PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025
bp4d.bondowosokab.go.id

BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nmor 132);

11.Peraturan…

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

10.Forum...

10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda, adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

18.Rencana…

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
19. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
25. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
27. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

30.Prioritas…

30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
32. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
33. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
36. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
37. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
38. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
39. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

40.Misi...

40. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
41. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
42. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
43. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
44. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
45. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
46. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
47. Program pembangunan Daerah adalah program Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
48. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
49. Sub kegiatan adalah aktivitas untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
50. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
52. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
53. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

54.Dampak…

54. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
56. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
57. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat dengan KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
60. Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SIPD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
61. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
62. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
63. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
   a. bab I berisi mengenai pendahuluan;
   b. bab II berisi mengenai Gambaran Umum Daerah;
   c. bab III berisi mengenai Visi, Misi dan Program prioritas pembanguna Daerah;
   d. bab IV berisi mengenai Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
   e. bab V berisi mengenai penutup.

(2) Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 5…

Pasal 5

Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 16) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9…

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BONDOWOSO

ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

FATHUR ROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 176-5/2005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi:

(I) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(II) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
(III) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Bondowoso, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Pendekatan…

Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 74

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sedangkan secara substantif berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso sehingga arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan harus dipahami dan menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

Bondowoso, 20 Agustus 2025

Bupati Bondowoso

BUPATI BONDOWOSO

ABDUL HAMID WAHID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-12
1.4 Maksud dan Tujuan I-20
1.5 Sistematika Penulisan I-20

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.1.1 Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis II-4
2.1.1.3 Topografi II-5
2.1.1.4 Geologi II-6
2.1.1.5 Hidrologi II-8
2.1.1.6 Klimatologi II-9
2.1.1.7 Penggunaan Lahan II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam II-10
2.1.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah II-10
2.1.2.2 Potensi Sumber Daya Alam II-54
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ... II-62
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-80
2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan II-80
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-82
2.1.5.1 Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang II-82
2.1.5.2 Alih Fungsi Lahan II-83
2.1.5.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-84
2.1.5.4 Indeks Kualitas Air II-87
2.1.5.5 Indeks Kualitas Udara II-89
2.1.5.6 Indeks Kualitas Lahan II-90
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-92
2.1.6.1 Kawasan Rawan Bencana II-92
2.1.6.2 Kerentanan Perubahan Iklim II-95
2.1.6.3 Emisi Gas Rumah Kaca II-98
2.1.6.4 Indeks Risiko Bencana II-102
2.1.6.5 Indeks Ketahanan Daerah II-104
2.1.7 Demografi II-105
2.1.7.1 Jumlah Penduduk II-105

2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk II-106
2.1.7.3 Rasio Penduduk II-108
2.1.7.4 Kepadatan Penduduk II-110
2.1.7.5 Proyeksi Demografi II-112

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-116
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-116
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi II-116
2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan II-118
2.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita . II-119
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-121
2.2.1.5 Indeks GINI II-122
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-124
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-126
2.2.2.1 Umur Harapan Hidup II-126
2.2.2.2 Prevalensi Stunting II-127
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-129
2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah II-129
2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah II-130
2.2.3.3 Angka Literasi dan Numerasi II-131
2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat II-132
2.2.3.5 Indeks Pendidikan II-134
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-135
2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja II-135
2.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-136
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-137
2.2.5.1 Indeks Harmoni Indonesia (Ihal) II-137
2.2.5.2 Indeks Zakat Nasional (IZN) II-138
2.2.5.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan II-139
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-141
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak II-141
2.2.6.2 Indeks Pembangunan Keluarga II-142
2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) II-143
2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-145

2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-147
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-149
2.3.1.1 Angka Ketergantungan II-149
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-150
2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah II-151
2.3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-154
2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) II-171
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-172
2.3.4 Transformasi Digital II-173
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-174
2.3.5.1 Daya Saing Iklim Investasi II-174
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-177

2.3.6.1 Kualitas Infrastruktur II-177
2.3.6.2 Layanan Air Minum, Sanitasi, Perumahan, Permukiman II-180
2.3.6.3 Pengelolaan Persampahan II-183
2.3.6.4 Persentase Desa Mandiri II-185
2.3.6.5 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) II-186
2.3.6.6 Indeks Infrastruktur II-187
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-187
2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB II-188
2.3.7.2 Inflasi Tingkat Produsen II-190

2.4 Aspek Pelayanan Umum II-192
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-193
2.4.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi II-193
2.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum II-195
2.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) II-197
2.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik II-199
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-202
2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda II-202
2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM II-204
2.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia II-204
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-205
2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah II-205
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-207
2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-207
2.4.4.1.1 Pendidikan II-207
2.4.4.1.2 Kesehatan II-216
2.4.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-224
2.4.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman II-230
2.4.4.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-232
2.4.4.1.6 Sosial II-236
2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-239
2.4.4.2.1 Tenaga Kerja II-239
2.4.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-241
2.4.4.2.3 Pangan II-242
2.4.4.2.4 Pertanahan II-245
2.4.4.2.5 Lingkungan Hidup II-246
2.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-248
2.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-250
2.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-252
2.4.4.2.9 Perhubungan II-254
2.4.4.2.10 Komunikasi dan Informatika II-255

2.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-257
2.4.4.2.12 Penanaman Modal..... II-259
2.4.4.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga II-260
2.4.4.2.14 Statistik..... II-262
2.4.4.2.15 Persandian..... II-263
2.4.4.2.16 Kebudayaan..... II-263
2.4.4.2.17 Perpustakaan..... II-265
2.4.4.2.18 Kearsipan II-266
2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-267
2.4.4.3.1 Kelautan dan Perikanan..... II-267
2.4.4.3.2 Pariwisata..... II-268
2.4.4.3.3 Pertanian..... II-270
2.4.4.3.4 Perdagangan..... II-275
2.4.4.3.5 Industri..... II-277
2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-279
2.4.4.4.1 Sekretariat Daerah..... II-279
2.4.4.4.2 Sekretariat DPRD..... II-280
2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-281
2.4.4.5.1 Perencanaan..... II-281
2.4.4.5.2 Keuangan..... II-282
2.4.4.5.3 Kepegawaian..... II-285
2.4.4.5.4 Pendidikan dan Pelatihan..... II-291
2.4.4.5.5 Penelitian dan Pengembangan..... II-292
2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-293
2.4.4.6.1 Inspektorat Daerah..... II-293
2.4.4.7 Unsur Kewilayahan..... II-295
2.4.4.7.1 Kecamatan..... II-295
2.4.4.8 Urusan Pemerintahan Umum..... II-297
2.4.4.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik..... II-297
2.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II-298
2.4.5.1 SPM Pendidikan..... II-299
2.4.5.2 SPM Kesehatan..... II-314
2.4.5.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-317
2.4.5.4 SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-319
2.4.5.5 SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... II-321
2.4.5.6 SPM Sosial..... II-326
2.4.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)..... II-354
2.5 Gambaran Keuangan Daerah..... II-357
2.5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024..... II-360
2.5.2 Neraca Daerah..... II-370
2.5.3 Kerangka Pendanaan..... II-374
2.6 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030..... II-380
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis..... II-385
2.7.1 Permasalahan..... II-385
2.7.2 Isu Strategis..... II-386
2.7.2.1 Isu Strategis Global..... II-386

2.7.2.2 Isu Strategis Nasional II-404
2.7.2.3 Isu Strategis Regional II-435
2.7.3 Telaah Dokumen Lainnya II-460
2.7.4 Isu Strategis Daerah II-465

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran III-1
3.1.1 Visi III-1
3.1.2 Misi III-2
3.1.3 Tujuan III-7
3.1.4 Sasaran III-8
3.1.5 Perumusan Tujuan dan Sasaran III-8
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-23
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan III-23
3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah III-31
3.2.3 Penahapan Pembangunan Daerah III-35
3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-36

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV- 1
4.1 Program Perangkat Daerah ..... IV- 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-126
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso IV-130
4.3.2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso IV-132

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Pedoman Transisi V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bondowoso dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2025-2029	I -17
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso	II - 3
Tabel 2.2	Klasifikasi Ketinggian Tempat Menurut Kecamatan Keadaan Tahun 2024	II - 5
Tabel 2.3	Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bondowoso	II - 8
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2023	II-10
Tabel 2.5	Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan (Rencana Pola Ruang) Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2044	II-12
Tabel 2.6	Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044	II-26
Tabel 2.7	Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso	II-55
Tabel 2.8	Perhitungan Koefisien Limpasan Kabupaten Bondowoso	II-65
Tabel 2.9	Proyeksi Status Daya Dukung Air Kabupaten Bondowoso	II-68
Tabel 2.10	Produksi, Luas Panen dan Nilai Tanaman Sayuran Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-69
Tabel 2.11	Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-69
Tabel 2.12	Produksi, Luas Panen, dan Nilai Tanaman Biofarmaka Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-70
Tabel 2.13	Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-70
Tabel 2.14	Produksi dan Luas Panen Tanaman Hias Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-70
Tabel 2.15	Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-70
Tabel 2.16	Populasi Hewan Ternak Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-71
Tabel 2.17	Populasi Telur Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-71
Tabel 2.18	Produksi dan Perikanan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024	II-71
Tabel 2.19	Produktivitas Kehutanan Tahun 2024	II-72
Tabel 2.20	Jumlah Kalori Tanaman Pangan	II-73
Tabel 2.21	Jumlah Kalori Buah-Buahan	II-73
Tabel 2.22	Jumlah Kalori Peternakan	II-74
Tabel 2.23	Kecukupan Beras Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso	II-75
Tabel 2.24	Distribusi Luas Lahan Jasa Lingkungan	II-77
Tabel 2.25	Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-80

Tabel 2.26 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 ..... II- 81
Tabel 2.27 Alih Fungsi Lahan Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Bondowoso Sampai dengan Tahun 2024 .... II- 84
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 .... II- 86
Tabel 2.29 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Bondowoso .. II- 96
Tabel 2.30 Intensitas Pengurangan Emisi Tahunan Dan Kumulatif Tahunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II- 99
Tabel 2.31 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 .... II-106
Tabel 2.32 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030..... ... II-112
Tabel 2.33 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030 .... II-113
Tabel 2.34 Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030..... ... II-114
Tabel 2.35 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030..... ... II-114
Tabel 2.36 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2020-2024..... ... II-119
Tabel 2.37 Kontribusi PDRB Kabupaten Bondowoso terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024..... ... II-120
Tabel 2.38 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2024 .. II-125
Tabel 2.39 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-136
Tabel 2.40 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-137
Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2024 .... II-140
Tabel 2.42 Perkembangan Kekayaan Budaya Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-141
Tabel 2.43 Jumlah Kasus Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2.44 Komposisi jumlah penduduk kabupaten Bondowoso menurut Kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020-2024 (dalam jiwa) II-150
Tabel 2.45 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku II-156
Tabel 2.46 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2024 (Milyar Rupiah) II-157
Tabel 2.47 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 dan 2024 (Milyar Rupiah)..... ... II-159
Tabel 2.48 Pertumbuhan Jawa Timur/Regional Share Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 dan 2024 ... ... II-161
Tabel 2.49 Pertumbuhan Proporsional (Ppij) Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024 .... II-163

Tabel 2.50 Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPWij) Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024 .... II-166
Tabel 2.51 Pergeseran Bersih (PBij) Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024..... ... II-168
Tabel 2.52 Perubahan PDRB Tiap Kategori Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024 .... II-169
Tabel 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 .... II-171
Tabel 2.54 Pemberdayaan Perempuan dalam lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... ... II-172
Tabel 2.55 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024..... ... II-175
Tabel 2.56 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024..... ... II-177
Tabel 2.57 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-178
Tabel 2.58 Penumpang dan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-179
Tabel 2.59 Jumlah Prasarana dan Sarana Perhubungan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-179
Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-180
Tabel 2.61 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024..... ... II-181
Tabel 2.62 Pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020-2024 .... II-181
Tabel 2.63 Akses Sanitasi Layak Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-182
Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-183
Tabel 2.65 Pengelolaan Persampahan Tahun 2020-2024 .... II-184
Tabel 2.66 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-186
Tabel 2.67 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-189
Tabel 2.68 Perkembangan Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-190
Tabel 2.69 Tabel Kategori Indeks Pelayanan Publik II-199
Tabel 2.70 Pencapaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-207
Tabel 2.71 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2020-2024 (%) II-208
Tabel 2.72 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-210

Tabel 2.73 Angka Putus Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-211
Tabel 2.74 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020–2024 ... II-211
Tabel 2.75 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per Kecamatan Tahun 2024 ... II-212
Tabel 2.76 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-213
Tabel 2.77 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2024 ... II-214
Tabel 2.78 Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2020-2024 ... II-215
Tabel 2.79 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-216
Tabel 2.80 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2029 ... II-217
Tabel 2.81 Rasio Posyandu (%) Tahun 2020 – 2024 ... II-218
Tabel 2.82 Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%) Tahun 2020- 2024 ... II-219
Tabel 2.83 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024 ... II-219
Tabel 2.84 Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 . II-220
Tabel 2.85 Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024 .. II-221
Tabel 2.86 Kinerja Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024 .. II-221
Tabel 2.87 Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 ... II-224
Tabel 2.88 Panjang Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya ... II-225
Tabel 2.89 Kondisi Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 ... II-225
Tabel 2.90 Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020–2024 II-226
Tabel 2.91 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 ... II-226
Tabel 2.92 Pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020 – 2024 ... II-227
Tabel 2.93 Perkembangan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024 ... II-228
Tabel 2.94 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-230
Tabel 2.95 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-230
Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020 – 2024 ... II-231
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ... II-232
Tabel 2.98 Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2020-2024 ... II-233
Tabel 2.99 Pembinaan Ormas, Orpol, dan LSM Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024 ... II-233

Tabel 2.100 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2020-2024 .... II-234
Tabel 2.101 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan) Tahun 2020 – 2024 .. II-235
Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bondowoso II-235
Tabel 2.103 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020-2024 .... II-236
Tabel 2.104 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-240
Tabel 2.105 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 .... II-241
Tabel 2.106 Partisipasi Kaum Perempuan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-242
Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-244
Tabel 2.108 Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton) Tahun 2020 - 2024 ... II-245
Tabel 2.109 Tingkat Produksi Bahan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 .... II-245
Tabel 2.110 Perkembangan Indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024 II-246
Tabel 2.111 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 .... II-247
Tabel 2.112 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 .... II-248
Tabel 2.113 Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-249
Tabel 2.114 Kepemilikan KTP, KK, Akta dan KIA Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-249
Tabel 2.115 Kelompok Binaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 - 2024 .... II-251
Tabel 2.116 Badan Usaha Milik desa Tahun 2020- 2024 .... II-251
Tabel 2.117 Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 .... II-253
Tabel 2.118 Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2020 - 2024 .... II-253
Tabel 2.119 Perkembangan Arus Penumpang Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bondowoso II-255
Tabel 2.120 Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 .... II-256
Tabel 2.121 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-257
Tabel 2.122 Capaian Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-258
Tabel 2.123 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .... II-260
Tabel 2.124 Capain Kinerja Kepemudaan Tahun 2020-2024 .... II-261

Tabel 2.125 Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2020-2024 ... II-262
Tabel 2.126 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-263
Tabel 2.127 Jumlah Pengamanan Informasi Milik Daerah Tahun 2020-2024 ... II-264
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-264
Tabel 2.129 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ... II-266
Tabel 2.130 Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan serta Penyelamatan/Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Tahun 2020-2024 ... II-267
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 ... II-268
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 ... II-269
Tabel 2.133 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2020-2024 ... II-271
Tabel 2.134 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020-2024 ... II-273
Tabel 2.135 Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024 ... II-274
Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-275
Tabel 2.137 Capaian Kinerja Perdagangan Tahun 2020-2024 ... II-276
Tabel 2.138 Data Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-278
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020 - 2024 II-281
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 ... II-281
Tabel 2.141 Indikator Program-Program Pembangunan Tahun 2020-2024 .. II-283
Tabel 2.142 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024 ... II-284
Tabel 2.143 Rata-Rata Realisasi Anggaran dan Opini BPK terhadap LKD Tahun 2020-2024 ... II-285
Tabel 2.144 Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso ... II-286
Tabel 2.145 Kualifikasi Pegawai Honorer Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 ... II-288
Tabel 2.146 Kinerja Kepegawaian Tahun 2020-2024 ... II-289
Tabel 2.147 Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ... II-292
Tabel 2.148 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ... II-293
Tabel 2.149 Kinerja Pengawasan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024. II-295
Tabel 2.150 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ... II-297

Tabel 2.151 Perkembangan Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Tahun 2020-2024 .... II-298
Tabel 2.152 Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024..... ... II-299
Tabel 2.153 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020-2024 .... II-301
Tabel 2.154 Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024..... ... II-307
Tabel 2.155 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan..... ... II-310
Tabel 2.156 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator IPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 .... II-311
Tabel 2.157 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator IPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 .... II-313
Tabel 2.158 Capaian Penyediaan Layanan Dasar Pendidikan Tahun 2024..... ... II-313
Tabel 2.159 Pemenuhan Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2024..... ... II-314
Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024..... ... II-316
Tabel 2.161 Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 .... II-318
Tabel 2.162 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024..... ... II-321
Tabel 2.163 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024..... ... II-322
Tabel 2.164 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020-2024..... ... II-328
Tabel 2.165 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021-2024..... ... II-329
Tabel 2.166 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020-2024..... ... II-351
Tabel 2.167 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-358
Tabel 2.168 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bondowoso II-367
Tabel 2.169 Neraca Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024..... ... II-371
Tabel 2.170 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030..... ... II-382
Tabel 2.171 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... ... II-427
Tabel 2.172 Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen..... ... II-429
Tabel 2.173 Tujuan dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029..... ... II-447
Tabel 2.174 Penyelarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030 ..... II-452
Tabel 2.175 Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030 ..... II-453
Tabel 2.176 Capaian Indikator TPB di Kabupaten Bondowoso II-460
Tabel 2.177 Persentase Capaian TPB di Kabupaten Bondowoso..... ... II-461

Tabel 2.178 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Menengah .. II-462
Tabel 2.179 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 II-466

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030..... ... III- 19
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 .... III- 24
Tabel 3.3 Arah kebijakan RPJMD..... ... III- 31
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso .... III- 35
Tabel 3.5 Integrasi Janji Politik ke Dalam Program Nomenklatur .... III- 44
Tabel 3.6 Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 .... III- 57

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah .... IV - 2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029..... ... IV-131
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030..... ... IV-133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I -13
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bondowoso	II - 2
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
Gambar 2.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso	II-13
Gambar 2.4	Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso	II-16
Gambar 2.5	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bondowoso	II-18
Gambar 2.6	Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044	II-22
Gambar 2.7	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bondowoso	II-56
Gambar 2.8	Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	II-58
Gambar 2.9	Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bondowoso	II-59
Gambar 2.10	Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso	II-61
Gambar 2.11	Peta Ketersediaan Air	II-67
Gambar 2.12	Proyeksi Daya Dukung Pangan Beras Kabupaten Bondowoso.	II-76
Gambar 2.13	Persentase Pemanfaatan Sesuai dengan Tata Ruang	II-83
Gambar 2.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.15	Indeks Kualitas Air Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.16	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.17	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.18	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso	II-94
Gambar 2.19	Peta Kerentanan Perubahan Iklim	II-98
Gambar 2.20	Pengurangan Emisi Tahunan Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.21	Pengurangan Emisi Kumulatif Tahunan Tahun 2020-2024	II-101
Gambar 2.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-103
Gambar 2.23	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-104
Gambar 2.24	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	II-107

Gambar 2.25 Rasio Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 .. II-109
Gambar 2.26 Kepadatan Penduduk per km2..... II-111
Gambar 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-117
Gambar 2.28 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-118
Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-121
Gambar 2.30 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-123
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-124
Gambar 2.32 Umur Harapan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-127
Gambar 2.33 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024 Kabupaten Bondowoso II-129
Gambar 2.34 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-130
Gambar 2.35 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-131
Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-133
Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 II-135
Gambar 2.38 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-144
Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-145
Gambar 2.40 Perkembangan Nilai IID Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024 ..... II-152
Gambar 2.41 Perkembangan IDSD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 ..... II-153
Gambar 2.42 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-194
Gambar 2.43 Indeks SPBE Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-198
Gambar 2.44 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 ..... II-202
Gambar 2.45 Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2020-2024 ..... II-203
Gambar 2.46 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 ..... II-206
Gambar 2.47 Isu Strategis Global II-387
Gambar 2.48 Disrupsi Teknologi II-391
Gambar 2.49 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... II-400

Gambar 3.1 Misi RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 ..... III - 3
Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1..... III-11
Gambar 3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 2..... III-12
Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 3..... III-14
Gambar 3.5 Tujuan dan Sasaran Misi 4..... III-15
Gambar 3.6 Tujuan dan Sasaran Misi 5..... III-18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan, strategi dan cara pencapaian yang baik akan menjadi petunjuk arah bagi cita-cita pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam

implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kearifan lokal setiap daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bagian dari pendekatan teknokratis sebelum tersusunnya RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mengawali penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dilakukan sesuai ketentuan sebagai upaya memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Pertimbangan aspek lingkungan dalam KLHS membantu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga pembangunan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 lalu. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan antara lain mengacu pada arah kebijakan tahap 1 dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini ditegaskan sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor:

000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Kemudian setelah dilantiknya Bpk. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag. dan Bpk. As'ad Yahya Syafi'i, S.E. selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bondowoso periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Rancangan Teknokratik RPJMD disempurnakan menjadi dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029 dengan berpedoman pada Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Visi dimaksud adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

"Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan"

Untuk pencapaian Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian Lokal Secara Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Aksesibilitas Pelayanan Dengan Kemampuan Dan Keberdayaan Di Seluruh Lapisan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat;
5. Membangun Ekosistem Harmonis Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kebudayaaan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal;

Melalui kelima misi tersebut dapat tersusun perencanaan pembangunan daerah yang jelas, terarah serta terukur. Salah satunya mengarah pada penguatan Sektor kepariwisataan melalui penguatan citra dan daya saing pariwisata secara internasional melalui *City*

Branding Ijen Geopark yang perlu dipromosikan secara terintegrasi didukung seluruh *stakeholder* dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2045, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 -2034. Komposisi *City Branding* menjadi bagian penyelaras dengan upaya transformasi daerah dalam hal mengupayakan *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik Kabupaten Bondowoso.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selanjutnya menjadi Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029. Upaya pencapaian Visi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui Misi pembangunan, yang dirinci dengan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai hasil identifikasi proses bisnis dan penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjadi jelas, terarah serta terukur.

Penyusunan dokumen ranwal RPJMD Kabupaten Bondowoso secara substantif, selain sebagai penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD dan penjabaran Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih, juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga penyusunan Ranwal RPJMD turut menjamin tercakupnya perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program prioritas perangkat daerah, dan kajian lingkungan hidup strategis.

Sehingga, tersusunlah dokumen rancangan awal rencana pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso dalam jangka menengah yang komprehensif dan dapat dipedomani secara holistik oleh seluruh perangkat daerah.

Selanjutnya, Ranwal RPJMD dilakukan penyempurnaan dan verifikasi secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluaran atas proses penyempurnaan Ranwal RPJMD pada beberapa tahapan secara berurutan menjadi dokumen Rancangan RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, dan pada tahap terakhir disempurnakan menjadi dokumen RPJMD yang terlegitimasi dalam penetapan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029.

RPJMD yang telah ditetapkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029 merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari periode awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2045, menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan sekaligus menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan berpedoman dan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara I-6 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 132);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso

Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69); dan

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 3 seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 64); dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Rancangan Akhir RPJMD harus disusun sebelum tersusunnya RPJMD.

Dalam perspektif sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMN yang merupakan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergis antar level pemerintahan, antar daerah, antar

waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

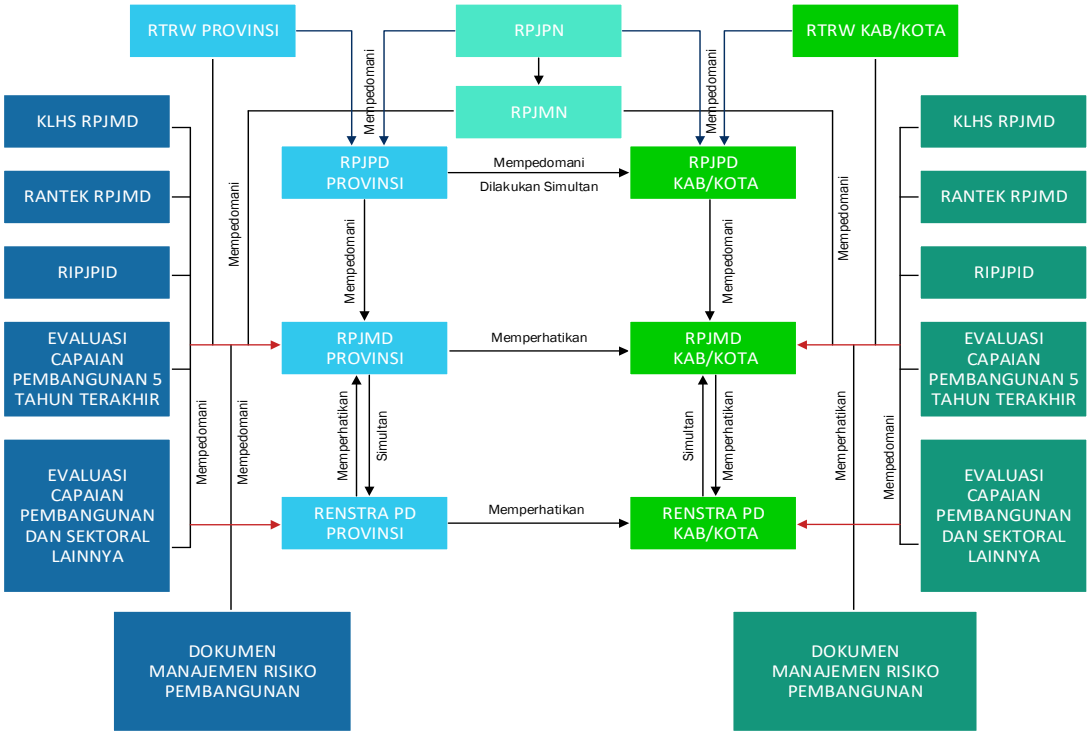

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045 yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

   Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bondowoso memperhatikan dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso disusun bertujuan agar Perencanaan Pembangunan selaras dengan arah pembangunan nasional 2025-2029. Secara prinsip, arah pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029 telah dijabarkan dan ditelaah sesuai tahapan RPJPN 2025-2045 periode ke I.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

   Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Keselarasan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah dalam ruang lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
4. Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029.

   Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045. Dalam penyusunannya, dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025- 2045 pada Tahap I.
5. Peraturan Daerah Nomor Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044.

   Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-

2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044. Hal yang menjadi perhatian dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025- 2029.

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2025-2029.

   Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penentuan isu strategis, penyusunan kinerja dan penyusunan kerja. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD digunakan untuk:

   a. Gambaran umum kondisi daerah;
   b. Permasalahan dan isu strategis daerah;
   c. Tujuan; dan
   d. Sasaran strategis.

   Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan. Karena di dalam Permendagri Nomor 07 Tahun 2018 tidak dijelaskan tentang bagaimana melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, maka identifikasi isu pembangunan berkelanjutan mengacu pada pasal 7 s/d 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan Isu Utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini juga sejalan dengan Tabel Penjaminan Kualitas dan Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari KLHS RPJMD tahun 2025-2029.

Secara garis besar KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten/Kota, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB jangka panjang yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 s/d 2029 sesuai dengan muatan Pasal 1 Nomor 4 Permendagri Nomor 07 Tahun 2018 yaitu mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 s/d 2029. Salah satu sinkronisasi Dokumen yang dicantumkan dalam

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2025-2029 terlihat dalam perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah;

a. Kondisi Geografis, Demografis serta Keuangan Daerah,
b. Kondisi Pencapaian TPB berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,
c. Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai hasil analisis dan rekomendasi 6 muatan KLHS RPJMD Kabupaten Bondowoso;
d. Potensi, daya saing dan inovasi daerah.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Menengah di Kabupaten Bondowoso diatas apabila disandingkan dengan isu strategis dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 1.1 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bondowoso dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2025-2029

No.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam Dokumen KLHS	Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029
1.	Kemiskinan	Kemiskinan
2.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi
3.	**tidak menjadi bagian isu KLHS**	Terbatasnya Lapangan Kerja
4.	Permasalahan tata kelola dan penegakan hukum	Permasalahan Tata Kelola Dan Penegakan Hukum
5.	Rendahnya kualitas SDM	Rendahnya Kualitas SDM

No.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam Dokumen KLHS	Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029
6.	**tidak menjadi bagian isu KLHS**	Infrastruktur Belum Memadai
7.	Alih fungsi lahan	Alih Fungsi Lahan
8.	**tidak menjadi bagian isu KLHS**	Pergeseran Nilai-Nilai Sosial Masyarakat
9.	Kerawanan terhadap bencana	Kerawanan Terhadap Bencana
10.	Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID)

   Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 berupaya mensinkronisasi dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), namun sampai pada saat penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso belum memiliki RIPJPID. RIPJPID sangat penting dalam mengoptimalkan potensi riset dan pengembangan (R&D) di Kabupaten Bondowoso. Penyusunan RIPJPID yang baik akan mendukung pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemetaan sektor-sektor yang membutuhkan inovasi Iptek, seperti pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, identifikasi kesenjangan antara teknologi yang ada dan yang dibutuhkan di daerah ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas riset yang harus dilakukan.

   RIPJPID juga mencakup strategi untuk mengembangkan infrastruktur riset di Bondowoso, termasuk penguatan laboratorium, pusat riset, dan kerjasama dengan perguruan tinggi serta lembaga

penelitian. Infrastruktur ini menjadi kunci untuk mendukung kegiatan riset yang lebih terstruktur dan aplikatif bagi kebutuhan daerah. Pembiayaan riset dan pengembangan juga perlu menjadi perhatian, di mana pemerintah daerah harus menyusun anggaran yang memadai serta mencari sumber pendanaan lain, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta, untuk mendukung riset yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, dan lembaga riset. Kerja sama ini akan menciptakan sinergi yang menghubungkan hasil riset dengan penerapan nyata di lapangan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Iptek, melalui pelatihan, workshop, dan pendanaan riset bagi peneliti lokal. RIPJPID juga harus memfokuskan pengembangan SDM Iptek dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan daerah untuk menciptakan ekosistem riset yang berkembang.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah ini juga memastikan bahwa hasil riset yang dihasilkan dapat diterapkan langsung dalam pembangunan daerah. Sebagai contoh, teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas petani atau teknologi pariwisata yang dapat memaksimalkan potensi wisata di Bondowoso. Dalam hal ini, RIPJPID perlu mengembangkan roadmap pengembangan Iptek yang berfokus pada sektor-sektor prioritas pembangunan daerah. Agar hasil riset benar-benar memberikan manfaat, mekanisme monitoring dan evaluasi juga harus disusun untuk menilai dampak riset terhadap pembangunan daerah. Sehingga, kebijakan dan regulasi pendukung yang memfasilitasi pengembangan Iptek perlu disusun dalam RIPJPID. Kebijakan ini mencakup pemberian insentif untuk riset dan inovasi serta penyederhanaan regulasi untuk mempermudah kolaborasi antara pemerintah Daerah, akademisi, dan sektor swasta. Dengan adanya

kebijakan yang jelas dan mendukung, diharapkan hasil riset yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor usaha lokal, mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. Integrasi RIPJPID dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso akan memastikan bahwa Iptek menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah hingga tahun 2030.

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dengan efisiensi sumber daya, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah untuk pembangunan berkelanjutan disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah sehingga rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat terwujud.
2. Menciptakan sinergitas RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya antar tingkat kewilayahan maupun antar periode waktu, dokumen perencanaan sektoral, dokumen perencanaan kewilayahan, dokumen perencanaan wilayah sekitar, serta dokumen strategis dan sektoral lainnya.
3. Sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
4. Sebagai pedoman penyusunan dokumen RKPD yang merupakan penjabaran tahunan pelaksanaan RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2

tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044), KLHS RPJMD dan RIPJPID.

4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029.

5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing BAB dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan data-data dan informasi terkait kondisi geografi dan kondisi demografi Kabupaten Bondowoso, diantaranya posisi dan peran strategis, potensi pengembangan wilayah dan potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian pemanfaatan tata ruang, alih fungsi lahan, serta gambaran terhadap Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Kawasan Rawan Bencana, Kerentanan Perubahan Iklim, Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio, Kepadatan, serta Proyeksi Jumlah Penduduk.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan data-data dan informasi terkait Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Budaya di Kabupaten Bondowoso, yang meliputi gambaran terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Perkapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bondowoso terhadap Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pendidikan Manusia, Umur Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, Rata-rata lama sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi dan Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Pendidikan,

Cakupan Kepesertaan Jamsostek Ketenagakerjaan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Indeks Harmoni Indonesia (IhaI), Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3. Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait daya saing ekonomi, daya saing sumber daya manusia meliputi Angka Ketergantungan, Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi meliputi Indeks Inovasi Daerah, Indeks Daya Saing Daerah, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, daya saing fasilitas/infrastruktur meliputi, dan daya saing iklim investasi di Kabupaten Bondowoso.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan data dan informasi Aspek Pelayanan Umum mencakup tiga fokus utama dari layanan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu layanan yang wajib, layanan yang bersifat pilihan, dan fungsi yang mendukung pemerintahan.

5. Standar Pelayanan Minimal

Menyajikan data-data dan informasi terkait Standar Pelayanan Minimal, indeks reformasi birokrasi, dan indeks pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 disusun

berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Menyajikan rumusan permasalahan sebagai pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang disajikan berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

Visi disajikan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD. Misi disajikan sesuai dengan hasil pendekatan teknokratik yang telah sesuai dengan kaidah penyusunan misi.

2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

Menyajikan tujuan yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

Menyajikan strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif, pentahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, lokus pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah. Menyajikan arah kebijakan sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi, serta penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

2. Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

Menyajikan program prioritas dari *cascading* kinerja dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 serta pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2035.

2. Indikator Program, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2030

Program Perangkat Daerah yang merupakan seluruh program Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Pembangunan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini menyajikan serta menjelaskan secara detail tentang gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi. Pendalaman pada aspek geografi Kabupaten Bondowoso perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran wilayah, lokasi, pembangunan sesuai rencana tata ruang, lingkungan hidup, kerentanan daerah terhadap bencana, ketahanan daerah dan ketahanan pangan. Disamping itu dalam sub bab ini juga menjelaskan gambaran capaian aspek-aspek terkait selama beberapa tahun sebagaimana disajikan berikut ini.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Batas Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 Kecamatan, 109 Desa dan 10 Kelurahan. Terbentang dari timur merupakan lereng Gunung Ijen hingga ke Barat lereng Pegunungan Argopuro. Di dalamnya mengalir 3 sungai utama yaitu: Sungai Deluwang, sungai Sampean dan sungai Tlaga, serta sungai-sungai lainnya. Keberadaan sungai-sungai tersebut mampu dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso.

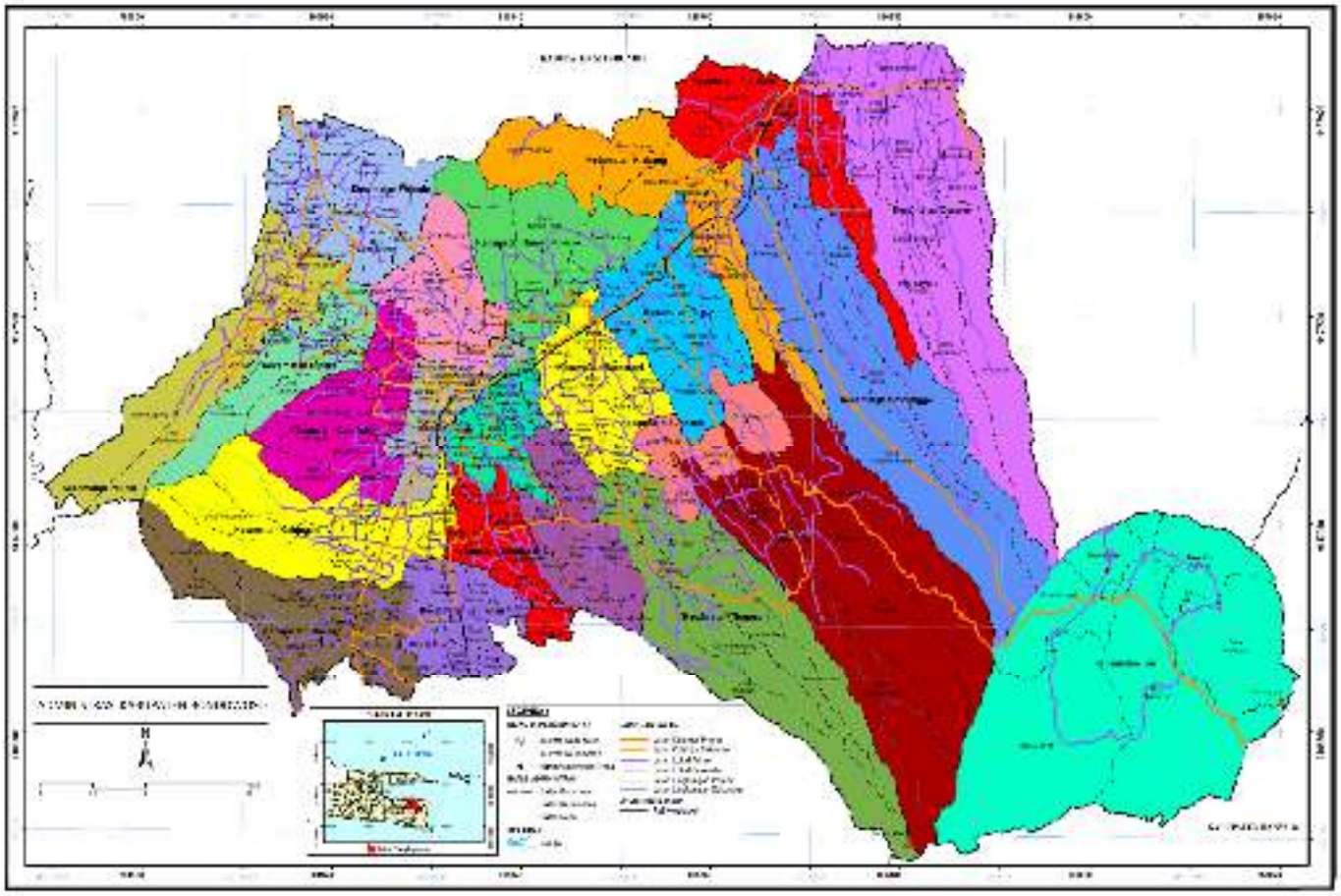

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bondowoso

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo;
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Jember;
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Rincian pembagian wilayah administrasi di dalam lingkup Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jml Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1	Maesan	Maesan	-	12	62	13	6.022,14
2	Grujugan	Grujugan	-	11	49	7	6.810,95
3	Tamanan	Tamanan	-	9	52	15	3.071,20
4	Jambesari Darus Sholah	Jambesari Darus Sholah	-	9	41	10	2.674,58
5	Pujer	Pujer	-	11	80	12	3.854,67
6	Tlogosari	Tlogosari	-	10	98	17	10.697,92
7	Sukosari	Sukosari	-	4	31	22	2.635,59
8	Sbr. Wringin	Sbr. Wringin	-	6	71	27	15.870,24
9	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.280,08
10	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.013,73
11	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.465,28
12	Bondowoso	Bondowoso	7	4	19	2	2.291,68
13	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	4.883,23
14	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.798,66
15	Pakem	Pakem	-	8	47	18	6.140,72
16	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.495,30
17	Tegalampel	Tegalampel	1	7	54	2	3.478,77
18	Taman Krocok	Taman Krocok	-	7	47	12	5.664,44
19	Klabang	Klabang	-	11	49	19	6.956,09

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jml Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
20	Botolinggo	Botolinggo	-	8	100	25	13.192,67
21	Ijen	Sempol	-	6	38	74	21.865,24
22	Prajekan	Prajekan	-	7	34	24	4.902,26
23	Cermee	Cermee	-	15	93	32	13.433,76
JUMLAH			10	209	1.412	385	155.499,18

Sumber : BPS dan BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Bondowoso merupakan wilayah dataran tinggi yang terletak pada posisi 7”50’10” sampai 7”56’41” Lintang Selatan, serta antara 113”48’10” sampai 113”48’26” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso, adalah seluas 1.554,99 km2 (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044). Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur.

Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, dimana 44,4% wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan 0^0-2^0 seluas 190,83 km2 (12,23%), landai 2^0-15^0 seluas 568,17 km^2 (36,42%), agak curam 15^0-40^0 seluas 304,70 km^2 (19,53%) dan sangat curam diatas 40^0 seluas 496,40 km^2 (31,82%).

2.1.1.3 Topografi

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), wilayah administrasi pada daratan tertinggi adalah Kecamatan Ijen (1.130 mdpl) dan terendah Kecamatan Prajekan (54 mdpl). Bentang alam wilayah terdiri dari 44,4 % pegunungan dan perbukitan, 30,7% dataran rendah, serta 24,9% Dataran Tinggi.

Hamparan tersebut dikelilingi oleh gugusan Pegunungan Kendeng dengan puncak Gunung Raung, Gunung Ijen dan Gunung Widodaren di sebelah Timur, Pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Gilap dan Gunung Krincing di sebelah Barat, sedangkan di sebelah Utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Secara rinci ketinggian wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Ketinggian Tempat Menurut Kecamatan Keadaan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tinggi Di Atas Permukaan Laut (M dpl)*
1.	Maesan	386,00
2.	Grujugan	357,00
3.	Tamanan	345,00
4.	Jambesari DS	345,00
5.	Pujer	371,00
6.	Tlogosari	475,00
7.	Sukosari	529,00
8.	Sbr. Wringin	700,00
9.	Tapen	184,00
10.	Wonosari	253,00
11.	Tenggarang	240,00
12.	Bondowoso	253,00
13.	Curahdami	247,00
14.	Binakal	238,00
15.	Pakem	500,00
16.	Wringin	502,00
17.	Tegalampel	240,00

No.	Kecamatan	Tinggi Di Atas Permukaan Laut (M dpl)*
18.	Taman Krocok	225,00
19.	Klabang	162,00
20.	Botolinggo	128,00
21.	Ijen	1.130,00
22.	Prajekan	54,00
23.	Cermee	116,00

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Daerah terluas berada pada ketinggian 100-500 mdpl atau 49,11% dari keseluruhan luas, ketinggian >1.000 mdpl seluas 27,87%, ketinggian 500-1.000 mdpl seluas 19,75% dan daerah tersempit berada pada ketinggian 0 – 100 mdpl atau 3,27%.

2.1.1.4 Geologi

Kabupaten Bondowoso termasuk dalam rangkaian zona fisiografis gunung api kuarter yang dikelompokkan dalam satu grup tersendiri sebagai Komplek Pegunungan Ringgit – Buser (*Van Bemmelen, 1949*), dengan dominasi endapan hasil aktifitas gunung api kwarter muda berupa breksi piroklastik, breksi lahar, tuff, lapili, lava dan batuan intrusi dan sedimentasi dataran intermountain (*Recent Volcanic Formation*).

Stratigrafi wilayah Kabupaten Bondowoso tersusun oleh batuan endapan vulkanik hasil gunung api kwarter 21,6% dan hasil gunung api kwarter muda 62,8%, yang banyak mengandung leusit, tufa dan batupasir (5,6%), endapan alluvium 8,5% dan fasies sedimen miosen 1,5% dengan komposisi ukuran dominan lempung, lanau, lanau berpasir dan pasir halus (± 96,9%) dan ukuran pasir kasar, kerikil, kerakal dan bongkah (±3,1%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki jenis tanah Regosol yaitu seluas yang tersebar di 23 Kecamatan. Jenis tanah ini luasan

terbesar terdapat di Kecamatan Tlogosari. Tanah regosol merupakan tanah berbutir kasar berasal dari material vulkanik gunung berapi yang mengendap berupa abu dan pasir vulkanik yang merupakan areal pertanaman padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran.

Sedangkan jenis tanah Andosol tersebar di 10 Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Ijen, vegetasi yang tumbuh berupa tanaman bambu, dan rumput liar.

Untuk jenis tanah Mediteran terdapat tersebar di Kecamatan Tapen, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Botolinggo, Prajekan dan Cermee. Tanah mediteran berwarna antara merah sampai kecoklatan yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Jenis tanah mediteran merupakan bagian lahan subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya. Tanaman yang tumbuh berupa palawija, tembakau, jati, dan jambu mente.

Jenis tanah Gromosol terdapat di wilayah Kecamatan Cermee. Gromosol adalah jenis tanah berwarna kelabu hitam berbentuk material halus berlempung. Jenis tanah ini bersifat subur dan merupakan areal pertanaman padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, dan jati.

Jenis tanah Litosol terdapat di Kecamatan Curahdami, Pakem dan Klabang. Jenis tanah ini berbatu-batu dan berupa areal pertanaman rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.

Sedangkan untuk jenis tanah Latosol tersebar di 12 kecamatan, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Grujugan, Klabang, Cermee dan Sumber Wringin. Jenis tanah ini berwarna merah hingga kuning, sehingga sering disebut tanah merah, banyak mengandung zat besi dan aluminium dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan pH berkisar antara 4,5-5,5. Areal pertanaman yang tersebar berupa padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan kopi.

Luas wilayah menurut karakteristik tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bondowoso

No	Jenis Tanah	Luas	
		Km²	%
1	Andosol coklat kekuningan	7.877,47	5,06%
2	Asos, andosol coklat dan regosol kelabu	13.336,88	8,57%
3	Asos, andosol kelabu dan regosol kelabu	33.405,95	21,47%
4	Asos, litosol dan latosol coklat kemerahan	2.855,03	1,83%
5	Grumosol Kelabu	243,22	0,16%
6	Komplek mediteran grumosol, regosol, dan litosol	862,01	0,55%
7	Komplek regosol kelabu dan litosol	17.873,16	11,49%
8	Kompleks latosol coklat kemerahan dan litosol	6.821,83	4,38%
9	Kompleks mediteran coklat dan litosol	5.212,46	3,35%
10	Kompleks mediteran coklat kemerahan dan litosol	22.996,47	14,78%
11	Kompleks regosol dan litosol	9.315,44	5,99%
12	Latosol coklat kemerahan	9.008,33	5,79%
13	Regosol coklat	15.513,71	9,97%
14	Regosol coklat kekelabuan	10.270,17	6,60%
	Luas Total	**155.592,12**	**100,00%**

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagian besar berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean, yaitu seluas 1.347 km2. Sungai Sampean melintasi bagian tengah Kabupaten Bondowoso dengan pola aliran sungai dendritik yang terbentuk akibat geomorfologi perbukitan yang sangat dominan. Selain DAS Sampean, sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso juga berada dalam DAS Deluwang di sisi barat dan DAS Banyuputih (Kalipahit) serta DAS Telaga di sisi timur.

Dalam wilayah DAS Sampean tersebut terdapat dua bendung, yaitu Bendung Sampean Baru (SB) di bagian hulu (Kabupaten Bondowoso) dan Bendung Sampean Lama (SL) di bagian hilir (Kabupaten Situbondo). Selain

itu terdapat 342 bendung kecil dan 14 waduk atau embung lapangan, baik di bagian hulu maupun di bagian hilir Sungai Sampean dan anak sungainya.

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah kabupaten Bondowoso memiliki suhu yang relatif sejuk berkisar antara 27˚C hingga 30˚C dengan suhu rata–rata 28˚C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 62% hingga 86%. Selama periode tahun 2018-2021, perubahan iklim global yang terjadi mengakibatkan perbedaan tingkat curah hujan yang signifikan, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni-Agustus dengan curah hujan 700mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan curah hujan 184 mm/bulan. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni-Agustus dengan jumlah hari hujan 27 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan November-Desember dengan rata-rata hari hujan 2 hari/bulan.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 didominasi penggunaan pertanian/sawah seluas 58.648,50 ha atau 37,72% luas wilayah. Berikutnya adalah hutan lindung seluas 32.463,54 ha (20,88%), hutan produksi 29.353,59 ha (18,88%), hutan rakyat 13.906,43 ha (8,94%) dan perkebunan seluas 9.347,29 ha (6,01%). Sementara luas permukiman 11.340,81 ha atau hanya 7,29% dari luas wilayah. Sehingga secara umum luas penggunaan lahan terbuka atau non terbangun mencapai 92,42% luas wilayah. Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2023

No	Jenis Penggunaan	2011	Persen	2023	Persen	Perubahan	Persen
1	Lindung	32.463,54	20,88%	32.463,54	20,88%	-	-
2	Hutan Produksi	29.315,54	18,85%	29.353,59	18,88%	38,04	3,17
3	Hutan Rakyat	13.987,94	9,00%	13.906,43	8,94%	-81,51	-6,79
4	Perkebunan	9.347,29	6,01%	9.347,29	6,01%	-	-
5	Sawah	58.759,74	37,79%	58.648,50	37,72%	-111,24	-9,27
6	Permukiman	11.206,10	7,21%	11.340,81	7,29%	134,71	11,23
7	Industri	122,87	0,08%	142,87	0,09%	20,00	1,67
8	Perairan	296,16	0,19%	296,16	0,19%	-	-
	JUMLAH	155.499,18	1,00	155.499,18	100,0%		

Sumber: BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pergeseran jenis penggunaan lahan, yaitu semakin berkurangnya luasan hutan rakyat dan pertanian khususnya sawah, di sisi lain luasan permukiman dan industri makin bertambah.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi wilayah Kabupaten Bondowoso sangat besar dan beragam yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan. Permasalahannya adalah bagaimana potensi wilayah tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan pengelolaan potensi wilayah secara optimal maka (a) tingkat investasi meningkat, (b) tingkat produktivitas meningkat, (c) sumber daya alam dapat dieksploitasi secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, (d) kualitas sumberdaya manusia

meningkat, (e) peran institusi meningkat, dan (f) ketersediaan sarana dan prasarana dasar meningkat.

Kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bondowoso disajikan pada Gambar berikut:

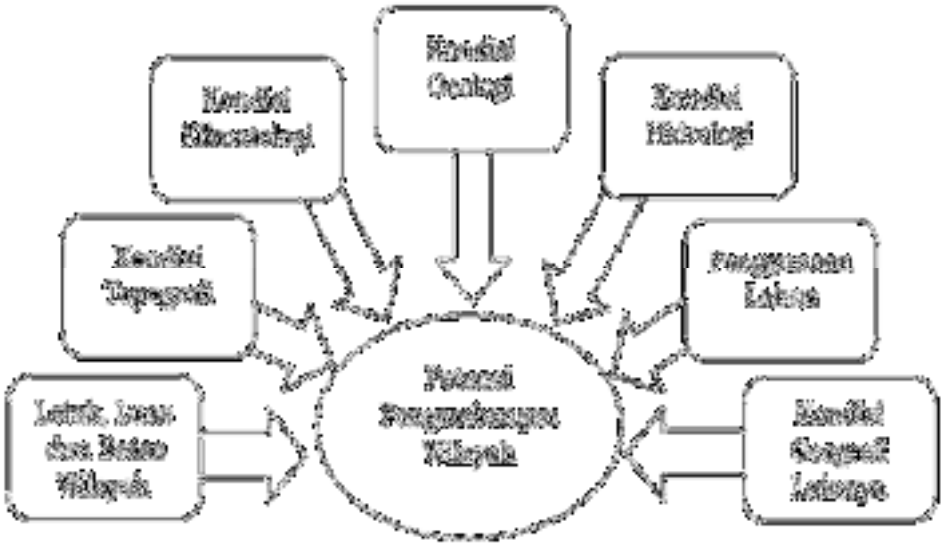

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 mengamanatkan pengelolaan ruang wilayah yang seimbang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pariwisata (agropolitan dan agrowisata) dengan tetap menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan.

Arahan pengembangan wilayah hingga tahun 2044 telah direncanakan dengan mempertimbangkan kecenderungan kebutuhan pembangunan yang seimbang secara ekologis, dengan konsep:

- Menjaga luasan dan kualitas kawasan lindung dan konservasi lahan melalui reboisasi dan penanganan lahan-lahan kritis;

- Mempertegas keberadaan kawasan-kawasan penyangga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air;
- Mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan lahan pertanian sawah untuk menjamin ketahanan pangan; dan
- Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, industri dan kawasan terbangun lainnya dengan konsep intensifikasi.

Adapun rencana pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten Bondowoso hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan (Rencana Pola Ruang) Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2044

No	Jenis Peruntukan Lahan	Rencana 2044	
		Luas (Ha)	Persen (%)
A.	**KAWASAN LINDUNG**	**32.760,34**	**21,07%**
1	Badan Air	296,80	0,19%
2	Cagar Alam	946,07	0,61%
3	Kawasan Hutan Lindung	30.132,75	19,38%
4	Suaka Margasatwa	1.230,76	0,79%
5	Taman Wisata Alam	153,96	0,10%
B.	**KAWASAN BUDIDAYA**	**122.738,91**	**78,93%**
1	K. Hutan Produksi Tetap	29.353,59	18,88%
2	K. Perkebunan Rakyat	13.917,77	8,95%
3	K. Pertanian		
	a. K. Tanaman Pangan	56.595,83	36,40%
	b. K. Hortikultura	841,57	0,54%
	c. K. Perkebunan	8.937,57	5,75%
4	K. Pertambangan dan Energi		
	K. Peruntukan Pertambangan Batuan	26,15	0,02%
5	K. Peruntukan Industri	789,98	0,51%
6	K. Permukiman		
	a. K. Permukiman Perkotaan	8.245,39	5,30%
	b. K. Permukiman Perdesaan	3.994,50	2,57%
7	K. Pertahanan dan Keamanan	36,56	0,02%
	JUMLAH	**155.499,25**	**100,00**

Sumber: BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Secara spasial RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Peruntukan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bondowoso terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan konservasi, dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

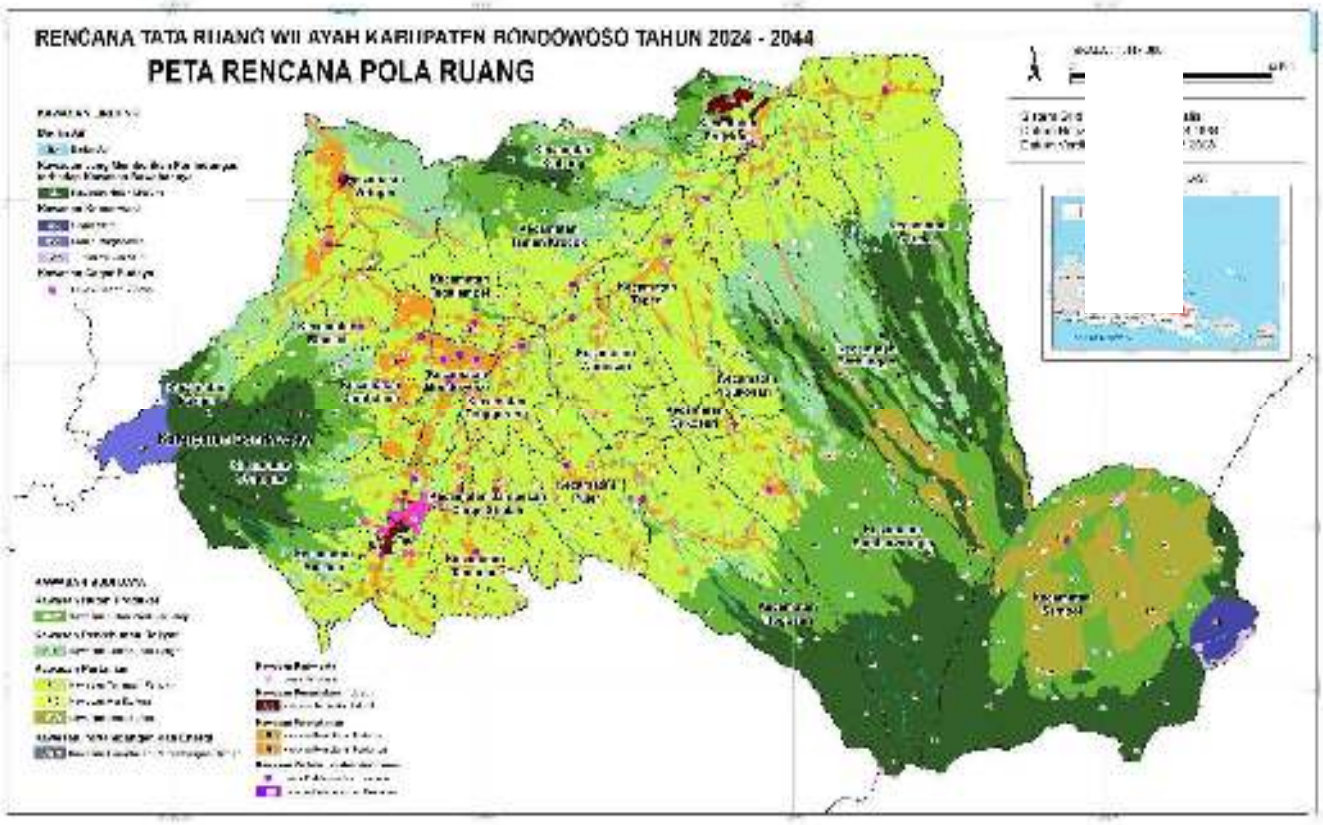

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan arahan rencana tata ruang dapat diketahui potensi pengembangan wilayah kabupaten, yang dapat ditunjukkan dengan

pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pengembangan prasarana wilayah.

1. Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman sesuai karakteristiknya terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Tersebar di 23 wilayah kecamatan. Simpul permukiman perkotaan dan perdesaan membentuk struktur ruang wilayah yang meliputi :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah PKL Perkotaan Bondowoso yang terletak di Kecamatan Bondowoso.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
   a. Perkotaan Maesan di Kecamatan Maesan yang meliputi Desa Maesan, Sumbersari, Pakuniran dan Penanggungan.
   b. Perkotaan Prajekan di Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa Prajekan Kidul dan Prajekan Lor.
   c. Perkotaan Tamanan di Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa Tamanan dan Kalianyar.
   d. Perkotaan Wonosari di Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong.
   e. Perkotaan Wringin di Kecamatan Wringin yang meliputi Desa Wringin dan Jatisari.
   f. Perkotaan Cermee di Kecamatan Cermee yang meliputi Desa Suling Wetan dan Cermee.
   g. Perkotaan Pujer di Kecamatan Pujer yang meliputi Desa Maskuning Kulon, Maskuning Wetan dan Mangli.
   h. Perkotaan Sukosari di Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa Sukosari Lor.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi :
   a. Perkotaan Binakal di Kecamatan Binakal meliputi Desa Baratan.
   b. Perkotaan Botolinggo di Kecamatan Botolinggo meliputi Desa Botolinggo dan Lumutan.

c. Perkotaan Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah meliputi Desa Jambesari dan Pejagan.
d. Perkotaan Klabang di Kecamatan Klabang meliputi Desa Klabang, Besuk, Klampokan dan Sumbersuko.
e. Perkotaan Pakem di Kecamatan Pakem meliputi Desa Pakem dan Patemon.
f. Perkotaan Sempol di Kecamatan Ijen meliputi Desa Sempol dan Kalisat.
g. Perkotaan Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin meliputi Desa Sumberwringin dan Sumbergading.
h. Perkotaan Grujugan di Kecamatan Grujugan meliputi Desa Dadapan dan Taman.
i. Perkotaan Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok meliputi Desa Taman.
j. Perkotaan Tapen di Kecamatan Tapen meliputi Desa Cindogo, Tapen, dan Kalitapen.
k. Perkotaan Tlogosari di Kecamatan Tlogosari meliputi Desa Pakisan dan Tlogosari.

4. Selanjutnya di setiap wilayah desa terdapat permukiman pusat permukiman yang umumnya berupa simpul pusat pemerintahan dan pelayanan skala desa.

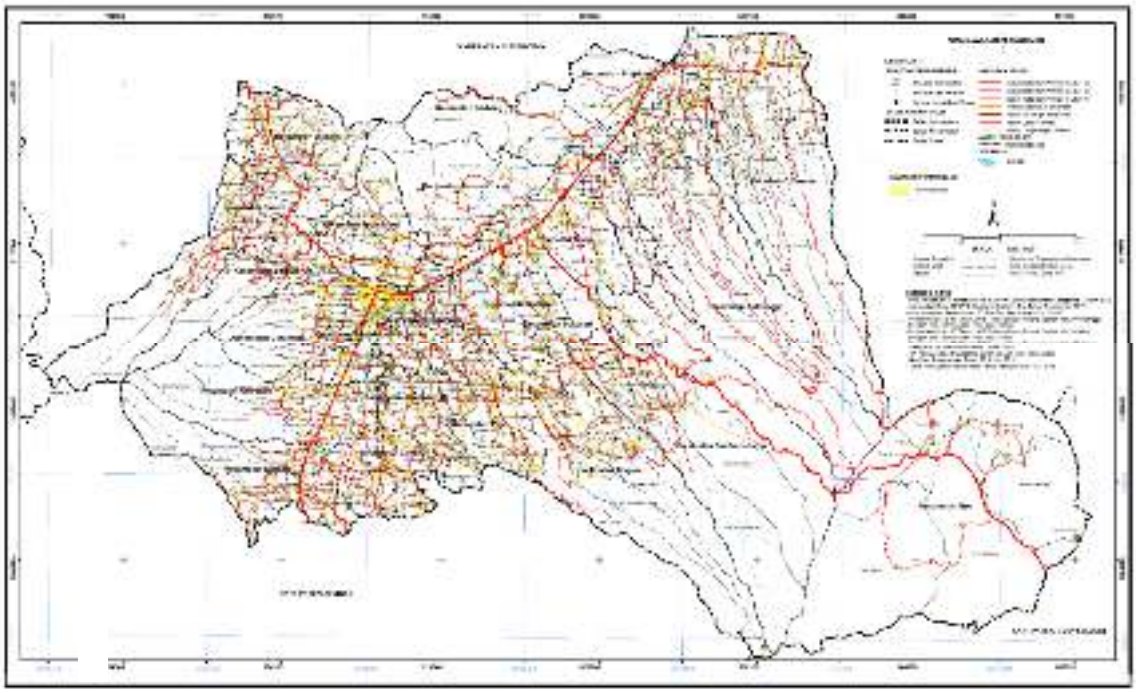

Gambar 2.4 Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan bagian dari Kawasan permukiman yang didominasi prasarana dan aktivitas perdagangan dan jasa, termasuk jasa keuangan atau perbankan. Pada umumnya kawasan perdagangan dan jasa menjadi simpul kawasan permukiman dan menjadi komponen pembentuk ordo/ hierarki pusat-pusat permukiman. Berdasarkan skala pelayanannya kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari:

a. Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Bondowoso, yang meliputi wilayah Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Tegalampel dan Tenggarang.
b. Kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kabupaten berada di Kecamatan Cermee, Maesan, Prajekan, Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringin.

c. Kawasan perdagangan dan jasa skala Kecamatan berada di Kecamatan Binakal, Botolinggo, Sumberwringin, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Ijen, Taman Krocok Tapen dan Tlogosari.
d. Kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan dan lingkungan, tersebar di seluruh kawasan permukiman, khususnya di lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Pada setiap jenis dan skala kawasan perdagangan terdapat prasarana perdagangan tradisional seperti pasar daerah, pasar desa, pertokoan dan toko atau kios, dan telah berkembang pula prasarana perdagangan modern seperti supermarket, mall, minimarket dan jenis-jenis toko modern lainnya. Pelayanan jasa telah berkembang dalam banyak layanan, baik keuangan, perbankan dan jasa lainnya sejalan dengan perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat.

3. Kawasan Industri

Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 790 Ha (tujuh ratus sembilan puluh hektare), terdapat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Botolinggo, Grujugan, Ijen, Klabang, Maesan, Prajekan, Tegalampel dan Wringin, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang menjadi Kawasan Strategis dalam aspek pengembangan ekonomi daerah adalah:

1. Kawasan Peruntukan Industri Prajekan, yang berada di Kecamatan Prajekan, Botolinggo dan Klabang;
2. Kawasan Peruntukan Industri Grujugan, yang berada di Kecamatan Grujugan dan Maesan;
3. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Wringin.

Peta Kawasan peruntukan industri sebagaimana gambar berikut.

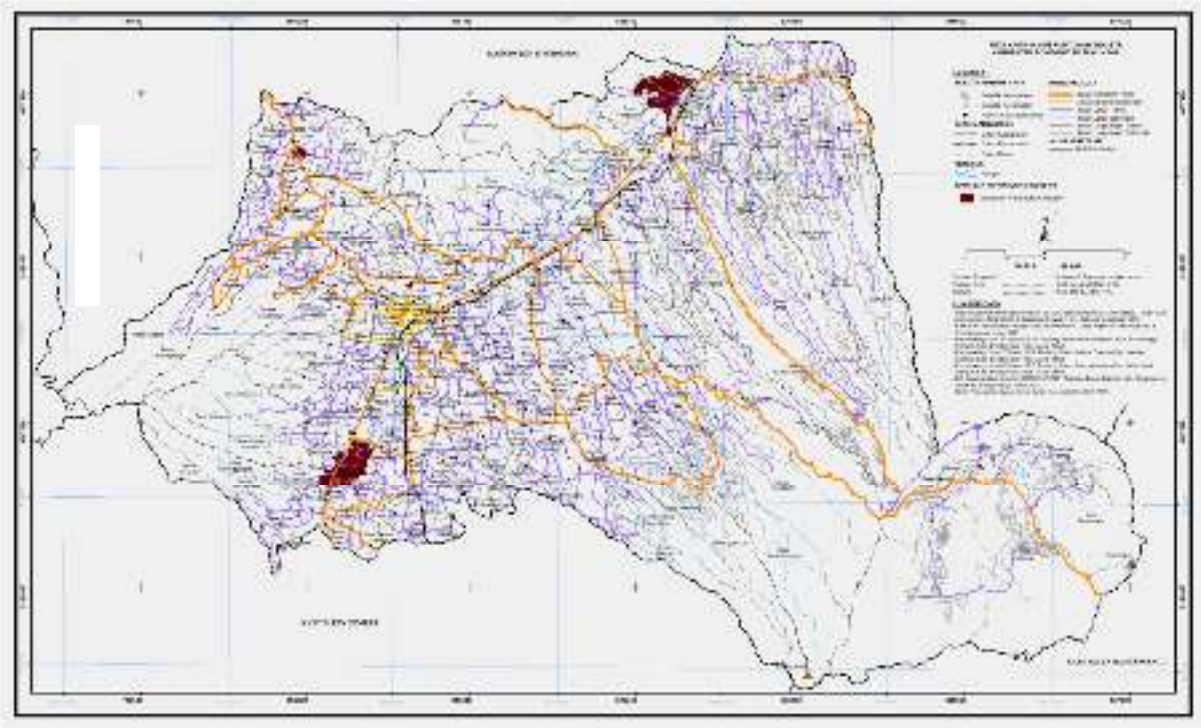

Gambar 2.5 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bondowoso

Selain Kawasan Peruntukan Industri, terdapat pula lokasi industri dan sentra industri kecil. Sentra industri kecil berkembang pada beberapa lokasi sesuai dengan jenisnya meliputi:

1) Sentra industri kimia di Kecamatan Cermee, Prajekan, Botolinggo, Klabang, Tapen, Grujugan, Tamanan, Tenggarang, dan Ijen.
2) Sentra industri pande besi meliputi Kecamatan Binakal, Jambesari Darus Sholah, dan Tlogosari.
3) Sentra industri makanan di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Klabang, Maesan, Prajekan, Pujer, Ijen, Sukosari, Sumberwringin, Tamanan, Taman Krocok, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari, dan Wringin.
4) Sentra industri logam dasar dan kuningan di Kecamatan Tapen.
5) Sentra industri mebel di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pakem, Tegalampel, dan Tamanan.

6) Sentra industri kerajinan tangan dan anyaman bambu di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Cermee, Pakem, Pujer, Tlogosari, Tapen, Tamanan, dan Wringin.
7) Sentra industri rokok dan pengolahan tembakau di Kecamatan Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pujer, Pakem, Tamanan, dan Wringin.
8) Sentra industri konveksi di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, dan Kecamatan Pujer.
9) Sentra industri batu hias di Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Pakem, dan Wringin.
10) Sentra industri batik di Kecamatan Maesan dan Tamanan.

4. Sistem Jaringan Prasarana (Infrastruktur)

Sistem jaringan prasarana atau infrastruktur wilayah yang berperan penting dalam pembangunan wilayah meliputi prasarana jalan, perhubungan, air minum, dan prasarana lainnya.

1. Prasarana Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Bondowoso, terbagi menjadi:

a. Jalan kolektor primer yang juga sebagai jalan strategis nasional yaitu Jalan Garduatak-Paltuding (Kawah Ijen) yang sebagian ruasnya dikelola sebagai jalan provinsi.

b. Jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi meliputi ruas: Jalan penghubung Bondowoso–Jember; Jalan penghubung Bondowoso–Situbondo, Jalan penghubung Bondowoso–Besuki dan Jalan penghubung Maesan-Sukowono.

c. Jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan pusat perkotaan Bondowoso dengan kawasan fungsional tertentu dalam kawasan perkotaan, seperti kawasan perdagangan, industri, perkantoran, wisata, dan permukiman, dengan status pengelolaan sebagai jalan kabupaten.

d. Jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan Perkotaan Bondowoso dengan pusat-pusat kegiatan kawasan dan lingkungan, yaitu simpul perkotaan kecamatan (poros kecamatan), serta jalan alternatif tembus antar kabupaten dengan status pengelolaan sebagai jalan kabupaten.

e. Jalan lokal sekunder yang merupakan jalan penghubung antara simpul kecamatan dengan pusat-pusat pelayanan tingkat desa.

Rencana peningkatan jalan dan jembatan sebagai prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk membuka kawasan terisolasi, meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, distribusi bahan konsumsi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bondowoso dengan wilayah kabupaten sekitar khususnya akses menuju pasar (outlet), pelabuhan, bandara dan pusat pemerintahan dan pelayanan regional provinsi dan nasional.

b. Peningkatan jalan kolektor dan lokal dalam wilayah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pengembangan kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan pelayanan pemerintahan serta sosial melalui peningkatan kualitas perkerasan jalan, pelebaran jalan, dan pemeliharaan kondisi jalan agar berfungsi optimal;

c. Peningkatan jalan lokal yang menuju daerah terpencil dan terisolir, dengan pelebaran dan peningkatan perkerasan jalan serta pembangunan jembatan pada ruas :

   - Jalan Botolinggo-Pancur;
   - Jalan Cermee-Solor-Pedati-Kalisat;
   - Jalan Pedati-Megasari-Silapak;
   - Jalan Watucapil-Sumberrejo-Kaligedang;

- Jalan Sempol-Jampit-Kawah Wurung;
- Jalan Prajekan-Walidono-Pacalan;
- Jalan Sukorejo-Puloagung-Taal;
- Jalan Tanggulangin-Gubrih-Ampelan; dan
- Jalan Sumbercanting-Semampir-Banyuwulu.

d. Melanjutkan pembangunan jalan lingkar Perkotaan Bondowoso sesi Timur yang menghubungkan ruas Pancoran-Kejawan, dengan melanjutkan proses pembebasan lahan, perencanaan, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan.

e. Mengoptimalkan kinerja pelayanan ruas-ruas jalan embrio jalan lingkar Perkotaan Bondowoso sesi Barat sebagai antisipasi pembukaan pintu masuk/keluar Tol Probolinggo-Banyuwangi di Kecamatan Buduan, yang akan berdampak pada meningkatnya arus lalu lintas antara Wilayah Kabupaten Jember menuju Besuki dan akan menambah beban lalu lintas di Perkotaan Bondowoso.

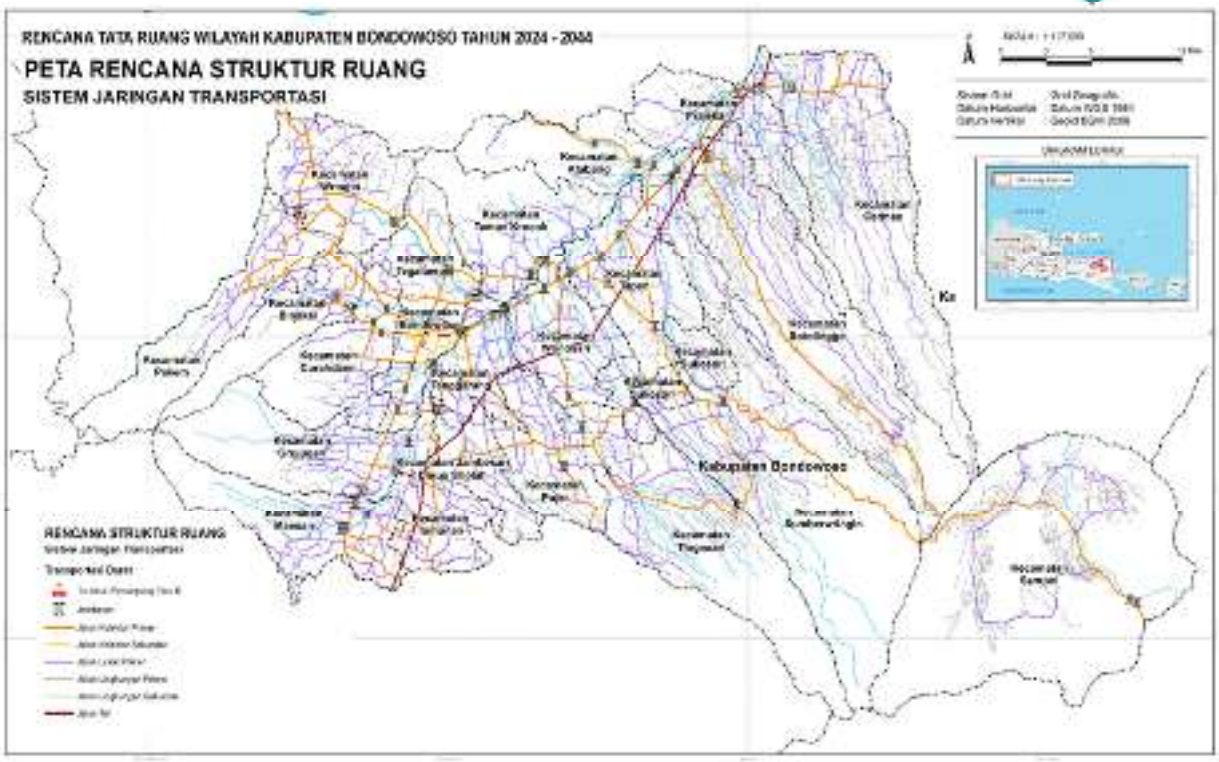

Gambar 2.6 Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso

2. Prasarana Perhubungan

Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan secara komprehensif dan terpadu dapat dilakukan melalui pengembangan sistem prasarana perhubungan atau transportasi. Mengingat letak geografis wilayah Kabupaten Bondowoso yang secara keseluruhan berupa daratan maka sistem transportasi yang berkembang adalah sistem transportasi darat. Transportasi darat di Kabupaten Bondowoso berperan dalam mendukung mobilitas manusia maupun distribusi komoditi kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, industri pengolahan dan perdagangan serta jasa.

Sistem prasarana perhubungan yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Bondowoso terdiri dari sistem transportasi jalan raya dan transportasi kereta api. Sistem transportasi jalan raya terdiri dari: jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jembatan, terminal dan rencana pengembangan sarana prasarana angkutan umum. Pengembangan transportasi jalan raya diarahkan pada:

a. Optimalisasi Terminal Bondowoso sebagai terminal Tipe B yang melayani antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi.
b. Pengembangan terminal penumpang tipe C di beberapa simpul kegiatan masyarakat yang potensial, diantaranya di Perkotaan Maesan, Prajekan, Ijen, Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringin.
c. Pengembangan pelayanan angkutan umum penumpang yang layak dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan sistem transportasi kereta api yang direncanakan dikembangkan meliputi :

- Mendukung pengembangan pelayanan transportasi kereta api di Kabupaten Bondowoso untuk mengaktifkan kembali sarana kereta api pada jalur Kalisat – Bondowoso – Panarukan.
- Pengamanan dan konservasi jalur kereta api, stasiun dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka revitalisasi sistem angkutan kereta api jalur Kalisat – Bondowoso – Panarukan yang melalui wilayah Kecamatan Tamanan, Grujugan, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Tapen, Klabang dan Prajekan;
- Mendukung aktivasi kembali pelayanan angkutan kereta api yang melintasi Kalisat – Bondowoso – Situbondo – Panarukan;
- Meningkatkan peranan pemerintah dalam pelayanan kereta api; dan
- Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya reaktivasi angkutan kereta api sebagai sarana transportasi umum dan pengembangan kereta api wisata.

3. Prasarana Sumber Daya Air (Irigasi)

Pengembangan prasarana sumber daya air berupa pembangunan bendungan dan penampung air baku lainnya, diarahkan untuk peningkatan kondisi prasarana irigasi pada kawasan potensial peningkatan produksi pangan, serta optimalisasi prasarana irigasi yang

telah terbangun, baik bendung, waduk/dam, jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier..

4. Prasarana Penyediaan Air Minum (SPAM)

   Sistem penyediaan air minum atau air bersih meliputi sistem penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan. Sistem perdesaan pada umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat berupa sistem perpipaan desa atau mandiri, yang dalam pengelolaannya memerlukan pembinaan teknis dan kelembagaan dari instansi terkait.

   Untuk kawasan perkotaan penyediaan air minum perpipaan sebagian besar dikelola oleh PDAM dan sebagian kecil dikelola masyarakat. Jaringan perpipaan PDAM baru menjangkau pada 16 wilayah kecamatan. Belum semua kawasan perkotaan terlayani perpipaan PDAM. Upaya meningkatkan kinerja PDAM dilakukan dengan optimalisasi kapasitas sumber pengambilan air, menurunkan tingkat kebocoran dan pemeliharaan/perbaikan jaringan secara rutin dan berkala, serta mengembangkan area layanan pada permukiman perkotaan.

   Dalam konteks regional terdapat potensi pemanfaatan sumber air untuk pengembangan SPAM regional (lintas kabupaten), yaitu di SPAM regional Kabupaten Bondowoso dan kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo.

5. Prasarana Lainnya

   Jenis jaringan prasarana lainnya yang menunjukkan potensi pengembangan wilayah meliputi:

   a. pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik yang layak dan merata untuk kebutuhan masyarakat khususnya sambungan rumah tangga hingga pada permukiman terpencil serta kegiatan konsumsi dan produksi oleh

masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai. Dikembangkan pula penyediaan energi listrik dengan memanfaatkan potensi panas bumi, yaitu PLTP Ijen-Blawan, energi mikrohidro (PLTm), tenaga surya, dan energi alternatif lainnya;

b. pengembangan prasarana jaringan komunikasi dan informasi meliputi prasarana menara telekomunikasi, jaringan kabel/fiber optik dan non kabel (pancaran gelombang), yang mendukung kemudahan masyarakat memperoleh informasi, interaksi sosial ekonomi dan kemudahan pelayanan publik atau pemerintahan berbasis elektronik agar semakin efektif; dan

c. pembangunan dan pengelolaan saluran drainase wilayah dengan optimalisasi fungsi sungai dan daerah aliran sungai, pembangunan saluran sekunder yang memperhatikan kontur suatu kawasan, pembuatan saluran drainase tersier pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan.

d. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah, khususnya limbah domestik mendapat perhatian penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup atau kesehatan masyarakat. Layanan prasarana limbah domestik (sanitas) di Kabupaten Bondowoso secara akses sudah 100%. Kabupaten Bondowoso telah berstatus ODF. Namun penguatan ODF perlu penguatan dengan penyediaan prasarana SPALD yang lebih baik. Pembangunan prasarana pengolahan limbah domestik (SPALD) dan penyediaan layanan pengolahan limbah domestik dapat memanfaatkan kerjasama lintas wilayah.

e. Pengelolaan persampahan menjadi tuntutan mendesak pada saat ini sejalan dengan meningkatnya timbulan sampah sebagai dampak perkembangan aktifitas masyarakat. Sebagian besar timbulan sampah belum dapat tertangani dengan pengangkutan dan pengolahan di TPS/TPA. Demikian pula dengan upaya pengurangan

sampah dengan berbagai metode belum secara signifikan mengurangi sampah terangkut. Penyelesaian penanganan sampah memerlukan perhatian serius dan upaya-upaya inovatif termasuk dengan mengembangkan kerjasama regional lintas kabupaten.

Pemanfaatan ruang wilayah secara optimal untuk pengembangan permukiman, perdagangan, industri dan penyediaan jaringan prasarana atau infrastruktur wilayah diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2.6 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
A	**ARAHAN PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**		
1	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**		
1.1	**Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**		
	a.	penyusunan peninjauan kembali RDTR Perkotaan Bondowoso	PKL Perkotaan Bondowoso di Kecamatan Bondowoso
	b	penyusunan RDTR Perkotaan Bondowoso	
	c.	penyusunan RTBL Kawasan Tertentu di Perkotaan Bondowoso	
	d.	pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial pelayanan PKL	
	e.	peningkatan kualitas permukiman Perkotaan Bondowoso	
	f	pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat di PKL	
1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan**		
	a.	penyusunan peninjauan kembali RDTR kawasan Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan	PPK Maesan, PPK Tamanan

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	Penyusunan RDTR kawasan Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan	a. PPK Cermee di Kecamatan Cermee; b. PPK Maesan di Kecamatan Maesan; c. PPK Prajekan di Kecamatan Prajekan; d. PPK Pujer di Kecamatan Pujer; e. PPK Sukosari di Kecamatan Sukosari; f. PPK Tamanan di Kecamatan Tamanan; g. PPK Wonosari di Kecamatan Wonosari; h. PPK Wringin di Kecamatan Wringin.
	c.	penyusunan RTBL kawasan Tertentu Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan	
	d.	pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial pelayanan Pusat Pelayanan Kawasan	
	e.	peningkatan kualitas permukiman Kawasan Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan	
	f	pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat di Pusat Pelayanan Kawasan	a. PPK Cermee di Kecamatan Cermee; b. PPK Maesan di Kecamatan Maesan; c. PPK Prajekan di Kecamatan Prajekan; d. PPK Pujer di Kecamatan Pujer; e. PPK Sukosari di Kecamatan Sukosari; f. PPK Tamanan di Kecamatan Tamanan; g. PPK Wonosari di Kecamatan Wonosari; h. PPK Wringin di Kecamatan Wringin.
1.3	**Pengembangan Perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan**		
	a.	penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan	a. PPL Binakal di Kecamatan Binakal; b. PPL Botolinggo di Kecamatan Botolinggo; c. PPL Grujugan di Kecamatan Grujugan; d. PPL Sempol di Kecamatan Ijen; e. PPL Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
	b.	penyusunan RTBL Kawasan Tertentu Perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan	
	c.	pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan	

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	d.	peningkatan kualitas permukiman kawasan perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan	f. PPL Klabang di Kecamatan Klabang; g. PPL Pakem di Kecamatan Pakem; h. PPL Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin; i. PPL Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok; j. PPL Tapen di Kecamatan Tapen; dan k. PPL Tlogosari di Kecamatan Tlogosari.
	e.	pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat di Pusat Pelayanan Lingkungan	
2	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA**		
2.1	**Sistem Jaringan Transportasi**		
2.1.1.	**Sistem Jaringan Jalan**		
2.1.1.1	**Jalan Umum**		
	a.	**Jalan Kolektor**	
		pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer	seluruh Kecamatan
		pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	1. Kecamatan Bondowoso 2. Kecamatan Tegalampel 3. Kecamatan Tenggarang
		penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Kabupaten Bondowoso	seluruh Kecamatan
		Peningkatan status dan fungsi jalan	seluruh Kecamatan
	b.	**Jalan Lokal**	
		pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer	seluruh Kecamatan
	c.	**Jalan Lingkungan**	
		pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	seluruh kecamatan
		pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	seluruh kecamatan

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
		pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	seluruh kecamatan
2.1.1.2	**Jalan Tol**		
	a	sosialisasi pengembangan jalan tol	seluruh Kecamatan
	b	pembebasan lahan	1. Kecamatan Botolinggo 2. Kecamatan Cermee 3. Kecamatan Grujugan 4. Kec. Jambesari Darus Sholah 5. Kecamatan Klabang 6. Kecamatan Maesan 7. Kecamatan Prajekan 8. Kecamatan Pujer 9. Kecamatan Tamanan 10. Kecamatan Tapen 11. Kecamatan Tenggarang 12. Kecamatan Wonosari
	c	pembangunan jalan tol Situbondo - Jember	
2.1.1.3	**Terminal Penumpang**		
	a.	peningkatan dan operasional Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Bondowoso
	b.	pembangunan dan pemeliharaan halte	seluruh Kecamatan
	c	pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Bondowoso
2.1.1.4	**Jembatan**		
	a.	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan
2.1.2	**Sistem Jaringan Kereta api**		
	a.	penyusunan studi kelayakan dan rencana pengaktifan kembali Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jalur kereta api Kalisat - Panarukan	a. Kecamatan Bondowoso; b. Kecamatan Botolinggo; c. Kecamatan Grujugan; d. Kec. Jambesari Darus Sholah; e. Kecamatan Klabang; f. Kecamatan Prajekan; g. Kecamatan Tamanan; h. Kecamatan Tapen; i. Kecamatan Tenggarang; dan j. Kecamatan Wonosari.
	b.	pembangunan prasarana dan operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kalisat -Panarukan	

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	penyusunan studi kelayakan dan pengembangan kereta api wisata	Kec. Bondowoso, Grujugan, Tamanan
	d	peningkatan sarana prasarana dan penataan Stasiun Penumpang	Kecamatan Bondowoso
2.2	**Sistem Jaringan Energi**		
2.2.1	**Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung**		
	a.	pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Blawan – Ijen Bondowoso terdapat di Kecamatan Ijen
	b	pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	1. PLTMH Sampean Baru terdapat di Kecamatan Klabang; dan 2. PLTMH Blawan terdapat di Kecamatan Ijen.
	c.	pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Prajekan (PTPN XI) terdapat di Kecamatan Prajekan
2.2.1.2	**Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukungnya**		
	a	pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bondowoso-Situbondo, terdapat di: a) Kecamatan Botolinggo; b) Kecamatan Cermee; c) Kecamatan Klabang; d) Kecamatan Prajekan; e) Kecamatan Tapen; f) Kecamatan Tenggarang; dan g) Kecamatan Wonosari; 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Jember-Bondowoso, terdapat di: a) Kec. Jambesari Darus Sholah; b) Kecamatan Tamanan; dan c) Kecamatan Tenggarang. 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTP Blawan Ijen – GI Banyuwangi terdapat di Kecamatan Ijen.

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan
		pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan
		pengembangan Gardu Listrik	Gardu Induk Bondowoso 150/20 KV 60 MVA terdapat di Kecamatan Tenggarang
2.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**		
2.3.1	**Jaringan Tetap**		
	a	pengembangan Jaringan Tetap	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Bondowoso; c. Kecamatan Botolinggo; d. Kecamatan Curahdami; e. Kecamatan Grujugan; f. Kecamatan Klabang; g. Kecamatan Maesan; h. Kecamatan Pakem; i. Kecamatan Prajekan; j. Kecamatan Tapen; k. Kecamatan Tenggarang; l. Kecamatan Wonosari; dan m. Kecamatan Wringin.
2.3.2	**Jaringan Bergerak**		
	a	pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan
	b	pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Seluruh Kecamatan
2.4	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**		
2.4.1	**Sistem Jaringan Irigasi**		

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	a.	pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Bondowoso Kecamatan Botolinggo Kecamatan Cermee Kec. Jambesari Darus Sholah Kecamatan Klabang Kecamatan Prajekan Kecamatan Pujer Kecamatan Sumberwringin Kecamatan Taman Krocok Kecamatan Tapen Kecamatan Tegalampel Kecamatan Tenggarang Kecamatan Tlogosari
	b.	pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Binakal Kecamatan Bondowoso Kecamatan Botolinggo Kecamatan Cermee Kecamatan Curahdami Kecamatan Grujugan Kec. Jambesari Darus Sholah Kecamatan Klabang Kecamatan Maesan Kecamatan Pakem Kecamatan Prajekan Kecamatan Pujer Kecamatan Sukosari Kecamatan Sumberwringin Kecamatan Taman Krocok Kecamatan Tamanan Kecamatan Tapen Kecamatan Tegalampel Kecamatan Tenggarang Kecamatan Tlogosari Kecamatan Wonosari Kecamatan Wringin

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Binakal Kecamatan Bondowoso Kecamatan Botolinggo Kecamatan Cermee Kecamatan Curahdami Kecamatan Grujugan Kec. Jambesari Darus Sholah Kecamatan Klabang Kecamatan Maesan Kecamatan Pakem Kecamatan Prajekan Kecamatan Pujer Kecamatan Sukosari Kecamatan Sumberwringin Kecamatan Taman Krocok Kecamatan Tamanan Kecamatan Tapen Kecamatan Tegalampel Kecamatan Tenggarang Kecamatan Tlogosari Kecamatan Wonosari Kecamatan Wringin
	d	penyusunan rencana induk sistem pengelolaan jaringan irigasi	Kabupaten Bondowoso
2.4.2	**Bangunan Sumber Daya Air**		
	a	pengembangan peningkatan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa waduk dan embung	Kecamatan Bondowoso Kecamatan Botolinggo Kecamatan Cermee Kecamatan Curahdami Kecamatan Grujugan Kecamatan Klabang Kecamatan Pujer Kecamatan Sukosari Kecamatan Sumberwringin Kecamatan Taman Krocok Kecamatan Tamanan Kecamatan Tapen Kecamatan Tegalampel Kecamatan Wonosari Kecamatan Wringin
2.5	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**		

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
2.5.1	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**		
2.5.1.1.	**Jaringan Perpipaan**		
	a	pengembangan Unit Air Baku	1. Kecamatan Bondowoso; 2. Kecamatan Curahdami; 3. Kecamatan Maesan; 4. Kecamatan Pakem; 5. Kecamatan Prajekan; 6. Kecamatan Sumberwringin; 7. Kecamatan Taman Krocok; 8. Kecamatan Tamanan; 9. Kecamatan Tapen; 10. Kecamatan Tegalampel; 11. Kecamatan Tenggarang; 12. Kecamatan Tlogosari; dan 13. Kecamatan Wringin.
	b	pengembangan Unit Produksi	1. Kecamatan Bondowoso; 2. Kecamatan Curahdami; 3. Kecamatan Maesan; 4. Kecamatan Pakem; 5. Kecamatan Prajekan; 6. Kecamatan Sumberwringin; 7. Kecamatan Taman Krocok; 8. Kecamatan Tamanan; 9. Kecamatan Tapen; 10. Kecamatan Tegalampel; 11. Kecamatan Tenggarang; 12. Kecamatan Tlogosari; dan 13. Kecamatan Wringin.

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	pengembangan Unit Distribusi	1. Kecamatan Bondowoso; 2. Kecamatan Botolinggo; 3. Kecamatan Curahdami; 4. Kecamatan Klabang; 5. Kecamatan Maesan; 6. Kecamatan Pakem; 7. Kecamatan Prajekan; 8. Kecamatan Pujer; 9. Kecamatan Sukosari; 10. Kecamatan Sumberwringin; 11. Kecamatan Taman Krocok; 12. Kecamatan Tamanan; 13. Kecamatan Tapen; 14. Kecamatan Tegalampel; 15. Kecamatan Tenggarang; 16. Kecamatan Tlogosari; 17. Kecamatan Wonosari; dan 18. Kecamatan Wringin.
	d	Pembangunan SPAM Regional Jember Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
	e.	penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten	Kabupaten Bondowoso
	f	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan perpipaan perkotaan (Perusahaan Daerah Air Minum)	Kawasan Perkotaan dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum non perkotaan,
	g	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan perpipaan perdesaan	Kawasan Perdesaan non Perusahaan Daerah Air Minum
	h	pengendalian dan pengawasan sistem penyediaan air minum non perpipaan	Kabupaten Bondowoso
2.5.2	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**		
2.5.2.1.	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**		
	a	pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	a. Kecamatan Bondowoso; b. Kecamatan Grujugan; c. Kecamatan Prajekan;

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	pembangunan IPAL bersama bagi industri	d. Kecamatan Pujer; e. Kecamatan Tamanan; f. Kecamatan Tenggarang; dan g. Kecamatan Wonosari.
2.5.2.2.	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**		
	a	stimulus jamban sehat	Kabupaten Bondowoso
	b	pembangunan dan operasional Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kecamatan Taman Krocok
	c	penyediaan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik kawasan permukiman	Kabupaten Bondowoso
2.5.3	**Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**		
	a.	pengembangan dan penyediaan prasarana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Bondowoso; c. Kecamatan Botolinggo; d. Kecamatan Cermee; e. Kecamatan Curahdami; f. Kecamatan Grujugan; g. Kecamatan Ijen; h. Kec. Jambesari Darus Sholah; i. Kecamatan Klabang; j. Kecamatan Maesan; k. Kecamatan Pakem; l. Kecamatan Prajekan; m. Kecamatan Pujer; n. Kecamatan Sukosari; o. Kecamatan Sumberwringin; p. Kecamatan Taman Krocok; q. Kecamatan Tamanan; r. Kecamatan Tapen; s. Kecamatan Tegalampel; t. Kecamatan Tenggarang; u. Kecamatan Tlogosari; dan v. Kecamatan Wringin.
	b.	pembangunan prasarana pengelolaan limbah B3 rumah sakit.	
2.5.4	**Sistem Jaringan Persampahan**		
	a.	penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah kabupaten	Kabupaten Bondowoso

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	Kecamatan Tenggarang
	c	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. Kecamatan Bondowoso; b. Kecamatan Curahdami; c. Kecamatan Grujugan; d. Kecamatan Maesan; e. Kecamatan Prajekan; f. Kecamatan Pujer; g. Kecamatan Tamanan; h. Kecamatan Tenggarang; dan i. Kecamatan Wonosari
	d	pembangunan pemeliharaan dan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a. TPA Paguan terdapat di Kecamatan Taman Krocok; dan b. TPA Sumberkokap terdapat di Kecamatan Taman Krocok.
	e.	pengembangan sistem pengurangan sampah di pusat kegiatan Masyarakat	Kabupaten Bondowoso
2.5.5	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**		
	a	penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
	b	pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan kelengkapannya	seluruh kecamatan

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	pengembangan Tempat Evakuasi Bencana dan kelengkapannya	1. Kecamatan Binakal 2. Kecamatan Bondowoso 3. Kecamatan Cermee 4. Kecamatan Curahdami 5. Kecamatan Grujugan 6. Kecamatan Ijen 7. Kec. Jambesari Darus Sholah 8. Kecamatan Maesan 9. Kecamatan Pakem 10. Kecamatan Prajekan 11. Kecamatan Pujer 12. Kecamatan Sukosari 13. Kecamatan Sumberwringin 14. Kecamatan Taman Krocok 15. Kecamatan Tamanan 16. Kecamatan Tapen 17. Kecamatan Tegalampel 18. Kecamatan Tenggarang 19. Kecamatan Tlogosari 20. Kecamatan Wonosari 21. Kecamatan Wringin
2.5.6	**Sistem Drainase**		

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	a	pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan dan kawasan rawan banjir	1. Kecamatan Binakal; 2. Kecamatan Bondowoso; 3. Kecamatan Botolinggo; 4. Kecamatan Cermee; 5. Kecamatan Curahdami; 6. Kecamatan Grujugan; 7. Kec. Jambesari Darus Sholah; 8. Kecamatan Klabang; 9. Kecamatan Maesan; 10. Kecamatan Pakem; 11. Kecamatan Prajekan; 12. Kecamatan Pujer; 13. Kecamatan Sukosari; 14. Kecamatan Sumberwringin; 15. Kecamatan Taman Krocok; 16. Kecamatan Tamanan; 17. Kecamatan Tapen; 18. Kecamatan Tegalampel; 19. Kecamatan Tenggarang; 20. Kecamatan Tlogosari; 21. Kecamatan Wonosari; dan 22. Kecamatan Wringin.

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	normalisasi Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Binakal 2. Kecamatan Bondowoso 3. Kecamatan Botolinggo 4. Kecamatan Cermee 5. Kecamatan Curahdami 6. Kecamatan Grujugan 7. Kecamatan Ijen 8. Kec. Jambesari Darus Sholah 9. Kecamatan Klabang 10. Kecamatan Maesan 11. Kecamatan Pakem 12. Kecamatan Prajekan 13. Kecamatan Pujer 14. Kecamatan Sukosari 15. Kecamatan Sumberwringin 16. Kecamatan Taman Krocok 17. Kecamatan Tamanan 18. Kecamatan Tapen 19. Kecamatan Tegalampel 20. Kecamatan Tenggarang 21. Kecamatan Tlogosari 22. Kecamatan Wonosari 23. Kecamatan Wringin

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Binakal; 2. Kecamatan Bondowoso; 3. Kecamatan Botolinggo; 4. Kecamatan Cermee; 5. Kecamatan Curahdami; 6. Kecamatan Grujugan; 7. Kec. Jambesari Darus Sholah; 8. Kecamatan Klabang; 9. Kecamatan Maesan; 10. Kecamatan Pakem; 11. Kecamatan Prajekan; 12. Kecamatan Pujer; 13. Kecamatan Sukosari; 14. Kecamatan Sumberwringin; 15. Kecamatan Taman Krocok; 16. Kecamatan Tamanan; 17. Kecamatan Tapen; 18. Kecamatan Tegalampel; 19. Kecamatan Tenggarang; 20. Kecamatan Tlogosari; 21. Kecamatan Wonosari; dan 22. Kecamatan Wringin.
	d	pengembangan Jaringan Drainase Tersier	1. Kecamatan Binakal; 2. Kecamatan Bondowoso; 3. Kecamatan Botolinggo; 4. Kecamatan Cermee; 5. Kecamatan Curahdami; 6. Kecamatan Grujugan; 7. Kec. Jambesari Darus Sholah; 8. Kecamatan Klabang; 9. Kecamatan Maesan; 10. Kecamatan Pakem; 11. Kecamatan Prajekan; 12. Kecamatan Pujer; 13. Kecamatan Sukosari; 14. Kecamatan Sumberwringin; 15. Kecamatan Taman Krocok; 16. Kecamatan Tamanan; 17. Kecamatan Tapen; 18. Kecamatan Tegalampel; 19. Kecamatan Tenggarang; 20. Kecamatan Tlogosari; 21. Kecamatan Wonosari; dan 22. Kecamatan Wringin.

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	e.	perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan bangunan-bangunan penunjang prasarana drainase	1. Kecamatan Binakal 2. Kecamatan Bondowoso 3. Kecamatan Botolinggo 4. Kecamatan Cermee 5. Kecamatan Curahdami 6. Kecamatan Grujugan 7. Kecamatan Ijen 8. Kec. Jambesari Darus Sholah 9. Kecamatan Klabang 10. Kecamatan Maesan 11. Kecamatan Pakem 12. Kecamatan Prajekan 13. Kecamatan Pujer 14. Kecamatan Sukosari 15. Kecamatan Sumberwringin 16. Kecamatan Taman Krocok 17. Kecamatan Tamanan 18. Kecamatan Tapen 19. Kecamatan Tegalampel 20. Kecamatan Tenggarang 21. Kecamatan Tlogosari 22. Kecamatan Wonosari 23. Kecamatan Wringin
B	**ARAHAN PERWUJUDAN POLA RUANG**		
1	**PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG**		
1.1	**Badan Air**		
	a.	perlindungan dan pelestarian Badan Air	seluruh kecamatan
	b	perlindungan sempadan sungai	seluruh kecamatan

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	perlindungan sempadan embung atau waduk	a. Kecamatan Bondowoso b. Kecamatan Botolinggo c. Kecamatan Cermee d. Kecamatan Curahdami e. Kecamatan Grujugan f. Kecamatan Pujer g. Kecamatan Sukosari h. Kecamatan Tamanan i. Kecamatan Tapen j. Kecamatan Tegalampel k. Kecamatan Wonosari l. Kecamatan Wringin
	d	perlindungan sempadan mata air	a. Kecamatan Bondowoso b. Kecamatan Botolinggo c. Kecamatan Cermee d. Kecamatan Curahdami e. Kecamatan Grujugan f. Kecamatan Ijen g. Kec. Jambesari Darus Sholah h. Kecamatan Maesan i. Kecamatan Pakem j. Kecamatan Prajekan k. Kecamatan Pujer l. Kecamatan Sukosari m. Kecamatan Sumberwringin n. Kecamatan Taman Krocok o. Kecamatan Tamanan p. Kecamatan Tapen q. Kecamatan Tegalampel r. Kecamatan Tenggarang s. Kecamatan Tlogosari t. Kecamatan Wonosari u. Kecamatan Wringin
1.2	**Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**		
1.2.1	**Kawasan Hutan Lindung**		

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	a	pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Botolinggo; c. Kecamatan Cermee; d. Kecamatan Curahdami; e. Kecamatan Grujugan; f. Kecamatan Ijen; g. Kecamatan Klabang; h. Kecamatan Maesan; i. Kecamatan Pakem; j. Kecamatan Prajekan; k. Kecamatan Sumberwringin; l. Kecamatan Taman Krocok; dan m. Kecamatan Tlogosari
	b	penyusunan rencana pengelolaan kawasan cagar alam geologi kabupaten	Kec. Ijen, Prajekan, Cermee, Botolinggo, Klabang, Wringin, Pakem, Maesan dan Grujugan.
	c	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan Geosite Ijen Geopark dan kawasan potensi cagar alam geologi lainnya	Kec. Ijen, Prajekan, Cermee, Botolinggo, Klabang, Wringin, Pakem, Maesan dan Grujugan.
1.4	**Kawasan Konservasi**		
1.4.1	**Kawasan Suaka Alam**		
	a	perlindungan Cagar Alam	1. Cagar Alam Ceding terdapat di Kecamatan Ijen; 2. Cagar Alam Kawah Ijen–Merapi–Ungup-ungup terdapat di Kecamatan Ijen; 3. Cagar Alam Pancuran Ijen I terdapat di Kecamatan Botolinggo; 4. Cagar Alam Pancuran Ijen II terdapat di Kecamatan Botolinggo; dan 5. Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateau terdapat di Kecamatan Pakem.
	b	perlindungan Kawasan Suaka Margasatwa	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang terdapat di: 1. Kecamatan Maesan; dan 2. Kecamatan Pakem.

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
1.4.2	**Kawasan Pelestarian Alam**		
	a.	perlindungan dan pelestarian Taman Wisata Alam	Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Kecamatan Ijen
2	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA**		
2.1	**Kawasan Hutan Produksi Tetap**		
	a	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Bondowoso; c. Kecamatan Botolinggo; d. Kecamatan Cermee; e. Kecamatan Curahdami; f. Kecamatan Grujugan; g. Kecamatan Ijen; h. Kecamatan Klabang; i. Kecamatan Maesan; j. Kecamatan Pakem; k. Kecamatan Prajekan; l. Kecamatan Pujer; m. Kecamatan Sukosari; n. Kecamatan Sumberwringin; o. Kecamatan Taman Krocok; p. Kecamatan Tapen; q. Kecamatan Tegalampel; r. Kecamatan Tlogosari; s. Kecamatan Wonosari; dan t. Kecamatan Wringin.
2.2	**Kawasan Perkebunan Rakyat**		
	a.	pembinaan budidaya tanaman kehutanan untuk Kawasan Perkebunan Rakyat	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Botolinggo; c. Kecamatan Cermee;

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b.	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat	d. Kecamatan Curahdami; e. Kecamatan Grujugan; f. Kecamatan Ijen; g. Kecamatan Klabang; h. Kecamatan Maesan; i. Kecamatan Pakem; j. Kecamatan Prajekan; k. Kecamatan Pujer; l. Kecamatan Sukosari; m. Kecamatan Sumberwringin; n. Kecamatan Taman Krocok; o. Kecamatan Tapen; p. Kecamatan Tegalampel; q. Kecamatan Tlogosari; dan r. Kecamatan Wringin.
2.3	**Kawasan Pertanian**		
2.3.1	**Kawasan Tanaman Pangan**		
	a	pemantauan dan pengendalian Kawasan Tanaman Pangan	1. Kecamatan Binakal 2. Kecamatan Bondowoso 3. Kecamatan Botolinggo 4. Kecamatan Cermee 5. Kecamatan Curahdami 6. Kecamatan Grujugan 7. Kec. Jambesari Darus Sholah 8. Kecamatan Klabang 9. Kecamatan Maesan 10. Kecamatan Pakem 11. Kecamatan Prajekan 12. Kecamatan Pujer 13. Kecamatan Sukosari 14. Kecamatan Sumberwringin 15. Kecamatan Taman Krocok 16. Kecamatan Tamanan 17. Kecamatan Tapen 18. Kecamatan Tegalampel 19. Kecamatan Tenggarang 20. Kecamatan Tlogosari 21. Kecamatan Wonosari 22. Kecamatan Wringin
	b	sinkronisasi kebijakan pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan dengan KP2B	Kabupaten Bondowoso

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c	pengembangan pertamian organik;	Kabupaten Bondowoso
	d	pengembangan usaha pengolahan pupuk organik	Kabupaten Bondowoso
2.3.2	**Kawasan Hortikultura**		
	a	pengembangan Kawasan Hortikutura	1. Kecamatan Botolinggo; 2. Kecamatan Cermee; 3. Kec. Jambesari Darus Sholah; 4. Kecamatan Klabang; 5. Kecamatan Maesan; 6. Kecamatan Pujer; 7. Kecamatan Prajekan; 8. Kecamatan Sukosari; 9. Kecamatan Sumberwringin; 10. Kecamatan Taman Krocok; 11. Kecamatan Tamanan; 12. Kecamatan Tapen; 13. Kecamatan Tenggarang; 14. Kecamatan Tegalampel; 15. Kecamatan Tlogosari; dan 16. Kecamatan Wonosari.
	b	pengembangan hortikultura produk komoditas unggul daerah	
2.3.3	**Kawasan Perkebunan**		
	a.	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Perkebunan	a. Kecamatan Botolinggo; b. Kecamatan Cermee; c. Kecamatan Ijen; dan d. Kecamatan Sumberwringin.
	b.	pengembangan usaha kopi dan sarana pengolahan kopi	Kecamatan Ijen
	c	pengembangan kawasan peternakan modern	Kabupaten Bondowoso
2.5	**Kawasan Pertambangan dan Energi**		
2.5.1	**Kawasan Pertambangan Mineral**		
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan		
	a	pembinaan usaha pertambangan batuan	a. Kecamatan Cermee; b. Kecamatan Curahdami;

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	b	pemantauan dan pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	c. Kecamatan Grujugan; d. Kecamatan Ijen; e. Kecamatan Klabang; f. Kecamatan Maesan; g. Kecamatan Pakem; h. Kecamatan Tapen; dan i. Kecamatan Wringin.
2.6	**Kawasan Peruntukan Industri**		
	a	penyusunan rencana penataan lokasi sentra industri kecil	Kabupaten Bondowoso
	b	pengembangan Pemantauan dan pengendalian lokasi sentra industri kecil	Kabupaten Bondowoso
	c	pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Botolinggo; 2. Kecamatan Grujugan; 3. Kecamatan Ijen; 4. Kecamatan Klabang; 5. Kecamatan Maesan; 6. Kecamatan Prajekan; 7. Kecamatan Tegalampel; dan 8. Kecamatan Wringin.
	d	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri	
2.7	**Kawasan Pariwisata**		
	a	penyusunan rencana pembangunan obyek daya tarik wisata	1. Kecamatan Bondowoso 2. Kecamatan Cermee 3. Kecamatan Grujugan 4. Kecamatan Ijen 5. Kecamatan Klabang 6. Kecamatan Pakem 7. Kecamatan Prajekan 8. Kecamatan Taman Krocok 9. Kecamatan Tegalampel 10. Kecamatan Tlogosari 11. Kecamatan Wonosari 12. Kecamatan Wringin
	b	pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana obyek daya tarik wisata	
	c	pembangunan prasarana kereta gantung (*cable car*) Kawasan Ijen	
	d	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pariwisata	
	e.	peningkatan status kawasan pariwisata Ijen Raung sebagai penunjang Kawasan Ijen Global Geopark	Kecamatan Ijen

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	f.	pengembangan Museum Kereta Api Bondowoso	Kecamatan Bondowoso
2.8	**Kawasan Permukiman**		
	a	rencana pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	seluruh kecamatan
	b	pembangunan dan operasional tempat khusus parkir (bongkar muat barang)	Kecamatan Bondowoso
	c	rencana pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Botolinggo; c. Kecamatan Cermee; d. Kecamatan Curahdami; e. Kecamatan Grujugan; f. Kecamatan Ijen; g. Kec. Jambesari Darus Sholah; h. Kecamatan Klabang; i. Kecamatan Maesan; j. Kecamatan Pakem; k. Kecamatan Prajekan; l. Kecamatan Pujer; m. Kecamatan Sukosari; n. Kecamatan Sumberwringin; o. Kecamatan Taman Krocok; p. Kecamatan Tamanan; q. Kecamatan Tapen; r. Kecamatan Tegalampel; s. Kecamatan Tenggarang; t. Kecamatan Tlogosari; u. Kecamatan Wonosari; dan v. Kecamatan Wringin.
	e.	penyusunan rencana induk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Bondowoso
	f.	pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kabupaten Bondowoso

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	g	pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kabupaten Bondowoso
	h	rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kabupaten Bondowoso
	i	relokasi permukiman di Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Bondowoso
	j	penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pelayanan permukiman	Kabupaten Bondowoso
2.11	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**		
	a.	pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertahanan Keamanan	a. Kecamatan Binakal; b. Kecamatan Bondowoso; c. Kecamatan Cermee; d. Kecamatan Curahdami; e. Kecamatan Grujugan; f. Kecamatan Klabang; g. Kecamatan Maesan; h. Kecamatan Prajekan; i. Kecamatan Pujer; j. Kecamatan Sukosari; k. Kecamatan Taman Krocok; l. Kecamatan Tamanan; m. Kecamatan Tapen; n. Kecamatan Tegalampel; o. Kecamatan Tenggarang; p. Kecamatan Tlogosari; q. Kecamatan Wonosari; dan r. Kecamatan Wringin.
C	**ARAHAN PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**		
I	**Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**		
1.1.	**Kawasan Strategis Agropolitan Ijen-Raung**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Ijen-Raung;	Kecamatan Sukosari dan Sumberwringin
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Kawasan Agropolitan Ijen-Raung.	Kecamatan Sukosari dan Sumberwringin

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Agropolitan Ijen-Raung.	Kecamatan Sukosari dan Sumberwringin
1.2.	**Kawasan Strategis Agropolitan Argopuro**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Argopuro	Kecamatan Pakem
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Kawasan Agropolitan Argopuro.	Kecamatan Pakem
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Agropolitan Argopuro	Kecamatan Pakem
1.3.	**Kawasan Strategis Pariwisata Ijen**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Pariwisata Ijen	Kecamatan Ijen
	b.	Pembangunan prasarana dan pengembangan Pariwisata Ijen	Kecamatan Ijen
	c.	Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pariwisata Ijen	Kecamatan Ijen
1.4.	**Kawasan Strategis Pariwisata Solor**		
	a.	Penyusunan rencana Pengembangan Pariwisata Solor	Kecamatan Cermee
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Pariwisata Solor	Kecamatan Cermee
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pariwisata Solor	Kecamatan Cermee
1.5.	**Kawasan Strategis Industri Grujugan**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Industri Grujugan	Kecamatan Grujugan, Maesan
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Industri Grujugan	Kecamatan Grujugan, Maesan

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Industri Grujugan	Kecamatan Grujugan, Maesan
1.6.	**Kawasan Strategis Industri Prajekan**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Industri Prajekan	Kecamatan Prajekan, Botolinggo, Klabang
	b	Pengembangan Industri Gula Bondowoso	Kecamatan Prajekan
	c	pembangunan prasarana dan pengembangan Industri Prajekan	Kecamatan Prajekan, Botolinggo, Klabang
	d	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Industri Prajekan	Kecamatan Prajekan, Botolinggo, Klabang
1.7.	**Kawasan Perdagangan Tamanan - Maesan**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perdagangan Tamana - Maesan	Kecamatan Tamanan dan Maesan
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Kawasan Perdagangan Tamana - Maesan	Kecamatan Tamanan dan Maesan
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangKawasan Perdagangan Tamana - Maesan	Kecamatan Tamanan dan Maesan
II	**Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**		
2.1.	**Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Bondowoso	Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah,Tegalampel, Tenggarang
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Kawasan Perkotaan Bondowoso	Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah,Tegalampel, Tenggarang

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Bondowoso	Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah,Tegalampel, Tenggarang
2.2.	**Kawasan Strategis Megalitikum Wringin**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Megalitikum Wringin	Kecamatan Wringin
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Megalitikum Wringin	Kecamatan Wringin
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Megalitikum Wringin	Kecamatan Wringin
2.3.	**Kawasan Megalitikum Maskuning**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Megalitikum Maskuning	Kecamatan Pujer dan Tlogosari
	b.	pembangunan prasarana dan pengembangan Megalitikum Maskuning	Kecamatan Pujer dan Tlogosari
	c.	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Megalitikum Maskuning	Kecamatan Pujer dan Tlogosari
III	**Perwujudan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**		
3.1.	**Kawasan Hulu DAS Sampean**		
	a.	penyusunan rencana pengembangan Hulu DAS Sampean	Kecamatan Maesan
	b	pembangunan prasarana dan pengembangan Hulu DAS Sampean	Kecamatan Maesan
	c	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hulu DAS Sampean	Kecamatan Maesan
3.2.	**Kawasan Hulu DAS Deluwang**		

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI
	a.	penyusunan rencana penataan Hulu DAS Deluwang	Kecamatan Pakem
	b	kegiatan konservasi Hulu DAS Deluwang	Kecamatan Pakem
	c	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hulu DAS Deluwang	Kecamatan Pakem
3.3.	**Kawasan Hulu DAS Bluncong**		
	a.	penyusunan rencana penataan Hulu DAS Bluncong	Kecamatan Klabang dan Taman Krocok
	b	kegiatan konservasi Hulu DAS Bluncong	Kecamatan Klabang dan Taman Krocok
	c	pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hulu DAS Bluncong	Kecamatan Klabang dan Taman Krocok

Sumber: BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2.1.2.2 Potensi Sumber Daya Alam

Dalam rangka pengelolaan potensi sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Bondowoso diarahkan pengembangan sektor-sektor pengelolaan sesuai dengan karakteristik wilayah yang sejalan dengan arahan dalam RTRW Kabupaten, khususnya berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung, kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan energi, serta pariwisata.

1. Kawasan Lindung

   Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. RTRW mengamanatkan perlunya memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya agar tidak punah sehingga memberi manfaat bagi

keberlanjutan kehidupan, dengan menjaga keberadaan Kawasan Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa agar tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso berdasarkan jenis kawasan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.7 Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
A.	**Badan Air**	297	Kec. Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Wonosari, dan Wringin
B.	**Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya**		
	Hutan Lindung	30.133	Kec. Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Ijen, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Sumberwringin, Taman Krocok, dan Tlogosari.
C.	**Konservasi**		
1.	**Kawasan Suaka Alam**		
a.	**Cagar Alam**	946	
1)	Cagar Alam Ceding		Kec. Ijen
2)	Cagar Alam Kawah Ijen-Merapi-Ungup-ungup		Kec. Ijen
3)	Cagar Alam Pancur Ijen I		Kec. Botolinggo
4)	Cagar Alam Pancur Ijen II		Kec. Botolinggo
5)	Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateau		Kec. Pakem
b.	**Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Iyang**	1.231	Kec. Maesan dan Kec. Pakem
2.	**Kawasan Pelestarian Alam**		
	Taman Wisata Alam Kawah Ijen	154	Kec. Ijen
D.	**Kawasan Cagar Budaya Situs Megalitikum Pekauman**		
	Batu Dakon		Kec. Grujugan
	Batu Kenong		Kec. Grujugan
	Dolmen		Kec. Grujugan
	Kubur Bilik		Kec. Grujugan
	Menhir		Kec. Grujugan

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
	Sarkofagus		Kec. Grujugan dan Kec. Maesan

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 29.354 Ha, terdapat di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Sempol, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari dan Wringin. Pada umumnya jenis vegetasi hutan produksi yang dikelola Perhutani Bondowoso adalah kelas tanaman Pinus, Jati, Sengon, Mahoni dan beberapa jenis tanaman lainnya. Peta Kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi di Kabupaten Bondowoso sebagaimana gambar berikut.

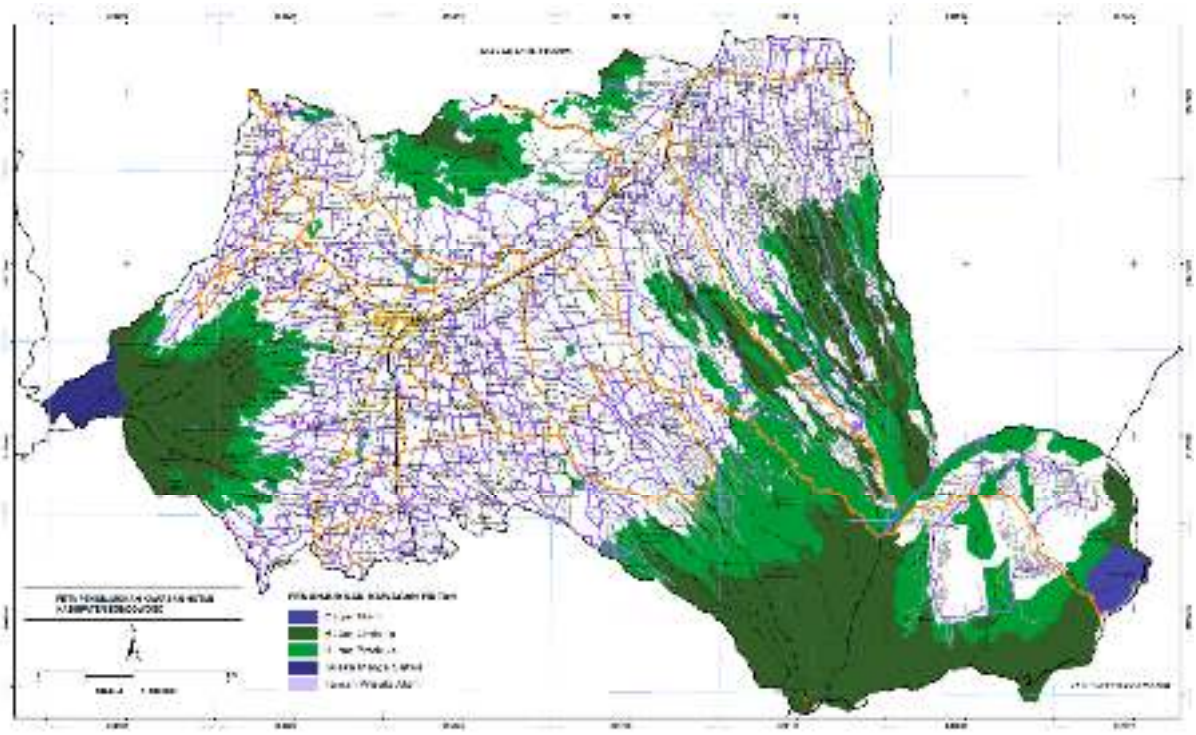

Gambar 2.7 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bondowoso

3. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat atau hutan rakyat dengan luas kurang lebih 13.918 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus delapan belas hektar), terdapat di Kecamatan Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Ijen, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari dan Wringin. Jenis vegetasi yang dibudidayakan di hutan rakyat umumnya adalah Sengon, Gamelina, Jabon, Balsa, Mahoni, Jati, Bambu dan beberapa jenis lainnya.

4. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 56.596 Ha, terdapat di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari dan Wringin. Sebagian dari kawasan tanaman pangan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 44.631 Ha.

Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 842 Ha, terdapat di Kecamatan Botolinggo, Cermee, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari dan Wonosari. Sedangkan Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 8.938 Ha, terdapat di Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Cermee, Kecamatan Ijen dan Sumberwringin.

Kawasan pertanian sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2024–2044 tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang, sedangkan arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berikut.

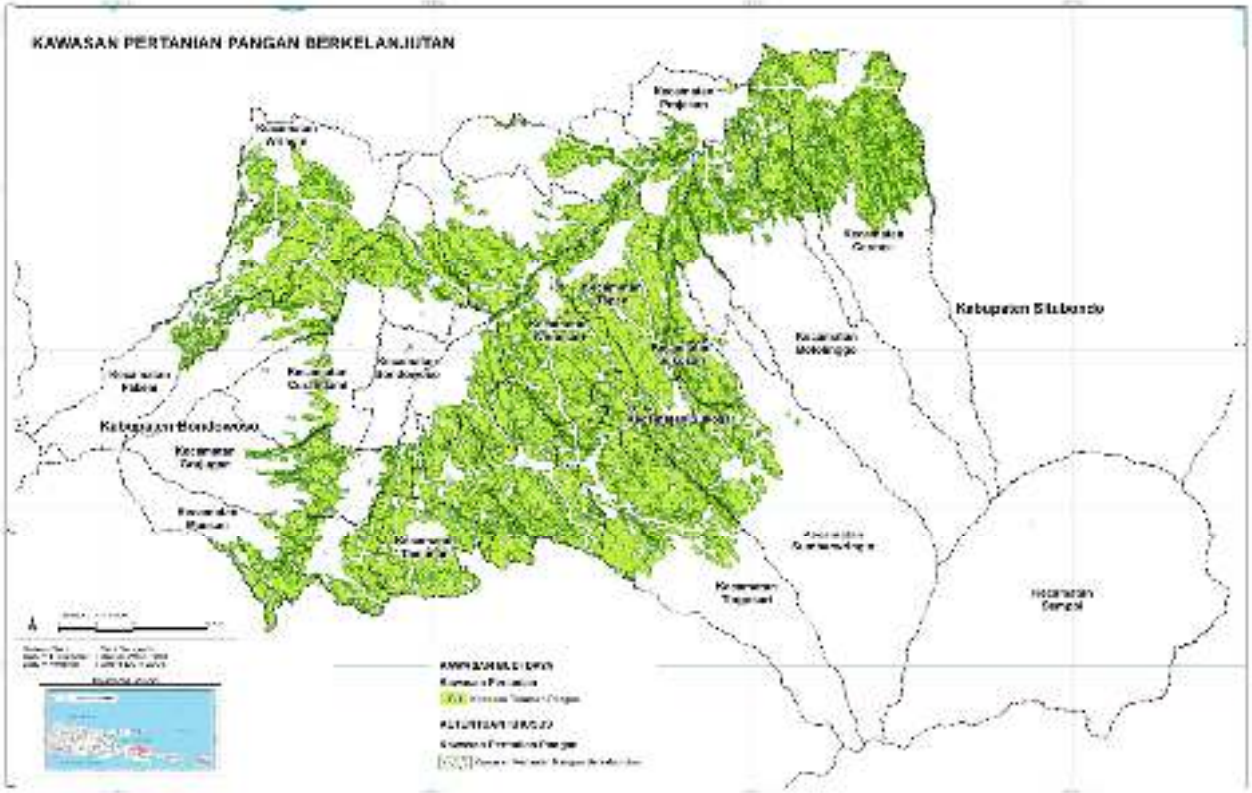

Gambar 2.8 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

5. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi yang ada di Kabupaten Bondowoso berupa kawasan pertambangan mineral berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 26Ha (dua puluh enam hektar), terdapat di Kecamatan Cermee, Curahdami, Grujugan, Ijen, Klabang, Maesan, Pakem, Tapen dan Wringin. Peta potensi pertambangan dan sumber daya bumi disajikan pada gambar berikut.

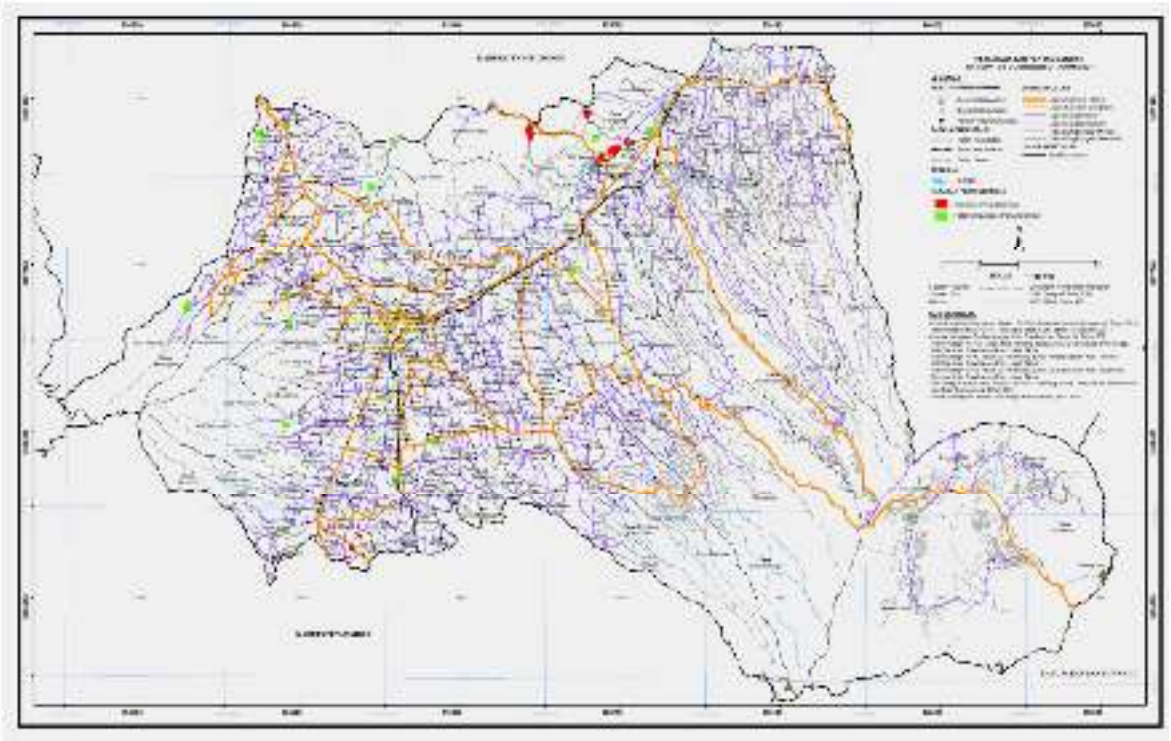

Gambar 2.9 Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bondowoso

Jenis kegiatan pertambangan yang sudah memiliki embrio dan berpotensi untuk berkembang di Kabupaten Bondowoso, antara lain:

a. Pertambangan mineral, meliputi tambang pasir di Kecamatan Klabang, Maesan dan Ijen; tambang batu kali di Kecamatan Binakal; tambang batu belah di Kecamatan Tlogosari, Binakal dan Wringin; tambang batu hias atau poles di Kecamatan Grujugan, Prajekan, Maesan, Pakem, dan Wringin; tambang batu tras di Kecamatan Wringin, Klabang, Botolinggo, Prajekan dan Cermee; tambang batu gamping, semen dan marmer di Kecamatan Prajekan, tambang kalsit di Kecamatan Klabang; dan tambang belerang dan gipsum di Kecamatan Ijen.
b. Pertambangan minyak dan gas bumi berpotensi ditemukan di Kecamatan Klabang, Pakem, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, dan Kecamatan Wringin sesuai peta blok wilayah kerja pertambangan migas Selat Madura.

c. Pemanfaatan panas bumi telah dikembangkan sebagai PLTP Blawan-Ijen di Kawasan Kawah Wurung Kecamatan Ijen dan berpotensi ditingkatkan kapasitasnya. Selain itu terdapat potensi di Kawasan Ijen–Raung Kecamatan Sumberwringin, dan di Kawasan Pegunungan Hyang di Kecamatan Binakal, Curahdami, Grujugan, Maesan, dan Pakem.

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata berupa lokasi yang memiliki nilai estetis bentang alam dan suasana alam sehingga menarik untuk kegiatan wisata, dikembangkan berdasarkan pengelompokan tematik dan zonasinya meliputi:

a. Kawasan Pariwisata Ijen Raung Geopark meliputi:
   1. Kawah Ijen di Kecamatan Ijen;
   2. Kawah Wurung di Kecamatan Ijen;
   3. Kalipait di Kecamatan Ijen;
   4. Air Terjun Blawan di Kecamatan Ijen;
   5. Pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin dan Tlogosari;
   6. Puncak Megasari Paralayang di Kecamatan Ijen;
   7. Pemandian Air Panas Blawan di Kecamatan Ijen; dan
   8. Agrowisata Kopi di Kecamatan Ijen.
b. Kawasan Pariwisata Solor meliputi:
   1. Batu So'on Solor di Kecamatan Cermee;
   2. Arung Jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok;
   3. Desa Wisata Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari;
   4. Desa Wisata Budaya Blimbing di Kecamatan Klabang; dan
   5. Padepokan Seni Gema Buana di Kecamatan Prajekan.
c. Kawasan Pariwisata Argopuro meliputi:
   1. Pemandangan Alam Arak-Arak di Kecamatan Wringin; dan
   2. Air Terjun Tancak Kembar di Kecamatan Pakem.

d. Kawasan Pariwisata Sejarah meliputi:
   1. Pemandian Alam Tasnan di Kecamatan Grujugan;
   2. Wisata Religi Makam Ki Ronggo di Kecamatan Bondowoso; dan
   3. Museum Kereta Api Bondowoso di Kecamatan Bondowoso.

Peta Kawasan pariwisata di Kabupaten Bondowoso sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

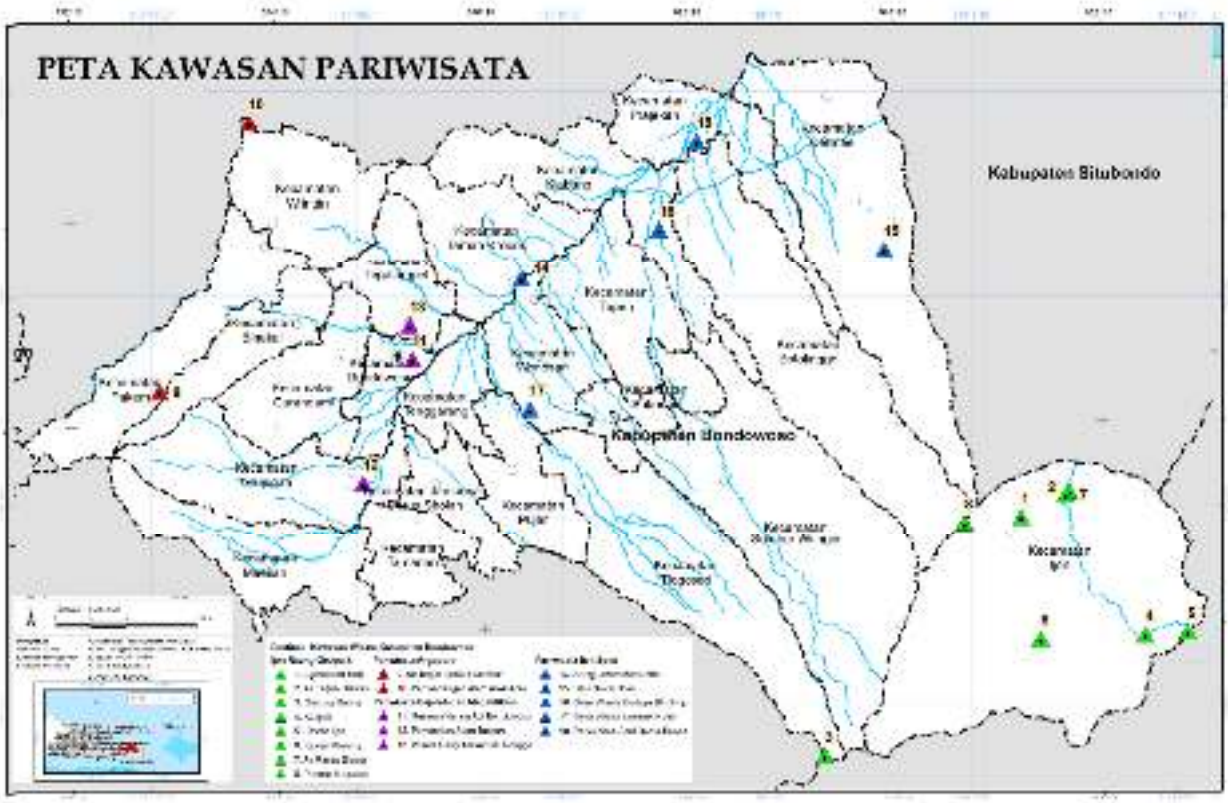

Gambar 2.10 Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso

Selain obyek daya tarik wisata tersebut diatas, terdapat pula potensi daya tarik wisata yang dapat direvitalisasi dan dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata unggulan, diantaranya:

a. Kawasan wisata Rekreasi Alun-alun Bondowoso (Raden Bagus Assra Ki Ronggo) sebagai ruang terbuka hijau Taman Kota di Kecamatan Bondowoso.
b. Kawasan wisata sejarah megalitikum meliputi: Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB) di Kecamatan Grujugan, dan situs-situs megalitikum lainnya yang tersebar di Kecamatan Bondowoso,

Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Prajekan, Pujer, Tamanan, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin, Situs Gua Buto di Kecamatan Cermee.

c. Kawasan Sentra kerajinan kuningan Desa Cindogo di Kecamatan Tapen, Sentra Bati di Kecamatan Maesan dan Tamanan.
d. Kawasan wisata air Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen.
e. Kawasan wisata Goa Stalagtit Blawan di kecamatan Ijen, Hutan Pelangi di Kecamatan Sumberwringin, dan Air Terjun Puloagung di Kecamatan Sumberwringin.
f. Kawasan wisata minat khusus meliputi: pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin, panjat tebing alam Patirana di Kecamatan Grujugan, dan pendakian Gunung Piramid dan Pegunungan Argopuro.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan ekosistem untuk mempertahankan kesehatan organisme dan produktivitasnya, serta beradaptasi dan memperbarui diri. Dalam konteks ini, daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Pelestarian daya dukung lingkungan melibatkan upaya perlindungan terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, sehingga lingkungan tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk menentukan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Bondowoso, perlu diketahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya yang ada, yang nantinya akan digunakan oleh penduduk dalam kelangsungan hidup mereka.

Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam menentukan penggunaan ruang yang sesuai. Oleh karena itu, penentuan daya dukung lingkungan dan daya tampung di Kabupaten

Bondowoso perlu memperhatikan kondisi dan karakteristik sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

A. Status Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Status daya dukung air dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Perhitungan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

1. Daya Dukung Air

Perhitungan ketersediaan air (*supply*) menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Nomor 17 Tahun 2009 dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \sum(ci\ x\ Ai)x\ 1/\sum Ai$$

$$R = \sum Ri/m$$

$$SA = 10\ x\ C\ x\ R\ x\ A$$

Keterangan:

SA : Ketersediaan air (m^3/tahun)
C : Koefisien limpasan tertimbang
Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan
Ai : Luas penggunaan lahan I (ha)
R : Rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)
Ri : Curah Hujan tahunan pada stasiun i
m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan
A : Luas wilayah (ha)
10 : Faktor konversi dari mm menjadi m^3

Berdasarkan perhitungan maka nilai Koefisien Tertimbang Penutup Lahan (C) Kabupaten Bondowoso adalah :

Jumlah (Ci x Ai) / Jumlah Ai = 43.883,63 / 156.010,00

= 0,281

Berikut adalah tabel perhitungan koefisien limpasan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.

Tabel 2.8 Perhitungan Koefisien Limpasan Kabupaten Bondowoso

No	Penutup Lahan	Luas Lahan (Ai) (Ha)	Koef. Limpasan (Ci)	(Ci x Ai)
1	Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	341,82	0,7	239,27
2	Bangunan Non Permukiman Lain	9,79	0,7	6,85
3	Bangunan Permukiman Desa (Bersosiasi dengan Vegetasi Pekarangan)	7897,32	0,7	5528,12
4	Bangunan Permukiman Kota	1703,94	0,7	1192,76
5	Danau/Telaga Alami	25,12	0,2	5,02
6	Hamparan Lahar/Lava	757,76	0,3	227,33
7	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	14.497,15	0,2	2899,43
8	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	25.556,51	0,2	5111,30
9	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Rendah	9.151,62	0,2	1830,32
10	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	2.267,47	0,2	453,49
11	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Tinggi	1.534,50	0,2	306,90
12	Hutan Rakyat	3420,06	0,2	684,01
13	Hutan Tanaman	5027,82	0,2	1005,56
14	Kebun Campuran	10312,21	0,2	2062,44
15	Ladang/Tegalan dengan Pakowija	17311,32	0,3	5193,40
16	Ladang/Tegalan Holtikultura	3.919,30	0,3	1175,79
17	Lahan Terbuka Lain	755,65	0,1	75,57
18	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (SIRTU)	22,82	0,3	6,85
19	Perkebunan Karet	114,65	0,2	22,93
20	Perkebunan Lain	7.112,59	0,2	1422,52
21	Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	31.477,28	0,3	9443,18
22	Sawah dengan Padi Terus Menerus	4,22	0,3	1,26
23	Semak	6.548,43	0,4	2619,37
24	Semak Belukar	5.609,01	0,4	2243,61
25	Sungai	139,87	0,2	27,97
26	Tanaman Semusim Lahan Kering Lain	491,76	0,2	98,35
Total		**156.010,00**		**43883,63**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Tahun 2019

2. Analisis Ketersediaan Air (SA)

Berdasarkan rumus matematis untuk menghitung Ketersediaan Air (SA), sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 17 Tahun 2009, tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, maka nilai (SA) untuk Kabupaten Bondowoso adalah :

SA =10 x C x R x A

SA = 10 x 0,281 x 3.599 x 156.010,00

SA = 1.579.371.767 m3/tahun

Nilai ketersediaan air (SA) hasil perhitungan tersebut diatas merupakan nilai maksimum ketersediaan air untuk seluruh Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 (tahun perhitungan), untuk melihat sebaran secara rinci mengenai ketersediaan air maka dilakukan analisis spasial berbasis SIG yang memasukkan nilai-nilai pada parameter perhitungan ketersediaan air didalam tabel atribut yang digunakan. Hasil dari analisis spasial ini adalah berupa Peta Ketersediaan Air Kabupaten Bondowoso yang didalamnya menggambarkan kelas ketersediaan air di Kabupaten Bondowoso. Dengan analisis spasial ini maka kita dapat melihat secara rinci distribusi ketersediaan air di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso berdasarkan masing- masing luas dari penutup lahan. Nilai ketersediaan air selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan 5 kelas. Secara rinci pembagian kelas ketersediaan air di Kabupaten Bondowoso disajikan pada gambar dan peta berikut ini.

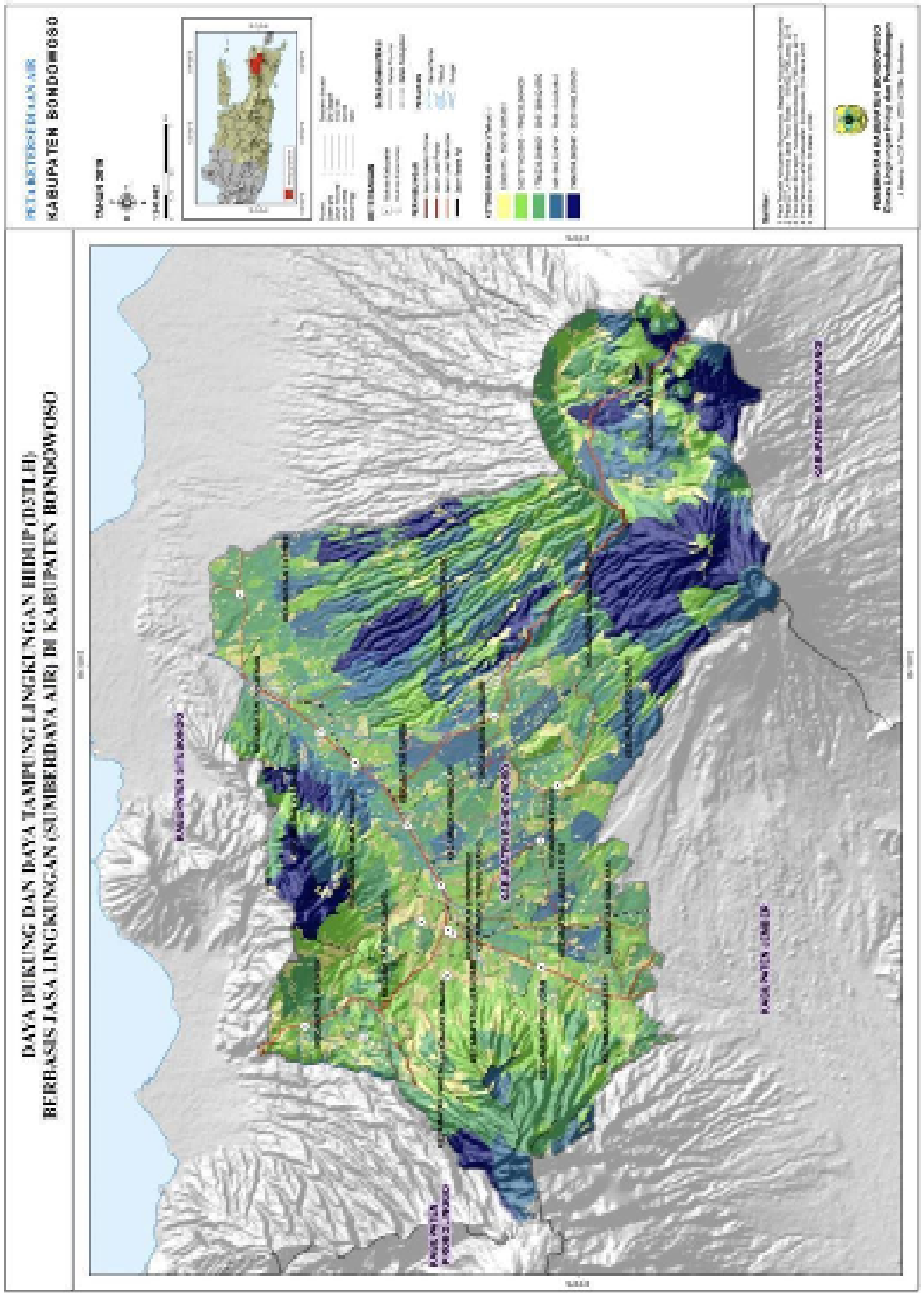

Gambar 2.11 Peta Ketersediaan Air

3. Analisis Status Daya Dukung Air

Berdasarkan data dan informasi dari analisis ketersediaan dan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Bondowoso, di dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam terutama sumber daya alam yang diharapkan dapat memberikan *supply* dan penyimpanan air tanah di Kabupaten Bondowoso maupun air permukaan, maka diperlukan suatu kebijakan, strategi dan rencana program yang terarah untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi yang surplus akan sumber daya air.

Tabel 2.9 Proyeksi Status Daya Dukung Air Kabupaten Bondowoso

No.	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air untuk Hidup Layak (m3/kapita/ Tahun)	Ketersediaan Air (SA) (m3/kapita /Tahun)	Kebutuhan Air (DA) (m3/kapita/Tahun)	Status Daya Dukung Air
1	2025	798.067	1000	1.579.371.767	798.066.652	Surplus
2	2026	801.818	1000	1.579.371.767	801.817.565	Surplus
3	2027	805.586	1000	1.579.371.767	805.586.108	Surplus
4	2028	821.698	1000	1.579.371.767	821.697.720	Surplus
5	2029	838.132	1000	1.579.371.767	838.131.674	Surplus
6	2030	854.894	1000	1.579.371.767	854.894.308	Surplus

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2024

B. Status Daya Dukung Lahan Pertanian

Perhitungan ketersediaan lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi tiap jenis komoditi (Pi) dan harga beras di tingkat produsen (Hb), harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen (Hi), dan produktivitas beras di Kabupaten Bondowoso (Ptvb).

Perhitungan daya dukung lahan pertanian dilakukan dengan cara membagi ketersediaan lahan pertanian dan kebutuhan lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2025, diketahui beberapa jenis produktivitas komoditas yang di wilayah tersebut. Komoditas tersebut antara lain adalah sayur-sayuran, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Secara rinci komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Produksi, Luas Panen dan Nilai Tanaman Sayuran Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Tanaman Sayuran	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
Sayuran/Vegetables:				
1	Bawang Merah/Shallots	32	279.100	12.199.461.000
2	Cabai Besar/Chili/Big Chili	13	74.300	2.741.670.000
3	Cabai Keriting	27	151.700	6.068.000.000
4	Cabai Rawit	945	5.659.300	365.024.850.000
5	Tomat/Tomato	65	776.000	6.518.400.000

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.11 Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Tanaman Pangan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kg)	Produktivitas
1	Jagung	30.666	166.046.000	5,41
2	Kedelai	47,3	72.000	1,52
3	Padi	75.250	464.766.000	6,18
4	Kacang Tanah	35	485.000	13,86
5	Kacang Hijau	16	135.570	8,47
6	Ubi Kayu	3.527	80.334.000	22,78
7	Ubi Jalar	69	809.000	11,72

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.12 Produksi, Luas Panen, dan Nilai Tanaman Biofarmaka Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Tanaman Biofarmaka	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Jahe/Ginger	367.950	626.002	14.398.046.000
2	Kencur/East Indian Galangal	17.150	15.772	473.160.000
3	Kunyit/Turmeric	6.618.000	17.415.950	174.159.500.000
4	Laos/Lengkuas/Galanga	78.680	246.586	1.972.688.000
5	Temulawak	104.500	287.745	4.316.175.000

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.13 Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kg)
1	Tebu	6.382,76	470.091.350
2	Kopi Robusta	18.885,38	8.439.230
3	Tembakau	8.424,00	10.737.390
4	Kelapa	4.233,56	3.097.580

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.14 Produksi dan Luas Panen Tanaman Hias Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Tanaman Hias	Luas Panen (Ha)	Produksi (Tangkai)
1	Krisan/Chrysantemum	37	84
2	Mawar/Rose	3.002	142.579
3	Melati	796	534

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.15 Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Buah-Buahan	Produksi (Kg)
1	Durian	10.921.400
2	Mangga	77.733.800
3	Pepaya	3.252.400
4	Pisang	45.767.200
5	Rambutan	3.527.000

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.16 Populasi Hewan Ternak Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi Perah	510
2	Sapi Potong	145.577
3	Kuda	210
4	Kambing	63.668
5	Domba	11,996
6	Kelinci	414
7	Ayam Buras	331.309
8	Ayam Petelur	680.082
9	Ayam Pedaging	3.280.714
10	Itik	57.473

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.17 Populasi Telur Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Produksi Telur	Jumlah (ekor)
1	Ayam Buras	151.772
2	Ayam Ras	2.365.109
3	Itik	359.156

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.18 Produksi dan Perikanan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

NO	Jenis Perikanan	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Kolam / Resevoir	971.015.000	20.686.282.000
2	Waduk / Water Resevoir	31.200	611.507.000
3	Sungai / River	55.300	1.184.866.000
4	Lahan Bebas	27.100	586.306.000

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.19 Produktivitas Kehutanan Tahun 2024

	Jenis Komoditas	Satuan	Produksi	Nilai (Rp)
1	PRODUKSI KAYU			
2	Jati	m3	4.897,70	13.713.560.000
3	Sengon	m3	55.344,22	47.042.595.500
4	Gmelina	m3	4.121,30	-
5	Mindi	m3	10,50	-
6	Mahoni	m3	157,50	-
7	Lain Lain	m3	4.208,92	-
8	PRODUKSI BUKAN KAYU			
9	Bambu	batang	273.472,00	6.836.800.000
10	Madu	liter	3.051,50	289.892.500
11	Empon-empon	ton	-	-
12	PRODUKSI PERUM PERHUTANI			
13	PRODUKSI KAYU			
14	Jati	m3	-	-
15	Pinus	m3	-	-
16	Mahoni	m3	-	-
17	Sonokeling	m3	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan data tabel perhitungan tersebut, jumlah keseluruhan nilai komoditas adalah Rp.15.407.703.998.480. Menurut data BPS, diketahui produktivitas beras adalah 61,76 kw/ha atau 6.176 kg/ha. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas dapat disimpulkan nilai ketersediaan dan kebutuhan lahan sebagai berikut:

- ketersediaan lahan (SL) adalah 249.477 ha
- kebutuhan lahan (DL) adalah 126.525 ha

Dengan demikian, maka diperoleh nilai daya dukung lahan pertanian (DDLp) > 1 sehingga belum terlampaui. Dari hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat produksi lahan yang masih mencukupi kebutuhan lahan pertanian penduduknya.

C. Status Daya Dukung Kecukupan Pangan

Analisis kecukupan pangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kecukupan kebutuhan pangan yang ada di daerah berdasarkan jumlah kalori yang dihasilkan oleh Kabupaten Bondowoso. Perhitungan jumlah kalori dilakukan dengan menghitung total produksi dikali jumlah kalori terkandung dalam bahan makanan. Jumlah total tersebut lalu dibagi dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh penduduk dalam setahun.

Tabel 2.20 Jumlah Kalori Tanaman Pangan

Tanaman Pangan	Jumlah Kalori Per 100 gram	Produksi (Kg)	Jumlah Kalori Total
Jagung	86	193.106.000	166.071.160.000
Kedelai	446	32.000	142.720.000
Beras	130	460.425.000	598.552.500.000
Kacang Tanah	567	165.000	935.550.000
Kacang Hijau	347	51.000	176.970.000
Ubi Kayu	160	48.964.000	78.342.400.000
Ubi Jalar	86	1.725.000	1.483.500.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.21 Jumlah Kalori Buah-Buahan

Buah-Buahan	Produksi (Kg)	Kalori Per Kg	Jumlah Kalori
Durian/Durian	106.550.000	3.670	391.038.500.000
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine	906.000	439	397.734.000
Mangga/Mango	795.113.000	600	477.067.800.000
Pepaya/Papaya	32.342.000	430	13.907.060.000
Pisang/Banana	488.982.000	960	469.422.720.000
Salak/Snakefruit	5.091.000	820	4.174.620.000
Alpukat/Avocado	53.749.000	1.600	85.998.400.000
Nangka/Cempedak	91.408.000	950	86.837.600.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2.22 Jumlah Kalori Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Berat/ekor (kg)	Kalori (kg)	Kalori Total
Sapi Perah	12	130	1.760	2.745.600
Sapi Potong	22.005	130	1.760	5.034.744.000
Kuda	126	120	1.479	22.362.480
Kambing	55.254	40	1.432	3.164.949.120
Domba	4.734	40	2.940	556.718.400
Kelinci	10.318	2	1.700	29.819.020
Ayam Buras	700.172	2	1.670	1.987.788.308
Ayam Petelur	247.900	2	1.670	703.788.100
Ayam Pedaging	2.387	2	1.670	7.972.580
Itik	68.765	2	3.370	347.607.075

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, Kabupaten Bondowoso menghasilkan kalori total sebesar 2.386.407.728.683 kalori per tahun. Sedangkan kebutuhan kalori penduduk Bondowoso dengan asumsi 1700 kal/hari selama setahun adalah 484.869.248.500 kalori. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa ketersediaan kalori yang dihasilkan lebih besar daripada kebutuhan kalori penduduk, sehingga masih mencukupi dari segi kecukupan kalori.

Perhitungan kecukupan beras dilakukan dengan menghitung total produksi tiap kecamatan menjadi ketersediaan beras. Jumlah total tersebut lalu dibagi dengan kebutuhan beras yang dibutuhkan oleh penduduk dalam setahun. Kebutuhan beras dihitung berdasarkan kebutuhan beras per kapita harian sebesar 0,22 kilogram. Berdasarkan selisihnya, kemudian diketahui apakah ketersediaan/daya dukung pangan tersebut mencukupi (belum melampaui) atau tidak cukup (terlampaui).

Tabel 2.23 Kecukupan Beras Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan	Ketersediaan Beras (Kg)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Beras Per Kapita (Kg)	Status Daya Dukung Pangan (Beras)
1	Maesan	22.600.000	49.312	3.995.751	Belum Terlampaui
2	Grujugan	21.818.000	38.271	3.101.099	Belum Terlampaui
3	Tamanan	22.759.000	39.413	3.193.635	Belum Terlampaui
4	Jambesari Darus Sholah	22.546.000	36.848	2.985.793	Belum Terlampaui
5	Pujer	43.019.000	41.268	3.343.946	Belum Terlampaui
6	Tlogosari	38.307.000	47.459	3.845.603	Belum Terlampaui
7	Sukosari	13.824.000	15.668	1.269.578	Belum Terlampaui
8	Sumber Wringin	22.199.000	35.622	2.886.451	Belum Terlampaui
9	Tapen	35.431.000	34.459	2.792.213	Belum Terlampaui
10	Wonosari	32.943.000	41.293	3.345.972	Belum Terlampaui
11	Tenggarang	26.677.000	44.310	3.590.439	Belum Terlampaui
12	Bondowoso	14.340.000	77.755	6.300.488	Belum Terlampaui
13	Curahdami	15.152.000	35.146	2.847.880	Belum Terlampaui
14	Binakal	12.846.000	17.436	1.412.839	Belum Terlampaui
15	Pakem	16.836.000	23.886	1.935.483	Belum Terlampaui
16	Wringin	18.677.000	41.183	3.337.058	Belum Terlampaui
17	Tegalampel	11.595.000	26.789	2.170.713	Belum Terlampaui
18	Taman Krocok	6.721.000	16.854	1.365.680	Belum Terlampaui
19	Klabang	23.225.000	18.926	1.533.574	Belum Terlampaui
20	Ijen	-	12.277	994.805	Terlampaui
21	Botolinggo	20.769.000	29.763	2.411.696	Belum Terlampaui
22	Prajekan	18.259.000	25.921	2.100.379	Belum Terlampaui
23	Cermee	33.337.000	47.052	3.812.624	Belum Terlampaui
	Kabupaten Bondowoso	**493.880.000**	**796.911**	**64.573.698**	**Belum Terlampaui**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso masih belum terlampaui dan ketersediaan berasnya sangat mencukupi kebutuhan secara domestik. Hanya ada satu kecamatan yang terlampaui daya dukung pangannya yaitu Kecamatan Ijen. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Ijen tidak tersedia data produktivitas beras sehingga ketersediaan berasnya nihil. Penduduk di Kecamatan Ijen mendapatkan pasokan berasnya dari wilayah lain. Sementara itu, apabila dilakukan proyeksi secara keseluruhan, seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso secara umum masih mampu mendukung kecukupan pangannya dari segi ketersediaan beras hingga tahun 2030.

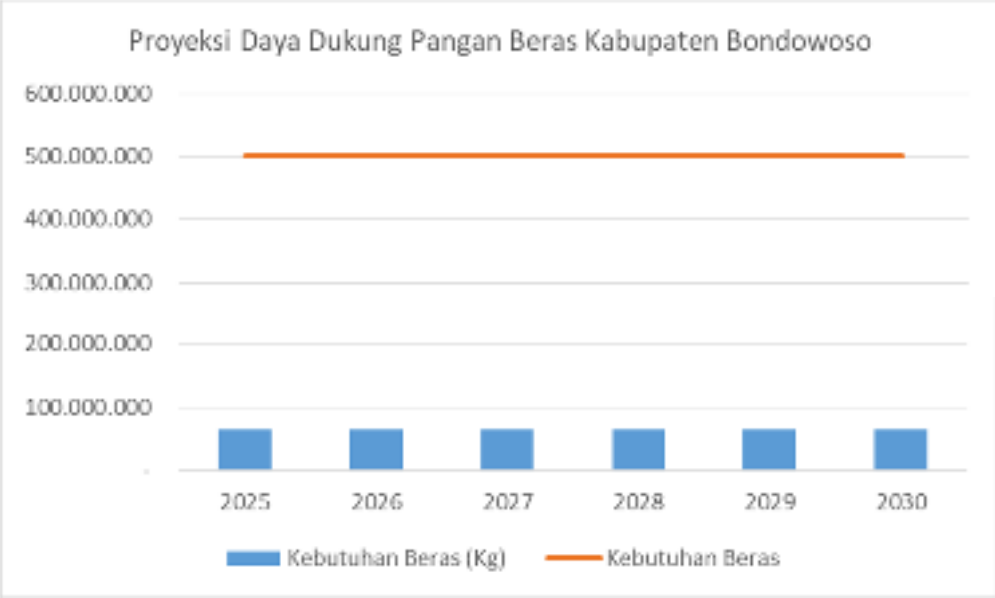

Gambar 2.12 Proyeksi Daya Dukung Pangan Beras Kabupaten Bondowoso

D. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Bondowoso

Analisis D3TLH berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Bondowoso dilakukan pada skala 1:50.000 menggunakan metode *Participatory Approaches and Expert Opinion*. Pengelompokan Jasa Lingkungan dilakukan berdasarkan klasifikasi *Millenium Ecosystem Assesment*, yang mengelompokkan 20 jenis Jasa Lingkungan ke dalam empat kelompok, yaitu Jasa Lingkungan penyedia, pengatur, pendukung dan budaya. Analisis ini menghasilkan nilai indeks serta sebaran luasan dari indeks D3TLH berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Bondowoso.

Deskripsi D3TLH berbasis Jasa Lingkungan dimaksudkan untuk melihat secara rinci mengenai distribusi luas lahan yang masuk kedalam kelas Jasa Lingkungan Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah, selain luas lahan pada masing- masing kelas Jasa Lingkungan yang dinyatakan dalam satuan Ha dan % (prosentase). Distribusi luas lahan jasa lingkungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Distribusi Luas Lahan Jasa Lingkungan

No	Jasa Lingkungan	Kode	Luas Jasa Lingkungan									
			SR		R		S		T		ST	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A. Jasa Penyedia												
1	Penyedia Pangan	P1	14.993,33	9,61	35.792,73	22,94	20.496,13	13,14	35.681,21	22,87	49.046,60	31,44
2	Penyedia Air Bersih	P2	12.967,02	8,31	16.207,87	10,39	30.080,18	19,28	42.045,94	26,95	54.708,99	35,07
3	Penyedia Serat/Fiber	P3	12.838,03	8,23	17.880,69	11,46	25.675,88	16,46	61.380,94	39,34	38.234,47	24,51
4	Penyedia Bahan Bakar	P4	9.061,52	5,81	40.411,16	25,90	35.170,84	22,54	35.362,70	22,67	36.003,78	23,08
5	Penyedia Sumberdaya Genetik	P5	4.701,99	3,01	24.090,05	15,44	7.807,79	5,00	66.095,19	42,37	53.314,97	34,17
B. Jasa Pengaturan												
6	Pengaturan Iklim	R1	4.325,00	2,77	13.377,95	8,58	14.557,37	9,33	60.799,60	38,97	62.950,07	40,35
7	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	R2	12.816,44	8,22	21.035,98	13,48	25.230,41	16,17	39.320,93	25,20	57.606,24	36,92

No	Jasa Lingkungan	Kode	Luas Jasa Lingkungan									
			SR		R		S		T		ST	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
8	Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	R3	15.135,87	9,73	10.002,89	6,41	56.106,65	36,06	25.038,61	16,09	49.725,97	31,96
9	Pengaturan Pemurnian Air	R4	10.202,81	6,54	20.090,00	12,88	11.957,32	7,66	32.117,77	20,59	81.642,10	52,33
10	Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	R5	17.400,07	11,15	14.977,01	9,60	49.113,67	31,48	39.749,73	25,48	34.769,52	22,29
11	Pemeliharaan Kualitas Udara	R6	1.546,53	0,99	11.601,21	7,44	17.592,41	11,28	59.223,67	37,96	66.046,17	42,33
12	Pengaturan Penyerbukan Alami	R7	6.315,54	4,05	13.760,75	8,82	20.750,22	13,30	69.682,36	44,67	45.501,12	29,17
13	Pengendalian Hama dan Penyakit	R8	8.647,31	5,54	20.742,46	13,30	6.332,55	4,06	71.956,19	46,12	48.331,50	30,98
C. Jasa Budaya												
14	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	C1	78.345,45	50,22	18.609,90	11,93	40.982,82	26,27	11.724,74	7,52	6.347,08	4,07

No	Jasa Lingkungan	Kode	Luas Jasa Lingkungan									
			SR		R		S		T		ST	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
15	Rekreasi and Ecotourism	C2	19.516,68	12,51	53.563,30	34,33	17.547,08	11,25	45.140,27	28,93	20.242,67	12,98
16	Estetika	C3	9.872,31	6,33	17.917,67	11,48	55.003,96	35,26	20.826,90	13,35	52.389,16	33,58
D. Jasa Pendukung												
17	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	D1	5.485,52	3,52	9.755,70	6,25	22.867,28	14,66	56.746,16	36,37	61.155,35	39,20
18	Pendukung Siklus Hara	D2	18.205,53	11,67	13.282,39	8,51	25.605,62	16,41	52.655,64	33,75	46.260,81	29,65
19	Pendukung Produksi Primer	D3	6.386,30	4,09	13.290,57	8,52	23.300,73	14,94	70.601,65	45,25	42.430,76	27,20
20	Pendukung Biodiversitas	D4	13.109,42	8,40	29.147,83	18,68	17.303,71	11,09	58.425,04	37,45	38.024,00	24,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Tahun 2019

Keterangan : Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST)

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencerminkan kemampuan suatu masyarakat atau daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya secara berkelanjutan, terjamin, dan berkualitas, serta mampu mengatasi perubahan kondisi atau krisis yang mungkin terjadi. IKP digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang dapat meningkatkan ketahanan pangan serta berperan peran penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks Pengentasan Kelaparan (*Goal* 2) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Perkembangan IKP Kabupaten Bondowoso bersifat fluktuatif tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif, hal ini menunjukkan kesiapan dan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menghadapi tantangan pangan serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bondowoso. Upaya meningkatkan ketahanan pangan yang telah dilakukan Pemerintah Bondowoso diantaranya dengan mengukur prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau yang dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Capaian ketahanan pangan Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25 Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	73.68	74.89	73.78	75.50	78.44
Kategori	tahan	tahan	tahan	tahan	sangat tahan
Prevalence of Undernourishment	13.64	13.60	16.87	12.72	14.49

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(PoU) Ketidakcukupan Konsumsi Pangan					
Kategori	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Analisis terhadap capaian tersebut mendapatkan rata-rata IKP Bondowoso sebesar 75,26 dengan kenaikan sebesar 1,19 poin sehingga digunakan sebagai acuan dalam perencanaan yang akan datang. Angka PoU di tahun 2024 sebesar 14.49 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 790.478 jiwa masih terdapat 114.556 jiwa yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Menurut Badan Pangan Nasional, angka PoU Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh kultur budaya masyarakat bukan karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi konsumsi. Salah satu upaya Pemerintah Bondowoso agar angka PoU menurun adalah dengan pemanfaatan data kerawanan pangan serta intervensi di daerah rawan pangan tersebut.

Penyediaan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan dilaksanakan melalui sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan, sesuai dengan potensi kawasan, sebagai upaya mencukupi kebutuhan air minum masyarakat dan bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cakupan rumah tangga yang menggunakan air minum sampai tahun 2024 mencapai tingkat 82,73%, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sebesar 73,54%. Perkembangan cakupan rumah tangga menggunakan air minum disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 26 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	73,54	78,16	80,59	80,75	82,73

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	37,76	38,79	41,87	42,30	40,75

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dapat menggunakan rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dibagi dengan jumlah rumah tangga perkotaan. Dengan asumsi sumber air perpipaan ke depannya lebih mudah untuk dilakukan intervensi secara peningkatan kualitas untuk menuju air siap minum perpipaan serta kualitas yang mudah dikontrol.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang

Berpijak pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 sebagai arahan dalam pengelolaan wilayah dalam pengendalian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya di Kabupaten Bondowoso. Semua kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat secara fisik, sosial dan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang.

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan secara kontinyu untuk meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil pengawasan pemanfaatan ruang, jumlah kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang relatif minim. Dalam lima tahun terakhir pelanggaran rencana tata ruang berkisar 0,1%, atau tingkat kesesuaian pemanfaatan

ruang rata-rata sebesar 99,9%. Bentuk ketidaksesuaian yang terjadi diantaranya bangunan di ruang sempadan, bangunan diatas badan air dan alih fungsi lahan pertanian tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

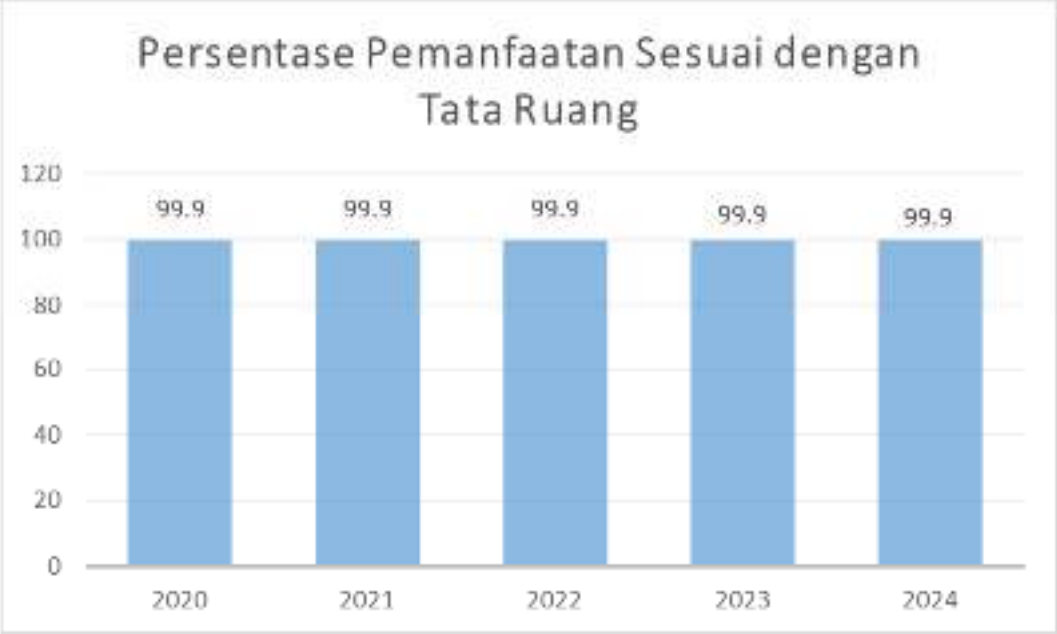

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 13 Persentase Pemanfaatan Sesuai dengan Tata Ruang

2.1.5.2 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, perdagangan, fasilitas sosial dan industri merupakan indikasi perkembangan suatu wilayah, dimana dari waktu ke waktu ruang terbangun semakin meningkat. Dengan tersedianya mekanisme KKPR, maka alih fungsi lahan dapat dipantau, dianalisis dan dikendalikan, agar tidak terlalu besar atau melebihi proporsi ideal untuk daya dukung wilayah yang optimal.

Berdasarkan rekomendasi tata ruang yang telah diterbitkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, maka diperoleh data alih fungsi lahan pertanian menjadi ruang terbangun berdasarkan rekomendasi tata ruang yang diterbitkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27 Alih Fungsi Lahan Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Bondowoso Sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Rekomendasi yang Diterbitkan	Luas Lahan Alih Fungsi	Luas Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	% Alih Fungsi Lahan
2020	62	18,18	51,474	0,04%
2021	43	21,04	51,474	0,04%
2022	67	27,31	51,474	0,05%
2023	53	130,93	51,474	0,25%
2024	58	29,06	56,596	0,05%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi didominasi kepentingan untuk pengembangan Kawasan Permukiman. Selain itu juga adanya perizinan untuk kegiatan pertambangan, peternakan dan perdagangan. Pada satu sisi kebutuhan lahan untuk investasi dan pembangunan ekonomi daerah diperlukan, namun di sisi lain alih fungsi lahan perlu dikendalikan dan dibatasi untuk menjaga luasan lahan pertanian yang harus dipertahankan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan.

2.1.5.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas lingkungan hidup suatu wilayah atau lokasi. Indeks ini mencakup berbagai aspek lingkungan, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor-faktor

lain yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Beberapa parameter yang menjadi komponen utama perhitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara keseluruhan capaian IKLH Kabupaten Bondowoso dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Data tersebut menggambarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024, terdapat variasi dalam capaian indeks tersebut. Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Bondowoso sebesar 71,06. Pada tahun 2021 IKLH mengalami penurunan menjadi 66,89. Pada tahun 2022 IKLH meningkat menjadi 68,97 dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 66,76 serta mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 68,21. **Nilai 68,21** ini termasuk dalam kategori SEDANG.

Fluktuasi nilai IKLH Kabupaten Bondowoso terjadi karena adanya perubahan formula dan parameter dalam perhitungan IKLH, namun

secara umum nilai IKLH sangat dibantu oleh capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) yang relatif sangat tinggi dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang rata-rata diatas 60. Sementara nilai Indeks Kualitas Air (IKA) relatif masih kurang yaitu dibawah 50.

Tantangan kedepan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan nilai IKLH maka yang perlu diungkit adalah komponen IKA dan IKL. Wilayah Kabupaten Bondowoso dengan karakteristik pegunungan merupakan daerah hulu yang seyogyanya memiliki kualitas air yang baik karena dekat dengan sumber-sumber air dan tutupan lahan yang baik karena iklim mikro yang sesuai untuk tumbuhnya vegetasi tanaman kayu. Maka pengawasan dan pencegahan pencemaran air dan gerakan penanaman tanaman kayu dan penghijauan menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai IKA dan IKL.

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sampah Tertangani (%)	60,4	60,0	60,96	81,3	66,00
2.	Rasio TPS per penduduk	1,3	1,26	0,84	1,26	1,12
3.	Pengangkutan sampah (unit)	17	17	24	27	28
4.	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (TPS) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	30,36
5.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	21,22
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	66,39	68,97	66,76	68,21

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	(IKLH)					
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	51,66	50	55,33	48,46	48,10
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,99	85,33	86,70	86,75	91,22
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	78,16	59,49	59,57	61,21	60,2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.5.4 Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan perairan dan sejauh mana air tersebut memenuhi standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan untuk berbagai kegunaan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan ekosistem akuatik. Metode perhitungan IKA dapat bervariasi tergantung pada standar yang digunakan. Beberapa indeks kualitas air yang umum digunakan melibatkan penentuan skor atau kategori berdasarkan nilai parameter yang diukur. Hasilnya dapat mengindikasikan apakah kualitas air termasuk dalam kategori baik, sedang, atau buruk. IKA memberikan informasi penting bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum untuk memahami dan memonitor kualitas air, serta untuk merancang langkah-langkah perlindungan dan pemulihan jika ditemukan masalah atau pencemaran. Pengukuran dan pemantauan kualitas air secara teratur sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan memastikan keamanan sumber air untuk berbagai keperluan manusia.

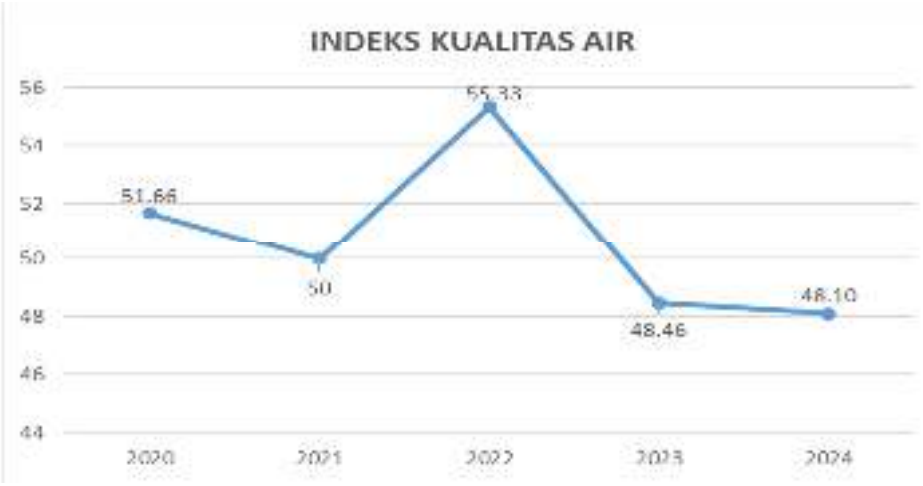

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 nilai IKA Kabupaten Bondowoso 51,66. Tahun 2021 IKA turun ke nilai 50,00. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan IKA menjadi 55,33. Namun pada tahun 2023 IKA kembali turun menjadi 48,46, dan berlanjut pada Tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 48,10 atau nilai KURANG.

Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas air antara lain kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah di selokan, sungai atau perairan lainnya serta penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam mengolah lahan pertanian. Air sungai yang tercemar terakumulasi pada sungai utama DAS yang menjadi titik pengukuran. Demikian pula dengan matinya sumber-sumber air di musim kemarau menjadikan debit air sungai menjadi berkurang dan konsentrasi zat pencemar air semakin tinggi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan IKA di wilayah Kabupaten Bondowoso diantaranya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat khususnya di saluran air atau sungai, meningkatkan pemahaman petani untuk lebih banyak menggunakan pupuk organik dan membatasi penggunaan

pupuk kimia agar tidak berlebihan, serta gerakan penghijauan di sekitar kawasan sumber mata air.

2.1.5.5 Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien di suatu daerah. IKU diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan, yaitu data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *manual passive.* Metode Perhitungan IKU dihitung menggunakan parameter pencemar SO2 dan NO2. Perhitungan IKU mengadopsi EU *Directives* yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU *Directives*.

Capaian IKU Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 adalah 80,99. Tahun 2021 meningkat menjadi 85,33 dan Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 86,7. Selanjutnya tahun, 2023 meningkat kembali menjadi 86,75 dan pada tahun 2024 IKU kembali naik menjadi 91,22 dengang kategori SANGAT BAIK.

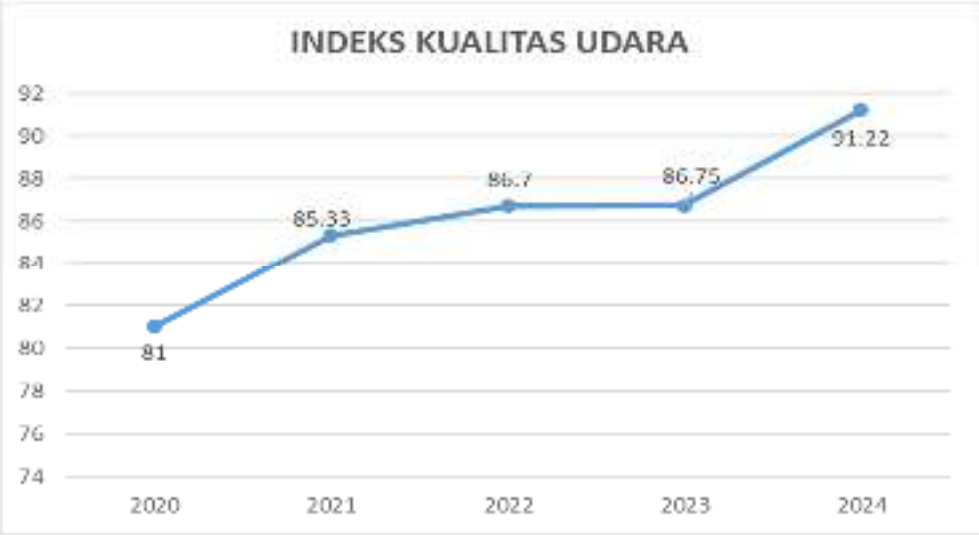

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 16 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Sehingga secara umum terjaganya nilai IKU Kabupaten Bondowoso dalam lima tahun menunjukkan tingkat kenyamanan wilayah Kabupaten sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Kondisi yang sudah baik ini perlu dipertahankan dengan memelihara dan meningkatkan luasan vegetasi penghijauan di kawasan permukiman khususnya perkotaan dan sekitar kawasan industri. Selain itu perlu diantisipasi dengan pengendalian pertumbuhan usaha industri yang berpotensi tinggi mencemari lingkungan, dan meningkatkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar ramah lingkungan dalam upaya mengurangi emisi gas.

2.1.5.6 Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lokasi pemantauan kualitas lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain (non hutan). Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan. Pengambilan data untuk penghitungan IKL dilakukan dengan menggunakan citra satelit. Adapun parameter tutupan lahan yang digunakan meliputi: wilayah tutupan hutan, wilayah tutupan belukar dan belukar diatas rawa, ruang terbuka hijau (RTH), tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi dan tutupan lahan di areal penggunaan lain.

Dengan demikian, analisis yang diperhitungkan dalam IKL Kabupaten Bondowoso adalah tutupan hutan dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari taman kota, sempadan sungai, media jalan, hutan kota dan pepohonan lainnya yang relevan, termasuk hutan rakyat dan perkebunan.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 17 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKL Kabupaten Bondowoso sebesar 78,16, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 59,49. Penurunan yang cukup drastis tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan formula dalam penghitungan IKL. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali pada nilai IKL menjadi 59,57, dan pada tahun 2023, IKL juga meningkat menjadi 61,21. Pada tahun 2024 nilai IKL mengalami penurunan menjadi 60,2 dengan kategori SEDANG.

Kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bondowoso relatif baik mengingat lebih dari 50% wilayah masih berupa hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan rakyat. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuatifnya nilai IKL adalah adanya lahan kritis dalam kawasan hutan negara yang belum tertangani dan adanya penebangan tanaman hutan produksi dan hutan rakyat pada saat pengukuran citra satelit. Untuk meningkatkan IKL di masa mendatang perlu gerakan penanaman tanaman kayu (usaha kehutanan) pada lahan-lahan masyarakat.

2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis dan bentang alam Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan serta tidak memiliki pesisir/pantai. Maka jenis bencana yang berpotensi terjadi adalah banjir bandang, banjir (genangan), longsor, angin kencang, letusan gunung berapi cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan gempa bumi, dengan sebaran sbb:

1. Bencana banjir dan banjir bandang

   Wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki kemiringan lereng yang sangat bervariasi, sehingga menyebabkan banyaknya lokasi-lokasi kawasan rawan bencana banjir, khususnya pada kawasan yang terdapat tanah gundul di kawasan hutan. Lokasi dengan kerawanan tinggi diantaranya bantaran sungai, kawasan alur sungai, alur pembuangan air kawah. Sedangkan kawasan rawan banjir (genangan) berada di daerah datar di kecamatan Bondowoso, Tamanan, Prajekan, dan Cermee.
2. Bencana longsor

   Kawasan rawan bencana longsor pada umumnya berhimpit dengan kawasan rawan banjir bandang, yaitu pada kawasan yang memiliki tingkat erosi tinggi karena struktur tanah yang rapuh dan kemiringan yang ekstrem bersudut lereng lebih dari 40% yang secara historis, geologis dan ekologis sering atau rawan mengalami longsor.

   Tingkat erosi wilayah Kabupaten Bondowoso yang sebagian besar berada dalam DAS Sampean berkisar antara 26.500 – 34.715 ton/ha/tahun atau 1,07 mm/tahun (hasil studi Universitas

Brawijaya, 1989-1990), yang berarti wilayah Kabupaten Bondowoso termasuk rawan terjadinya erosi dan longsor.

3. Bencana angin kencang

   Potensi terjadinya bencana angin kencang, angin puyuh dan angin puting beliung relatif merata di seluruh wilayah kabupaten pada 23 kecamatan.

4. Bencana cuaca ekstrem (hidrometeorologi)

   Potensi bencana badai/ cuaca ekstrim (hidrometeorologi) berada 13 kecamatan yaitu Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumberwringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Klabang, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

5. Bencana kekeringan

   Kejadian bencana kekeringan berpotensi terjadi di 7 (tujuh) wilayah kecamatan rawan kekeringan yaitu Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Binakal, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

6. Bencana kebakaran hutan/lahan

   Potensi bencana kebakaran hutan berada di 14 kecamatan yaitu Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Maesan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumberwringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Klabang.

7. Bencana gempa bumi

   Sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam kawasan patahan di palung jawa, maka potensi terjadinya gempa bumi di Kabupaten Bondowoso cenderung merata di semua wilayah kecamatan. Bahkan terdapat potensi kecil terjadinya likuifaksi di Kecamatan Prajekan.

Selain potensi bencana alam juga terdapat potensi bencana non alam yang meliputi bencana epidemi (penyekit tertentu), bencana polusi lingkungan dan kecelakaan industri, bencana konflik sosial, dan kebakaran permukiman.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso tergambarkan dalam peta berikut.

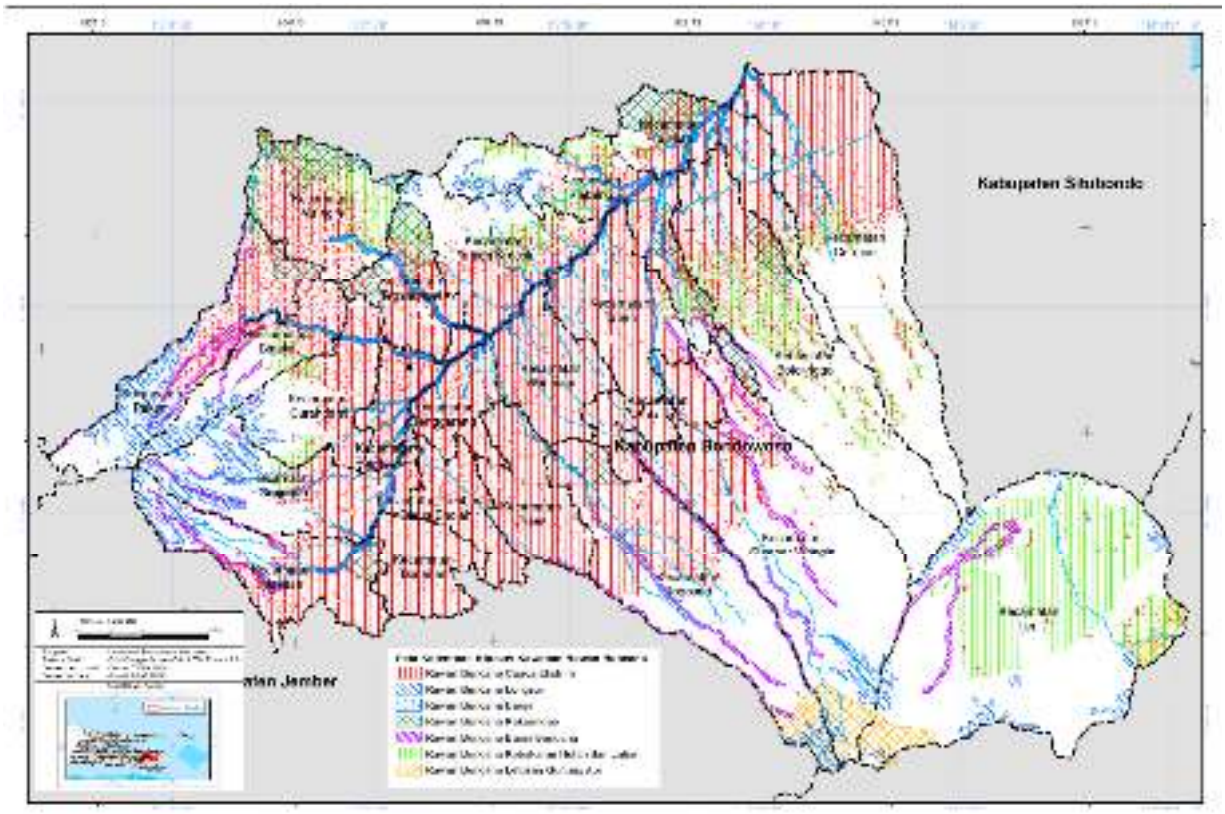

Gambar 2. 18 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata ruang WIlayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044 terdapat ketentuan khusus pengelolaan kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis bencana dan peruntukan kawasannnya.

2.1.6.2 Kerentanan Perubahan Iklim

Dengan pertambahan penduduk, dampak bencana alam akibat perubahan iklim akan semakin mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat, serta membuat upaya mengurangi kemiskinan semakin sulit. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah-daerah berisiko tinggi terhadap bencana banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air pada musim kemarau. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk membangun ketahanan dan pengamanan terhadap bencana banjir, ketersediaan air, dan sumber energi. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat.

Dalam upaya ini, pemahaman bahwa membangun ketahanan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar menjadi penting. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk menjaga kekuatan ekonomi masyarakat, menjamin keamanan pangan, dan melindungi mata pencaharian serta kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terdampak dan ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi, dan sistem penghidupan.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK). SIDIK menyajikan data dan informasi tentang kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Data yang dimanfaatkan berasal dari sumber seperti sosial-ekonomi, demografi, geografi, dan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang kerentanan perubahan

iklim yang dapat mendukung pembuatan kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim.

Sistem database SIDIK memberikan informasi indeks kerentanan dan risiko dampak yang divisualisaikan ke dalam peta serta ringkasannya, dengan formula secara nasional maupun khas daerah. Informasi tersebut sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.29 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Bondowoso

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Maesan	0.68361	0.542	2	2	2
Grujugan	0.74417	0.6259	2	2	2
Tamanan	0.75135	0.683	2	2	2
Jambesari Darus Sholah	0.64909	0.6835	3	3	3
Pujer	0.68399	0.6556	2	2	2
Tlogosari	0.67449	0.5306	2	2	2
Sukosari	0.75915	0.5554	2	2	2
Sumberwringin	0.67838	0.4495	1	1	1
Tapen	0.65940	0.5769	2	2	2
Wonosari	0.69154	0.6359	2	2	2
Tenggarang	0.73560	0.6769	2	2	2
Bondowoso	0.67053	0.5169	2	2	2
Curahdami	0.73681	0.5940	2	2	2
Binakal	0.64457	0.6464	3	3	3
Pakem	0.58784	0.6812	3	3	3
Wringin	0.74493	0.5907	2	2	2
Tegalampel	0.73139	0.5875	2	2	2
Taman Krocok	0.60909	0.4984	4	4	4
Klabang	0.63330	0.5254	4	4	4
Ijen	0.64151	0.5168	4	4	4
Botolinggo	0.55085	0.5051	4	4	4
Prajekan	0.73653	0.4999	1	1	1
Cermee	0.67355	0.5425	2	2	2

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan kondisi kerentanan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sumberwringin dan Prajekan memiliki tingkat kerentanan yang rendah (1). Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan ini termasuk dalam kategori "tidak rentan" terhadap perubahan iklim;
2. Kecamatan Maesan, Grujugan, Tamanan, Pujer, Tlogosari, Sukosari, Tapen, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso, Curahdami, dan Cermee memiliki tingkat kerentanan yang sedang (2-3). Ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan ini termasuk dalam kategori "agak rentan" hingga "cukup rentan" terhadap perubahan iklim;
3. Kecamatan Taman Krocok, Klabang, Ijen, dan Botolinggo memiliki tingkat kerentanan yang tinggi (4). Ini menandakan bahwa kecamatan-kecamatan ini termasuk dalam kategori "rentan" terhadap perubahan iklim;
4. Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Binakal, dan Pakem memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi (5). Hal ini menandakan bahwa kecamatan-kecamatan ini termasuk dalam kategori "sangat rentan" terhadap perubahan iklim.

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi di masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bondowoso untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan di setiap kecamatan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko dampak negatif dari perubahan iklim. Upaya peningkatan adaptasi dan kapasitas masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah

tersebut. Secara spasial, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada peta berikut.

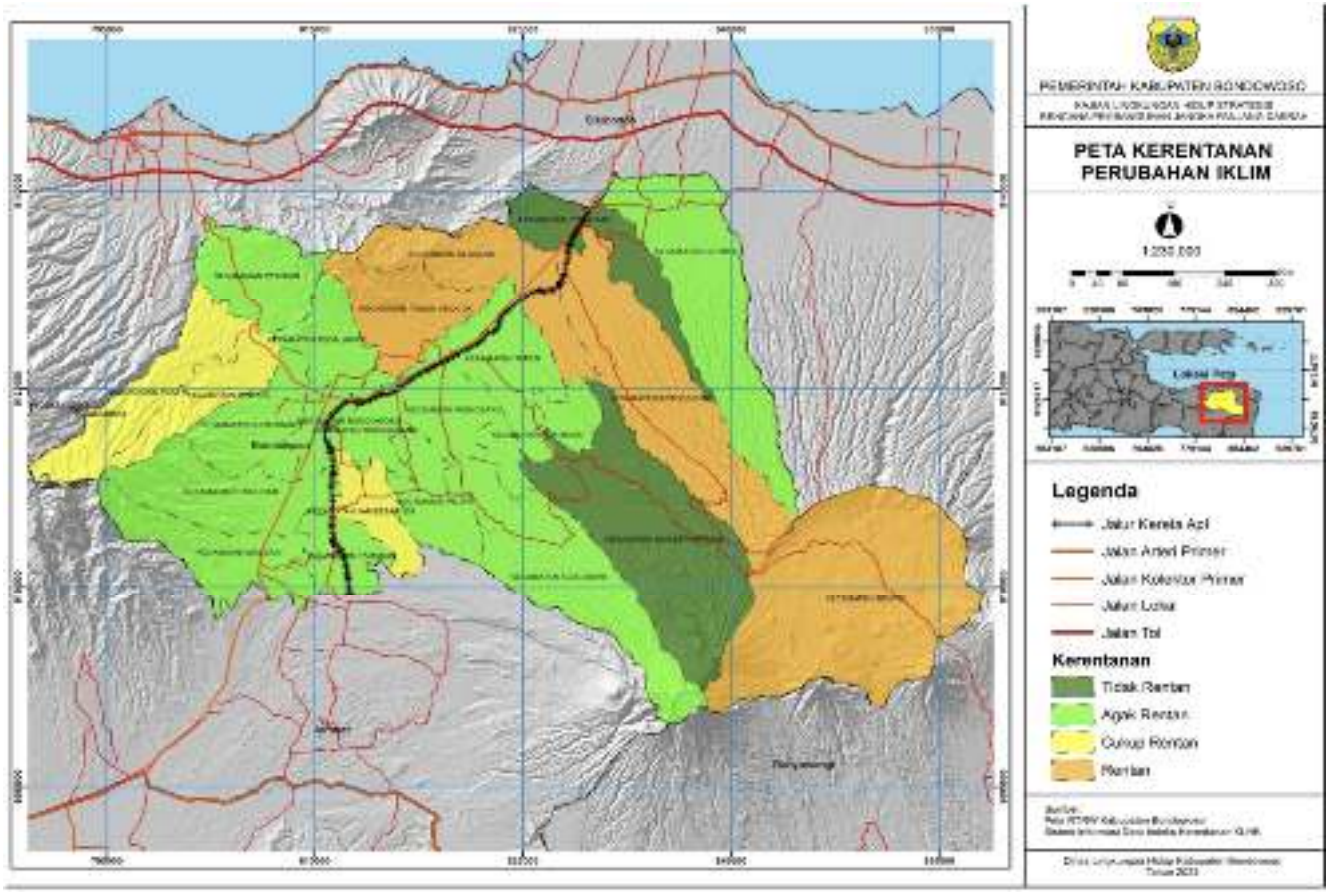

Gambar 2. 19 Peta Kerentanan Perubahan Iklim

2.1.6.3 Emisi Gas Rumah Kaca

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, menyebabkan efek rumah kaca. Beberapa gas rumah kaca utama meliputi gas Karbon dioksida (CO_2), Metana (CH_4), Dinitrogen oksida (N_2O), dan Gas-gas fluorinated seperti Hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF_6). Gas-gas tersebut berasal dari pembakaran bahan

bakar fosil, proses industri, aktivitas pertanian, pembuangan sampah serta hasil akhir produksi energi.

Pengukuran kontribusi penurunan emisi GRK dihitung melalui formula yang ditetapkan oleh Bappenas dengan mempertimbangkan komponen pada sektor kehutanan, penggunaan lahan, pertanian dan peternakan, pengelolaan limbah dan sanitasi, serta perhubungan sebagai pihak penghasil emisi GRK. Berdasarkan data Bappenas, 2023 kontribusi wilayah Kabupaten Bondowoso dalam penurunan emisi GRK tahunan dan kumulatif cukup baik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30 Pengurangan Emisi Tahunan Dan Kumulatif Tahunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Tahun	Penurunan Emisi GRK Tahunan (Ton CO_2 eq)	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO_2 eq)
2020	201.473,07	261.261,15
2021	61.700,77	322.961,92
2022	86.668,17	409.630,10
2023	16.601,44	426.231,54
2024	43.246,09	469.477,63

Sumber: AKSARA Bappenas, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan melalui Aplikasi AKSARA, nilai capaian Pengurangan Emisi Tahunan Kumulatif Kabupaten Bondowoso sampai tahun 2024 sebesar 469.477,63. Capaian ini memberi kontribusi sekitar 1,43% terhadap Target Pengurangan Emisi Kumulatif tahun 2045 Kabupaten Bondowoso yang diarahkan sebesar 50.683.015 Ton CO_2 eq.

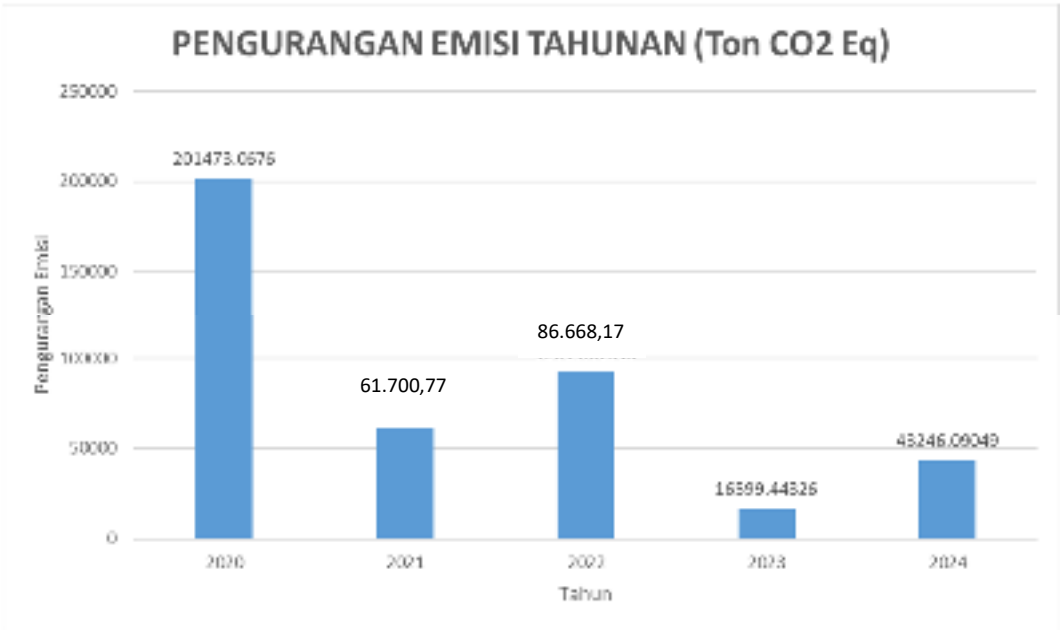

Gambar 2. 20 Pengurangan Emisi Tahunan Tahun 2020-2024

Sedangkan apabila dilihat capaian absolut Pengurangan Emisi per tahunnya sejak pencatatan tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan dinamika naik turun bergantung pada besarnya upaya-upaya masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan usaha dan aktifitas yang berdampak pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, diantaranya pengembangan teknologi prasarana transportasi, penghijauan dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang layak.

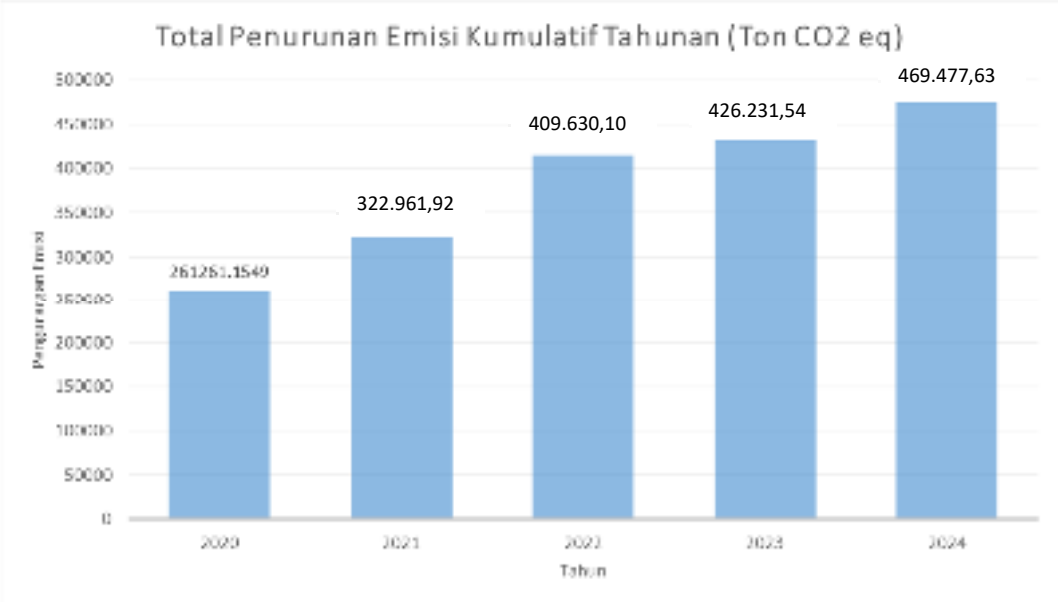

Sumber: AKSARA Bappenas, 2025

Gambar 2. 21 Pengurangan Emisi Kumulatif Tahunan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 peran sektor energi (termasuk transportasi) sangat besar dalam penurunan emisi tahunan yang tercatat sebesar 201.190,82 ton CO2 eq. Salah satu upaya yang mendukung adalah penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) secara rutin dan meningkatnya kendaraan listrik. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan kontribusi sektor energi dalam pengurangan emisi. Tercatat sebesar 52.400,00 ton CO2 eq (2021); turun menjadi 51.269,23 ton CO2 eq (2022); turun menjadi 413,76 ton CO2 eq (2023) dan sebesar 5.934,99 ton CO2 eq (2024).

Pada Sektor Lahan atau pertanian kontribusi pengurangan emisi tahunan masih relatif sangat kecil dengan fluktuatif. Volume penurunan emisi yang tercatat sebagai berikut: Tahun 2020 sebesar 282,25 ton CO2 eq; Tahun 2021 hanya sebesar 2,18 ton CO2 eq; Tahun 2022 sebesar 10.549,78 ton CO2 eq; Tahun 2023 sebesar 481,58 ton CO2 eq; dan Tahun 2024 sebesar 3.721,98 ton CO2 eq. Salah satu kegiatan pendukung pengurangan emisi adalah pengadaan Varietas Padi Rendah Emisi.

Pada Sektor Pengelolaan Limbah menunjukkan peningkatan kontribusi pada pengurangan emisi tahunan. Pada tahun 2020 belum terdata adanya kontribusi, namun mulai tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan peningkatan kontribusi yang terus meningkat, sebagai berikut: 9.298,59 ton CO2 eq (2021); 24.849,17 ton CO2 eq (2022); 15.706,10 ton CO2 eq (2023); dan 33.589,11 ton CO2 eq pada 2024.

2.1.6.4 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat pengukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat risiko dan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam atau bencana terkait manusia. Tujuan dari indeks ini adalah untuk membantu pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengelola risiko bencana dengan lebih efektif.

Indeks Risiko Bencana membantu dalam menyusun strategi mitigasi risiko, perencanaan tanggap darurat, dan pengembangan kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana. Penggunaan indeks ini juga dapat membantu alokasi sumber daya dengan lebih efisien untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan merespons bencana di masa depan.

Berikut merupakan capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020-2024.

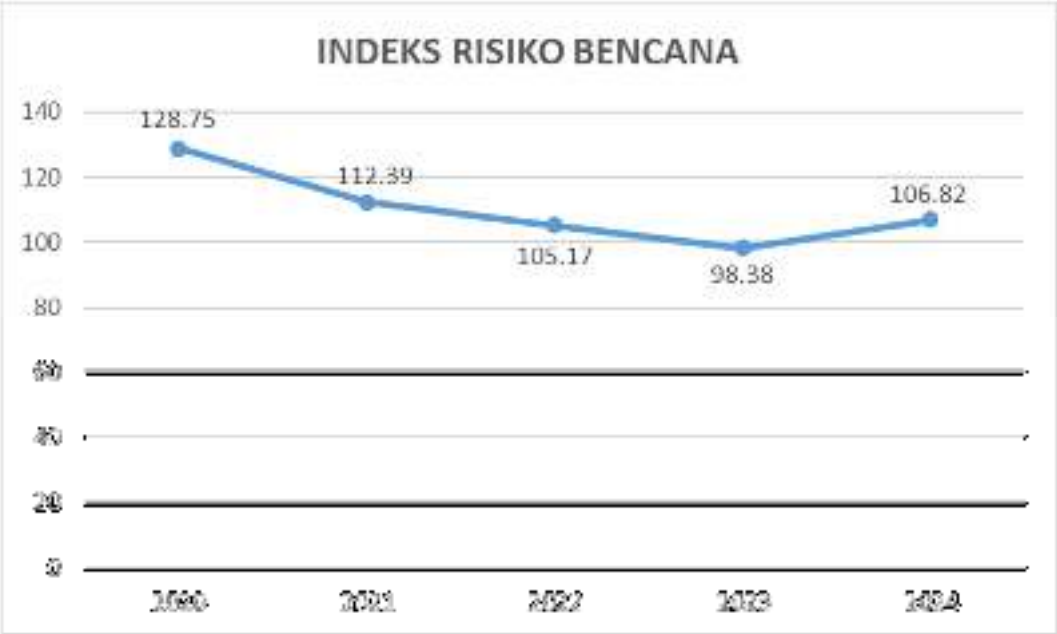

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 2. 22 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Bondowoso dalam periode 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2023 nilai Indeks Resiko Bencana konsisten menurun dari 128.75 hingga 9836. Hal ini menunjukkan perbaikan sistem yang berkelanjutan dalam manajemen risiko bencana di Kabupaten Bondowoso. Nilai 98.38 pada tahun 2023 merupakan level terendah selama periode ini. Berarti bahwa wilayah tersebut telah berhasil mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun pada tahun 2024 IRB Kabupaten Bondowoso sedikit mengalami kenaikan menjadi 106,82. Hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria dan formula dalam pengukuran IRB secara nasional, diantaranya bertambahnya jenis potensi bencana yang diidentifikasi yaitu Likuifaksi. Sementara dari aspek kesiapan Pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana juga memerlukan updating teknologi, informasi serta

kesiapan prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang lebih baik secara kuantitas dan kualitas.

2.1.6.5 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah terhadap berbagai tekanan dan ancaman, termasuk bencana alam, krisis ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan suatu wilayah. IKD bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang kemampuan suatu daerah untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 23 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, Kabupaten Bondowoso memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,72. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan mencapai 0,76. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,55. Hal ini dikarenakan

adanya perubahan metode dan formula dalam perhitungan IKD. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai IKD menjadi 0,60. Pada tahun 2024 IKD Kabupaten Bondowoso naik menjadi 0,62.

Secara keseluruhan tren capaian IKD Kabupaten Bondowoso menunjukkan peningkatan, yang menunjukkan bahwa terdapat upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi kebencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi IKD antara lain ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, jumlah petugas yang memadai, kelengkapan dokumen kebencanaan, perencanaan kontinjensi, serta kesiapan masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana, yang perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2024 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim sebanyak 788.007 jiwa yang terdiri atas 385.405 jiwa penduduk laki-laki dan 402.602 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96,0 yang artinya diantara 100 perempuan terdapat 96 orang laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 mencapai 505 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bondowoso dengan sebesar 3.317 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Ijen sebesar 58 jiwa/km.

Tabel 2.31 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Maesan	24.294	24.918	49.212
2	Grujugan	18.824	19.341	38.165
3	Tamanan	19.654	19.881	39.535
4	Jambesari Darus Sholah	17.588	18.488	36.076
5	Pujer	19.733	20.861	40.594
6	Tlogosari	23.023	24.055	47.078
7	Sukosari	7.473	8.080	15.553
8	Sumberwringin	17.148	17.979	35.127
9	Tapen	16.426	17.577	34.003
10	Wonosari	19.748	21.016	40.764
11	Tenggarang	21.536	22.437	43.973
12	Bondowoso	37.481	39.324	76.805
13	Curahdami	17.386	17.503	34.889
14	Binakal	8.291	8.775	17.066
15	Pakem	11.459	11.903	23.362
16	Wringin	19.873	20.882	40.755
17	Tegalampel	13.219	13.352	26.571
18	Taman Krocok	8.025	8.629	16.654
19	Klabang	9.046	9.642	18.688
20	Ijen	6.021	6.009	12.030
21	Botolinggo	14.213	14.897	29.110
22	Prajekan	12.465	13.179	25.644
23	Cermee	22.479	23.874	46.353
	Kab. Bondowoso	**385.405**	**402.602**	**788.007**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini diukur sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertumbuhan penduduk bisa dipengaruhi oleh berbagai

faktor, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka laju pertumbuhan penduduk akan menurun.

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0.52 persen. Pada tahun 2021, terjadi penurunan dalam laju pertumbuhan penduduk menjadi 0.31 persen, menunjukkan adanya perubahan dinamika populasi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini mungkin mencerminkan dinamika demografis yang berubah atau adanya faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dan kelahiran. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan sedikit dalam laju pertumbuhan penduduk menjadi 0.37 persen. Meskipun kenaikan ini terjadi, perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan penduduk masih pada tingkat yang relatif rendah.

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.98 persen namun mengalami penurunan kembali tahun 2024 menjadi -1.12 persen. Meskipun kenaikan ini terjadi, perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan penduduk masih pada tingkat yang relatif rendah.

Secara keseluruhan, perubahan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bondowoso menunjukkan dinamika demografis yang bervariasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti kebijakan keluarga, migrasi, dan faktor-faktor ekonomi dapat menjadi kontributor utama terhadap fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk adalah suatu perbandingan atau ukuran yang menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dalam suatu kelompok dengan kelompok atau populasi lain. Terdapat beberapa jenis rasio penduduk yang umumnya digunakan, dan setiap rasio memberikan informasi khusus mengenai distribusi atau struktur populasi.

Pemahaman mengenai rasio penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, dan strategi pembangunan ekonomi. Rasio-rasio tersebut memberikan gambaran yang lebih baik tentang struktur dan dinamika populasi suatu wilayah atau negara.

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 25 Rasio Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, Kabupaten Bondowoso mencatatkan Rasio Penduduk sebesar 498, tahun 2021 rasio penduduk terjadi kenaikan sebesar 494 dan tahun 2022 rasio penduduk mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 515. Hal ini dimungkinkan mencerminkan variasi alamiah dalam pertumbuhan penduduk atau perubahan dalam faktor-faktor demografis. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi adanya pertumbuhan penduduk yang lebih cepat atau perubahan dalam distribusi usia dan jenis kelamin.

Secara keseluruhan, rasio penduduk di Kabupaten Bondowoso menunjukkan dinamika dalam struktur demografis wilayah tersebut. Peningkatan rasio penduduk dapat memiliki implikasi bagi perencanaan pembangunan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rasio penduduk dan implikasinya bagi kebijakan pembangunan.

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana jumlah penduduk dalam suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayah tersebut. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayahnya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai:

Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk/Luas Wilayah

Satuan yang umum digunakan untuk mengukur kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per kilometer persegi (jiwa/km^2). Kepadatan penduduk memberikan gambaran tentang seberapa padat atau jarang penduduk di suatu daerah, dan dapat memberikan indikasi tentang tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik. Penting untuk dipahami bahwa tingkat kepadatan penduduk dapat bervariasi signifikan antar wilayah. Beberapa wilayah urban biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sementara wilayah pedesaan atau daerah yang jarang dihuni memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Indikator ini menjadi penting dalam perencanaan kota, pembangunan, dan penentuan kebijakan publik, karena dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, dan layanan dengan lebih efektif sesuai dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

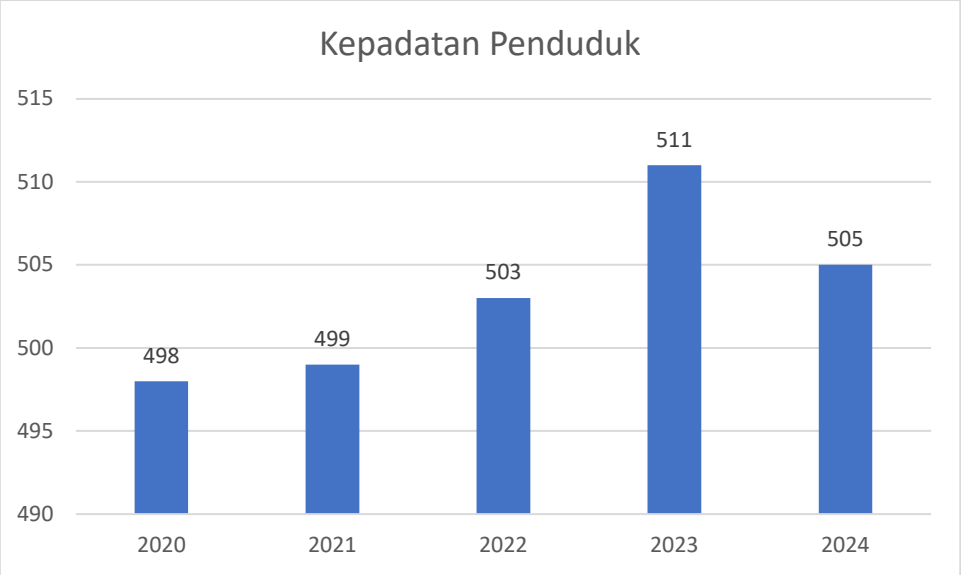

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 26 Kepadatan Penduduk per km2

Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso tercatat sebesar 498 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepadatan penduduk menjadi 499 jiwa per kilometer persegi, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi atau perubahan demografis lainnya.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dalam kepadatan penduduk menjadi 503 iwa per kilometer persegi, mencerminkan stabilitas dengan kenaikan yang minimal. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk mencapai 511 jiwa/km2, menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang lebih konsisten. Tahun 2024 terjadi penurunan kepadatan penduduk menjadi 505 km2.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan kecil, kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami peningkatan secara umum dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

2.1.7.5 Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan suatu metode perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa mendatang. Data yang digunakan dalam proyeksi penduduk biasanya berasal dari sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki tanggung jawab dalam mencatat dan mengelola data kependudukan.

Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Bondowoso dihitung berdasarkan data dari Dispendukcapil. Data ini mencakup informasi dasar mengenai jumlah penduduk, struktur usia, dan jenis kelamin. Proses proyeksi penduduk kemudian melibatkan analisis data historis, tren pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dinamika populasi di masa depan. Proyeksi penduduk Kabupaten Bondowoso dihitung dengan menggunakan basis data dari BPS Kabupaten Bondowoso untuk menghasilkan proyeksi penduduk tahun 2025 - 2030. Sehingga dengan ketersediaan data ini dapat dilakukan proyeksi kebutuhan sarana-prasarana wilayah.

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2030 sesuai dengan data BPS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030

No.	Kecamatan	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Maesan	49.730	49.969	50.199	50.418	50.625	50.820
2	Grujugan	38.567	38.752	38.930	39.100	39.261	39.412
3	Tamanan	39.951	40.143	40.328	40.504	40.670	40.827
4	Jambesari Darus Sholah	36.456	36.631	36.800	36.960	37.112	37.255
5	Pujer	41.021	41.219	41.408	41.589	41.760	41.921
6	Tlogosari	47.573	47.802	48.022	48.232	48.430	48.617
7	Sukosari	15.717	15.792	15.865	15.934	16.000	16.061
8	Sumber Wringin	35.497	35.667	35.832	35.988	36.136	36.275
9	Tapen	34.361	34.526	34.685	34.836	34.979	35.114
10	Wonosari	41.193	41.391	41.582	41.763	41.934	42.096

No.	Kecamatan	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Tenggarang	44.436	44.650	44.855	45.051	45.236	45.410
12	Bondowoso	77.613	77.987	78.345	78.687	79.010	79.315
13	Curahdami	35.256	35.426	35.589	35.744	35.891	36.029
14	Binakal	17.246	17.329	17.408	17.484	17.556	17.624
15	Pakem	23.608	23.721	23.831	23.935	24.033	24.125
16	Wringin	41.184	41.382	41.572	41.754	41.925	42.087
17	Tegalampel	26.851	26.980	27.104	27.222	27.334	27.439
18	Taman Krocok	16.829	16.910	16.988	17.062	17.132	17.198
19	Klabang	19.067	19.158	19.246	19.330	19.410	19.485
20	Ijen	12.157	12.215	12.271	12.325	12.375	12.423
21	Botolinggo	29.416	29.558	29.694	29.823	29.946	30.061
22	Prajekan	25.914	26.039	26.158	26.272	26.380	26.482
23	Cermee	46.841	47.066	47.283	47.489	47.684	47.868
Kabupaten Bondowoso		**796.300**	**800.132**	**803.812**	**807.318**	**810.633**	**813.760**

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bondowoso, menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2025, proyeksi penduduk diprediksi mencapai 796.300 jiwa. Tren pertumbuhan penduduk terus berlanjut hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk diperkirakan mencapai 813.760 jiwa. Proyeksi ini mencerminkan dinamika populasi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, harapan hidup, dan migrasi.

Tabel 2. 33 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030

Luas Wilayah Kabupaten Bondowoso		Proyeksi Kepadatan Penduduk					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Km^2	1.518,77	524	527	529	532	534	536
M^2	151.877,4	5,24	5,27	5,29	5,32	5,34	5,36

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Dengan luas wilayah Kabupaten Bondowoso sebesar 1.518,77 km^2 pada tahun 2025, kepadatan penduduk pada tahun tersebut diproyeksi mencapai 524 jiwa/km^2. Proyeksi kepadatan penduduk menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pertumbuhan kepadatan penduduk

terus berlanjut hingga tahun 2030, di mana proyeksi mencapai 536 jiwa/km².

Tabel 2. 34 Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-laki	392.640	394.530	396.320	397.990	399.550	400.990
Perempuan	403.660	405.610	407.490	409.330	411.080	412.770
Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Proyeksi rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bondowoso memberikan gambaran tentang distribusi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan serta perubahan rasio di masa mendatang.

Pada tahun 2025, diproyeksikan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 392.640 jiwa, sedangkan perempuan mencapai 403.660 jiwa. Proyeksi rasio penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2025, rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 0.97, yang berarti terdapat sedikit kelebihan jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio ini tidak terlalu mengalami perubahan pada tahun 2030, yakni tetap 0.97.

Tabel 2. 35 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk (jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 tahun	161.070	161.960	162.810	163.590	164.290	164.940
15-64 tahun	541.660	541.830	542.010	542.150	541.830	541.280
> 65 tahun	93.600	96.330	99.000	101.690	104.730	107.570
Angka Ketergantungan	47,01%	47,67%	48,30%	48,94%	49,61%	50,34%
Anak-anak	20,23%	20,24%	20,25%	20,26%	20,27%	20,27%
Lansia	11,75%	12,04%	12,32%	12,60%	12,89%	13,22%

Sumber: BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Proyeksi penduduk Kabupaten Bondowoso berdasarkan kelompok umur memberikan gambaran yang komprehensif tentang struktur demografis masyarakat, memperhitungkan distribusi usia penduduk dan angka ketergantungan.

Pada tahun 2025, kelompok usia 0-14 tahun memiliki jumlah penduduk sebanyak 161.070 jiwa. Proyeksi menunjukkan tren kenaikan hingga tahun 2030 sejumlah 164.940 jiwa. Pada kelompok usia 15-64 tahun, jumlah penduduk pada tahun 2025 diproyeksi mencapai 541.660 jiwa, dan mengalami penurunan hingga tahun 2030 mencapai 541.280 jiwa. Sementara itu, kelompok usia >65 tahun selama 5 tahun diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 13.970 jiwa, pada tahun 2025 diproyeksi sebesar 93.600 jiwa meningkat menjadi 107.570 jiwa pada tahun 2030.

Angka ketergantungan, yang mengukur hubungan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan kelompok usia yang memerlukan dukungan (0-14 tahun dan >65 tahun), menunjukkan tren kenaikan dari 47,01% pada tahun 2025 menjadi 50,34% pada tahun 2030. Ini menggambarkan perbandingan antara penduduk usia produktif dan yang memerlukan dukungan, yang memiliki implikasi penting terhadap beban ekonomi dan sosial suatu wilayah. Bonus demografi diukur dengan angka ketergantungan, dimana ketika angka ketergantungan dibawah 50% dikatakan mendapatkan bonus demografi yaitu tahun 2025-2029.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1): "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat membahas dua dimensi utama, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Pada aspek kesejahteraan ekonomi, fokusnya melibatkan peningkatan perekonomian daerah, mencakup pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Sementara itu, dalam dimensi kesejahteraan sosial budaya yang mencakup pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan gender.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan persentase dalam nilai total produksi ekonomi suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Jika PDB mengalami peningkatan dari satu periode lainnya, maka dapat dianggap sebagai indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi parameter kunci dalam menilai pembangunan ekonomi suatu negara, memperhitungkan kontribusi sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dianggap positif, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memberikan dasar bagi pembangunan. Pemerintah dan pembuat kebijakan menggunakan indikator ini untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan ekonomi serta merancang strategi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut merupakan grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada periode 2020-2024.

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso,2025

Gambar 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada periode 2020-2024 mencerminkan dinamika ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 terasa dengan penurunan signifikan laju pertumbuhan menjadi minus 1,36%. Hal ini mencerminkan dampak pandemi terhadap sektor ekonomi, termasuk penurunan aktivitas bisnis dan penurunan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2023, Kabupaten Bondowoso berhasil pulih dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%, dan pada tahun 2024 naik menjadi sebesar 4,87% menunjukkan ketangguhan dan adaptabilitas dalam menghadapi krisis. Pemulihan ini mungkin dipicu oleh berbagai kebijakan

stimulus dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor-sektor terdampak.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Tingkat kemiskinan adalah indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan kebijakan sosial ekonomi. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 tersaji sebagai berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.28 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan penurunan yang signifikan. Pada tahun

2020, Tingkat Kemiskinan mencapai 14,17%, namun pada tahun 2023 dan 2024 kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 12,60% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya dan keberhasilan dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor seperti implementasi program kesejahteraan sosial, peningkatan peluang pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif mungkin berkontribusi pada hasil positif ini. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perubahan Tingkat Kemiskinan dan untuk merancang kebijakan yang berkelanjutan guna terus meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

2.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan untuk mengetahui pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso meningkat selama kurun waktu 2020-2024 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita penduduk pada tahun 2020 yaitu Rp.25.598.000,- meningkat menjadi Rp.33.500.000,- pada tahun 2024. PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 36 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2020-2024

Tahun	PDRB Per kapita (ADHB)	PDRB Per kapita (ADHK)
2020	25.706	17.345
2021	27.009	17.861
2022	29.217	18.384
2023	31.432	19.128
2024	33.501	19.953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

PDRB perkapita ADHB penduduk Kabupaten Bondowoso terus meningkat selama kurun waktu tahun 2020-2024, yang menunjukkan terdapat tren peningkatan pendapatan masyarakat yang dipengaruhi faktor harga. Hal ini tidak hanya akibat faktor ekonomi Kabupaten Bondowoso saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi regional maupun nasional. Kondisi perekonomian nasional dan regional yang mengalami kontraksi mempengaruhi tingkat produksi dan distribusi komoditas yang dihitung secara sektoral di dalam PDRB. Kontribusi PDRB Kabupaten Bondowoso terhadap Provinsi Jawa Timur disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37 Kontribusi PDRB Kabupaten Bondowoso terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Kabupaten Bondowoso (%)	0,87	0,86	0,84	0,84	0,84
2	PDRB ADHB Bondowoso (miliar Rp)	25.706	27.009	29.217	31.432	33.501
3	PDRB ADHB Jawa Timur (miliar Rp)	56,640	59.988	66.248	71.121	75.770

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Kontribusi PDRB Kabupaten Bondowoso terhadap Provinsi Jawa Timur selama 2020–2024 berada di bawah 1 persen, dengan tren menurun tipis lalu stabil di angka 0,84 persen. Hal ini menunjukkan pangsa ekonomi Bondowoso relatif kecil dan stabil, sehingga perlu penguatan sektor unggulan untuk meningkatkan peran Bondowoso dalam perekonomian Jawa Timur.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingkat ini memberikan gambaran tentang ketersediaan lapangan kerja dan tingkat keaktifan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka 4,13. Namun, dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi tren penurunan pengangguran terbuka, mencapai 3,63. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti perubahan kondisi pasar kerja, fluktuasi ekonomi, atau dampak peristiwa tertentu. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab perubahan ini dan merancang kebijakan yang

tepat guna mengatasi tantangan pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi di Kabupaten Bondowoso.

2.2.1.5 Indeks GINI

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam suatu populasi atau negara. Indeks ini berasal dari kurva Lorenz, yang membandingkan distribusi kumulatif pendapatan dengan distribusi kumulatif yang sempurna, di mana setiap orang memiliki bagian yang sama dari total pendapatan. Indeks Gini memiliki rentang antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang paling tidak setara (satu orang memiliki seluruh pendapatan). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi jenjang ketidaksetaraan. Indeks Gini digunakan sebagai alat evaluasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan pemerataan, karena ketidaksetaraan dapat mempengaruhi stabilitas pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

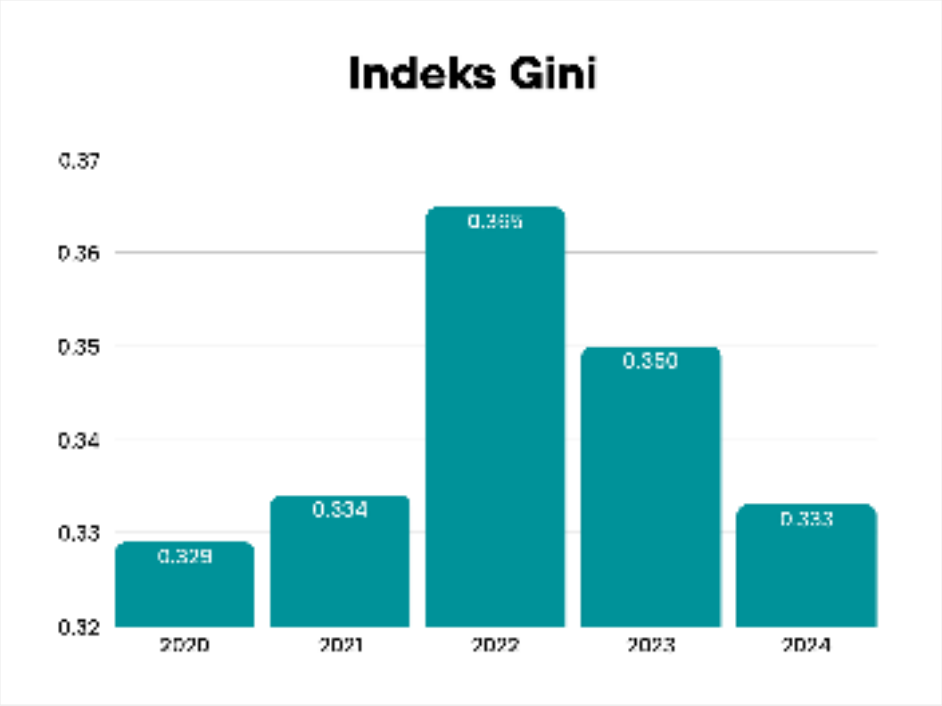

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2024

Gambar 2.30 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Grafik Indeks Gini Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan perubahan tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2020, Indeks Gini mencatatkan nilai sebesar 0,329, menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang relatif rendah. Namun, terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2022, di mana Indeks Gini mencapai 0,365. Kenaikan ini menandakan adanya pergeseran dalam distribusi pendapatan, dengan sebagian besar pendapatan cenderung lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi. Peningkatan ketidaksetaraan tersebut dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pada tahun 2024 indeks Gini menurun menjadi 0,333 dan diharapkan terus menurun pada tahun-tahun mendatang. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini dan merancang kebijakan yang tepat untuk mengurangi tingkat ketidaksetaraan pendapatan di Kabupaten Bondowoso.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur tingkat pembangunan suatu negara dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan ekspektasi lama sekolah), dan pendapatan per kapita. IPM memberikan Gambaran holistik tentang kondisi hidup masyarakat, melampaui aspek ekonomi saja.

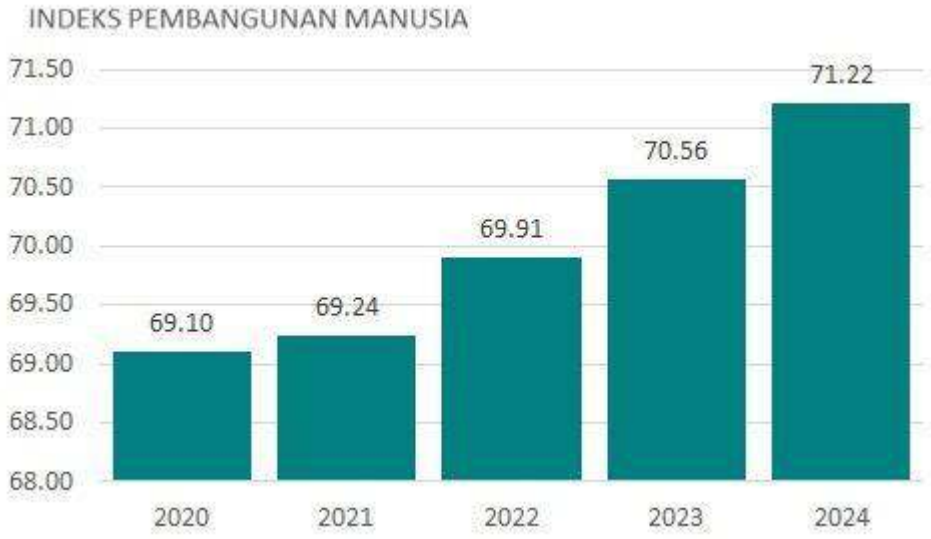

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dalam kondisi pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, IPM mencapai 69,10, dan selanjutnya mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 71,22 di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam tiga dimensi utama yang diukur oleh IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Mungkin adanya

peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, upaya peningkatan kualitas pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap hasil positif ini. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor spesifik yang mendorong peningkatan IPM dan untuk merancang kebijakan yang mendukung kelanjutan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dengan melihat capaian masing-masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing.

Tabel 2.38 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,61	72,71	72,98	73,19	73,31
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,28	13,29	13,31	13,32	13,33
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,93	5,94	6,22	6,36	6,53
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.610,00	10.690,00	10.851,00	11.255,00	11.689,00

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Peningkatan IPM tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, yaitu: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,70 tahun atau laju pertumbuhan UHH sebesar 1,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Bondowoso adalah 72,61 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,31. UHH tahun 2024 meningkat 0,12 tahun (0,16 persen) dibanding tahun sebelumnya.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan HLS Kabupaten Bondowoso sebesar 7,81 persen per tahun, sementara RLS sebesar 17,43 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,17 tahun (2,67 persen) dibandingkan tahun 2023.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bondowoso mencapai Rp 11,689 juta per tahun. Capaian ini meningkat 434 ribu rupiah (3,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Umur Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup atau Umur Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Kabupaten Bondowoso telah meningkat sebesar 0,70 tahun atau laju

pertumbuhan UHH sebesar 1,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Bondowoso adalah 72,61 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,31. UHH tahun 2024 meningkat 0,12 tahun (0,16 persen) dibanding tahun sebelumnya. Berikut merupakan data UHH Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024.

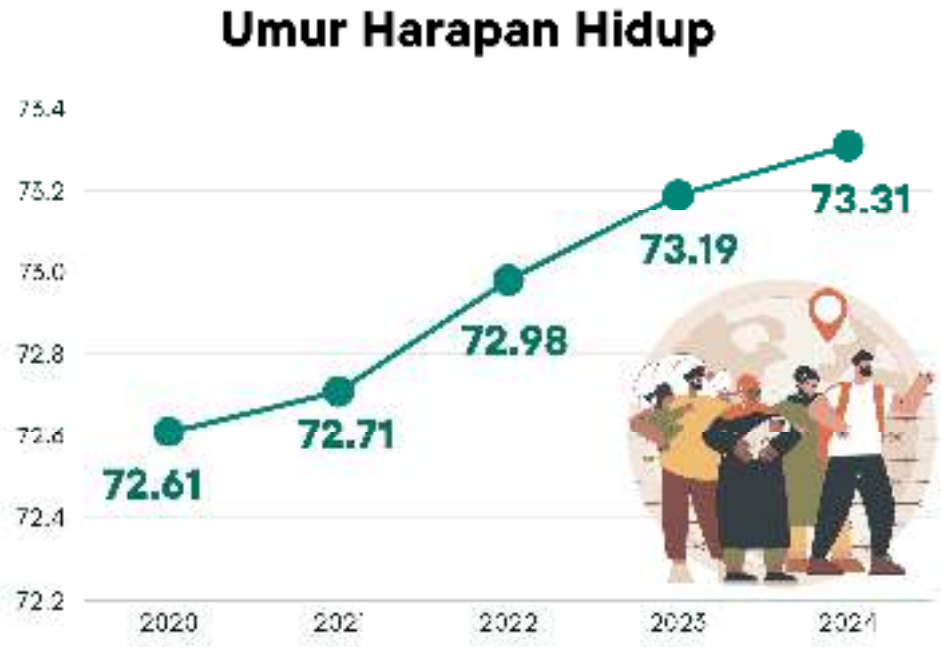

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.32 Umur Harapan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penuruan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penuruan Stunting bertujuan untuk:

a. Menurunkan prevalensi Stunting:
b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. Memperbaiki pola asuh;
e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 tahun dengan target yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Bondowoso tergolong cukup tinggi, namun pemerintah Bondowoso terus fokus meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan manusia dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas menyusui, baduta dan balita. Berikut merupakan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020 hingga tahun 2024.

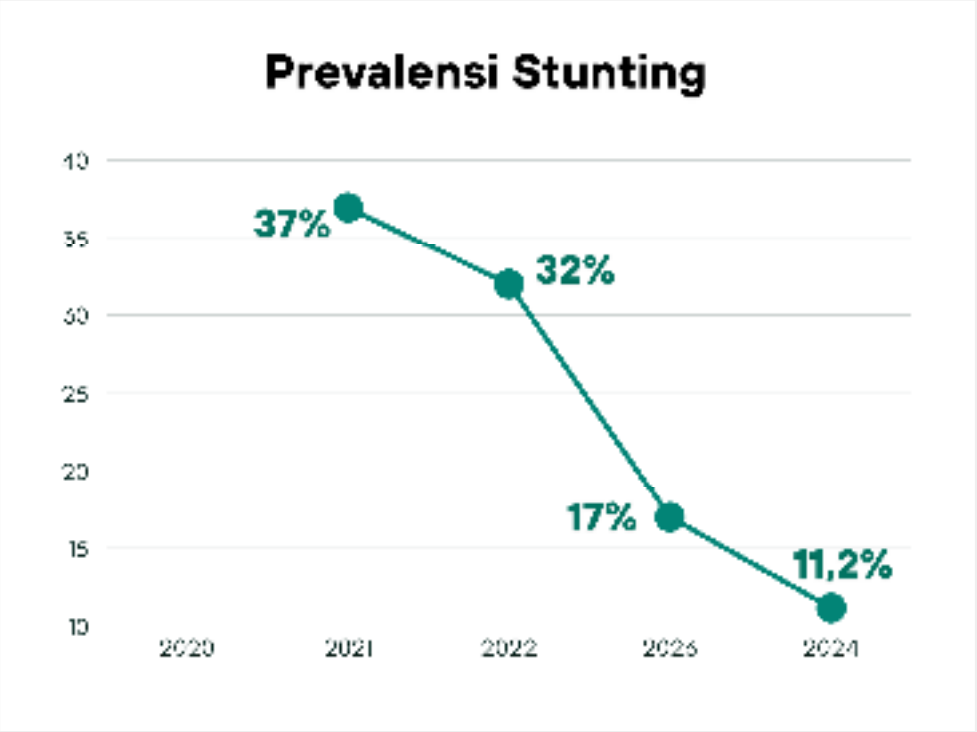

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.33 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024 Kabupaten Bondowoso

Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 angka prevalensi stunting Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 angka prevalensi stunting Kabupaten Bondowoso sebesar 37%, menurun menjadi 32% di tahun 2022 dan hingga pada tahun 2023 menurun menjadi 17%. Tahun 2024 angka prevalensi stunting mengalami penurunan kembali menjadi 11,2%.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh Pendidikan formal. RLS digunakan sebagai salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menunjukkan

tingkat Pendidikan yang telah ditempuh oleh individu dalam suatu wilayah. Berikut merupakan RLS Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020 hingga tahun 2024.

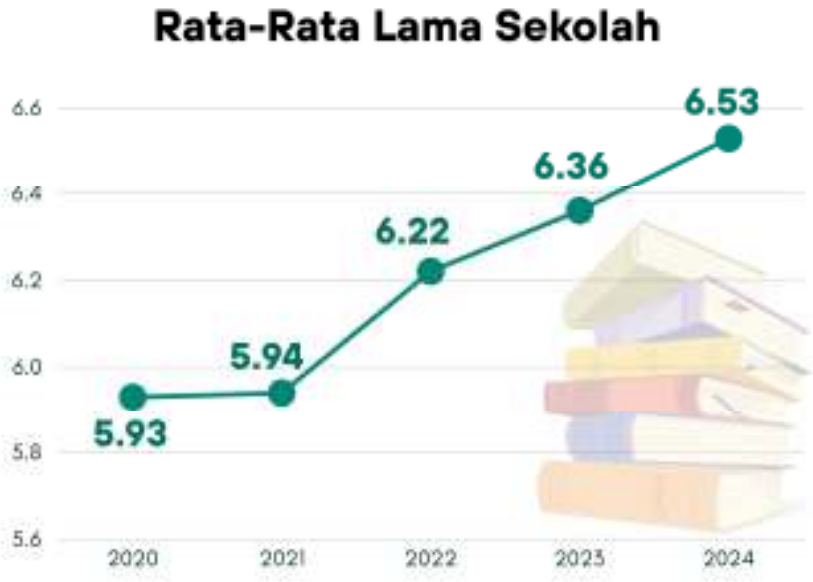

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.34 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,17 tahun (2,67 persen) dibandingkan tahun 2023.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah yang diharapkan dapat dialami oleh seseorang pada usia 7 tahun ke atas, diukur dalam tahun. HLS merupakan indikator yang menunjukkan peluang seorang anak untuk menempuh Pendidikan hingga jenjang

tertentu. Berikut merupakan HLS Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020 hingga tahun 2024.

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.35 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan HLS Kabupaten Bondowoso sebesar 7,81 persen per tahun.

2.2.3.3 Angka Literasi dan Numerasi

Literasi/Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Angka Numerasi digunakan untuk mengukur

Tingkat kemampuan literasi, numerasi dan karakter siswa sebagai hasil dari proses belajar.

Capaian kemampuan literasi pada jenjang SD/MI pada tahun 2023 adalah 53,31 dan naik menjadi 68,71 di tahun 2024. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs adalah 51,77 dan meningkat menjadi 65,15. Adapun kemampuan numerasi pada jenjang SD/MI pada tahun 2023 adalah 39,17 dan naik menjadi 63,07 di tahun 2024. Untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2023 adalah 37,77 dan meningkat menjadi 63,17 di tahun 2024.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah metrik yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan membaca, menulis, dan berhitung di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Pengukuran ini mencakup sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap sumber daya pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, serta penerapan literasi dalam aktivitas sehari-hari. Melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, kita dapat memahami sejauh mana kelompok tersebut memiliki keterampilan literasi yang memadai, suatu aspek penting dalam meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, ekonomi, dan perkembangan sosial.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Data di atas mencerminkan sebuah peningkatan yang positif dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari tahun 2021 ke tahun 2022, mengalami kenaikan dari 15,8 menjadi 17,42 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 19,47. Sedangkan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Timur yaitu tahun 2023 mencapai 75,18 dan pada 2024 adalah 78.60.

Peningkatan ini mencerminkan potensi perbaikan signifikan dalam tingkat literasi masyarakat, menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi di komunitas tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan ini termasuk upaya pendidikan formal, program-program literasi masyarakat, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan untuk merancang strategi yang

berkelanjutan dalam memperkuat indeks pembangunan literasi masyarakat.

Sedangkan Nilai tingkat kegemaran membaca merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan sejauh mana kebiasaan, intensitas, serta minat masyarakat dalam melakukan aktivitas membaca, baik terhadap bahan bacaan cetak maupun digital, dalam periode waktu tertentu.

Capaian di tahun 2022 adalah 59,89, turun 57,2 di tahun 2023, namun meningkat di tahun 2024 menjadi 65,6. Artinya ada peningkatan minat baca masyarakat dalam aktifitas membaca.

2.2.3.5 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang direpresentasikan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata rata lama sekolah. indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Berikut merupakan Indeks Pendidikan Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020-2024.

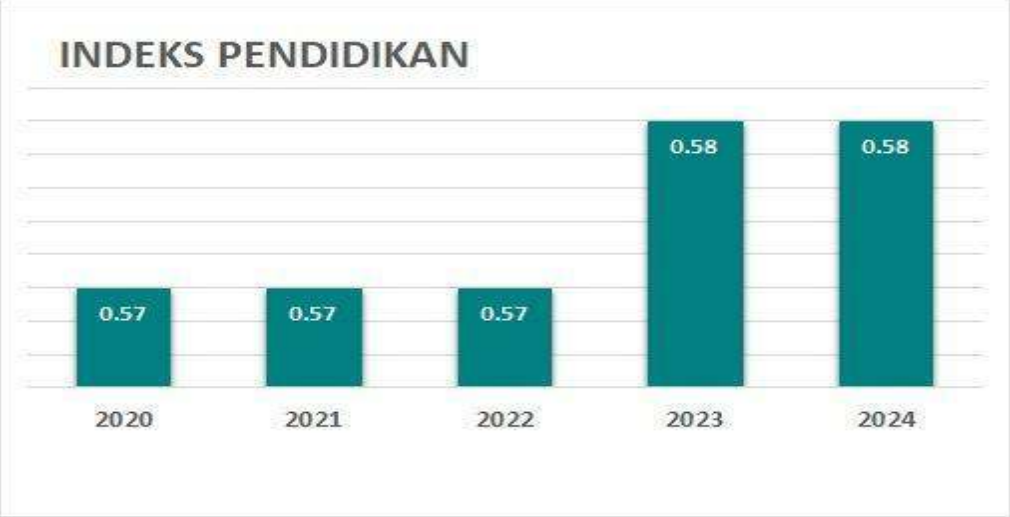

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Negara. Di Indonesia penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 Program Jaminan yakni:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP), dan

5. Jaminan Kematian (JKM)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso secara rata-rata sebanyak 7.872 peserta tiap tahun dan tumbuh sebesar 25,00% atau sebanyak 413 peserta per tahun. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tambah sebesar 20,28% dari 20,26% di tahun 2020 menjadi 40,54% di tahun 2024. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.39 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perusahaan [1)]	422	632	640	611	634
Tenaga Kerja [1)]	6.526	8.679	8.924	7.051	8.178
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja [2)]	20,26	39,46	39,46	37,33	40,54

Sumber: [1)] *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bondowoso, 2025*
[2)] *Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, 2025*

2.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

UHC (*Universal Health Coverage*) atau cakupan kesehatan semesta, UHC adalah sebuah sistem Jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, bermutu dan terjangkau. Sejak tanggal 11 Oktober 2022, Kabupaten Bondowoso resmi berstatus *Universal Health Coverage* (UHC), dimana cakupan kepesertaan pada bulan tersebut sebesar 95,18% dengan jumlah penduduk sebesar 802.535 dan jumlah peserta terdaftar sebesar 763.819. Jumlah peserta aktif sejak ditetapkan UHC di Kabupaten Bondowoso adalag sebesar 579.406 atau sebesar 72,19%. Sedangkan pada bulan Desember 2023, jumlah peserta terdaftar sebesar 784.470 dengan jumlah penduduk sebesar 802.864, yang artinya

cakupan kepesertaan ialah sebesar 97,71%. Jumlah peserta aktif pada bulan Desember 2023 ialah sebesar 613.789 atau sebesar 76,45% dari jumlah penduduk. Pada bulan Desember 2024 cakupan kepesertaan adalah sebesar 99,35% dengan jumlah penduduk sebesar 788.007 dan jumlah peserta terdaftar sebesar 782.877. Cakupan keaktifan peserta pada bulan Desember 2024 adalah sebesar 76,55% dengan jumlah peserta aktif sebesar 603.222. Cakupan kepesertaan pada bulan Agustus 2025 ialah sebesar 97,83% dengan jumlah penduduk sebesar 788.007 dan jumlah peserta terdaftar sebesar 770.879. Penurunan cakupan kepesertaan terjadi karena terdapat pemuktahiran data kependudukan bagi penduduk yang telah meninggal. Cakupan keaktifan peserta pada bulan Agustus 2025 adalah sebesar 75,33% dengan jumlah peserta aktif sebesar 593.590. Terjadi penurunan cakupan keaktifan peserta yang disebabkan oleh penonaktifan peserta segmen PBI JK.

Tabel 2.40 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	0	0	95,18%	97,71%	99,35%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Indeks harmoni indonesia merupakan sebuah inisiatif penting untuk mengukur dan memahami tingkat kerukunan serta keseimbangan dalam masyarakat di berbagai tingkatan dari daerah hingga nasional serta sebagai sarana membangun bangsa yang harmonis dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang

harmoni sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan Indonesia dapat terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera dan berkeadilan.

Bondowoso merupakan wilayah dengan keberagaman budaya, etnis dan agama yang beragam. Indeks harmoni sebagai alat yang sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberagaman terjaga, melalui 4 point penting antara lain :

1. Penguatan dialog dan komunikasi yaitu dialog secara kons1ruktif antara berbagai kelompok masyarakat harus terus didorong yaitu komunikasi terbuka dan jujur adalah kunci menghindari kesalahpahaman dan konflik yang bisa merusak harmoni sosial.

2. Pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial serta pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya kerukunan dan toleransi harus terus ditingkatkan.

3. Kebijakan Inklusif yaitu Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat harus bersifal inklusif dan merangkul semua lapisan masyarakat.

4. Kolaborasi dan sinergi yaitu semua pihak baik Pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan ormas harus berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya menjaga dan meningkatkan harmoni sosial.

Data dan temuan dihasilkan melalui monitoring dan evaluasi yang berharga sebagai dasar merumuskan kebijakan dan strategi lebih efektif dalam meningkatkan harmoni sosial.

2.2.5.2 Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan zakat secara obyektif. Tujuan utamanya adalah untuk

meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme lembaga pengelola zakat mulai tingkat BAZNAS hingga Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Nilai IZN berkisar antara 0 – 1, dimana nilai lebih tinggi menunjukkan kinerja pengelolaan ZIS yang lebih baik.

Realisasi pengelolaan ZIS tahun 2024 mencapai 1,7 milyar rupiah terdiri dari 800 juta di BAZNAS dan 900 juta di LAZISMU, sedangkan di Lembaga lainnya belum terdata dengan baik, dari potensi Zakat yang diproyeksikan minimal 5 milyar per tahun dari masyarakat Bondowoso. Sebanyak 1.350 orang ASN yang menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS dari 9.099 orang ASN. Secara regulasi telah dilakukan himbauan melalui Surat Edaran Bupati Bondowoso untuk membayar ZIS. Penyaluran ZIS di Bondowoso untuk 8 penerima yang berhak dengan jenis bantuan meliputi kemanusian, ekonomi, social dakwah, Pendidikan, dan Kesehatan. Secara kelembagaan BAZNAS melakukan pembinaan kepada Lembaga pengumpul ZIS agar tertib dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

2.2.5.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan Gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan.

Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	54,65	51,90	55,13	57,13	N/A
2	Jawa Timur	57,88	53,19	57,15	59,38	N/A
3	Bondowoso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2025
N/A = data tidak tersedia

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur secara konsisten memiliki skor IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tahun 2020, IPK nasional berada di angka 54,65, sedangkan Jawa Timur mencatat 57,88. Kedua wilayah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor kebudayaan. Namun, tren pemulihan mulai tampak tahun 2022 dan 2023, dengan IPK nasional meningkat menjadi 57,13, dan Jawa Timur naik menjadi 59,38.

Data IPK untuk Kabupaten Bondowoso masih belum tersedia untuk seluruh periode 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi karena pengukuran IPK oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini masih dilakukan hingga level provinsi. Belum dilakukan penghitungan resmi untuk tingkat kabupaten atau kota, termasuk Bondowoso.

Penghitungan IPK di tingkat kabupaten sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi pembangunan kebudayaan di daerah. Dengan mengetahui skor IPK secara lokal, pemerintah daerah dapat menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengembangkan sektor kebudayaan,

memperkuat identitas lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya.

Kekayaan budaya yang dilestarikan di Bondowoso meliputi budaya benda dan budaya tak benda, dengan harapan masyarakat memahami bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki warisan yang dapat dijadikan sebagai identitas wilayah, menghargai dan menghormati budaya tersebut serta dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Perkembangan kekayaan budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bondowoso disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42 Perkembangan Kekayaan Budaya Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	81,91	82,54	91,36	91,35	93,18
Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	49	49	53	53	70

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2025

Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan setiap tahunnya meningkat secara konsisten yang merupakan komitmen Pemerintah Bondowoso untuk melestarikan warisan kebudayaan. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari upaya untuk mendaftarkan cagar budaya meskipun terdapat stagnasi akibat pandemi Covid-19.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 (lima) klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi: (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang serta (5) Hak Perlindungan Khusus Anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistik bersama Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.44 Jumlah Kasus Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kekerasan Kepada Perempuan	25	42	30	22	56
Jumlah Kasus Kekerasan Kepada Anak	17	33	34	40	28

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso tahun 2021 adalah sebesar 58,39, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 61,63. Meskipun pada tahun 2022 capaiannya masih di bawah Provinsi Jawa Timur (66,10), hal ini menjadi pendorong Kabupaten Bondowoso secara konsisten untuk mewujudkan dan mempertahankan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan

fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.

iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Capaian iBangga Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2022 sebesar 56,34 dan meningkat menjadi 57,25 di tahun 2023 serta 61,12 pada tahun 2024.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia karena ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0 - 1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi). Berikut ini merupakan capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024.

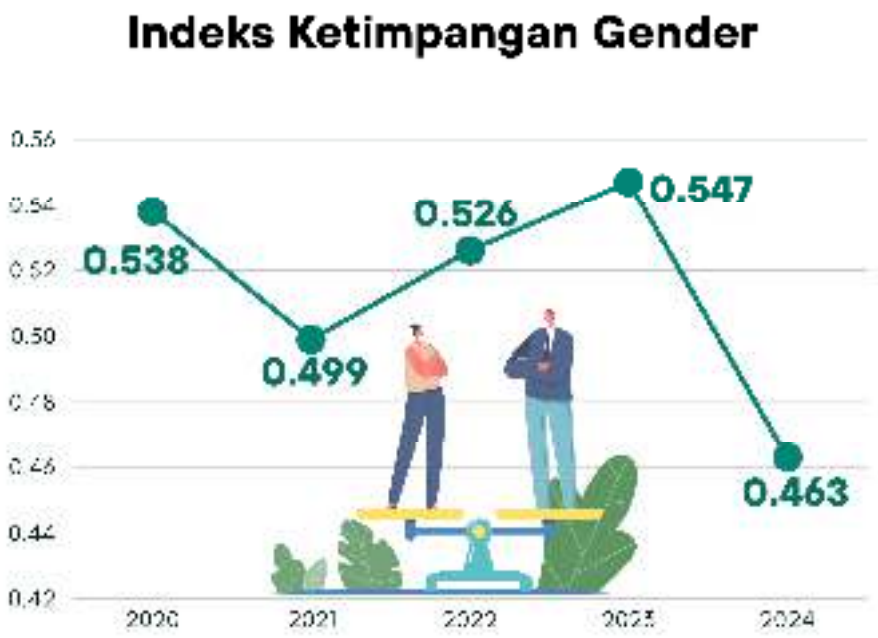

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.38 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020-2024 capaian IKG menunjukkan kecenderungan meningkat atau ketimpangan makin naik. Capaian IKG Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 sebesar 0,538 menurun tahun 2021 menjadi sebesar 0,499, selanjutnya naik sebesar 0,027 poin pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,526, dan tahun 2023 naik sebanyak 0,021 point menjadi sebesar 0,547. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin meningkat atau kesetaraan yang semakin menurun. Oleh karena itu, butuh perhatian berbagai pihak lintas sektor terkait untuk menurunkan IKG tersebut dengan berbagai aksi nyata diantaranya: meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi kepada wanita usia 15 – 49 tahun; meningkatkan Advokasi dan KIE Pemberdayaan Perempuan agar perempuan di Kabupaten Bondowoso lebih berdaya. Sehingga presentase perempuan yang menjadi anggota legislatif semakin meningkat dan memiliki pendidikan yang tinggi (SMA ke atas); meningkatkan capaian TPAK

(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) pada perempuan, sehingga kesempatan kerja bagi perempuan bisa setara dengan kesempatan kerja pada laki – laki.

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang mengukur kesetaraan gender dalam suatu masyarakat. IPG mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (rasio jenis kelamin), pendidikan (rasio lama sekolah antara jenis kelamin), dan partisipasi ekonomi (rasio partisipasi tenaga kerja antara jenis kelamin). IPG memberikan informasi tentang sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

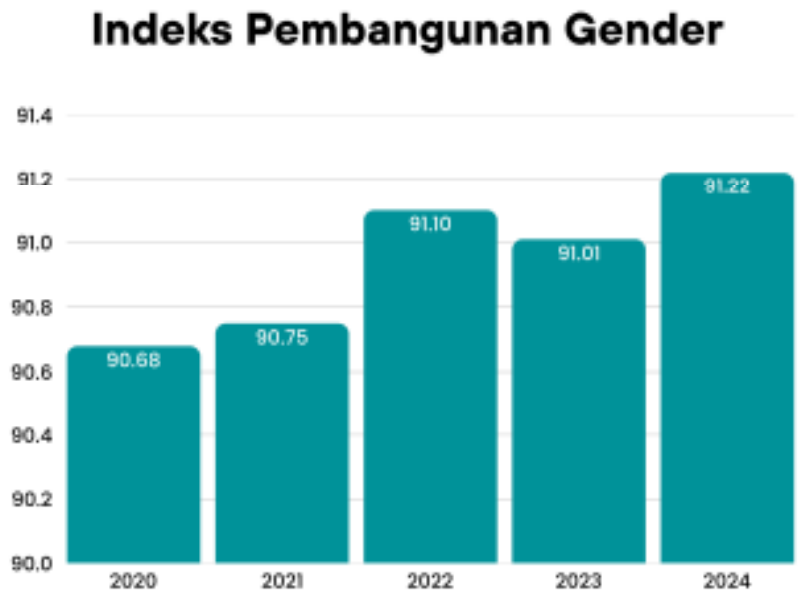

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan perbaikan signifikan dimana pada tahun

2020, IPG mencapai 90,68, dan mengalami peningkatan yang positif hingga mencapai 91,22 di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam memperbaiki kesenjangan gender dalam tiga dimensi utama yang diukur oleh IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Kemungkinan adanya upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap hasil positif ini. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang mendukung peningkatan IPG dan untuk merancang kebijakan yang berkelanjutan guna terus memperkuat kesetaraan gender di Kabupaten Bondowoso.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah atau daerah dalam berdaya saing serta mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daya saing sering dimaknai sebagai produktivitas. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi. Pendekatan yang sering dilakukan untuk mengukur daya saing dilihat beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta ada juga yang keunggulan absolut.

Aspek daya saing daerah berdasarkan kepada Rencana Induk Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJPID) yang merupakan dokumen strategis daerah yang memuat arah kebijakan, prioritas, serta peta jalan pengembangan IPTEK dan inovasi berbasis potensi lokal. RIPJPID menjadi landasan dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Salah satu fokus utama RIPJPID adalah pembangunan ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal. Ekosistem ini melibatkan berbagai aktor kunci seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, komunitas inovator, serta masyarakat.

Secara umum, kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Beberapa aspek penting yang mencerminkan kondisi tersebut antara lain:

1. Kelembagaan dan Kebijakan Tersedianya kebijakan daerah yang mendukung riset dan inovasi, seperti Perda/LKD tentang inovasi daerah, serta terbentuknya perangkat kelembagaan seperti Bappeda,

BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), dan forum koordinasi inovasi daerah. Ini memperkuat tata kelola inovasi yang terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Kapasitas SDM dan Litbang.

   Ketersediaan sumber daya manusia peneliti dan tenaga Inovator masih terbatas secara kuantitatif, namun kualitasnya terus berkembang melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Peran kampus dan SMK vokasi menjadi penggerak penting dalam penguatan kapasitas SDM litbang.

3. Kolaborasi Quadruple Helix.

   Semakin terbukanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong hilirisasi hasil riset, inkubasi UMKM berbasis teknologi, serta pengembangan produk lokal berdaya saing. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang produktif dan berdampak nyata pada perekonomian daerah.

4. Akses Pendanaan dan Sarana Prasarana.

   Dukungan anggaran inovasi masih relatif kecil dalam APBD, namun terdapat akses ke skema pembiayaan lain seperti Dana Inovasi Daerah, hibah riset nasional, dan kemitraan swasta. Infrastruktur dasar seperti laboratorium, teknologi informasi, dan pusat inovasi (*innovation hub*) yang dapat dibangun di daerah.

5. Pemanfaatan Potensi Lokal dan Teknologi Inovasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan lokal dan mengolah potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan energi terbarukan. Penerapan teknologi tepat guna, digitalisasi layanan publik, dan sistem informasi daerah menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

6. Indikator Daya Saing dan Inovasi Daerah.

   Kemajuan ekosistem riset dan inovasi tercermin dalam peningkatan indeks daya saing daerah, jumlah inovasi yang terdaftar, jumlah

paten/HAKI yang dihasilkan, serta pertumbuhan *startup* berbasis teknologi lokal. RIPJPID turut menjadi acuan dalam memperbaiki capaian indikator-indikator tersebut secara konsisten.

Dengan penguatan ekosistem riset dan inovasi yang terpadu dan berkelanjutan, RIPJPID kemudian berperan dalam menciptakan daya saing daerah yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based development*) dan mendorong transformasi struktural perekonomian menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hasil data dan penelitian yang dilakukan dalam RIPJPID ke depan, akan dapat menentukan pilihan terhadap program super prioritas Bupati. Hal tersebut dapat dipilih dan ditentukan sekurang-kurangnya 1 tema untuk masing-masing produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah.

Berikut adalah data-data capaian yang selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bondowoso terkait aspek daya saing daerah.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas) dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan Kerja (usia 15-64 tahun). Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan di Kabupaten Bondowoso sebesar 44,92% sedangkan pada tahun 2024 angka rasio ketergantungan sebesar 47,01 % yang artinya pada tahun 2024 setiap 100 penduduk usia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang tidak produktif.

Tabel 2. 44 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (dalam jiwa)

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk usia 0-14	157.043	155.490	154.210	159.166	160.120
2	Jumlah Penduduk usia 15-64	538.370	538.471	538.457	486.322	541.400
3	Jumlah Penduduk usia 65+	89.521	80.738	84.564	88.570	90.800
4	Rasio (%)	44,92	44,17	44,58	31,06	47,01
	Jumlah	**776.721**	**776.151**	**778.525**	**781.417**	**792.309****

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

***Hasil Data penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)*

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi merupakan salah satu pendorong untuk tidak hanya mempertahankan, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diupayakan dengan mengembangkan sektor unggulan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain potensi unggulan sektoral, terdapat juga keunggulan absolut yaitu dengan keberadaan Kawasan Gunung Ijen serta penetapan beberapa destinasi di Kawasan Ijen sebagai Unesco Global Geopark. Peningkatan status menjadi kepariwisataan internasional diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan investasi serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kawasan pariwisata Ijen diharapkan menjadi penopang sektor pariwisata, UMKM dan kebudayaan melalui standarisasi, sertifikasi SDM pelaku UMKM, pelaku wisata maupun

budayawan sehingga mampu bersaing di era global dengan pemanfaatan teknologi digital.

Ekonomi kreatif yang berkembang terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu keunggulan kompetitif, kedepan perlu mendapat perhatian. Sub sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang diharapkan mampu menciptakan perluasan lapangan kerja serta menjadi daya ungkit perekonomian Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2023 sebanyak 10 jenis usaha subsektor ekonomi kreatif tercatat dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan jumlah 503 usaha.

Bondowoso sebagai daerah mayoritas muslim memiliki potensi keuangan Syariah yang cukup tinggi. Saat ini telah berkembang perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia di Bondowoso. Berkembang pula Lembaga pengelola dana sosial syariah seperti Baznas, Lazisnu, Lazismu, dan lainnya yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang dapat dijadikan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Beberapa perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Bondowoso membuka juga program ekonomi Syariah guna mendukung perkembangan ekonomi Syariah di Bondowoso. Penguatan ekonomi syariah daerah guna mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah

2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, menggunakan seperangkat variabel dan indikator yang telah ditetapkan. IID memberikan gambaran

tentang tingkat inovasi di setiap daerah, membantu pemerintah dalam mengidentifikasi praktik terbaik, dan mendorong daerah untuk terus berinovasi. Lebih lanjut, selain sebagai instrumen penting dalam mengukur kapasitas dan ekosistem inovasi suatu wilayah, IID juga mencakup aspek kemampuan menciptakan serta menerapkan teknologi serta ide baru dalam pembangunan.

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2.40 Perkembangan Nilai IID Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024

IID juga memiliki korelasi dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang dalam hal ini daerah dengan tingkat inovasi yang tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. Daya saing daerah sendiri merupakan parameter krusial dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, akses keuangan, kapasitas inovasi yang saling terintegrasi dan lain sebagainya. hubungan integratif dalam ini menunjukkan upaya terhadap penguatan inovasi daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing, sehingga nantinya dapat memperkuat posisi daerah dalam persaingan nasional maupun global, sehingga mendorong tercapainya

pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

IDSD ini merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah untuk memberikan gambaran produktivitas dan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Skor IDSD Kabupaten Bondowoso selama periode 2022-2024 mengalami tren yang cukup positif setiap tahun. Pada tahun 2024 skor IDSD Kabupaten Bondowoso mencapai angka 3,32 yang mendekati rata-rata IDSD nasional, sebesar 3,43. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Bondowoso memiliki daya saing yang sedang dan potensi ekonomi yang cukup baik.

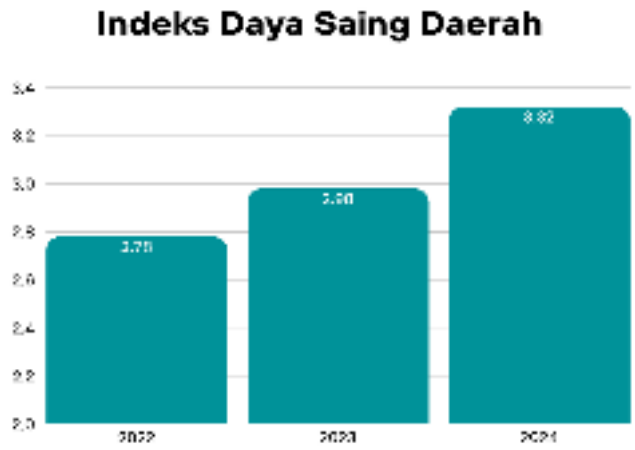

Gambar 2.41 Perkembangan IDSD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024

Dalam perkembangan Kabupaten Bondowoso, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala pembangunan daerah. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Daya Saing Daerah yang telah diamanatkan adalah keterpaduan riset dan inovasi daerah. Riset dan inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyusun dokumen peta potensi dan investasi untuk menjadi pedoman pemangku kebijakan walaupun masih menggunakan analisis sektor basis yang mengukur indikator makro ekonomi di daerah berupa sektor-sektor basis yang potensial. Penyempurnaan dokumen berupa analisis Produk Unggulan Daerah (PUD) penting untuk dilakukan.

Produk unggulan daerah yang sudah teramanatkan adalah bagaimana daerah dapat mengeksplorasi hasil daerahnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pelaku usaha. Berdasarkan pemetaan pelaku usaha, PUD yang bisa digarisbawahi adalah kuliner (makanan dan minuman), fesyen (tekstil, pakaian jadi dan batik), industri pengolahan tembakau, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, industri furniture dan industri galian bukan logam. Mind Mapping PUD adalah bentuk identifikasi permasalahan serta penyesuaian dengan bukti eviden yang dimiliki oleh OPD teknis.

2.3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur PDRB Kabupaten Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB dengan kontribusi di atas 25 persen. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,41 persen dengan nilai PDRB sebesar 5.946,50 Miliar rupiah. Secara persentase kontribusinya terus menurun sampai pada tahun 2023 menjadi sebesar 27,88 persen namun secara angka dalam rupiah justru kontribusinya meningkat yaitu sebesar 6.906,68 Miliar rupiah dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 dengan nilai PDRB sebesar 7.445,84 Miliar rupiah atau secara kontribusi total sebesar 28,05 persen.

Besaran kontribusi Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang terlihat semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 22,56 persen dengan nilai PDRB sebesar 4.762,10 Miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2024 dengan nilai PDRB sebesar 6.691,30 Miliar rupiah. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 15,20 persen dengan nilai PDRB sebesar 2.879,90 Miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 15,78 persen dengan nilai PDRB sebesar 4.188,10 Miliar rupiah.

Kontribusi dari 5 (lima) lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi pada tahun 2020 sebesar 82,88 persen dari total PDRB sebesar 16.521,3 Miliar rupiah dan tahun 2024 mencapai 83,65 persen dari total PDRB sebesar 22.203,01 Miliar rupiah atas dasar harga berlaku. Tabel perkembangan kontribusi lapangan usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 45 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Miliar Rp)	%	(Miliar Rp)	%	(Miliar Rp)	%	(Miliar Rp)	%	(Miliar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.946,50	30,41	6.204,93	29,47	6.489,78	28,34	6.906,68	27,88	7.445,84	28,05
2	Pertambangan dan Penggalian	373,7	21	388,06	1,84	425,65	1,86	453,48	1,83	462,88	1,74
3	Industri Pengolahan	4.762,10	22,56	5.140,41	24,42	5.788,78	25,28	6.300,31	25,43	6.691,30	25,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,6	0,04	9,01	0.04	9,74	0.04	10,59	0,04	11,24	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	14,5	0,07	15,68	0,07	16,12	0,07	16,37	0,07	16,35	0,06
6	Konstruksi	1.822,10	9,64	1.852,41	8,8	2.091,20	9,13	2.282,93	9,22	2.439,95	9,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.879,90	15,2	3.136,5	14,9	3.520,24	15,37	3.880,21	15,66	4.188,10	15,78
8	Transportasi dan Pergudangan	142	0,72	158,08	0,75	189,64	0,83	224,7	0,91	238,92	0,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,7	0,74	132,78	0,63	155,04	0,68	175,92	0,71	190,51	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	1.110,70	5,07	1.188,01	5.64	1.236,89	5,4	1.339,17	5,41	1.437,82	5,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	575,5	2,95	596,56	2,83	641,28	2,8	693,49	2,8	718,94	2,71
12	Real Estate	238,2	1,14	243,67	1,16	259,97	1,14	269,44	1,09	278,47	1,05
13-14	Jasa Perusahaan	73,4	0,38	76,35	0,36	81,73	0,36	89,4	0,36	97,12	0,37
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan	697,4	3,32	697,89	3,32	702,78	3,07	709,43	2,86	782,30	2,95
16	Jasa Pendidikan	724,7	3,43	741,71	3,52	764,93	3,34	834,1	3,37	910,09	3,43
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156,9	0,71	167,71	0,8	175,56	0.77	187,16	0,76	198,24	0,75
18-21	Jasa Lainnya	283,7	1,63	302,49	1,44	352,51	1,54	399,97	1,61	435,00	1,64
PDRB		**19.935,60**	**100**	**21.052,23**	**100**	**22.901,86**	**100**	**24.773,36**	**100**	**26.543,06**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Hasil Analisis *Shift Share* terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso tahun 2024 dengan tahun awal analisis tahun 2015 menggunakan variabel regional PDRB sektoral Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah analisis dan PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah referensi untuk tahun 2015 dan 2024, disajikan dibawah ini.

Nilai PDRB sektoral Provinsi Jawa timur tahun 2015 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.46 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2024 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Jawa Timur		Perubahan	
		2015	2024	Absolut	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	160.889,40	177.789,80	6.900,40	10,50
2	Pertambangan dan Penggalian	65.707,00	72.588,57	6.881,57	10,47
3	Industri Pengolahan	393.273,00	588.589,26	195.316,26	49,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.455,30	6.727,74	2.272,44	51,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.299,30	1.898,56	599,26	46,12
6	Konstruksi	120.688,30	181.967,62	61.279,32	50,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	243.014,70	368.883,68	125.868,98	51,79
8	Transportasi dan Pergudangan	38.895,70	66.044,11	27.148,41	69,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.657,00	108.833,45	41.176,45	60,86
10	Informasi dan Komunikasi	73.640,00	135.143,73	61.503,73	83,52

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Jawa Timur		Perubahan	
		2015	2024	Absolut	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	34.730,30	46.483,85	11.753,55	33,84
12	Real Estat	23.092,60	33.414,39	10.321,79	44,70
13,14	Jasa Perusahaan	10.349,10	15.316,23	4.967,13	48,00
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	30.236,30	37.780,98	7.544,68	24,95
16	Jasa Pendidikan	35.330,70	51.184,27	15.853,57	44,87
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.743,30	14.399,03	5.655,73	64,69
18, 19,20, 21	Jasa Lainnya	19.374,40	28.764,88	9.390,48	48,47
	Total	**1.331.376,40**	**1.935.810,15**	**604.433,75**	**45,40**

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai total maupun sektoral PDRB Jawa Timur mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu satu dekade, nilai total PDRB Jawa Timur tahun 2024 naik sebesar Rp 604.433,75 miliar atau tumbuh 45,40 persen dibandingkan tahun 2015. Kategori atau lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (10) menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 jika dibandingkan dengan tahun awal analisis 2015 yaitu meningkat sebesar Rp 61.503,73 miliar atau tumbuh 83,52 persen. Terdapat sepuluh kategori lainnya yang tumbuh di atas pertumbuhan total PDRB Jawa Timur yaitu: Transportasi dan Pergudangan (69,80), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (64,69), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (60,86), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda (51,79), Pengadaan Listrik dan Gas (51,01), Konstruksi (50,77), Industri Pengolahan (49,66), Jasa Lainnya (48,47), Jasa Perusahaan (48,00) dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang (46,12).

Terdapat Enam kategori tumbuh di bawah pertumbuhan total PDRB Jawa Timur yaitu: Jasa Pendidikan (44,87), Real Estat (44,70), Jasa Keuangan dan Asuransi (33,84), Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial (24,95), Pertanian, Kehutanan, Perikanan (10,50), dan Pertambangan dan Penggalian (10,47).

Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai wilayah analisis. Nilai PDRB sektoral Kabupaten Bondowoso tahun 2015 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.47 PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 dan 2024 (Milyar Rupiah)

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		Perubahan	
		2015	2024	Absolut	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.431,00	3.970,09	539,09	15,71
2	Pertambangan dan Penggalian	236,40	283,92	47,52	20,10
3	Industri Pengolahan	2.416,40	3.914,48	1.498,08	62,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	8,42	2,72	47,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,90	11,87	2,97	33,37
6	Konstruksi	932,90	1.328,76	395,86	42,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.748,10	2.623,62	875,52	50,08
8	Transportasi dan Pergudangan	79,30	149,94	70,64	89,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,30	110,13	35,83	48,22
10	Informasi dan Komunikasi	675,60	1.229,39	553,79	81,97

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		Perubahan	
		2015	2024	Absolut	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,10	434,44	106,34	32,41
12	Real Estat	137,60	191,28	53,68	39,01
13,14	Jasa Perusahaan	40,20	56,71	16,51	41,07
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	380,50	460,17	79,67	20,94
16	Jasa Pendidikan	396,20	608,62	212,42	53,61
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,70	135,74	51,04	60,26
18, 19,20, 21	Jasa Lainnya	203,70	291,68	87,98	43,19
	Total	11.179,60	15.809,26	4.629,66	41,41

Berdasarkan data tersebut, nilai total maupun sektoral PDRB Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu satu dekade, nilai total PDRB Kabupaten Bondowoso naik sebesar Rp 4.629,66 miliar atau tumbuh 41,41 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi total Bondowoso masih dibawah Provinsi Jawa Timur, kategori atau lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 jika dibandingkan dengan tahun awal analisis 2015 yaitu meningkat sebesar Rp 70,64 miliar atau tumbuh sebesar 89,08 persen. Terdapat sembilan kategori lainnya tumbuh di atas pertumbuhan total PDRB Kabupaten Bondowoso adalah Informasi dan Komunikasi (81,97), Industri Pengolahan (62,00), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (60,26), Jasa Pendidikan (53,61), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda (50,08), Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum (48,22), Pengadaan Listrik dan Gas (47,72), Jasa Lainnya (43,19), dan Konstruksi (42,43).

Terdapat tujuh kategori yang tumbuh di bawah pertumbuhan total PDRB Kabupaten Bondowoso yaitu: Jasa Perusahaan (41,07), Real Estat (39,01), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang (33,37), Jasa Keuangan dan Asuransi (32,41), Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial (20,94), Pertambangan dan Penggalian (20,10), dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan (15,71).

Dalam analisis *Shift-Share* komponen Pertumbuhan Jawa Timur/*Regional Share* bermanfaat untuk melihat potensi ekonomi regional Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.48 Pertumbuhan Jawa Timur/*Regional Share* Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 dan 2024

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		Ra= ((Y_t/Y_0)-1)	PJT/RS (Miliar)
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.431,00	3.970,09	160.889,40	177.789,80	0,45	1.557,65
2	Pertambangan dan Penggalian	236,40	283,92	65.707,00	72.588,57	0,45	107,32
3	Industri Pengolahan	2.416,40	3.914,48	393.273,00	588.589,26	0,45	1.097,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	8,42	4.455,30	6.727,74	0,45	2,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,90	11,87	1.299,30	1.898,56	0,45	4,04
6	Konstruksi	932,90	1.328,76	120.688,30	181.967,62	0,45	423,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.748,10	2.623,62	243.014,70	368.883,68	0,45	793,62

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		Ra= ((Y_t/Y_0)-1)	PJT/RS (Miliar)
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8	Transportasi dan Pergudangan	79,30	149,94	38.895,70	66.044,11	0,45	36,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,30	110,13	67.657,00	108.833,45	0,45	33,73
10	Informasi dan Komunikasi	675,60	1.229,39	73.640,00	135.143,73	0,45	306,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,10	434,44	34.730,30	46.483,85	0,45	148,95
12	Real Estat	137,60	191,28	23.092,60	33.414,39	0,45	62,47
13,14	Jasa Perusahaan	40,20	56,71	10.349,10	15.316,23	0,45	18,25
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	380,50	460,17	30.236,30	37.780,98	0,45	172,74
16	Jasa Pendidikan	396,20	608,62	35.330,70	51.184,27	0,45	179,87
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,70	135,74	8.743,30	14.399,03	0,45	38,45
18, 19,20 , 21	Jasa Lainnya	203,70	291,68	19.374,40	28.764,88	0,45	92,48
	Total	11.179,60	15.809,26	1.331.376,40	1.935.810,15	0,45	5.075,44

Tabel diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 5.075,44 miliar. Nilai positif dari PJTij/RSij baik secara total maupun setiap kategori menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bondowoso dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan Jawa Timur. Dapat dimaknai bahwa kebijakan umum dalam lingkup Jawa Timur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

Sektor ekonomi di Kabupaten Bondowoso yang mendapat dampak terbesar dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan yakni sebesar Rp 1.557,65 miliar dan yang terkecil adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 2,59 miliar.

Selanjutnya hasil perhitungan dari komponen Pertumbuhan Proporsional (PPij) disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.49 Pertumbuhan Proporsional (PPij) Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		(Ri-Ra)	PPij
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.431,00	3.970,09	160.889,40	177.789,80	-0,35	-1.197,24
2	Pertambangan dan Penggalian	236,40	283,92	65.707,00	72.588,57	-0,35	-82,57
3	Industri Pengolahan	2.416,40	3.914,48	393.273,00	588.589,26	0,04	103,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	8,42	4.455,30	6.727,74	0,06	0,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,90	11,87	1.299,30	1.898,56	0,01	0,06
6	Konstruksi	932,90	1.328,76	120.688,30	181.967,62	0,05	50,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.748,10	2.623,62	243.014,70	368.883,68	0,06	111,80
8	Transportasi dan Pergudangan	79,30	149,94	38.895,70	66.044,11	0,24	19,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,30	110,13	67.657,00	108.833,45	0,15	11,49
10	Informasi dan Komunikasi	675,60	1.229,39	73.640,00	135.143,73	0,38	257,54

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		(Ri-Ra)	PPij
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,10	434,44	34.730,30	46.483,85	-0,12	-37,92
12	Real Estat	137,60	191,28	23.092,60	33.414,39	-0,01	-0,97
13,14	Jasa Perusahaan	40,20	56,71	10.349,10	15.316,23	0,03	1,04
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	380,50	460,17	30.236,30	37.780,98	-0,20	-77,80
16	Jasa Pendidikan	396,20	608,62	35.330,70	51.184,27	-0,01	-2,09
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,70	135,74	8.743,30	14.399,03	0,19	16,34
18, 19,20 , 21	Jasa Lainnya	203,70	291,68	19.374,40	28.764,88	0,03	6,25
	Total	11.179,60	15.809,26	1.331.376,40	1.935.810,15		-821,17

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PPij) menunjukkan perubahan relatif kinerja dan menyatakan besar perubahan perekonomian baik secara total maupun menurut kategori tertentu di wilayah analisis terhadap total ekonomi maupun kategori yang sama di wilayah referensi. Secara total, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso mengalami perlambatan sebagai pengaruh aspek Pertumbuhan Proporsional (PPij) sebesar Rp -821,17 miliar. Nilai negative mengindikasikan bahwa komposisi lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Bondowoso cenderung ***belum*** mengarah pada perekonomian yang progresif (terspesialisasi).

Secara sektoral, hasil analisis memberikan gambaran pada PDRB Kabupaten Bondowoso terdapat sebelas kategori dari hasil perhitungan bernilai positif, diartikan bahwa kemajuan atau pertumbuhan ekonomi sebelas kategori tersebut di Kabupaten Bondowoso relatif lebih cepat

daripada kategori yang sama di level provinsi Jawa timur. sebelas kategori yang dimaksud yaitu:

1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
4. Konstruksi
5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
6. Transportasi dan Pergudangan
7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Informasi dan Komunikasi
9. Jasa Perusahaan
10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
11. Jasa Lainnya

Nilai positif terhadap sebelas kategori tersebut dapat pula dimaknai bahwa pertumbuhan yang positif terhadap sebelas sektor tersebut di level Provinsi Jawa Timur memberikan efek pertumbuhan yang cepat terhadap sektor-sektor yang sama di Kabupaten Bondowoso.

Sementara enam kategori yang lainnya merupakan kategori yang tergolong lambat kemajuan atau pertumbuhannya di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan kategori yang sama pada level Provinsi Jawa Timur. Enam Kategori dimaksud adalah :

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Jasa Keuangan dan Asuransi
4. Real Estat
5. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial
6. Jasa Pendidikan

Nilai negatif pada enam kategori selebihnya menunjukkan bahwa lambannya pertumbuhan enam kategori tersebut di tingkat Provinsi

Jawa Timur memberikan dampak pertumbuhan yang lamban terhadap kategori yang sama di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2.50 Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPWij) Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		(ri-Ri)	PPWij
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.431,00	3.970,09	160.889,40	177.789,80	0,05	178,69
2	Pertambangan dan Penggalian	236,40	283,92	65.707,00	72.588,57	0,10	22,76
3	Industri Pengolahan	2.416,40	3.914,48	393.273,00	588.589,26	0,12	297,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	8,42	4.455,30	6.727,74	-0,03	- 0,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,90	11,87	1.299,30	1.898,56	-0,13	- 1,13
6	Konstruksi	932,90	1.328,76	120.688,30	181.967,62	-0,08	- 77,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.748,10	2.623,62	243.014,70	368.883,68	-0,02	- 29,90
8	Transportasi dan Pergudangan	79,30	149,94	38.895,70	66.044,11	,19	15,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,30	110,13	67.657,00	108.833,45	-0,13	- 9,39
10	Informasi dan Komunikasi	675,60	1.229,39	73.640,00	135.143,73	-0,02	- 10,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,10	434,44	34.730,30	46.483,85	-0,01	- 4,70
12	Real Estat	137,60	191,28	23.092,60	33.414,39	-0,06	- 7,82
13,14	Jasa Perusahaan	40,20	56,71	10.349,10	15.316,23	-0,07	- 2,78
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	380,50	460,17	30.236,30	37.780,98	-0,04	- 15,27

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PDRB Kabupaten Bondowoso		PDRB Provinsi Jawa Timur		(ri-Ri)	PPWij
		2015	2024	2015	2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16	Jasa Pendidikan	396,20	608,62	35.330,70	51.184,27	0,09	34,64
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,70	135,74	8.743,30	14.399,03	-0,04	- 3,75
18, 19,20, 21	Jasa Lainnya	203,70	291,68	19.374,40	28.764,88	-0,05	- 10,75

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPWij) menunjukkan daya saing tiap sektor ekonomi/kategori lapangan usaha di wilayah analisis terhadap sector ekonomi di wilayah referensi. Apabila PPWij > 0 atau bertanda positif (+) maka sektor ekonomi tersebut memiliki daya saing yang baik terhadap wilayah referensinya. Sebaliknya bila bertanda negatif (-) atau PPWij < 0 berarti sector tersebut tidak memiliki daya saing terhadap wilayah referensinya. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat lima kategori di Kabupaten Bondowoso yang memiliki daya saing terhadap kategori yang sama di level Provinsi Jawa Timur. Lima kategori yang dimaksud yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Jasa Pendidikan

Sebaliknya dua belas kategori lainnya bertanda negatif (PPWij < 0) artinya sektor-sektor ekonomi tersebut di Kabupaten Bondowoso tidak memiliki daya saing yang baik dibandingkan sektor-sektor yang sama di level Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.51 Pergeseran Bersih (PBij) Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PPij	PPWij	PBij
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1.197,24	178,69	-1.018,56
2	Pertambangan dan Penggalian	-82,57	22,76	-59,80
3	Industri Pengolahan	103,06	297,99	401,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	-0,19	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,06	-1,13	-1,07
6	Konstruksi	50,15	-77,82	-27,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	111,80	-29,90	81,90
8	Transportasi dan Pergudangan	19,35	15,29	34,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,49	-9,39	2,10
10	Informasi dan Komunikasi	257,54	-10,47	247,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-37,92	-4,70	-42,61
12	Real Estat	-0,97	-7,82	-8,79
13,14	Jasa Perusahaan	1,04	-2,78	-1,74
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-77,80	-15,27	-93,07
16	Jasa Pendidikan	-2,09	34,64	32,55
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,34	-3,75	12,59
18, 19,20, 21	Jasa Lainnya	6,25	-10,75	-4,50

Analisis berikutnya menurut komponen Pergeseran Bersih (PBij) menunjukkan pergeseran bersih yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan perekonomian sektoral. Kategori dengan pertumbuhan yang progresif, artinya benar-benar memiliki pertumbuhan yang positif (+) yang didapat dari penjumlahan komponen PPij dengan PPWij. Dari hasil perhitungan, terdapat 8 kategori yang bertanda positif (+) atau PBij > 0. Kedelapan kategori tersebut yaitu:

1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6. Informasi dan Komunikasi
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sebaliknya terdapat sembilan kategori yang memiliki tanda negatif (PBij < 0) artinya sembilan kategori tersebut memiliki pertumbuhan yang lamban,

Tabel 2.52 Perubahan PDRB Tiap Kategori Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2024

No.	Kategori/ Lapangan usaha	PJTij/RSij (Miliar)	*dQij*	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.557,65	539,09	RSij>dQij
2	Pertambangan dan Penggalian	107,32	47,52	RSij>dQij
3	Industri Pengolahan	1.097,03	1.498,08	RSij<dQij
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,59	2,72	RSij<dQij
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	4,04	2,97	RSij>dQij
6	Konstruksi	423,53	395,86	RSij>dQij
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	793,62	875,52	RSij<dQij
8	Transportasi dan Pergudangan	36,00	70,64	RSij<dQij
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,73	35,83	RSij<dQij
10	Informasi dan Komunikasi	306,72	553,79	RSij<dQij
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	148,95	106,34	RSij>dQij
12	Real Estat	62,47	53,68	RSij>dQij
13,14	Jasa Perusahaan	18,25	16,51	RSij>dQij
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	172,74	79,67	RSij>dQij
16	Jasa Pendidikan	179,87	212,42	RSij<dQij
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,45	51,04	RSij<dQij
18, 19,20, 21	Jasa Lainnya	92,48	87,98	RSij>dQij

Perubahan PDRB di wilayah analisis disebabkan ketiga komponen *ShiftShare* yaitu *PJTij*, *PPij*, dan *PPWij*. Hasil perhitungan *PNij / RSij* < *dQij* maka pertumbuhan kategori tertentu di wilayah analisis akan mendorong pertumbuhan kategori yang sama di wilayah referensi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 8 kategori dengan *PNij / RSij*

< $dQij$. Dapat diartikan bahwa 8 kategori tersebut di Kabupaten Bondowoso merupakan kategori pendorong pertumbuhan kategori yang sama di level Provinsi Jawa timur. Delapan kategori tersebut yaitu:

1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6. Informasi dan Komunikasi
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sedangkan sembilan kategori lainnya di Kabupaten Bondowoso belum mampu menjadi pendorong pertumbuhan kategori yang sama di level Provinsi Jawa timur. Sembilan kategori tersebut yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
4. Konstruksi
5. Jasa Keuangan dan Asuransi
6. Real Estat
7. Jasa Perusahaan
8. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial
9. Jasa Lainnya

Berdasarkan analisis shift share, Kabupaten Bondowoso memiliki 5 sektor ekonomi yang berdaya saing dengan wilayah sekitar antara lain :

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Transportasi dan Pergudangan

5. Jasa Pendidikan

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja di suatu wilayah yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang ada di Kabupaten Bondowoso. TPAK Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya bergerak fluktuatif, dengan pertumbuhan sebesar 0,25% dan rata-rata sebesar 74,62%. Berikut merupakan data TPAK tahun 2020-2024.

Tabel 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2020	75,09
2021	73,89
2022	74,61
2023	74,39
2024	75,10

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Pemberdayaan perempuan diupayakan dengan mengoptimalkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh kesempatan dan hak peran maupun partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan secara adil. Partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja tahun 2020-2024 di Kabupaten Bondowoso cenderung stagnan, yaitu secara persentase berkisar antara 55-60 persen.

Tabel 2.54 Pemberdayaan Perempuan dalam Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	195.810	198.975	188.280	192.077	192.710
2	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62,08	60,70	60,69	62,11	60,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau mengacu pada upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif, tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan ekonomi hijau antara lain: pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; kebijakan dan regulasi lingkungan; pengembangan energi terbarukan; transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan; pendidikan dan kesadaran lingkungan; dan ekonomi sirkular dan industri hijau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso perlu untuk terus mendukung kebijakan yang menerapkan ekonomi hijau dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi potensi terbesar dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, membuat regulasi yang melindungi kepentingan lingkungan, serta implementasi elemen lain yang mendukung dilaksanakannya ekonomi hijau.

Implementasi ekonomi hijau di Kabupaten Bondowoso diwujudkan dengan pengelolaan Industri yang menggunakan bahan bakar non

migas, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Perkembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bondowoso dapat diukur dari pertumbuhan PDRB non migas.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu langkah penting yang harus mulai dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai gambaran kondisi ekosistem digital masyarakat Kabupaten Bondowoso adalah indikator Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang tercatat 30,25 pada tahun 2022, meningkat menjadi 39,17 pada tahun 2023, dan sedikit menurun pada 2024 menjadi 38,36.

Di era teknologi saat ini, dimana teknologi informasi menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat maka tujuan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi harapan utama masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkomitmen memulai tahapan awal transformasi digital secara bertahap dan terarah.

Langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem layanan digital yang terintegrasi, atau yang dikenal dengan istilah super platform. Sistem ini akan menyatukan beberapa layanan dasar pemerintah, seperti perizinan, kependudukan dan aduan masyarakat, ke dalam satu platform yang mudah digunakan. Meskipun dimulai dengan beberapa jenis layanan, pengembangan aplikasi ini menjadi langkah awal penting menuju layanan publik yang lebih modern.

Untuk mempercepat proses ini dapat dilakukan dengan melakukan penataan ulang proses kerja agar lebih siap menggunakan teknologi digital. Langkah-langkah praktis seperti digitalisasi dokumen, pelatihan pegawai, dan penguatan jaringan internet.

Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan talenta digital, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan generasi muda menjadi perhatian. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang mampu mengelola layanan digital dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan strategi yang bertahap dan dimungkinkan untuk dicapai akan dapat membangun fondasi transformasi digital. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mendorong efisiensi kerja, serta membuka peluang baru di bidang ekonomi digital lokal.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Daya Saing Iklim Investasi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya agar investasi terus meningkat, mengingat investasi merupakan salah satu fungsi perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal dilakukan dengan promosi, meningkatkan iklim investasi sesuai potensi unggulan daerah, dengan kemudahan perizinan dalam berusaha, meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan infrastruktur sesuai pola tata ruang wilayah, ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja, serta terus mendorong kondusifitas wilayah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Disamping selalu menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan adanya perbedaan kewenangan dalam persetujuan perizinan.

Realisasi penanaman modal tahun 2021-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.55 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	PMA	153.285.417.508	157.640.472.898	898.893.597.335	1.168.332.000.000
2	PMDN	93.879.700.000	262.038.700.000	86.525.600.000	110.079.800.000
Jumlah		**247.165.117.508**	**419.679.172.898**	**985.419.197.335**	**1.278.411.800.000**

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2025

Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penanaman modal yang bersumber dari PMA maupun PMDN meningkat dari tahun 2021-2024 dengan total peningkatannya mencapai 298,68%.

Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, iklim investasi di Kabupaten Bondowoso menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan, ditandai dengan meningkatnya realisasi penanaman modal pada tahun 2023, khususnya dari sektor Penanaman Modal Asing (PMA). Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bondowoso mulai dilirik oleh investor global sebagai wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan yang layak untuk investasi jangka panjang. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bondowoso mulai dilirik sebagai tujuan investasi yang prospektif oleh pelaku usaha internasional, berkat potensi sektor unggulan seperti pertanian organik, energi terbarukan, pariwisata alam (terutama Ijen Geopark), serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Tingginya realisasi PMA tersebut turut mencerminkan perbaikan persepsi terhadap kemudahan berusaha, aksesibilitas sumber daya,

serta peluang pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menandai adanya transformasi positif dalam iklim usaha di Kabupaten Bondowoso.

Disisi lain perlu untuk melakukan stabilisasi dalam meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Fenomena ini menandakan masih terdapat tantangan struktural dalam mendukung pelaku usaha lokal, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, keterampilan manajerial, dan kepastian regulasi yang ramah usaha. Untuk memperkuat iklim investasi dan mempertahankan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengambil langkah strategis melalui:

1. Peningkatan insentif investasi yang kompetitif,
2. Penyederhanaan sistem perizinan dan tata kelola layanan investasi,
3. Penguatan dukungan terhadap UMKM dan usaha lokal, melalui fasilitasi akses permodalan dan inkubasi bisnis, serta
4. Promosi potensi unggulan daerah secara aktif kepada calon investor domestik maupun internasional.

Sinergi antara investasi asing dan domestik akan menjadi fondasi penting dalam membentuk struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan iklim investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing tinggi.

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin dalam indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini mengukur seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan

peningkatan satu unit output (atau nilai tambah). Secara umum, ICOR digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi yang diperlukan guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, serta untuk menilai tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Perkembangan nilai ICOR Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	ICOR	7,05	7,25	5,61	5,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022-2025

Tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren membaik dari tahun ke tahun. Nilai ICOR yang sempat mencapai 7,25 pada tahun 2022 menurun menjadi 5,61 pada 2023, dan terus menurun ke angka 5,27 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin efektifnya pemanfaatan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di mana semakin kecil nilai ICOR menandakan bahwa setiap tambahan investasi menghasilkan output yang lebih tinggi.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Kualitas Infrastruktur

Salah satu aspek untuk mengungkit daya saing daerah adalah aspek infrastruktur dalam hal ini infrastruktur kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang perlu dilakukan untuk mendukung perekonomian suatu daerah. Kondisi jalan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kabupaten (Km)	1.395,28	1.395,28	1.395,28	1.395,28	1.382,42
2	Jalan aspal (Km)	1.156,15	1.063,02	1.208,41	1.103,50	1.171,01
3	Jalan Makadam (Km)	39,95	107,99	81,92	178,08	108,27
4	Jalan Tanah (Km)	199,18	224,23	104,95	113,7	103,14
5	Jalan Mantap (Km)	881,12	982,71	973,10	902,83	898.22
6	Persentase Jalan Mantap (%)	63,15	70,43	69,74	64,71	64,97
7	Jumlah Jembatan (buah)	293	310	310	310	310
	1)Kondisi baik (buah)	248	245	245	245	245
	2)Kondisi rusak (buah)	45	65	65	65	65

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun terus berupaya agar kualitas infrastruktur semakin baik, dimana kondisi jalan mantap maupun jaringan irigasi baik semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun untuk jalan mantap tahun 2024 turun disebabkan meningkatnya jalan rusak akibat beberapa faktor seperti usia jalan dan tidak adanya drainase jalan.

Berkaitan dengan prasarana perhubungan, arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi. Jumlah penumpang yang berangkat dari terminal Bondowoso dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Tercatat tahun 2020 sebanyak 127.423 orang menjadi 69.5109 orang di Tahun 2024. Sementara jumlah kendaraan pribadi dan angkutan barang juga menunjukkan fluktuatif. Jumlah penumpang dan kendaraan bermotor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Penumpang dan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Arus penumpang di Terminal					
	- Keberangkatan penumpang	127.423	60.041	79.851	68.409	69.510
	- Kedatangan penumpang	89.377	27.475	38.630	27.130	28.250
2.	Kendaraan pribadi					
	- Kendaraan Roda 4	20.268	15.217	14.953	15.423	22.544
	- Kendaraan Roda 2	189.462	99.750	120.749	96.780	116.415
3.	Moda Angkutan Barang/Orang					
	- Angkutan Barang	4.454	4.649	3.349	5.456	3.887
	- Angkuran Umum	217	165	165	197	188

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, 2025

Prasarana dan sarana perhubungan diperlukan untuk mendukung kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penumpang dan barang, diantaranya adalah rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk, prasarana penerangan jalan dan halte. Jumlah prasarana dan sarana perhubungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Jumlah Prasarana dan Sarana Perhubungan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu Lalu Lintas (unit)	1.656	1.723	1.867	1.944	2.108
2	Penerangan Jalan Umum Taksasi (titik)	6.000	6.000	5.917	5.851	5.851
3	Penerangan Jalan Umum (unit)	3.696	3.743	3.743	3.763	3.786
4	Halte (unit)	25	25	25	25	25
5	Alat Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	9	11	11	11	11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, 2025

Pemeriksaan kendaraan atau Uji KIR dilaksanakan untuk memenuhi aspek pelayanan keselamatan angkutan umum. Kelengkapan sarana uji kendaraan bermotor meliputi alat pengujian emisi, pengujian rem, uji lampu, uji ketebalan ban, uji kegelapan kaca, uji emisi COHC,

uji ketebalan asap, uji berat, uji kincup roda depan, uji penunjuk kecepatan dan uji tingkat suara.

Sebagian besar masyarakat Bondowoso bermata pencaharian di bidang pertanian, kondisi jaringan irigasi yang baik merupakan kebutuhan utama dalam rangka menunjang produksi dan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Panjang saluran irigasi kondisi baik pada tahun 2020 mencapai sepanjang 430.416 meter dari total panjang saluran irigasi sepanjang 584.552 meter atau sepanjang 73,63 persen dalam kondisi baik. Pada tahun 2024 panjang saluran irigasi kondisi baik meningkat mencapai 450.853 meter atau 77,13 persen dalam kondisi baik. Selama 5 tahun terakhir panjang saluran irigasi kondisi baik meningkat sepanjang 20.437 meter. Kondisi jaringan irigasi tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Saluran (m)	584.552	584.552	584.552	584.552	584.552
2	Panjang Saluran Irigasi Baik (m)	430.416	435.732	441.007	446.707	450.853
3	Persentase Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (%)	73,63	74,54	75,44	76,42	77,13

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

2.3.6.2 Layanan Air Minum, Sanitasi, Perumahan, Permukiman

Penyediaan sarana prasarana air minum perdesaan dilaksanakan melalui sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan yang mencukupi kebutuhan air minum masyarakat desa dan bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cakupan rumah

Tangga yang menggunakan air minum tahun 2024 mencapai tingkat 82,73% dari tahun 2020 sebesar 73,54%. Perkembangan cakupan rumah Tangga menggunakan air minum disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum layak (jiwa)	570.818	609.859	628.842	643.492	649.072
2.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	73,54	78,16	80,59	80,75	82,73

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Sedangkan pada kawasan perkotaan, pelayanan air bersih dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum ”Tirta Dharma” Bondowoso melalui 14 sistem jaringan meliputi 1 unit BNA Bondowoso dan 13 unit UPK (Sukosari 1, Sukosari 2, Maesan, Tegalampel, Tapen, Prajekan, Tlogosari, Wringin, Curahdami, Pakem, Tamanan, Taman Krocok dan Tenggarang) yang menjangkau 16 kecamatan. Kondisi pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.62 Pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020-2024

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas sumber air	L/dt	158,3	163,0	171,5	171,4	172,7
2	Produksi air	M^3	3.789.547	3.728.549	3.657.153	3.641.117	3.569.938
3	Jumlah Pelanggan	pelanggan	19.516	19.550	19.463	19.241	18.938
4	Penduduk terlayani	jiwa	120.262	119.960	119.398	115.446	113.682
5	Prosentase pelayanan	%	15,98	16.43	15,00	14,5	14,41

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, 2025

Dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, produksi air minum PDAM menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024

produksi air PDAM mencapai 3.569.938 m³ turun sebanyak 71.719 m³ dibanding tahun 2023 yang mencapai produksi sebanyak 3.641,117 m³. Sedangkan jumlah pelanggan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18.938 pelanggan dari tahun 2023 yang sebanyak 19.241.

Penanganan air limbah di Kabupaten Bondowoso menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan air limbah sebesar 75,59% meningkat menjadi 100% pada tahun 2023, sehingga Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 menerima piagam penghargaan sebagai daerah dengan predikat *Open Defecation Free (ODF*) dari Gubernur Jawa Timur dan di tahun 2024 tetap 100%. Namun hal ini masih perlu dilakukan percepatan karena hal tersebut masih dari sisi akses belum dari sisi prasarana. Sedangkan dari aspek prasarananya mencapai 84,61% di tahun 2024, naik dari tahun 2023 sebesar 84,43%. Perkembangan cakupan rumah tangga dengan akses air limbah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.63 Akses Sanitasi Layak Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Akses Sanitasi Layak (KK)	196.555	217.070	261.091	272.970	274.788
2	Persentase Akses Sanitasi Layak	75,59	83,44	96,03	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Untuk persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bondowoso masih 0% dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Bondowoso masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pengelolaan air limbah domestik secara jangka panjang diperlukan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site*, serta pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah.

Disamping itu diperlukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mencapai air limbah aman.

Pada tahun 2024, rasio rumah layak huni di Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi 74,72% atau sebanyak 203.567 rumah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 71,91%. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam rangka peningkatan rasio rumah layak huni dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih baik dan layak huni sehingga dengan adanya kegiatan ini berdampak pada meningkatnya rasio rumah layak huni setiap tahunnya meskipun jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bondowoso masih cukup banyak. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 64 Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga dengan akses hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan (unit)	185.836	186.686	187.094	187.888	203.567
2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	71,91	72,24	72,40	72,71	74,72

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

2.3.6.3 Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah dipusatkan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok. Bertambahnya luas

wilayah pelayanan memerlukan pengembangan teknologi komposting sampah organik dan penerapan sistem 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*) sebagai upaya pengurangan serta optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPA.

Tabel 2.65 Pengelolaan Persampahan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah (M3/hari)	1.941,82	1.940,39	1.946,33	1.959,70	1.973,70
2	Sampah Tertangani (%)	60,40	60,00	60,96	81,30	66,00
3	Rasio TPS per Penduduk	1,30	1,26	0,84	1,26	1,12
4	Pengangkutan Sampah (unit)	17	17	24	27	28
5	Penegakan Hukum Lingkungan (kasus)	8	3	1	3	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Komposisi sampah di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh sisa makanan sebesar 33,04%, disusul oleh sampah plastik 20,71% dan sampah kertas/karton 15,56%, sampah kayu/ranting sebesar 13,15%, sampah lainnya 13,94% serta jenis sampah lainnya seperti sampah logam, kain dan kaca sebesar 0,3-1,5%. Dari 23 Kecamatan di Bondowoso, terdapat 5 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Tegalampel, Klabang, Cermee, Sukosari dan Kecamatan Ijen. Pada tahun 2024 terdapat 28 unit alat pengangkut sampah. Sedangkan Rasio TPS per penduduk menurun di tahun 2024 sebesar 1,12. Adanya sarana pengangkutan sampah dan ketersediaan TPS tersebut tidak diimbangi dengan sampah yang tertangani pada tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023. Tercatat bahwa di Kabupaten Bondowoso memiliki 3 jenis fasilitas penanganan sampah, yaitu Bank Sampah (20 Bank aktif dan 40 Bank tidak aktif), TPS 3R di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang dan di Desa Wringin, Kecamatan Wringin serta Rumah Kompos di Depo Tamansari dan TPA Paguan.

Kabupaten Bondowoso menghasilkan timbulan sampah sebesar 315.202 ton/hari atau setara 115.049 ton/tahun dengan penanganan melalui Rumah Kompos, Bank Sampah serta dikelola di Rongsok sebesar 3,4 ton/hari atau setar 1.270 ton/tahun. Sedangkan sampah yang masuk ke TPA (tidak terkelola) sebesar 63,8 ton/hari atau setara dengan 23.273 ton/tahun.

Disamping itu, dilakukan pemulihan lingkungan atau restorasi lingkungan berupa proses meningkatkan pemulihan suatu ekosistem yang telah terdegradasi ataupun mengalami kerusakan, adapun kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai upaya pemulihan lingkungan antara lain seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemilahan sampah anorganik, serta pemulihan sumber air melalui pembuatan biopori. Tercatat pada tahun 2024, sampah yang berhasil dikomposkan sebesar 594,5 ton setahun dari fasilitas komposting yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari para komunitas pengelola persampahan yang ada di Kelurahan Badean, Kademangan dan Tamansari. Selain itu, pengurangan sampah pada tahun 2024 juga dibantu oleh 20 unit Bank Sampah yang mampu mengolah sampah sebesar 15,7 ton setahun.

2.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola potensi sumber daya lokal, menyediakan pelayanan dasar secara optimal, serta memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang kuat. Persentase ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan desa, termasuk efektivitas program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Persentase desa mandiri Kabupaten Bondowoso merujuk pada perbandingan jumlah desa yang telah mencapai status "mandiri" terhadap total jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Tabel 2. 66 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Mandiri	1	6	17	25	38
Jumlah Desa	209	209	209	209	209
Persentase Desa Mandiri	0,48	2,87	8,13	11,96	18,18

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2025

2.3.6.5 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. IKLI mengukur sejauh mana pemanfaatan dan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat, serta menilai kualitas output dan outcome dari penyediaan layanan infrastruktur.

Sampai saat ini, Kabupaten Bondowoso masih belum pernah melakukan pengukuran IKLI, dan direncanakan pada tahun 2025 akan dilakukan pengukuran IKLI dengan melakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan infrastruktur yang terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu kualitas jalan dan jembatan, kualitas infrastruktur Sumber Daya Air, ketersediaan transportasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.6.6 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini umumnya dihitung berdasarkan berbagai indikator, seperti kualitas jalan dan jembatan, ketersediaan transportasi, air bersih, dan drainase. Semakin tinggi indeks infrastruktur, menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur di wilayah tersebut semakin baik. Indeks infrastruktur biasanya terdiri dari beberapa komponen penilaian, seperti kualitas jalan dan jembatan, kualitas infrastruktur Sumber Daya Air, ketersediaan transportasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur air limbah.

Sampai saat ini, Kabupaten Bondowoso masih belum pernah melakukan pengukuran Indeks Infrastruktur, dan direncanakan pada tahun 2025 akan dilakukan pengukuran Indeks Infrastruktur.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di daerah merujuk pada kondisi ekonomi wilayah yang ditandai oleh keseimbangan antara berbagai indikator ekonomi utama seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang positif, angka pengangguran yang rendah, keseimbangan neraca perdagangan daerah, serta terkendalinya fluktuasi harga kebutuhan pokok. Stabilitas ini menjadi landasan penting bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, peningkatan daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal.

Di tingkat daerah, stabilitas ekonomi makro juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi pengelolaan anggaran, memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta mengelola risiko fiskal dengan bijak. Keberhasilan menjaga stabilitas

ekonomi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.

Lebih jauh, stabilitas ekonomi makro di daerah menjadi prasyarat utama untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, pariwisata, dan UMKM. Ketika ekonomi daerah stabil, kepercayaan publik meningkat, distribusi pembangunan menjadi lebih merata, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pun semakin kuat.

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah (produk domestik regional bruto/PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu periode tertentu (dapat dalam kurun waktu per tahun).

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi (PDRB) yang dihasilkan suatu daerah dalam satu tahun. Rasio ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pemungutan pajak, serta menjadi ukuran efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB daerah tersebut, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi pendapatan dari pajak terhadap aktivitas ekonomi daerah, yang dapat mengindikasikan kemampuan fiskal yang kuat, struktur ekonomi yang sehat, dan sistem perpajakan yang efektif.

PDRB per kapita menggambarkan tingkat pembangunan (*level of development*). Semakin tinggi tingkat pembangunan akan mendorong kemampuan membayar yang lebih tinggi dan mengumpulkan hasil pajaknya, sebagaimana semakin tinggi permintaan relatif atas pendapatan, baik barang maupun jasa publik. Sehingga secara teori, potensi pajak dipengaruhi oleh tingkat pembangunan di daerah. Sehingga, PDRB berkorelasi secara positif terhadap derajat potensi pajak daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah akan diikuti dengan meningkatnya kecakapan masyarakat, pergerakan uang, dan penegakan hukum yang lebih baik, sehingga akan membawa pada meningkatnya kapasitas pajak daerah. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.67 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	30.580.807.590,96	35.114.763.839,00	41.397.270.293,00	43.384.281.391,00	46.854.513.560,00
PDRB ADHB (milyar)	19.935,59	21.052,23	22.901,86	24.773,36	26.543,06
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	**0,15**	**0,17**	**0,18**	**0,18**	**0,18**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

Penerimaan daerah atas pajak juga dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor salah satunya adalah kemampuan daerah dalam memungut pajak daerah. Kemampuan ini sangat bergantung pada sumber daya manusia serta infrastruktur seperti tata kelola pemungutan dan pengawasan, elektronifikasi pemungutan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Sehingga dari hasil

pembangunan daerah dapat ditangkap sebagai pendapatan pajak daerah.

2.3.7.2 Inflasi Tingkat Produsen

Inflasi tingkat produsen di tingkat daerah merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan persentase kenaikan harga rata-rata atas barang dan jasa yang dijual oleh produsen lokal dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan perubahan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha atau sektor industri sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, inflasi tingkat produsen memberikan gambaran mengenai tekanan harga yang dirasakan oleh para pelaku produksi di wilayah tersebut.

Di tingkat daerah, inflasi produsen sangat penting untuk dipantau karena menjadi salah satu sinyal awal bagi terjadinya inflasi di tingkat konsumen. Kenaikan harga bahan baku, ongkos produksi, atau biaya distribusi dapat menyebabkan lonjakan harga jual di hilir, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, inflasi tingkat produsen tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.68 Perkembangan Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi Tingkat Produsen (%)	1,74	2,04	5,10	3,40	2,17

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi inflasi tingkat produsen antara lain ketersediaan bahan baku lokal, efisiensi rantai

pasok, upah tenaga kerja, serta kebijakan fiskal dan tarif daerah. Ketika faktor-faktor ini mengalami tekanan, maka biaya produksi meningkat dan produsen cenderung menaikkan harga jual. Sebaliknya, efisiensi dan dukungan terhadap sektor produksi dapat menekan laju inflasi di tingkat produsen. Pemantauan terhadap inflasi tingkat produsen sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta mendukung iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, inflasi produsen menjadi bagian integral dalam menciptakan sistem ekonomi daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan pasar.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup tiga fokus utama dari layanan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu layanan yang wajib, layanan yang bersifat pilihan, dan fungsi yang mendukung pemerintahan. Fokus pertama, yaitu layanan pemerintah yang wajib, terdiri dari dua bagian, yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Selanjutnya, terdapat layanan urusan pemerintahan pilihan, yang mencakup sektor-sektor seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian, serta fungsi penunjang pemerintah yang lainnya. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut beserta data terkait.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi semakin hari semakin tinggi. Sehingga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi tentu harus menjadi salah satu perhatian utama. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada setiap Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan perlu dilakukan penajaman sehingga dapat menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik.

Indeks Reformasi Birokrasi mengukur sejauh mana birokrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan secara efisien kepada masyarakat, dan memiliki tingkat transparansi yang memadai. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso disajikan pada gambar berikut ini.

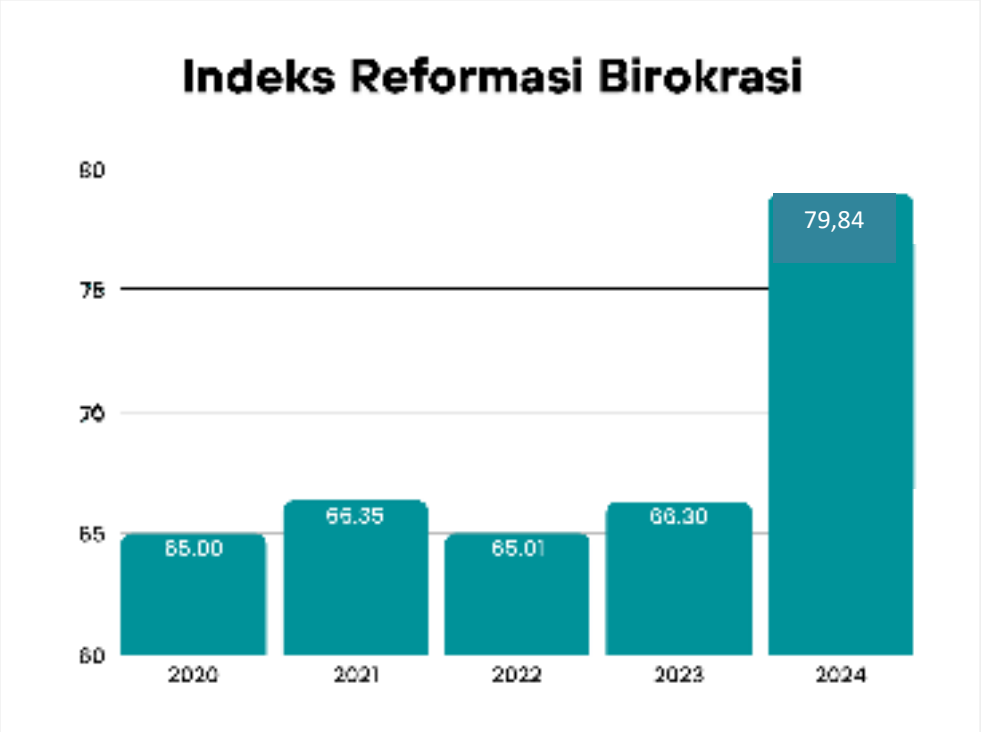

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 42 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, Kabupaten Bondowoso mencatatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65,00. Angka ini mencerminkan tingkat kinerja birokrasi pada waktu itu, dan nilai yang lebih tinggi biasanya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dalam Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 66,35. Peningkatan ini mencerminkan upaya-upaya perbaikan atau perubahan positif dalam beberapa dimensi yang dinilai oleh indeks tersebut. Pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 65,01 akan tetapi mengalami peningkatan kembali menjadi 66,30. Tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 79,84. hal ini menunjukkan perbaikan secara terus-menerus dalam kinerja birokrasi di Kabupaten Bondowoso. Angka yang meningkat dapat

mencerminkan upaya pemerintah dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bondowoso mencerminkan dinamika kompleks dalam kinerja birokrasi dan perlu diperhatikan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

2.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 22 April 2025 mengatur penilaian IRH pada tahun 2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah dalam menyusun Sasaran Indeks Reformasi Hukum berpedoman pada 2 (dua) peraturan tersebut guna memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran Indeks Reformasi Hukum, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum dilakukan terhadap 4 (empat) variabel pengukuran, meliputi:

1. Tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi;

2. kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang perundang-undangan *(legal drafter)*;
3. kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam mendorong re-regulasi atau deregulasi; serta
4. penataan *database* Peraturan Perundang-undangan.

Tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Hukum yaitu melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi baik regulasi yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah maupun regulasi inisiatif dari DPRD.

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Bondowoso tahun 2024 yaitu 87,86 dengan predikat kategori A (Sangat Baik). Dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai upaya re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, kebijakan yang dilaksanakan yaitu meliputi:

1. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (*existing*) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi;
2. Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah;
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan

eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.

Untuk pengembangan dan penataan database peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Hukum melaksanakan pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

2.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keunggulan penerapan SPBE adalah pada penerapan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek pelayanan publik berbasis elektronik. Indeks SPBE adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur TIK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi digital.

Data capaian Indeks SPBE menunjukkan variasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks SPBE berada pada angka 2,25 dengan keterangan "Cukup." Pada tahun 2022, indeks ini sedikit menurun menjadi 2,23, namun tetap berada dalam kategori "Cukup." Pada tahun 2023, indeks SPBE meningkat signifikan menjadi 2,90, dengan keterangan berubah menjadi "Baik". Sedangkan di tahun 2024 indeks SPBE 3,86 dengan kategori baik.

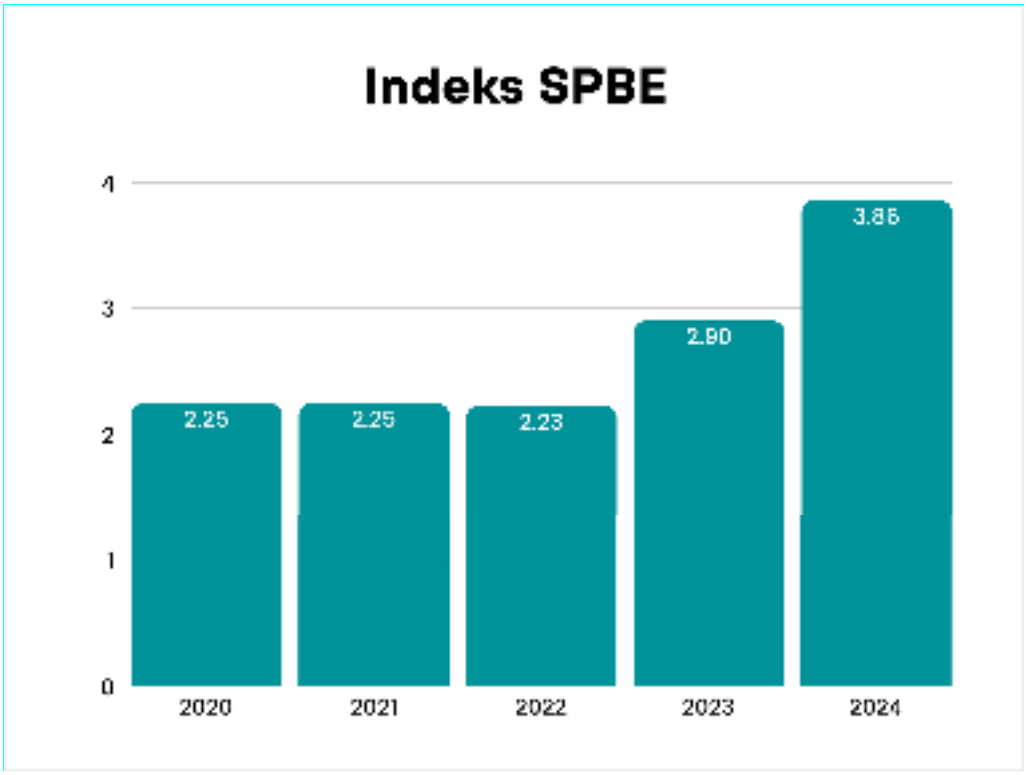

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 43 Indeks SPBE Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Secara umum, kondisi Indeks SPBE di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan yang berarti dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022, dari 2,25 menjadi 2,23, indeks ini tetap dalam kategori "Cukup." Penurunan ini mungkin disebabkan oleh tantangan dalam implementasi atau penyesuaian kebijakan terkait SPBE.

Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Bondowoso berhasil meningkatkan indeks SPBE secara signifikan menjadi 2,90 dan 3,86 yang masuk dalam kategori "Baik." Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dari pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur TIK, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis

elektronik, serta menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas melalui teknologi digital.

Peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menunjukkan komitmen dan kerja keras dari pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

2.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Penilaian IPP dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Ketentuan mengenai PEKPPP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian IPP sesuai dengan kategori sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 69 Tabel Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0 -1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya
1,01-1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya
1,51-2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51-3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
			catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal
3,51-4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang - undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara
4,01-4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang undangan Tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang undangan

Sumber: Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023

Indeks Pelayanan Publik kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 menunjukkan trend peningkatan yang cukup konsisten dalam kurun waktu lima tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga kembali mengalami peningkatan menjadi 3,86 di tahun 2024.

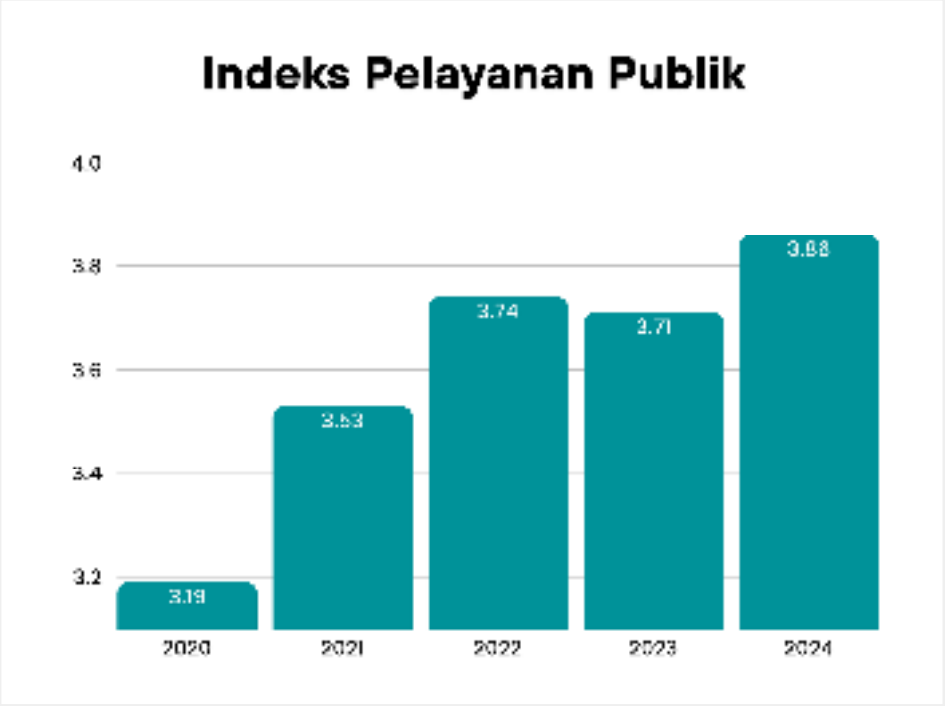

Sumber: BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 44 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat indikasi upaya berkelanjutan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Perda dan Perkada adalah instrumen hukum yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di suatu daerah. Dengan memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Perda dan Perkada, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang

aman dan tertib bagi masyarakat. Ini juga mencerminkan keberhasilan dalam memberlakukan peraturan yang mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, transportasi, izin usaha, pajak, dan banyak hal lainnya.

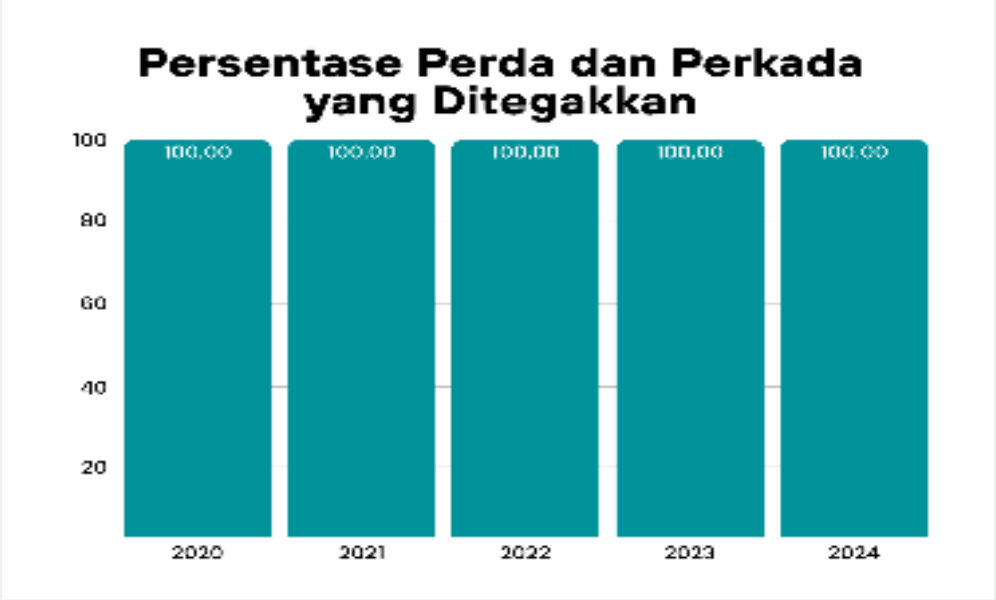

Sumber: LPPD Kabupaten Bondowoso, 2025

Gambar 2. 45 Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2020-2024

Data aspek pelayanan umum untuk tahun 2020 sampai 2024 di Kabupaten Bondowoso mengenai persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan menunjukkan angka yang stabil pada 100% pada kedua tahun tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda dan Perkada.

Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Perda dan Perkada juga menciptakan dasar yang kuat untuk penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Bondowoso. Ini adalah indikator positif dari tata kelola

pemerintahan yang baik dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mematuhi aturan hukum yang berlaku, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hasil atau pencapaian dari berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia. Ini mencakup berbagai indikator, seperti peningkatan pemenuhan hak, pengurangan pelanggaran HAM, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada HAM.

Untuk capaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Bondowoso relatif cenderung meningkat yaitu 82,28 (tahun 2022), 99,3 (tahun 2023) dan 100,00 (tahun 2024).

Kabupaten Bondowoso telah mencapai prestasi yang cukup signifikan dalam pelaporan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Timur, dengan meraih penghargaan "TERBAIK 1" dalam periode pelaporan tahun 2023. Capaian ini menempatkan Bondowoso sebagai salah satu dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang meraih nilai sempurna.

2.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia atau lazim dikenal dengan istilah (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat

perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan dengan pelaksanaan serta perkembangan tugas aspek demokrasi, diantaranya aspek kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI sebagai instrumen pengukuran yang komprehensif terhadap perkembangan demokrasi saat ini masih diimplementasikan secara eksklusif di tingkat provinsi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan metodologis dalam pelacakan dinamika demokrasi di tingkat kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Bondowoso, sehingga evaluasi kinerja demokrasi lokal belum memiliki parameter terstandarisasi yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pengembangan IDI pada skala kabupaten/kota merupakan langkah strategis yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka penguatan evidensi perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan semangat otonomi daerah.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah untuk memberikan gambaran produktivitas dan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif

mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual kedua perspektif tersebut dibagi ke dalam empat komponen utama yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 pilar daya saing. Adapun capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bondowoso selama periode 2022 – 2024 sebagaimana gambar di bawah ini.

Sumber: BRIN Tahun 2025

Gambar 2. 46 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. Pada tahun 2024 Skor IDSD Kabupaten Bondowoso mencapai angka 3,32 yang mendekati rata-rata IDSD nasional (3,43) menunjukkan Kabupaten Bondowoso memiliki daya saing yang sedang dan potensi ekonomi yang cukup baik. IDSD diharapkan dapat menjadi data rujukan dalam mendukung penelitian

serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.4.1.1 Pendidikan

Indikator kinerja pada urusan pendidikan, dapat digambarkan melalui beberapa indikator yang ada yakni sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia PAUD dan TK

Pencapaian indikator pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 70 Pencapaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD 3-6 tahun (%)	91,91	91,20	58,09	56,62	71,48
2	Jumlah siswa PAUD (jiwa)	37.784	37.870	36.811	35.185	30.599
3	Jumlah Penduduk kelompok Usia 3-6 (jiwa)	41.109	41.520	63.370	62.141	42.809
4	PAUD 5-6 tahun (%)	4,17	96,15	96,65	97,37	7,37
5	Jumlah siswa PAUD (jiwa)	19.566	9.902	19.936	15.395	21.605

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Penduduk kelompok Usia 5-6 (jiwa)	20.778	20.699	20.626	15.862	22.189

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

2. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Gambaran kinerja indikator APK dan APM di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Angka Partisipasi Kasar:**					
	PAUD 3-6 tahun	91,91	91,20	-	-	-
	PAUD 5-6 tahun	-	-	96,65	97.06	97.37
	SD/MI/Paket A	103,21	102,51	100,24	93,96	102.50
	- Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 th (jiwa)	65.978	65.579	65.028	67.562	61,034

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	SMP/MTs/Paket B	100,41	100,42	100,38	107,31	105.29
	- Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 th (jiwa)	33.318	33.471	33.094	34.728	32,092
	SMA/SMK/MA/Paket C	66,81	-	-	102,28	101.78
	- Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-18 th (jiwa)	57.889	-	-	35.834	32,964
2.	Angka Partisipasi Murni:					
	SD/MI/Paket A	99,10	99,92	99,91	87,11	95.31
	-Jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Paket A Usia 7-12 Thn	65.385	65.527	64.968	58.856	58,169
	SMP/MTs/Paket B	94,12	94,20	94,50	75,03	77.06
	- Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/Paket B Usia 13-15 Tahun	31.231	31,529	31.274	26.056	24.731
	SMA/SMK/MA/Paket C	48,54	-	-	62,35	68.03
	- Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA	27.889	-	-	22.344	22,427

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi atau persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah di suatu daerah, tanpa memandang jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APS mengukur besarnya kelompok usia sekolah aktif dalam

pendidikan suatu wilayah. Sehingga dengan APS dapat diketahui perbandingan antara jumlah siswa dalam usia sekolah tertentu dengan total penduduk dalam kelompok usia yang sama. APS di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	65.385	68.185	66.142	65.244	64.820
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	65.978	65.579	65.028	64.288	63.693
1.3.	APS SD/MI (%)	102,19	103,97	101,71	101.49	101.77
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	31.936	32.349	31.762	26.056	33.349
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	33.181	33.741	33.094	34.728	33.176
2.3.	APS SMP/MTs (%)	96,25	96,65	95,98	98,67	100.52

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan sebuah indikator yang menunjukkan persentase dari jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah merupakan suatu indikator yang penting untuk menilai kualitas sistem pendidikan di suatu wilayah. Indikator tersebut mengukur banyaknya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan di jenjang tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Angka Putus Sekolah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18
2.	SMP/MTs	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

5. Rasio Ketersediaan Sekolah per jumlah Penduduk

Rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk merupakan sebuah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah. Rasio ini menunjukkan banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia untuk anak-anak pada usia tertentu di suatu wilayah. Ketersediaan sekolah dan penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 - 15 tahun di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 74 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020–2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	626	626	576	576	577
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	65.978	65.579	65.028	64.288	63693
1.3.	Rasio	1 : 105	1 : 105	1 : 113	1:112	1:110
2	**SMP/MTs**					

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	Jumlah gedung sekolah	237	237	239	242	239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	33.181	33.613	33.094	33.328	33.176
2.3.	Rasio	1 : 140	1 : 142	1 :138	1:138	1:139

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Sedangkan rincian per Kecamatan terhadap ketersediaan sekolah dan penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 - 15 tahun di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 75 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 7-12 th	Rasio	Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Binakal	13	1.338	1:103	2	678	1:339
2	Bondowoso	48	6.778	1:141	21	3.657	1:174
3	Botolinggo	30	2.358	1:79	12	1.276	1:106
4	Cermee	44	3.606	1:82	15	1.851	1:123
5	Curahdami	25	2.902	1:116	13	1.485	1:114
6	Grujugan	26	3.239	1:125	11	1.711	1:156
7	Ijen	10	947	1:95	2	547	1:274
8	Jambesari Ds	25	3.085	1:123	20	1.658	1:83
9	Klabang	20	1.325	1:66	4	692	1:173
10	Maesan	30	4.103	1:137	13	2.137	1:164
11	Pakem	18	1.715	1:95	6	922	1:154
12	Prajekan	23	1.978	1:86	6	1.031	1:172
13	Pujer	26	3.232	1:124	13	1.627	1:125
14	Sukosari	14	1.210	1:86	9	547	1:61

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 7-12 th	Rasio	Σ gedung sekolah	Σ penduduk usia 13-15 th	Rasio
15	Sumberwringin	24	2.775	1:116	9	1.507	1:167
16	Taman Krocok	14	1.269	1:91	4	613	1:153
17	Tamanan	25	3.264	1:131	11	1.846	1:168
18	Tapen	22	2.502	1:114	7	1.338	1:191
19	Tegalampel	15	2.119	1:141	9	1.101	1:122
20	Tenggarang	29	3.700	1:128	14	1.897	1:136
21	Tlogosari	39	3.917	1:100	16	1.908	1:119
22	Wonosari	27	3.204	1:119	13	1.559	1:120
23	Wringin	30	3.127	1:104	9	1.588	1:176
Jumlah		577	63.693	1:110	239	33.176	1:139

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

6. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan jumlah murid dalam suatu lingkungan pendidikan. Rasio ini menunjukkan kualitas pembelajaran ditinjau dari kuantitas pengajar. Semakin kecil rasio guru/murid, maka semakin ideal dan berkualitas pengajaran yang dapat diberikan. Rasio guru/murid yang ideal biasanya bervariasi bergantung pada jenjang pendidikan. Jumlah Guru dan Murid jenjang pendidikan dasar tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 76 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	6.645	6.557	6.170	6.121	6.057

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.	Jumlah Guru berijasah D4/S1	5.982	5.046	5.861	5.882	5.897
1.3.	Jumlah Murid	65.978	65.579	66.338	64.288	64.973
1.4.	Rasio	1:10	1:10	1 : 11	1:11	1:12
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	4.370	3.149	3.112	3.003	3.016
2.2.	Jumlah Guru berijasah D4/S1	4.075	2.602	2.861	2.867	2.871
2.3.	Jumlah Murid	35.181	33.613	33.503	31.421	33.349
2.4.	Rasio	1:8	1:11	1 : 11	1:10	1:12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Sedangkan Jumlah Guru dan Murid jenjang pendidikan dasar tahun 2024 menurut Kecamatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 77 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ Guru	Σ Murid	Rasio	Σ Guru	Σ Murid	Rasio
1	Binakal	141	1.147	1:8	31	249	1:22
2	Bondowoso	654	10.764	1:16	534	6.390	1:7
3	Botolinggo	244	2.176	1:9	71	1.273	1:18
4	Cermee	394	3.684	1:9	123	2.352	1:15
5	Curahdami	248	2.364	1:10	122	1.454	1:12
6	Grujugan	230	3.156	1:14	87	1.361	1:20
7	Ijen	91	1.016	1:11	37	226	1:15
8	Jambesari Ds	209	2.738	1:13	214	2.106	1:8
9	Klabang	182	1.177	1:6	59	388	1:12
10	Maesan	323	4.476	1:14	156	1.984	1:14
11	Pakem	168	1.606	1:10	72	452	1:13

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Σ Guru	Σ Murid	Rasio	Σ Guru	Σ Murid	Rasio
12	Prajekan	244	2.027	1:8	97	517	1:11
13	Pujer	226	3.332	1:15	105	812	1:15
14	Sukosari	117	1.1.35	1:10	100	284	1:5
15	Sumberwringin	244	2.279	1:9	129	769	1:12
16	Taman Krocok	200	1.058	1:5	31	290	1:20
17	Tamanan	265	3.045	1:11	228	945	1:8
18	Tapen	274	2.236	1:8	126	701	1:11
19	Tegalampel	213	1.886	1:9	80	600	1:14
20	Tenggarang	292	3132	1:11	160	987	1:12
21	Tlogosari	405	3888	1:10	144	986	1:13
22	Wonosari	331	3.415	1:10	165	818	1:9
23	Wringin	362	3.236	1:9	145	811	1:11
Jumlah		**6.057**	**64.973**	**1:11**	**3.016**	**33.349**	**1:11**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

7. Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP

Kualifikasi guru merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kuantitas pendidikan. Guru yang berkualitas dapat memberikan kontribusi besar dalam mutu pendidikan. Sehingga penting untuk memastikan standar pendidik terpenuhi dan terus ditingkatkan guna mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah jumlah guru pada jenjang sekolah SD dan SMP berpendidikan S1 atau sederajat di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024.

Tabel 2. 78 Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	89%	91%	93%	93.57	94.49
2	SMP	94%	95%	95%	95.82	96.22

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan tabel di atas mengenai kualifikasi guru jenjang SD dan SMP di atas mencerminkan bahwa keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu tenaga pendidik seiring dengan kenaikan presentase setiap tahunnya. Namun, kualifikasi yang telah ada dapat terus dioptimalkan serta pemerintah dapat terus meningkatkan kompetensi formal guru dalam mendongkrak pengembangan SDM pendidik terutama di tingkat SD dan SMP untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik.

2.4.4.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan sebuah indikator yang menghitung jumlah kematian perempuan akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI menunjukkan probabilitas ibu meninggal karena masalah atau penyakit yang terkait dengan kehamilan atau persalinan.

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan sebuah indikator yang mengukur jumlah kematian bayi yang terjadi dalam satu tahun pertama kehidupan, per 1.000 kelahiran hidup. AKB dapat menunjukkan probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai

usia satu tahun. Indikator AKI dan AKB di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 79 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AKI per 100.000 KH	177,40	404,55	164	101,71	190,41
2	AKB per 1.000 KH	15,69	13,55	12,6	13,32	8,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

2. Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang

Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 774 kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan adanya penyakit penyerta, serta masih adanya balita gizi kurang disebabkan pola makan balita yang tidak sesuai dengan gizi seimbang akibat kurangnya asupan nutrisi sesuai usia. Pengetahuan Orang tua dan pola asuh juga mempengaruhi status gizi balita Pada tahun 2024 persentase balita berat badan kurang (BB/Umur) 3870 balita (8,4%) dari 46.240 balita ditimbang, balita pendek (TB/Umur) 2813 balita (6,1%) dari 46.152 balita yang diukur tinggi badannya, balita gizi kurang (BB/TB) 2423 balita (5,2%) dan balita gizi buruk 335 (0,7%) dari 46.183 balita yang diukur, data ini dianalisa berdasarkan pelaporan pada SiGisi Terpadu/EPPGMB Sedangkan berdasarkan SSGI pada tahun 2024 Prevalensi stunting yaitu 11,2%.

3. Cakupan Desa Siaga

Asesment dilakukan setiap tahun terhadap Desa Siaga dengan format sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 tahun 2010. Jumlah desa siaga mengalami perkembangan tiap tahun, baik pratama, madya, purnama dan mandiri. Hal ini terjadi karena adanya faktor indikator forum masyarakat desa/kelurahan yang keaktifannya mengalami pasang surut (nilai sesuai kriteria) sertra berkurangnya

jumlah kader kesehatan di posyandu (nilai sesuai kriteria). Cakupan Desa Siaga Aktif disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 80 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

Desa Siaga	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Pratama	57	26.03	41	18.72	32	14.61	27	12.33	20	9.13
Madya	112	51.14	101	46.12	98	44.75	100	45.66	99	45.21
Purnama	44	20.09	69	31.51	79	36.07	86	39.27	96	43.84
Mandiri	6	2.74	8	3.65	10	4.57	6	2.74	4	1.83
	219	100.00	219	100.00	219	100.00	219	100.00	219	100.00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Cakupan desa siaga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 berjumlah 219 yang tersebar di setiap desa di Kabupaten Bondowoso. Terdapat 20 desa siaga aktif pratama dengan persentase sebanyak 9,1%, desa aktif madya sebanyak 45,2% atau sebanyak 99 desa, aktif purnama dengan persentase sebanyak 43,8% atau sebanyak 96 desa dan aktif mandiri dengan persentase sebanyak 1,8% atau sebanyak 4 desa, dan siaga aktif puri (purnama mandiri) dengan persentase sebanyak 46% atau sebanyak 100 desa.

4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indikator selanjutnya pada urusan kesehatan yakni rasio posyandu per satuan balita. Posyandu merupakan fasilitas kesehatan berbasis masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi dan anak balita. Rasio ini menunjukkan jumlah posyandu per 1.000 balita. Perkembangan rasio ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 81 Rasio Posyandu (%) Tahun 2020 – 2024

Jenis Sarana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per satuan balita	2,68	2,20	2,20	2,30	1,90

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

5. Rasio Puskesmas, Ponkesdes, Pustu Per Satuan Penduduk

Selanjutnya, guna menilai kecukupan fasilitas kesehatan yang ada di suatu wilayah maka perlu diketahui data terkait rasio Puskesmas, Ponkesdes, Pustu per satuan penduduk. Hal ini penting mengingat, fasilitas tersebut merupakan akses dasar bagi masyarakat dalam urusan kesehatan. Perkembangan rasio tersebut di Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

Tabel 2. 82 Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%)
Tahun 2020- 2024

Jenis Sarana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio puskesmas, ponkesdes, Pustu per satuan penduduk	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

6. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat. Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah dokter, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk yang juga mencerminkan sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan medis di wilayah Kabupaten Bondowoso. Semakin tinggi rasio kesehatan, semakin besar potensi akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diberikan. berikut tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024.

Tabel 2. 83 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Sarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio dokter per satuan penduduk	17,00	26,00	19,73	23,30	22,47
2	Rasio perawat per satuan penduduk	140,00	143,00	153,90	159,70	167,36
3	Rasio bidan per satuan penduduk	82,00	87,30	91,40	89,90	92,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Selanjutnya, sarana kesehatan berupa rumah sakit telah terjadi penambahan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah terus berupaya dalam pemenuhan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Secara lebih rinci, sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dapat ditinjau sebagai berikut:

Tabel 2. 84 Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Sarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Sakit	3	3	3	3	4
2.	Puskesmas	25	25	25	25	25
3.	Puskesmas Pembantu	63	63	63	63	63
4.	Puskesmas Keliling	25	25	25	25	25
5.	Poskesdes	157	157	157	157	157
6.	Poliklinik	10	10	12	14	19
7.	Laboratorium Medis	4	4	4	2	3
8.	Rumah Bersalin	0	0	0	0	0
9.	Apotek	44	48	51	58	68
10.	Toko Obat berijin	0	0	1	1	2
11.	Posyandu	1.084	1.086	1.091	1.095	1.101

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Sedangkan untuk keterpenuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 85 Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	43	79	53	60	61
2.	Dokter Umum	88	125	102	124	117
3.	Dokter Gigi	44	48	45	49	52
4.	Perawat	1089	1118	1214	1259	1326
5.	Bidan	639	683	718	709	731
6.	Bidan Desa	214	171	253	256	255
7.	Dukun Bermitra	405	376	360	343	324

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Selain indikator-indikator di atas, beberapa data terkait urusan kesehatan lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 86 Kinerja Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	%	2020	91,32	94,06	103,00
		2021	91,32	94,06	103,00
		2022	91,32	97,72	107,01
		2023	91,32	95,43	95,43
		2024	100	79,45	79,45
Cakupan penderita pneumonia	%	2020	100,00	55,27	55,26
		2021	100,00	55,70	55,70
		2022	N/A	N/A	N/A
		2023	100,00	126,1	100,00
		2024	100,00	104,2	100,00
	%	2020	100,00	50,79	50,79

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan penderita TBC BTA positif		2021	100,00	54,37	54,37
		2022	100,00	110,52	110,52
		2023	100,00	98,5	98,5
		2024	100,00	109,00	100,00
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	2020	80,00	52,40	65,50
		2021	85,00	60,40	71,06
		2022	90,00	140,52	156,13
		2023	90,00	94,50	105,00
		2024	90,00	74,44	82,71
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	2020	90,00	31,50	35,00
		2021	90,00	83,40	92,67
		2022	90,00	84,50	93,89
		2023	90,00	86,80	96,44
		2024	90,00	88,80	98,67
Cakupan penderita DBD	%	2020	50,00	35,70	128,60
		2021	50,00	19,55	100,00
		2022	N/A	28,8	28,8
		2023	50,00	28,9	28,9
		2024	50,00	120,9	100,00
Cakupan penderita Diare	%	2020	100,00	42,87	42,87
		2021	100,00	78,64	78,64
		2022	N/A	62,90	62,90
		2023	100,00	72,4	72,4
		2024	100,00	237,7	100,00
Penanganan HIV – AIDS	%	2020	100,00	95,47	95,47
		2021	100,00	113,65	113,65
		2022	100,00	113,53	113,53

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		2023	100,00	70,49	70,49
		2024	100,00	116,9	116,9
Cakupan kunjungan bayi	%	2020	97,00	91,93	94,77
		2021	98,00	95,88	97,84
		2022	94,00	96,21	102,35
		2023	100,00	95,2	95,2
		2024	100,00	77,3	77,3
Cakupan kunjungan bumil K-4	%	2020	92,00	85,86	93,33
		2021	93,00	87,69	94,29
		2022	89,00	84,86	95,35
		2023	100,00	82,06	82,06
		2024	100,00	68,1	68,1
Cakupan pelayanan nifas	%	2020	96,00	99,12	103,25
		2021	96,50	105,06	108,87
		2022	97,00	103,31	106,51
		2023	100,00	100,4	100,4
		2024	100,00	77,2	77,2
Cakupan kunjungan neonatus	%	2020	N/A	91,90	91,90
		2021	N/A	95,90	95,90
		2022	N/A	87,10	87,10
		2023	N/A	89,9	89,9
		2024	N/A	72,0	72,0
Cakupan pelayanan anak balita	%	2020	97,00	103,05	106,24
		2021	98,00	94,86	96,79
		2022	100,00	99,22	99,22
		2023	100,00	102,80	102,80
		2024	100,00	88,40	88,40
Cakupan penjaringan	%	2020	100,00	95,09	95,09
		2021	100,00	95,56	95,56

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
kesehatan siswa SD dan setingkat		2022	100,00	96,88	96,88
		2023	100,00	100,00	100,00
		2024	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Bina Marga

Pembangunan infrastruktur kebinamargaan meliputi jalan dan jembatan merupakan bagian pembangunan yang mempunyai arti penting dalam rangka mendukung pembangunan dibidang lainnya seperti pembangunan menuju dan di kawasan Pariwisata, kawasan pertumbuhan ekonomi dan kawasan lainnya. Kondisi infrastuktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan (km)	1.395,28	1.395,28	1.395,28	1.395,28	1.382,42
2	Jalan Aspal (km)	1.156,15	998,669	1.184,00	1.037,57	1.102,13
3	Jalan beton (km)	-	64,358	24,41	65,93	68,88
4	Jalan makadam (km)	39,946	107,99	81,92	178,08	108,27

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Jalan tanah (km)	199,18	224,229	104,95	113,7	103,14
6	Jalan Mantap (%)	63,15	70,43	69,74	64,71	64,97

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

2. Sumber Daya Air

Kondisi prasarana sumber daya air secara signifikan meningkat selama tahun 2020-2024, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bangunan bendung dan dam, tertanganinya bangunan irigasi yang rusak, serta bertambah panjangnya saluran irigasi sekunder dan tersier yang permanen dalam kondisi baik. Kondisi prasarana irigasi tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 88 Panjang Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bendung (buah)	438	438	438	438	438
2.	Saluran sekunder (m)	163.089	163.089	163.089	163.089	163.089
3.	Saluran tersier (m)	421.463	421.463	390.553	390.553	390.553
4.	Bangunan pelengkap (unit)	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

Perkembangan sarana prasarana irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bondowoso tahun 2020– 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 89 Kondisi Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Σ kondisi bendung yang baik (buah)	401	403	404	404	404
2.	Σ kondisi saluran sekunder yang baik (m)	148.013	136.315	141.590	141.590	145.736
3.	Σ kondisi saluran tersier yang baik (m)	282.403	296.205	269.205	274.905	274.905
4.	Σ kondisi bangunan pelengkap yang baik (unit)	3.093	3.093	3.125	3.125	3.125

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

Sebagian besar masyarakat Bondowoso bermata pencaharian di bidang pertanian, kondisi jaringan irigasi yang baik merupakan kebutuhan utama dalam rangka menunjang produksi dan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Perkembangan luas baku sawah selama kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 90 Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020–2024

No.	Jenis Sawah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Teknis	31.174	25.281	25.258	31.325	31.216
2	Semi Teknis	2.102	2.098	2.127	2.039	2.030
3	Sederhana	2.622	2.596	2.596	2.596	2.591
	Jumlah	35.898	29.975	29.981	35.870	35.837

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

3. Air Minum

Penyediaan sarana prasarana air minum perdesaan dilaksanakan melalui sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan yang

mencukupi kebutuhan air minum masyarakat desa dan bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 91 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase rumah Tangga dengan akses air minum layak	73,54	78,16	80,59	80,75	82,73
2	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	37,76	38,79	41,87	42,30	40,75

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dikarenakan jumlah rumah tangga perkotaan yang mendapatkan akses air minum perpipaan mengalami penurunan jumlah rumah tangga.

Sedangkan pada kawasan perkotaan, pelayanan air bersih dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Bondowoso melalui 14 sistem jaringan meliputi 1 unit BNA Bondowoso dan 13 unit UPK (Sukosari 1, Sukosari 2, Maesan, Tegalampel, Tapen, Prajekan, Tlogosari, Wringin, Curahdami, Pakem, Tamanan, Taman Krocok dan Tenggarang) yang menjangkau 16 kecamatan. Perkembangan pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 92 Pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas sumber air	L/dt	158,3	163,0	171,5	171,4	172,7
2	Produksi air	M^3	3.789.547	3.728.549	3.657.153	3.641,117	3.569.938
3	Jumlah Pelanggan	pelanggan	19.516	19.550	19.463	19.241	18.938
4	Penduduk terlayani	jiwa	120.262	119.960	119.398	115.446	113.682
5	Prosentase pelayanan	%	15,98	16.43	15,00	14,5	14,41

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, 2025

PDAM telah berupaya untuk melaksanakan distribusi air minum perkotaan melalui beberapa strategi, diantaranya pemberian diskon bagi pelanggan baru, peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penyedia Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa Ijen Water, guna menarik minat masyarakat akan kebutuhan air bersihnya.

4. Air Limbah

Perkembangan cakupan rumah tangga dengan akses air limbah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 93 Perkembangan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Akses Sanitasi Layak	75,59	83,44	96,03	100	100
2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2025

Dari sisi akses, capaian di tahun 2024 sebesar 100%. Namun hal ini masih perlu dilakukan percepatan karena hal tersebut masih dari sisi akses belum dari sisi prasarana. Sedangkan dari aspek prasarananya mencapai 84,61% di tahun 2024, naik dari tahun 2023 sebesar 84,43%.

Sedangkan untuk persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bondowoso masih 0% dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Bondowoso masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di masa mendatang tetap perlukan mengembangkan 2 (dua) sistem, yaitu sistem off site dan on site, khususnya pengembangan SPALD-T di kawasan permukiman padat.. Dalam jangka menengah perlu segera pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala kabupaten untuk mencapai target layanan sanitasi (air limbah) aman. Selanjutnya perlu juga penyediaan prasarana dan pengawasan pada kegiatan usaha yang menghasilkan limbah industri, limbah medis, dan limbah B3.

5. Penataan Ruang

Terdapat 2 Indikator Kinerja Kabupaten sub urusan penataan ruang. Untuk Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah dengan definisi operasional rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBP KKPRnya oleh pemohon. Sedangkan Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota dengan definisi operasional jumlah kasus pelanggaran terkait pemanfaatan ruang yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah total kasus pelanggaran

yang dilaporkan atau teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu di kabupaten. Sampai tahun 2024 belum dilakukan perhitungan pengukuran 2 indikator IKK penataan ruang tersebut.

2.4.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah rumah layak huni keluarga prasejahtera mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam rangka peningkatan rasio rumah layak huni dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih baik dan layak huni sehingga dengan adanya kegiatan ini berdampak pada meningkatnya rasio rumah layak huni setiap tahunnya meskipun jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bondowoso masih cukup banyak. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2. 94 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Rumah di Kabupaten Bondowoso (unit)	258.429	258.425	258.417	258.407	272.428
2	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	185.836	186.686	187.094	187.888	203.567
3	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	71,91	72,24	72,40	72,71	74,72

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso terus dilakukan agar lingkungan menjadi lebih baik. Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/1055/430.4.2/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, dari luasan kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso 831,6 Ha. Tahun 2024 telah dilakukan updating baseline berdasarkan SK Kumuh tahun 2021, dimana dari hasil updating tersebut didapatkan luasan kumuh menjadi 433,92 Ha dengan mengeluarkan RTH dan bukan wilayah permukiman. Sampai dengan tahun 2024 telah tertangani seluas 2,71 Ha. sehingga masih terdapat luasan kumuh seluas 431,21 Ha.

Tabel 2.95 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh, terhadap luas kawasan permukiman (%)	3,85	3,23	6,03	5,70	3,52
2.	Persentase Kawasan permukiman kumuh, terhadap luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati (%)	-	83,55	88,77	83,96	99,38

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di perkotaan semakin menurun dari tahun ke tahun. Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh tersebut dikarenakan adanya peningkatan kualitas infrastruktur prasarana lingkungan permukiman, meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan jalan lingkungan, jaringan air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, akses untuk pemadaman kebakaran serta penataan Ruang Terbuka Hijau.

Jaringan listrik di Kabupaten Bondowoso sudah menjangkau sebagian besar masyarakat, namun demikian masih ada yang belum terjangkau jaringan yaitu dusun terpencil. Selain menggunakan sumber energi listrik PLN, banyak desa yang memanfaatkan energi surya dan air sebagai tenaga pembangkit listrik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bondowoso yang dilayani PT PLN (Persero) tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020 – 2024

No.	Golongan Tarif	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sosial	7.716	7.098	7.098	7.098	7.456
2.	Rumah Tangga	222.605	234.531	234.531	234.531	262.077
3.	Usaha	4.343	4.843	4.843	4.843	7.858
4.	Industri	275	409	409	409	1.048
5.	Gedung Kantor	446	613	613	613	1.160
6.	Jalan	727	779	779	779	-
7.	Multiguna	8	7	7	7	36
	Jumlah	**235.580**	**248.280**	**248.280**	**248.280**	**279.634**

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Urusan ini mencakup penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban, dan perlindungan masyarakat dari berbagai potensi bahaya seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Capaian kinerja ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bondowoso (%)	100	100	100	100	100
2	Penegakan Perda (%)	28,57	28,57	8,57	100	100
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) (%)	57,00	50	8,71	15,05	22,22
4	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten /Kota(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bondowoso, 2025

Pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyrakat terdiri atas Satpol PP dan didukung oleh lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yakni keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Data jumlah rasio Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 98 Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pol PP	168	168	168	152	164
2	Jumlah LINMAS	6.080	6.080	6.080	3.535	4.864
3	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	2,15	2,16	2,16	1,94	2,09
4	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	77,66	78,33	78,33	45,15	62,13

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bondowoso, 2025

Selanjutnya, pada urusan ini dalam rangka membangun kesatuan bangsa dan politik dan menciptakan kondisi harmonis antar suku, agama, ras, maupun antar golongan masyarakat maka dilakukan pembinaan dan penataan instrumen sosial dalam tatanan masyarakat Bondowoso terhadap Organisasi masyarakat, Organisasi politik, pemuda dan LSM. Jumlah pembinaan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 99 Pembinaan Ormas, Orpol, dan LSM Kabupaten Bondowoso Tahun 2020– 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ormas, Orpol dan LSM yang dibina	269	278	287	300	362

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso, 2025

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, pemuda dan LSM harus terus dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan, mencegah terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat dan untuk menumbuh kembangkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada masyarakat yang terkena dampak bencana bertujuan untuk penanganan bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi dengan baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana. Ditinjau dari aspek geografis, Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kerawanan bencana yang termasuk tinggi dengan potensi bencana yang dapat terjadi antara lain gempa bumi, bahaya banjir, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung dan lain sebagainya. Berikut data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024:

Tabel 2. 100 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2020-2024

No.	Uraian Bencana	Jumlah Kejadian Bencana				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angin Kencang/Puting beliung	34	64	66	59	111
2	Banjir	8	8	7	8	19
3	Longsor	4	16	29	23	12
4	Kekeringan	7	19	24	23	12
5	Karhutla	-	-	2	41	31
6	Non Alam	4	10	20	4	10
7	Erupsi Gunung Api	26	1	1	-	5
8	Sosial	-	1	1	-	-
	Jumlah	**83**	**119**	**150**	**158**	**200**

Sumber : BPBD Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian kinerja ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sektor kebencanaan Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024 ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan) Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	0,72	0,76	0,55	0,60	0,62
2	% Bencana yang Ditanggulangi	100	100	100	100	100

Sumber : BPBD Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.1.6 Sosial

Urusan sosial di daerah meliputi beberapa aspek yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan fakir miskin. Selain itu urusan Sosial juga termasuk pada pengelolaan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial.

Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	294	-	-	-	-
2	Σ lembaga kesejahteraan sosial yg dibantu & difasilitasi	110 lbg	82 lbg	-	-	-
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS	153 org	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Selanjutnya, pada perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 103 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2020	2021	2022	2023	2024
	Populasi Data Keluarga Miskin					
1	Keluarga Fakir Miskin	155.470	223.766	222.016	218.059	215.365

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2020	2021	2022	2023	2024
	Populasi PMKS Prioritas					
1	Anak Jalanan	16	26	41	46	46
2	Tuna Susila	0	0	0	0	0
3	Pengemis	75	51	54	46	35
4	Gelandangan dan gelandangan Psikotik	75	167	538	538	538
	Jumlah PMKS Prioritas	166	244	633	630	619
	Populasi PMKS Lainnya					
1	Anak Balita Terlantar	0	0	2	4	4
2	Anak Terlantar	0	291	1143	1243	1260
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	26	21	45	65	79
4	Anak dengan Kedisabilitasan	658	22	79	85	90
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	21	45	55	79
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	26	2	2	2	5
7	Lanjut Usia terlantar	15	150	836	5043	7038
8	Penyandang Disabilitas	579	740	3825	3968	4148
	a. Tubuh	308	617	1372	1432	1571
	b. Netra	82	64	981	933	899
	c. Rungu wicara	65	17	644	781	815
	d. Mental	65	42	491	632	579
	e. Cacat Ganda	59	0	337	190	284
	f. Bekas penderita penyakit kronis	0	0			
9	Pemulung	0	0	0	0	35
10	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2020	2021	2022	2023	2024
11	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	25	25	0	0	0
12	a. Orang dengan HIV	35	11	0	0	0
	b. Orang dengan AIDS (ODHA)	0		0	0	0
13	Korban penyalahgunaan Napza	30	30	0	0	0
14	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
15	Korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah	42	26	0	0	0
	a. Wanita	42	26	0	0	0
	b. Laki laki	0	0	0	0	0
	c. Lanjut usia	0	0	0	0	0
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	81	0	1	0	0
17	Korban Bencana Alam	26	59	75	75	75
18	Korban Bencana Sosial	8	59	75	75	75
19	Perempuan rawan sosial Ekonomi	0	0			
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	75	75	75
21	Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	0	0	0	100	100
	Jumlah Populasi PMKS Lainnya	**1.577**	**1.457**	**6.203**	**10.790**	**13.063**
	Jumlah Populasi PMKS Prioritas dan Populasi PMKS Lainnya	**157.213**	**1.701**	**232.852**	**229.479**	**229.047**

Sumber : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.4.2.1 Tenaga Kerja

Sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi, maka berpengaruh juga terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap meningkatnya pengangguran. Beberapa jenis usaha mengalami penutupan khususnya di sektor jasa yang berkontribusi meningkatkan pengangguran terbuka menjadi relatif cukup besar. Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

Berikut merupakan kondisi Ketenagakerjaan Menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 104 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Tingkat Pendidikan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Belum Bekerja	Bekerja	Belum Bekerja	Bekerja	Belum Bekerja	Bekerja	Belum Bekerja	Bekerja	Belum Bekerja	Bekerja
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	511	27.559	-	19.655	-	17.340	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Tidak Tamat/belum tamat SD	2.333	136.337	4.114	143.686	8.083	161.382	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Tamat SD/MI	6.713	143.710	5.171	135.969	3.634	103.025	4.434	293.800	2.581	270.972
4	Tamat SLTP/MTs	2.448	57.772	3.957	58.845	2.311	43.820	3.869	39.898	1.620	46.373
5	Tamat SLTA/Sederajat	5.672	58.520	5.690	63.176	6.812	92.944	10.115	82.402	12.274	75.135
6	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	1.796	28.647	1.903	25.322	684	35.884	1.014	33.110	790	45.739
	Jumlah	19.473	452.545	20.835	446.653	21.533	454.395	19.432	449.210	17.265	458.219

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2025

Disisi lain pertumbuhan ketersediaan lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja baru belum seimbang, disamping itu kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga masih diperlukan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan mediasi tenaga kerja ke pasar kerja khususnya dari kecepatan penyampaian informasi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja dilakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, agar pencari kerja memiliki keterampilan guna memenuhi kualifikasi kebutuhan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup keluarga.

Tenaga kerja yang diserap oleh lapangan kerja di Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya berfluktuatif dengan daya serap rata-rata sebesar 54,35%. Berikut merupakan capaian kinerja pelaksanaan urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 105 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Serap Tenaga Kerja	73,15%	50,62%	60,65%	24,74%	60,65%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesenjangan dalam hal memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak masih terjadi, walaupun negara menjamin hak atas hal-hal tersebut diatas. Terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender juga rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, media

massa dan akademisi juga menjadi kendala untuk menyatukan tujuan bersama meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam mencapai kesejahteraan. Tingginya kekerasan kepada perempuan dan anak hingga kejahatan seksual serta rendahnya pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak menjadi tantangan terbesar dalam rangka pencapaian pembangunan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bondowoso.

Berikut merupakan partisipasi kaum perempuan di Kabupaten Bondowoso dalam dunia kerja tahun 2020-2024:

Tabel 2. 106 Partisipasi Kaum Perempuan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	195.810	198.975	188.280	192.077	192.710
2	Persentase Partisipasi angkatan Kerja Perempuan	62,08	60,70	60,69	62,11	60,97

Sumber : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Fasilitasi terhadap korban KDRT juga secara intensif dilaksanakan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap para calon ibu maupun ibu rumah tangga. Pada tahun 2020-2021 jumlah kasus kekerasan rumah tangga sebanyak 42 kasus yang dilakukan advokasi dan rasio kekerasan dalam rumah tangga sebesar 0,014.

2.4.4.2.3 Pangan

Urusan pangan menjadi sangat penting karena merupakan kebutuhan paling asasi yang menentukan kelangsungan hidup dan

kesehatan manusia dimana meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan serta masih adanya kawasan rawan pangan yang mengakibatkan kerentanan pangan sehingga berakibat pada rendahnya Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP).

Peningkatan Angka Kecukupan Gizi (AKG) masyarakat selaras dengan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga. Untuk mencapai tingkat konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Bondowoso masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan yaitu pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100 dimana kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari kategori Cukup pada rentang skor 70-84 menjadi Baik pada skor ≥ 85.

Dasar perhitungan skor PPH berdasarkan angka kecukupan energi 2.100 Kkal/Kapita/hari, secara keseluruhan terhadap Angka Kecukupan Gizi berada pada kategori Normal atau Cukup. Meskipun capaiannya belum mencapai angka ideal 100% , tren peningkatan dari 2020 hingga 2024 sangat positif. Ini mengindikasikan masih terdapat tantangan untuk mencapai target ideal.

Persentase Daerah Rawan Pangan menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dengan faktor-faktor penyebabnya antara lain dampak perubahan iklim, pola kultur budaya serta daya beli masyarakat menurun yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Beberapa intervensi yang sudah dilakukan Pemerintah Bondowoso diantara dengan Bantuan Pangan serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian.

Berikut merupakan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024.

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Pangan Harapan (%)	78,9	81,1	78,9	86,20	86,18
2	Angka kecukupan gizi (Kkal/ Kpt/Hr)	1.887,5	2.015,12	1.957,40	2.046,0	2.046,45
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi penduduk terhadap masing – masing ketersediaan komoditi. Komoditi beras, jagung, ubi kayu dan gula setiap tahun mengalami surplus ketersediaan bahan pangan sedangkan komoditi yang lain berfluktuasi tergantung dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada masing-masing tahun. Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 108 Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton)
Tahun 2020 - 2024

No.	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	Ton	360.114,00	175.399,52	272.161,72	257.420	296.546
2	Jagung	Ton	140.604,00	172.054,00	165.166	126.060	132.205
3	Gula Pasir	Ton	27.352,72	28.224,01	40.486	35.050	13.149,52
4	Telur	Ton	2.776,35	3.245,93	7.994,31	6.747	14.927,28
5	Daging	Ton	2.663,00	3.816,03	10.306,17	11.809	14.074,74

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Untuk tingkat produksi bahan pangan di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 109 Tingkat Produksi Bahan Pangan Kabupaten Bondowoso
Tahun 2020 - 2024

No.	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	Ton	542.574	453.503	460.425	493.879	464.766
2	Jagung	Ton	172.054	189.869	193.106	184.435	30.666
3	Kedelai	Ton	78	32	32	94	72
4	Kacang Tanah	Ton	260	161	165	120	485
5	Kacang Hijau	Ton	112	51	51	8,43	135,57
6	Ubi kayu	Ton	48.201	48.842	48.964	59.076	80.334
7	Ubi jalar	Ton	1.599	1.713	1.725	109	809
8	Daging	kg	4.595.681	3.816,03	6.035,34	-	9.936,67
9	Telur	kg	3.245.929	3.245,93	1.042.472	2.964.680	2.876.037

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.4 Pertanahan

Aspek pelayanan urusan pertanahan meliputi pemberian izin lokasi dan penerbitan ijin membuka tanah untuk pembangunan, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk lokasi tanah yang digunakan

dalam pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, serta perencanaan penggunaan hamparan tanah dalam satu daerah kabupaten. Perkembangan indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 110 Perkembangan Indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian izin lokasi/membuka lahan *	18	76	-	-	-
2	Bangunan yang memiliki IMB *	84.528	84.933			
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat **	39,13	52,17	82,6	-	-
4	Persentase fasilitasi penerbitan pertanahan **	-	-	-	86,9	91,30

*Sumber : * Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja Kabupaten Bondowoso, 2025*
*** Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025*

2.4.4.2.5 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan (degradasi). Kualitas air, udara, dan lahan mengalami penurunan dikarenakan dampak pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah usaha/industri, polusi udara dari kendaraan dan industri, penggunaan pupuk kimia dalam pengolahan lahan, serta alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan terbangun lainnya.

Kabupaten Bondowoso masih belum memiliki prasarana TPA yang layak dan memadai. TPA Paguan yang ada saat ini masih menggunakan sistem open dumping dan kondisi kapasitasnya saat ini

sudah overload. Sementara TPA baru di Desa Sumber Kokap belum dapat dibangun meskipun sudah tersedia lahannya.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah untuk penanganan sampah yang harus diangkut ke TPA, sementara partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari rumah dan penyediaan sistem mandiri pengangkutan sampah dari rumah ke TPS masih kurang.

Belum optimalnya pemeliharaan dan pengembangan ruang terbuka hijau taman kota untuk memelihara kualitas lingkungan permukiman dan memenuhi ketentuan 20% luasan RTH Publik di kawasan perkotaan.

Berikut merupakan capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 111 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sampah Tertangani (%)	60,4	60,0	60,96	81,3	66,00
2	Rasio TPS per penduduk	1,3	1,26	0,84	1,26	1,12
3	Pengangkutan sampah (unit)	17	17	24	27	28
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,06	66,39	68,97	66,76	68,21
	- Indek Kualitas Air (IKA)	51,66	50	55,33	48,46	48,10
	-Indek Kualitas Udara (IKU)	80,99	85,33	86,70	86,75	91,22
	- Indek Kualitas Lahan (IKL)	78,16	59,49	59,57	61,21	60,2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2025

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pelaporan, evaluasi dan pemantauan (PEP GRK), dengan melaksanakan inventarisasi emisi gas rumah kaca pada sumber emisi pengadaan dan penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah.

Sesuai dengan RAD Pengurangan Emisi GRK Provinsi Jawa Timur, pengukuran kontribusi pengurangan Karbon di Wilayah Kabupaten Bondowoso dilakukan pada sektor energi, lahan dan limbah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 112 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No.	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	201.190,87	52.400,00	51.269,23	413,76	5.934,99
2	Lahan	-	9.278,59	18.249,17	15.706,10	33.589,11
3	Limbah	282,25	2,18	10.549,78	481,58	3.721,98

Sumber: AKSARA,BAPPENAS 2025

2.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak hukum masyarakat untuk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. Adapun pelayanan dokumen yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Bondowoso pada tahun 2020-2024 dapat dilihat berdasarkan data berikut.

Tabel 2. 113 Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akta Kelahiran	14.391	14.681	13.830	14.608	28.072
2	Akta Perkawinan	24	26	25	17	46
3	Akta Perceraian	3	8	0	5	13
4	Akta Kematian	796	1.741	8.383	24.780	31.873
5	Akta Pengakuan/ Pengesahan Anak	0	0	6	8	15
6	Pengangkatan Anak	0	0	0	1	3
7	Kartu Keluarga	-	-	3.875	2.846	7.095
8	Kartu Tanda Penduduk	-	-	39.476	28.580	71.883

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2025

Adapun data kepemilikan KTP, KK, Akta kelahiran dan KIA di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.114 Kepemilikan KTP, KK, Akta dan KIA Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Kepemilikan Dokumen	2020	2021	2022	2023	2024
1	KTP (lembar) (%)	624.336 (99,99%)	590.612 (94,66%)	604.476 (95,97%)	619.408 (98,04%)	606.773 (99,56%)
2	KK (lembar) (%)	325.905 (100%)	339.885 (100%)	307.396 (100%)	309.670 (100%)	316.083 (100%)
3	Akta Kelahiran (lembar) (%)	445.271 (56,88%)	457.960 (57,86%)	472.329 (58,85%)	486.937 (61,10%)	327.587 (41,82%)
4	KIA (lembar) (%)	25.150 (13,18%)	52.061 (26,85%)	85.453 (48,03%)	98.945 (56,82%)	73.584 (41.45%)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat pedesaan, yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga memerlukan penanganan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Disisi lain, wilayah perdesaan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sehingga selama tahun 2020-2024 dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi terciptanya masyarakat yang partisipatif, berdaya, dan mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pemberian bantuan usaha ekonomi masyarakat, pembinaan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, pembinaan kelompok PKK, revitalisasi pasar desa dan pengembangan BUM Desa.

Upaya sinergis pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan potensi desa dan pengerahan seluruh sumberdaya dan stakeholder pembangunan. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat menjadi dasar pembentukan pola pikir pembangunan kemasyarakatan. Pembinaan kelompok masyarakat terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan perluasan lapangan kerja.

Tabel 2. 115 Kelompok Binaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa	209	209	209	209	209

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Kelompok PKK/desa yg dibina dan dilatih	36	35	150	-	-
3	Jumlah kelompok Penggerak PKK	243	243	243	243	243
4	Kelompok Pemanfaatan TTG	95	84	96	637	-
5	Posyandu	-	438	39	-	209
6	Kelompok Penerima Manfaat	1.163	1337	600	2.079	992

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2025

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan juga dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) melalui pengembangan unit usaha dan bantuan modal bagi BUMDES. Perkembangan BUMDES di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 116 Badan Usaha Milik desa Tahun 2020- 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Keberadaan BUMDES	209	209	209	209	209
2	Peningkatan Kapasitas BUMDes	-	209	209	209	209
3	BUMDES Aktif	43	57	57	57	57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara lebih detail masih banyak BUMDesa yang tata kelolanya belum optimal, secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh mayoritas BUMDes di Kabupaten Bondowoso belum berbadan hukum. Kondisi ini memerlukan intervensi dan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan pengarahan dalam pengurusan status badan hukum serta meningkatkan tata kelola BUMDesa.

2.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Konsep keluarga berencana berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Fokus keluarga berencana adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mencegah pernikahan dini, terutama pada anak-anak dan remaja usia sekolah. untuk memenuhi hak reproduksi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keluarga dapat mengatur idealnya jumlah anak dan jarak kelahiran. Keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah hasil langsung dari pemenuhan hak reproduksi tersebut.

Dukungan fasilitas seperti penyediaan alat dan obat kontrasepsi, sosialisasi, advokasi KIE, dan adanya kelompok masyarakat peduli KB dapat meningkatkan jumlah pasangan usia subur yang ikut KB (baru dan aktif) termasuk KB pria.

Tabel 2. 117 Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	AKDR	6.466	6.017	3.240	2.805	2.512
2.	Tablet	25.764	24.873	18.618	20.940	19.691
3.	Kondom	582	605	427	543	526
4.	MOP	1.098	1.002	459	325	266
5.	MOW	2.192	2.271	2.273	2.054	2.137
6.	Suntik	67.779	67.906	70.980	73.735	70.666
7.	Susuk	13.271	12.849	9.518	9.624	9.344

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	**117.152**	**115.523**	**105.515**	**110.026**	**105.142**

Sumber : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Perkembangan pasangan usia subur dan pencapaian kepesertaan KB aktifnya di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 - 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 118 Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	147.895	147.895	131.369	133.661	129.765
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB aktif	115.523	115.523	105.831	110.186	105.265
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB	32.355	32.355	25.538	23.475	24.500
4.	Persentase Terhadap PUS	78,12	78,12	80,56	82,44	81,12

Sumber : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu optimalnya program KB

(MKJP) dan masih rendahnya angka usia pernikahan. Pertama, belum optimalnya program KB (MKJP) disebabkan karena pola fikir akseptor KB yang masih belum paham terkait metode kontrasepsi jangka panjang serta kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih dipegang teguh oleh pasangan usia subur. Kedua, masih rendahnya angka usia pernikahan, disebabkan oleh budaya dan tradisi yang masih dominan di masyarakat.

2.4.4.2.9 Perhubungan

Arus penumpang angkutan umum di wilayah Bondowoso relatif stagnan dan dan bahkan cenderung menurun dengan jumlah izin trayek tetap sebanyak 5 trayek. Guna mendukung kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penumpang dan barang, penyediaan prasarana dan sarana perhubungan senantiasa terus ditingkatkan. Pada tahun 2024 telah tersedia 79 APILL meliputi 17 TL, 61 WL dan 1 PCTL, 2.108 rambu lalu lintas, dan 25 halte. Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bondowoso tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan arus penumpang angkutan umum.

Sampai tahun 2024 terdapat 3 trayek yang masih aktif. Adapun trayek tersebut yaitu Bondowoso - Tamanan, Bondowoso - Pakisan dan Bondowoso - Ijen dengan jumlah armada total saat ini 16 angkutan.

Perkembangan arus penumpang tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 119 Perkembangan Arus Penumpang Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bondowoso

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Keberangkatan Penumpang	127.423	60.041	79.851	68.409	69.510
2	Kedatangan Penumpang	89.377	27.475	38.630	27.130	28.250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, transparansi dan keterbukaan diperlukan. Transparansi pelaksanaan pembangunan berfungsi sebagai fungsi kontrol dan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menilai keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa penyebaran informasi yang berkualitas, cepat, dan akurat kepada masyarakat serta ketersediaan informasi yang akurat, cepat, dan informatif dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelayanan komunikasi dan informatika mencakup meningkatkan jumlah jaringan komunikasi, memungkinkan peningkatan media massa (surat kabar, radio, televisi, dan website), dan memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat. Berikut merupakan gambaran dari kinerja urusan komunikasi dan informasi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 120 Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kerjasama dengan media massa	-	42	40	54	50
2.	Persentase peningkatan frekuensi informasi publik	65,11	-	84,49	87,65	90
3.	Cakupan jaringan e-Gov di lingkungan SKPD Kabupaten Bondowoso	58	93	93	93	93
4.	Jumlah implementasi e government (aplikasi)	5	3	6	10	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2025

Adapun sampai saat ini permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan urusan informasi dan komunikasi adalah belum optimalnya layanan pemerintah berbasis elektronik, kurangnya Sarana dan Prasarana Operasional, kurangnya Koordinasi dan Pemahaman antar sektor, keterbatasan SDM yang kompeten, serta belum optimalnya penerapan digitalisasi. Pertama, belum optimalnya layanan pemerintah berbasis elektronik, disebabkan kurangnya infrastruktur teknologi informasi pelayanan pemerintahan, serta belum semua pelayanan publik berbasis digital, secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh kondisi topografi wilayah pegunungan dan sebaran permukiman, serta kurangnya adaptasi aparatur dan Masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik berbasis digital. Kedua, kurangnya Sarana dan Prasarana Operasional, disebabkan masih kurangnya sarana prasarana operasional teknologi informasi dan komunikasi, secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh keterbatasan peralatan yang ada tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Ketiga, kurangnya Koordinasi dan Pemahaman antar sektor, disebabkan kurangnya dukungan antar sektor dalam pengembangan sistem informasi, secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh belum adanya tim kolaborasi lintas sektor yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi secara efektif. Keempat, keterbatasan SDM yang kompeten, disebabkan kurangnya kapasitas SDM aparatur teknologi informasi dan komunikasi, secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh Kurangnya kuantitas dan pelatihan SDM terkait teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, belum optimalnya penerapan digitalisasi, disebabkan masih terdapat Perangkat Daerah yang belum optimal menerapkan digitalisasi, serta belum terintegrasinya satu data daerah

secara lebih rinci dianalisis disebabkan oleh lambatnya pengembangan aplikasi di perangkat daerah.

2.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan Sub Urusan Bidang Pemerintahan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah pembinaan pada usaha mikro (UM), hal ini ditunjukkan selama periode tahun 2020-2024 jumlah UM terus meningkat. Begitu juga dengan perkembangan koperasi yang mengalami peningkatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 121 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jumlah**					
	Koperasi	952	957	962	972	975
	Usaha Mikro	39.71	39.97	40.035	40.212	40.272
2	**Jumlah Permodalan (juta Rp)**					
	Koperasi	369.504448	401.885,450	392.560,000	394.652,000	398.740,000
	Usaha Mikro		427.188,460	430.438,460	439.614,695	455.073,862
3	**Jumlah volume usaha (juta Rp)**					
	Koperasi	324.448,860	341.988,80	341.988,89	325.411	100.358
	Usaha Mikro	3.012.461,000	3.017.953,420	3.040.704,00	7.338.691,00	11.024.463,000
4	**Jumlah anggota/pelaku usaha (orang)**					
	Koperasi	96.052	96.715	96.715	99.358	100.358
	Usaha Mikro	79.42	79.53	79.725	80.256	80.477
5	**Jumlah kesehatan kelembagaan koperasi**	268	236	236	237	244

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Jumlah koperasi rata-rata bertambah 5 unit setiap tahunnya, begitu pula usaha mikro setiap tahunnya rata-rata bertambah

sebanyak 141 usaha. Jumlah permodalan koperasi rata-rata senilai Rp.391.468.380, dengan jumlah volume usahanya sebesar 286.839.110 setiap tahunnya. Jumlah permodalan usaha mikro rata-rata senilai Rp.438.078.869.000 dengan jumlah volume usaha rata-rata setiap tahunnya sebesar 5.486.854.000. Jumlah anggota koperasi tumbuh sebesar 0,011% setiap tahunnya, sedangkan jumlah pelaku usaha hanya tumbuh sebesar 0,003% setiap tahunnya.

Tabel 2.122 Capaian Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15,3	16,2	15,07	14,4	16,98
2	Persentase koperasi aktif	45,06	45,45	45,74	45,96	46,15
3	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	26,37	26,12	25,99	26,09	26,67
4	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	16,88	24,66	13,93	13,58	14,2
5	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	17,97	43,98	46,67	61,36	88,63
6	Pertumbuhan Wirausaha	0,40	0,65	0,16	0,44	0,15

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian kinerja Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara rata-rata pada persentase koperasi aktif tumbuh sebesar 0,27% setiap tahunnya, begitu pula dengan usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal tumbuh sebesar 17,67%.

2.4.4.2.12 Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi, dimana aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang tinggi, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Realisasi nilai investasi non fasilitasi di Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 123 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

NO	BIDANG USAHA	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	Realisasi Investasi	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.599.118.948.300	2.599.118.948.300	2.599.118.948.300	2.599.118.948.300	2.599.118.948.300
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	7.759.482.135.141	7.759.482.135.141	7.759.482.135.141	7.759.482.135.141	7.759.482.135.141

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2025

Fluktuasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga kondisi stabilitas investasi benar-benar dipengaruhi oleh iklim investasi khususnya regulasi yang berhubungan dengan insentif.

2.4.4.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan pemuda merupakan upaya untuk pembentukan karakter generasi bangsa yang diharapkan dapat mewujudkan generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental melalui kegiatan yang edukatif, rekreatif dan produktif. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, sosial ekonomi produktif dan olahraga.

Tabel 2. 124 Capain Kinerja Kepemudaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi kepemudaan	13	13	13	15	15
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	4	4	6	9	9
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,33	1,31	1,52	1,51	0,94
4	Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	398	390	604	496

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2025

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri merupakan persentase dari total populasi pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri. Peningkatan yang dicapai merupakan respon terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19 dimana banyak pemuda yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Begitu pula sebaliknya, adanya penurunan capaian disebabkan antara lain oleh adanya perubahan kondisi ekonomi yang semakin membaik sehingga mendorong pemuda untuk mencari dimana pekerjaan formal, serta kegagalan usaha terutama yang baru mulai cenderung tinggi.

Pembinaan olahraga diarahkan pada cabang olahraga yang memiliki pengurus cabang tingkat kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1) Cabang olahraga terukur, yaitu atletik, renang, balap sepeda, panjat tebing, senam.
2) Cabang bela diri, yaitu pencak silat, wushu, karate, taekwondo.
3) Cabang olahraga permainan, yaitu sepak bola, bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, catur, bridge, drumband.

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bondowoso masih berfluktuatif yang menunjukkan bahwa prestasi olahraga masih belum stabil dan sangat bergantung pada siklus penyelenggaraan event olahraga. Hal tersebut mencerminkan masih terdapat tantangan untuk mempertahankan konsistensi khususnya dalam sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi di tingkat kabupaten.

Tabel 2. 125 Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Atlet yang mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional)	188	200	282	255	265

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Cabor yang mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional)	5	7	26	10	8
3	Peningkatan prestasi olahraga	532	142	457	283	285

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.14 Statistik

Dalam era informasi, data statistik merupakan hal yang sangat penting dimana data yang dikumpulkan didasari oleh konsep dan definisi yang jelas dan baik sehingga semua pengguna dapat berkomunikasi dengan persepsi yang sama. Penyediaan data digunakan untuk bahan perencanaan, evaluasi maupun pengukuran dalam berbagai indikator pencapaian pembangunan. Penyediaan data statistik sektoral terangkum dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso. Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan dengan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2. 126 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Jenis Dokumen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Bondowoso dalam angka	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Data statistik Sektoral yang disusun	2	2	1	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.15 Persandian

Pengamanan informasi pembangunan dalam bentuk persandian beserta segala aspek penyebarluasannya sangat diperlukan dalam rangka pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Pelaksanaan kegiatan persandian masih belum optimal dan memerlukan dukungan baik dari SDM, teknologi dan sarana prasarana.

Tabel 2. 127 Jumlah Pengamanan Informasi Milik Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengamanan informasi milik daerah (dokumen)	30	30	38	38	38

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Bondowoso memiliki peninggalan benda-benda purbakala seperti Punden Berundak, Sarkofagus, Dolmen, Kubur Batu, Batu Kenong, Menhir, Abris Saus Roche, Pelinggih, *Stun Chambers* (batu ruang), Ekopak, Goa Buto, Arca Batu yang terdapat di kecamatan Maesan, Grujugan, Pujer, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Tegalampel, Bondowoso, Wonosari, Prajekan, Tlogosari, Cermee, Ijen dan Wringin. Pelestarian terhadap benda cagar budaya tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten

Bondowoso agar peninggalan ini dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat sebagai warisan dan karya budaya yang pernah ada di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2. 128 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kekayaan budaya yang dilestarikan	1.219	1.423	1.324	1.344	1.326
2.	cagar budaya yang dapat dijadikan Potensi kabupaten	-	250	500	614	615
3	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	45	45	80	210	220
4	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (orang)	5	5	5	5	5
5	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. (orang)	48	48	48	37	37

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2025

Pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat banyaknya benda cagar budaya yang tersebar di

seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, beserta masih minimnya penyelenggaraan event yang bertema seni dan budaya sehingga diperlukan upaya pengelolaan dan pemeliharaan benda cagar budaya serta pelibatan masyarakat dalam melestarikan termasuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Disamping itu perlu upaya meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional melalui penyelenggaraan event pagelaran kesenian daerah.

2.4.4.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran maupun media transfer pengetahuan berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, karena perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan belajar mandiri yang dapat membantu masyarakat dalam belajar, Tanggap dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial politik.

Pelayanan perpustakaan diarahkan dalam meningkatkan jumlah perpustakaan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan layanan sehingga meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan serta meningkatkan ketersediaan bahan bacaan berupa koleksi buku yang tersedia. Gambaran perkembangan perpustakaan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 129 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jangkauan layanan perpustakaan keliling (kali)	81	85	160	160	165

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Perpustakaan Satker Kab, Kec dan Desa/Kel (Unit)	83	83	88	88	88
3.	Jumlah bahan pustaka di Perpustakaan umum daerah (Eksemplar)	1.100	2.374	60.340	62.283	64.602
4.	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan (Orang)	53.847	46.909	52.685	108.177	164.318
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	32.302	32.327	32.793	33.268	34.041
6.	Jumlah perpustakaan berstandart SNP	25	25	40	45	48
7.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)			59,89	57,2	65,6
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)			17,42	19,04	19,47

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.2.18 Kearsipan

Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan sistem administrasi kearsipan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 130 Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan serta Penyelamatan/Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Instansi pemerintah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah	82	83	85	87	87

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah arsip yg berhasil diakuisisi (eksemplar)	3.925	1.975	3.88	6.544	50
3	Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan	1.972	2.331	2.425	14.898	6.544
4	Persentase arsip yang disajikan dalam bentuk digital	1.952	2.055	1.893	286	103
5	Persentase arsip yang disusutkan/dimusnahkan	462	617	300	280	6.717

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bondowoso memiliki potensi pengembangan perikanan darat yang mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perkembangan luas area dan hasil produksi sektor perikanan selama periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan budidaya (kg)	907.822	808.802	868.690	1.073.129	971.015
2	Produksi perikanan tangkap perairan umum (kg)	148.760	124.914	120.963	107.740	113.800
3	Produksi benih ikan (ekor)	14.355.000	15.634.00	17.763.000	10.108.200	6.491.000
4	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	20,84	20,37	21,62	22.21	21,62

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa pengembangan usaha budidaya perikanan belum optimal yang disebabkan usaha ini masih dipandang sebagai aktivitas sampingan oleh para pembudidaya. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap memberikan pembinaan secara sistematis kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakkan) dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya Tingkat Konsumsi Ikan.

2.4.4.3.2 Pariwisata

Bondowoso memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan pariwisata melalui kombinasi unik antara kondisi geografis yang beragam, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta warisan seni dan budaya yang otentik. Keunggulan ini menjadi modal dasar yang telah berhasil mendorong pertumbuhan destinasi wisata pada skala regional, nasional, bahkan internasional. Hal ini dibuktikan oleh pengakuan Unesco Global Geopark yang menetapkan Kawasan Ijen sebagai Ijen Geopark.

Pariwisata Kabupaten Bondowoso telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai sektor strategis, pengembangan destinasi wisata di Bondowoso mendorong perkembangan ekonomi, khususnya perdagangan, hotel dan kuliner, serta mampu memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.

Tabel 2. 132 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan wisatawan	263.309	188.360	366.522	555.171	611.361
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,63	0,63	0,68	0,71	0,72
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	1,42	1,74	3,08	3.09	3,63
Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	-	15	15	15	15
Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	-	94,66	91,43	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kemudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2025

Kunjungan wisatawan ke Bondowoso menunjukkan tren positif meski terdapat penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata memiliki daya tarik yang kuat. Selaras dengan jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan terhadap PAD juga tumbuh, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan dalam perekonomian serta mengindikasikan pemungutan retribusi dari sektor pariwisata berhasil dikelola secara efektif. Secara keseluruhan kinerja Urusan Pariwisata menunjukkan pemulihan yang kuat dan pertumbuhan yang menjanjikan pasca pandemi. Tantangan kedepan yang perlu ditindaklanjuti adalah keterlibatan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar kolaborasi semua dapat lebih meningkatkan sektor pariwisata dalam perekonomian.

2.4.4.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 menunjukkan kontribusi sektor pertanian di tahun 2020 mencapai 29,83%, tahun 2021 mencapai 29,47%, tahun 2022 mencapai 28,34%, tahun 2023 mencapai 27,88% dan tahun 2024 menjadi 28,05%. Tren PDRB sektor pertanian terus mengalami penurunan tetapi nilai produksi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 5,94 triliun, tahun 2021 sebesar 6,20 triliun, tahun 2022 sebesar 6,48 triliun, tahun 2023 sebesar 6,90 triliun dan tahun 2024 meningkat menjadi 7,25 triliun rupiah.

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan adanya peralihan dari sektor subsisten ke sektor pengolahan, yang dapat diartikan bahwa perekonomian di Kabupaten Bondowoso bergerak dari hanya menjual langsung produk hasil panen menjadi produk olahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa industri pengolahan masih berbasis pertanian atau agroindustri, selain itu dapat diartikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sudah diadopsi oleh masyarakat khususnya petani.

Berikut disajikan tabel luas panen, produktivitas dan produksi per jenis komoditas tanaman pangan, sayuran dan biofarmaka di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2. 133 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	**Luas Panen**						
1	**Padi Palawija**						
a	Padi	Ha	88.166	73.677	74.594	79.985	75.250
b	Jagung	Ha	32.766	36.009	37.136	34.535	30,666
c	Kedelai	Ha	52	21	21	94	47,30
d	Ubi Kayu	Ha	2.110	2.136	2.149	2.589	3.527
2	**Sayuran**						
a	Bawang Merah	Ha	42	50	33,82	33,82	32
b	Cabe Rawit	Ha	1.560	1.374	725	725	945
3	**Biofarmaka**						
a	Jahe	Kw/Ha	171	2	161,1	310	367
b	Kunyit	Kw/Ha	221	2	19,55	885,37	661,8
II	**PRODUKTIVITAS**						
1	**Padi Palawija**						
a	Padi	Kw/Ha	61,54	61,55	61,7	61,7	61,8
b	Jagung	Kw/Ha	52,51	52,73	51,9	51,9	54,1
c	Kedelai	Kw/Ha	15,09	15,10	15,2	15,2	15,2
d	Ubi Kayu	Kw/Ha	228,44	228,66	227,8	227,8	227,8
2	**Sayuran**						
a	Bawang Merah	Kw/Ha	109,62	97	103,8	103,8	87,18
b	Cabe Rawit	Kw/Ha	85,00	85	83,8	83,8	60,24
3	**Biofarmaka**						
a	Jahe	Kw/Ha	171	2	161,1	172,3	-
b	Kunyit	Kw/Ha	221	2	19,55	263	-
III	**PRODUKSI**						
1	**Padi Palawija**						
a	Padi	Ton	542.574	453.503	460.452	460.452	464.766
b	Jagung	Ton	172.054	189.869	193.106	193.106	166,046
c	Kedelai	Ton	78	32	32	32	72

No.	Uraian	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
d	Ubi Kayu	Ton	48.201	48.842	48.964	48.964	80.334
2	**Sayuran**						
a	Bawang Merah	Ton	460	487	351	351	279
b	Cabe Rawit	Ton	132.602	11.697	6.076	6.076	5.693
3	**Biofarmaka**						
a	Jahe	Ton	5.130	530	315	315	626
b	Kunyit	Ton	19.227	18.985	17.309	17.309	17.415

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 134 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**Luas Panen**					
1	Kopi (Ha)	13.649	13.649	15.791	16.366	
	Luar Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ha)	1.150	1.150	1.446	1.482	1.482,50
	- Arabika (Ha)	434	434	599	599	599,43
	dalam Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ha)	4.316	4.316	4.684	5.070	5.070
	- Arabika (Ha)	7.749	7.749	11.420	11.733	11.733,45
2	Tebu (Ha)	6.060,09	6.060,09	6.193	6.207	6.383
3	Tembakau (Ha)	6.372,70	6.372,70	5.684	6.298,40	8.424
II	**Produksi**					
1	Kopi	4.335,95	10.552,24	6.147,11	9.868,57	8.439,23
	- Robusta (Ton)	2.110,45	3.527,88	2.991,25	3.155,86	3.203,83
	- Arabika **(**Ton**)**	2.225,50	7.024,36	4.752,48	5.116,09	5.235,40

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Tebu (Ton Gula)	28.224,01	408.405,34	440.653,61	454.415,20	47.091,35
3	Tembakau	-	-	6.347,73	8.033,07	10.737,39
	- Kasturi	3941,45	2.648,66	1.853,02	3.211,80	4.089,11
	- Rajangan	7.360,93	5.766,46	4.495	4.821,27	6.648,28
III	**Produktivitas**					
1	Kopi (Ton Oce)					
	Luar Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ton/Ha)	0,36	0,45	0,46	0.49	0,52
	- Arabika (Ton/Ha)	0,44	0,47	0,49	0.51	0,50
	dalam Kawasan Hutan					
	- Robusta (Ton/Ha)	0,36	0,45	0,46	0,50	0,49
	- Arabika (Ton/Ha)	0,42	0,48	0,49	0,515	0,51
2	Tebu (Ton tebu)	59,02	61,42	71,15	73.21	73,65
3	Tembakau					
	- Kasturi (Ton/Ha)	1,81	1,65	1,60	1.65	1,65
	- Rajangan (Ton/Ha)	1,24	1,21	1,00	1.19	1,12

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Perkembangan populasi dan produksi peternakan di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 135 Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Populasi Ternak					
1	Sapi potong (ekor)	234.300	237.407	232.659	182.875	145.577
2	Sapi perah (ekor)	12	14	12	12	510
3	Kuda (ekor)	1.065	1.130	1.126	1.126	210
4	Kambing (ekor)	49.166	54.809	55.254	55.254	63.668
5	Domba (ekor)	44.506	51.235	51.276	51.279	11.996
6	Kelinci (ekor)	8.884	10.305	10.318	10.318	414
7	Ayam Buras (ekor)	698.046	701.846	700.172	700.172	331.309

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Ayam Ras Petelur (ekor)	232.045	247.900	247.900	247.900	680.082
9	Ayam Ras Pedaging (ekor)	2.685.053	2.312.800	152.237	152.237	3.280.714
10	Itik (ekor)	71.350	68.838	68.765	63.765	57.473
11	Entok (ekor)	22.833	23.888	23.888	23.888	5135
II	Produksi Ternak					
1	Daging (Ton/thn)	4.595,681	4.696.321	4.903.572	4.503.572	5.961.239
2	Telur (Ton/thn)	3.245,929	3.264.335	3.258.871	3.258.871	2.911.844
3	Susu (kg/thn)	239.586	31.255	197.506	197.506	91.200

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2025

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdiri atas kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta lahan cadangan pangan. Penetapan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan di masa depan, mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif, serta menyiapkan lahan cadangan terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian pangan untuk memastikan pasokan pangan yang stabil. Tabel Capaian Kinerja Urusan Pertanian disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (ha) [1)]	35.200,13	35.200,13	35.200,13	35.200,13	35.200,13

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Penanganan Bencana Pertanian 1)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 1)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan dan kesehatan hewan 2)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2)	1,37	1,39	1,47	1,44	1,43
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 2)	22,75	22,90	23,25	23,50	23,90

Sumber : 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2025
2) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian kinerja sub sektor peternakan memiliki pondasi yang kuat dari sisi prasarana. Namun, tantangan utama terletak pada aspek keamanan dan kesehatan hewan. Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Bondowoso adalah dengan fasilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi ternak, penguatan terhadap pengendalian penyakit serta mempercepat cakupan sertifikasi NKV untuk memastikan hasil produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

2.4.4.3.4 Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengarahkan pembangunan Urusan Bidang Perdagangan untuk peningkatan nilai lebih penyelenggaraan perdagangan yang dilaksanakan untuk peningkatan

sarana dan prasarana perdagangan, stabilisasi harga, pengembangan ekspor serta perlindungan konsumen.

Tabel 2. 137 Capaian Kinerja Perdagangan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	98,57	98,87	99,13	99,47	99,74
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	59,83	62,01	63,23	65,45	66,67
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan menunjukkan kinerja yang konsisten, capaian ini menjadi dasar yang penting bagi kelancaran arus barang dan jasa di Bondowoso. Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas ekspor menunjukkan kenaikan yang stabil dimana pelaku usaha semakin berminat dengan pasar internasional dan mendorong agar produk lokal dapat bersaing di pasar global. Capaian persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ditera ulang juga mengalami peningkatan meski kecil, oleh karena itu masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan fasilitas tera ulang. Capaian persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menunjukkan angka yang fluktuatif, menunjukkan upaya Pemerintah

Bondowoso melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga. Secara keseluruhan kinerja Urusan Perdagangan mendapatkan hasil yang baik dalam pengelolaan sarana distribusi dan peningkatan kapasitas ekspor yang merupakan pengungkit dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam pengawasan dan perlindungan konsumen masih membutuhkan upaya agar jumlah UTTP yang ditera ulang dapat terus meningkat. Stabilisasi harga masih menjadi tantangan untuk memastikan iklim perdagangan yang sehat dan adil.

2.4.4.3.5 Industri

Sektor industri merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso. Pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengindikasikan bahwa sektor Industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai tambah yang tinggi, utamanya dalam hal hilirisasi produk.

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2020 jumlah pelaku industri sejumlah 20.518 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 56.754 orang meningkat menjadi 21.083 unit usaha pada tahun 2024 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 57.503 orang. Data IKM di Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.138 Data Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (unit)	20.518	20.651	20.791	20.939	21.083
2	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	56.754	56.952	57.171	57.344	57.503
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dilakukan oleh instansi terkait	0	0	0	100,00	100,00
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2025

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Bondowoso menunjukkan hasil yang positif. Pertumbuhan jumlah IKM dan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini adalah salah pilar penting bagi ekonomi daerah. Disamping itu juga menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ini tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bondowoso Tahun 2022-2042 yang dijadikan pedoman untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Bondowoso dalam industrialisasi.

Beberapa kegiatan tersebut meliputi pembinaan legalitas usaha dan standarisasi produk, diantaranya pembuatan Nomor Induk

Berusaha (NIB), akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sertifikasi PIRT, BPOM, SNI, Halal, Merek, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, transformasi wawasan tentang label dan kemasan, serta penyajian, serta adanya fasilitasi kemudahan akses pembiayaan dan fasilitasi promosi produk lokal di berbagai event pameran menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan daya saing pasar. Penerapan Standar Industri Hijau (SIH) juga disosialisasikan karena merupakan salah satu instrumen yang akan menjadi tulang punggung mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.4.4.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah secara umum mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah yang bersifat koordinatif diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan melalui penerapan sistem yang terintegrasi bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses pelaporan dan evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tabel 2. 139 Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyusunan Kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Secara fungsi sekretariat DPRD melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat/sidang DPRD, fasilitasi penyusunan perundang-undangan DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persepsi IKM Terhadap Peran DPRD	7,51	7,71	7,80	96,50	89,00
2	% Raperda yang dibahas	75%	81,25%	81,25%	100%	92,30%
3	% Raperda yang ditetapkan	75%	81,25%	81,25%	112%	240%
4	% Aspirasi yang ditindaklanjuti	103,72%	100%	104,96%	97,16%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RPJMD program-program pembangunan dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang

direncanakan secara efektif dan menunjang pencapaian keberhasilan program.

Tabel 2. 141 Indikator Program-Program Pembangunan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah program pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang harus dilaksanakan	54 Program	24 Program	24 Program	57 Program	57 Program
2.	Jumlah program pembangunan sosial budaya yang harus dilaksanakan	180 Program	98 Program	98 Program	184 Program	201 Program
3.	Jumlah program pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang harus dilaksanakan	34 Program	18 Program	18 Program	33 Program	33 Program
4.	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.5.2 Keuangan

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, masih mengandalkan sumber dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih sangat tinggi, sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian Pemerintah Bondowoso. Persentase Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap total pendapatan mengindikasikan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Persentase PAD Terhadap Pendapatan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 142 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.941.757.072.599	2.054.350.628.525	1.908.478.394.409	1.990.420.763.058	2.016.026.652.579
PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.657.296.673	223.136.567.608	189.504.490.467	211.009.393.993	255.068.751.500
Pajak Daerah	30.580.807.590	35.114.763.839	41.397.270.293	43.384.281.391	46.854.513.560
Retribusi Daerah	18.316.717.235	14.367.036.052	16.881.328.762	21.566.432.779	191.366.744.109
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.203.394.607	4.260.079.389	4.544.375.373	4.629.838.583	4.743.208.147
Lain-lain PAD yang sah	169.556.377.240	169.394.688.328	126.681.516.038	141.428.841.239	12.104.285.684
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	11,47	10,86	9,93	10,60	12,65
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	38,46	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025

Secara keseluruhan, kinerja Keuangan di sub urusan Pendapatan Kabupaten Bondowoso menunjukkan pola pemulihan yang kuat dan progres positif pasca-pandemi. Meskipun sempat mengalami penurunan namun berhasil memperbaiki keadaan di tahun-tahun berikutnya yaitu meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Bondowoso berhasil mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Namun, perlu diperhatikan bahwa adanya fluktuasi mengindikasikan bahwa diperlukan strategi yang lebih stabil dan berkelanjutan kedepannya.

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, tingkat tersebut dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Realisasi anggaran dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 143 Rata-Rata Realisasi Anggaran dan Opini BPK terhadap LKD Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-Rata Realisasi Anggaran	93,92	94,02	87,88	88,51	92,46
2.	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	17,00	34,81	37,70	34,10	23,35
4.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	92,95	91,39	88,17	89,29	92,63

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase Penurunan SILPA	10,22	-66,24	3,21	19,55	27,49
6.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-1,38	-2,66	-2,01	-2,43	-3,45

Sumber : BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.5.3 Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 sejumlah 8.657 orang yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 2 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 6.439 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 2.216 Orang. Kualifikasi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 144 Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	Berdasarkan Pendidikan					
1.	SD/MI	57	65	57	37	25
2.	SMP/MTs	196	187	175	120	106
3.	SMA/SMK/MA	1.867	1.801	1.649	1.516	1.239
4.	Diploma 1 (D-1)	12	8	8	3	5

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Diploma 2 (D-2)	283	273	229	155	122
6.	Diploma 3 (D-3)	609	627	779	803	757
7.	Diploma 4 (D-4)	124	154	159	217	224
8.	Sarjana Strata 1 (S-1)	4.335	4.506	5.391	5.920	5.797
9.	Sarjana Strata 2 (S-2)	366	316	313	319	379
10	Doktoral (S-3)	2	2	1	3	3
JUMLAH		**7.851**	**7.939**	**8.761**	**9.093**	**8.657**
II	Berdasarkan Golongan					
1.	Golongan I	142	130	102	55	31
2.	Golongan II	1.833	1.728	1.822	1.721	1.638
3.	Golongan III	3.868	3.964	3.887	3.754	3.663
4.	Golongan IV	2.008	1.805	1.582	1.339	1.109
	JUMLAH	7.851	7.627	7.393	6.869	6.441
III	PPPK					
	JUMLAH	**-**	**312**	**373**	**2.224**	**2.216**

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/5/430.6.2/2024 tentang Daftar Nama Tenaga Honorer dan Besaran Honorarium Tenaga Honorer Tahun 2024, Jumlah tenaga honorer kategori 1 (K1) sebanyak 47 orang, sedangkan tenaga honorer kategori 2 (K2) berjumlah 271 orang. Mengingat terdapat tenaga honorer yang meninggal dan pensiun hingga akhir tahun 2024 jumlah

pegawai honorer sebanyak 318 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 145 Kualifikasi Pegawai Honorer Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

No	Kualifikasi Pendidikan	No ASN	
		Honorer K1	Honorer K3
1.	SD/MI	5	5
2.	SMP/MTs	1	13
3.	SMA/SMK/MA	18	179
4.	Diploma 1 (D1)	-	-
5.	Diploma 2 (D2)	-	28
6.	Diploma 3 (D3)	5	4
7.	Diploma 4 (D4)	-	-
8.	Sarjana Strata 1 (S1)	18	42
9.	Sarjana Strata 2 (S2)	-	-
10.	Doktoral (S3)	-	-
JUMLAH		**47**	**271**

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bondowoso, 2025

Dalam penyelenggaran urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh aparatur pemerintah agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik antara lain : formasi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah, disiplin aparatur dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 146 Kinerja Kepegawaian Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	% SK yang diterbitkan tepat waktu	88,07% 5284/6000	99,46% 5935/5967	98,45% 888/902	95,63% 5403/5650	23,48% (1045/4450)
2.	% penerbitan SK Sangsi	0.24% (19/7.851)	0.30% (24/7.939)	0.24% (19/7.766)	0.12% (11/9.093)	0,17% (15/8657)
3.	% Pejabat struktural yang di asessmen yang memenuhi standar kompetensi	52,74% 337/639	50,64% 199/393	34,87% 144/413	36,64% (144/393)	98,46% 387/390
4.	% laporan E SKP tepat waktu	99,97% (7849/7851)	97,66% (7.667/7.939)	100% 8761/8761	99,28% (9.028/9.093)	99,56% (8619/8657
5.	% ASN yang mengikuti Bimtek	15,95% (1.252/7.851)	47,67% (3.784/7.939)	21,44% 1879/8761	27,99% (2.545/9.093)	35,78% 3098/8657
6,	% pejabat yang memenuhi standar struktur kompetensi	96,15% 7549/7851	97,55% 7745/7939	90,37% (7.918/8.761)	89,77% (8.163/9.093)	99,96% 8654/8657

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7.	% pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi	52,74% (337/639)	84,73% (333/393)	34,87% (144/413)	36,64% (144/393)	98,46% 387/390
8.	% pemangku jabatan struktural	84,19% (639/759)	71,85% 393/547	87,13% (413/474)	82,91% (393/474)	82,28% 390/474
9.	% pemangku jabatan fungsional	34,83% (4.800/13.782)	74,82% (4.707/6.291)	92,56% (4.343/4.692)	76,89% (4.229/5.500)	95,84% 6171/6439
10.	% dokumen kepegawaian (pangkat, pensiun, berkala) yang diterbitkan tepat waktu	88,07% (5.284/600)	99,46% (5.935/5967)	98,45% (888/902)	95,63% (5.403/5.650)	50.30% 830/1650
11.	% akurasi data pegawai	97,97% 7692/7851	94,18% 7477/7939	91,67% 8032/9761	96,81% (8.803/9.093)	94,35% 8168/8657
12.	% pegawai pendidikan D4/S1	54,81% 4303/7851	61,37% 4872/7939	66,93% 5864/8761	71,03% (6.459/9.093)	69,59% 6024/8657

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13.	% pemenuhan kebutuhan pegawai	54,11% 7851/14509	54,72% 7939/14509	60,56% 8761/14466	62,68% 9.093/14.466	59,84% 8657/14466
14.	% tingkat kehadiran aparatur	99,97% 7849/7851	99,95% 7935/7939	99,99% 8760/8761	99,26% 9.026/9.093	99,96% 8654/8657
15.	% aparatur yang berprestasi kinerja baik	99,97% (7849/7851)	99,55% (7816/7939)	99,66% (8731/9761)	99,28% (9.028/9.093)	99,56% (8619/8657

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan daerah, peran bidang pendidikan dan pelatihan menjadi kunci penting bagi penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi buruk jika aparatur pelaksanaan pembangunan memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Aparat yang profesional menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien, berwawasan dan terintegrasi baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan, maupun kelembagaan.

Tabel 2. 147 Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	% Kelulusan peserta diklat	100% 80/80	100% 60/60	100% 1189/1189	100% (298/298)	100% 138/138
2.	% ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20JP	35,88% 2817/7851	53,34% 4235/7939	21,44% 1879/8761	27,99% 2545/9.093	3,47% 242/8657
3.	% pemenuhan kebutuhan diklat	3,85% 70/1819	29,22% 128/438	1,65% 145/8761	1,34% 122/9093	3,53% 302/8657
4.	% ASN yang lulus diklat dengan nilai memuaskan	100% 80/80	100% 60/60	91,17% 1084/1189	97,32% 290/298	100% 138/138

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Pasal 373, 374, dan 388 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan Pengembangan (litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemologi maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 148 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

Kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan bergantung pada penyusunan perencanaannya. Perencanaan yang baik perlu didasari dengan hasil riset dan inovasi sehingga perencanaan akan menjadi terarah dan efektif menghasilkan dampak yang signifikan, serta dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran. Riset dan inovasi yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan kebijakan akan menjadi katalisator yang efektif dalam pembangunan di daerah. Sebagai contoh, dalam program pengentasan kemiskinan, seringkali bantuan tunai atau sembako menjadi solusi utama padahal selain bantuan sosial, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, seperti

peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Di tingkat kabupaten/kota, dokumen ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab atas riset dan inovasi di daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya. Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah bertujuan untuk menjadi landasan kebijakan berbasis bukti sehingga implementasi kebijakan lebih efektif dan akseleratif dalam menangani masalah prioritas di daerah.

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.4.4.6.1 Inspektorat Daerah

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah yang pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah dilakukan terhadap semua urusan pemerintahan mulai tingkat Kabupaten sampai

dengan desa/kelurahan. Gambaran kinerja pengawasan di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2. 149 Kinerja Pengawasan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan	30 Orang	28 Orang	7 Orang	6 Orang	5 orang
2	Jumlah Aparatur pengawasan yang mendapat Diklat Teknis	12 Orang	11 Orang	-	7 orang	23 orang
3	LK OPD sesuai SAP	57 OPD	57 OPD	100%	100%	100%
4	OPD dengan Maturitas Penerapan SPIP mencapai level 3	57 OPD	57 OPD)	17,54% (10 OPD)	87,72% (50 OPD)	100%
5	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit	165 Obwas	145 obwas	293 obwas	92,28 %	91,40%
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	138 Kasus	57 kasus	42 kasus	100% (55 pengaduan)	100% (36 pengaduan)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

2.4.4.7.1 Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan memiliki wilayah geografis tertentu yang meliputi desa/kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Kecamatan berfungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum:
   Kecamatan berperan dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum yang meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah di tingkat kecamatan.
2. Pelayanan Publik:
   Kecamatan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan umum lainnya.
3. Pemberdayaan Masyarakat:
   Kecamatan juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

   Kecamatan bertanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya, termasuk penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren:

   Kecamatan juga berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, serta sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.

Tabel 2. 150 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang aktif (LPMD/K, TKPK Kec, Forkumsehat, PKK dan Karangtaruna)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Tindak Kriminal yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BP4D Kabupaten Bondowoso, 2025

2.4.4.8 Urusan Pemerintahan Umum

2.4.4.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembangunan berwawasan kesatuan bangsa dan sosial politik dalam kerangka NKRI mengarah pada penciptaan situasi saling menghormati antar suku, agama, ras maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penataan instrumen sosial masyarakat Bondowoso yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM serta mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam Potensi konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat.

Tabel 2. 151 Perkembangan Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Potensi Konflik SARA yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso, 2025

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, Pemuda dan LSM terus dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan, pencegahan terjadinya Potensi konflik sosial dan untuk menumbuhkan Kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Bondowoso yang terdaftar di Bakesbangpol Jawa Timur terus meningkat, pada Tahun 2022 sebanyak 268 dan Tahun 2024 mencapai 290 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 152 Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ormas/LSM	263	281	268	281	290

Sumber : Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur, 2025

Lemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, sehingga semakin luntur nilai-nilai Pancasila. Masih kurangnya optimalisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sehingga pemahaman kesatuan bangsa dan politik belum terbentuk secara maksimal di masyarakat, karena masih ditemui bahwa demokrasi diidentikkan dengan kebebasan menentukan sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompok. Perlu peningkatan Pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan peran Ormas/LSM dan Tomas/Toga dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif.

2.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 Ayat (3) yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa untuk memenuhi

kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100%.

SPM yang berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, juga dimaksudkan untuk menjawab isu-isu krusial yang bermuara pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

2.4.5.1 SPM Pendidikan

Penerapan SPM Pendidikan selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2. 153 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100%	100	100	100	100
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100%	100	100	100	100
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	73,80%	73.80	74.59	75.24	75.82
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	92,48%	92.52	92.84	93.32	93.87
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	67,43%	68.65	70.29	72.58	74.16

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	62,08%	63.52	65.51	67.32	70.16
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	88,70%	89.12	90.24	91.37	91.89
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%.	93,21%	93.75	94.23	94.87	95.12
9	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan	40,46%	41.23	41.68	42.15	42.78
10	Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	76,09%	84.25	87.59	92.57	96.58
11	Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	78,18%	88.56	89.64	92.56	97.24

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki serifikat pendidik;	87,06%	92.56	93.56	100	100
13	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	100%	100%	100%	100%
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	79,70%	82.35	83.69	85.76	86.97
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;	79,80%	83.59	85.25	87.24	89.23
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	90,06%	91.12	92.35	93.67	94.56

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku dan 20 buku referensi;	79,68%	81.26	83.54	84.56	85.24
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk, merencanakan, pembelajaran, melaksanakan, pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	95,78%	96.12	96.83	97.32	97.89
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	100%	100%	100%	100%	100%
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	100%	100%	100%	100%	100%
22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	100%	100%	100%	100%	100%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	100%	100%	100%	100%	100%

No	Pelaksanaan SPM	Capaian Seluruh Indikator SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	NA	NA	100	100	100
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian 26setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	100%	100%	100%	100%	100%
26	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada akhir semester; dan	100%	100%	100%	100%	100%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Dalam pemenuhan SPM Pendidikan tahun 2020-2024, pencapaian tingkat kemandirian sekolah masih belum memadai. Pada indikator di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Sampai dengan tahun 2020 masih mencapai 73,80%.

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; hingga tahun 2020 mencapai 92,48%.

Pada indikator di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 67,43%.

Pada indikator Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 88,70%.

Indikator di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%, sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 93,21%.

Indikator Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan, sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 40,40%.

Indikator setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 76,09%.

Indikator setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 78,18%.

Indikator satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu, dan indikator Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester pada tahun 2020 tidak dapat tercapai mengingat kondisi pandemi Covid-19 sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.

Capaian mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 154 Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
	Pendidikan Anak Usia Dini	
1	Jumlah total warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan PAUD	19.936
2	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang menerima buku gambar	19.936
3	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang menerima alat mewarnai	19.936
4	Jumlah satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	451

No.	Uraian	Jumlah
5	Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	957
6	Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.511
7	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidkan	
	Pendidikan Dasar	
1	Jumlah total warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	98.402
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima buku teks pelajaran	98.402
3	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima perlengkapan belajar	98.402
4	Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	529
5	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualitas SMA/sederajad	
6	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	
7	Jumlah lembaga pendidikan yang berakreditasi minimal C	605
8	Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5.873
	Pendidikan Kesetaraan	

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah total warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikandasar dalam pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraaan	98.402
2	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang menerima modul belajar	98.402
3	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima perlengkapan Belajar	98.402
4	Jumlah rombongan belajar di PKBM	
5	Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	48
6	Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi SI/D-IV	48
7	Jumlah kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualitas SMA/sederajad	48
8	Jumlah PKBM terakreditasi minimal C	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

SPM berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk mengukur kinerja mereka dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi masyarakat, pada urusan Pendidikan merujuk pada Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS);
2. Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS);
3. Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan

kesetaraan (APS);

4. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional;
5. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional;
6. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional;
7. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B;
8. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV;
9. Iklim keamanan SD;
10. Iklim keamanan SMP;
11. Iklim kebinekaan SD;
12. Iklim kebinekaan SMP;
13. Iklim inklusivitas SD;
14. Iklim inklusivitas SMP.

Capaian target SPM tahun 2021 dan Mutu Pelayanan SPM mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 155 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Program	Indikator	Target 2024 (%)	Capaian 2024(%)
1.	Pendidikan Dasar	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	85,05
		Tenaga admin kualifikasi SMA/sederajat	100	100
		Perlengkapan belajar	100	100

No	Program	Indikator	Target 2024 (%)	Capaian 2024(%)
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	92,07
		Satuan pendidikan akreditas min. C	100	97,90
2.	Pendidikan Kesetaraan	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	100
		Tenaga admin kualifikasi SMA/sederajat	100	100
		Perlengkapan belajar	100	100
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	72,95
		Satuan pendidikan akreditas min. C	100	18,75
3.	PAUD	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	85,52
		Perlengkapan belajar	100	100
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	42,27
		Satuan pendidikan akreditas min. C	100	40,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Capaian target SPM tahun 2022 dan Mutu Pelayanan SPM mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 156 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator IPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Program	Indikator	Target 2024(%)	Capaian 2024(%)
1	**Pendidikan Dasar**	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	100

No	Program	Indikator	Target 2024(%)	Capaian 2024(%)
		Tenaga admin kualifikasi SMA/sederajat	100	100
		Perlengkapan belajar	100	100
		Rombongan Belajar di satuan Pendidikan	100	100
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	97,32
		Satuan pendidikan akreditas min. C	100	77,39
2	**Pendidikan Kesetaraan**	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	84,21
		Tenaga admin kualifikasi SMA/sederajat	100	100
		Modul belajar, Perlengkapan belajar	100	100
		Rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	100	100
		Biaya personil peserta didik	100	100
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	18,46
		PKBM terakreditas minimal C	100	12,28
3	**PAUD**	Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV	100	67,32
		Perlengkapan belajar	100	100
		Pendidik kualifikasi S1/DIV	100	61,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Untuk capaian target SPM tahun 2023 dan Mutu Pelayanan SPM mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Pendidikan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 157 Capaian Target SPM dan Mutu Pelayanan SPM Mengacu Pada Indikator IPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Uraian	Target 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
1	Kemampuan Literasi SD	100	100
2	Kemampuan Literasi SMP	100	100
3	Kemampuan Numerasi SD	100	100
4	Kemampuan Numerasi SMP	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	100	100
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	100	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	100	100
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100	34,80
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100	43,42
10	Iklim Inklusivitas SD	100	100
11	Iklim Inklusivitas SMP	100	100
12	Iklim Keamanan SD	100	100
13	Iklim Keamanan SMP	100	100
14	Iklim Kebinekaan SD	100	100
15	Iklim Kebinekaan SMP	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2. 158 Capaian Penyediaan Layanan Dasar Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	PAUD	37.772	37.772	100	Tuntas
2	Pendidikan Dasar	98.122	98.122	100	Tuntas

No.	Jenis Layanan	Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Pendidikan Kesetaraan	1.134	1.134	100	Tuntas

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2. 159 Pemenuhan Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Bidang Pendidikan			
			Jumlah dilayani (Jiwa)	Jumlah terlayani (Jiwa)	Target (%)	Capaian (%)
1	PAUD	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	35.977	37.977	100	98,80
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	66.187	66.187	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaran	15.281	1.134	100	95,25

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2025

Secara umum penerapan SPM Urusan Pendidikan masih mengalami hambatan antara lain :

1. Masih rendahnya capaian literasi dan numerasi;
2. Pembatasan aktifitas masyarakat akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan capaian program dan kegiatan kurang optimal;
3. Masih terdapat angka Drop Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar;
4. Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya;
5. Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang;
6. Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso sehingga mengakibatkan kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan;

2.4.5.2	**SPM Kesehatan**

SPM bidang kesehatan bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan merata. SPM ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang wajib dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kesehatan, SPM bidang kesehatan mencakup berbagai aspek layanan yang harus tersedia di setiap wilayah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Terdapat beberapa indikator kinerja yang terkait dengan SPM bidang kesehatan Kabupaten Bondowoso antara lain disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 160 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	85,86	87,69	84,86	82,06	62,56
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,12	105,06	103,31	99,36	77,08
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,93	95,88	96,22	94,53	75,35
4	Persentase pelayanan kesehatan Balita	103,05	94,86	96,22	110,52	97,52
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	95,09	95,56	100,84	101,61	95,58
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6,35	10,90	22,46	85,15	100,10
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	36,04	32,71	65,90	71,25	82,38
8	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	25,23	16,53	19,96	83,8	100,90
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	411,13	88,33	111,83	108,8	100,96
10	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	97,7	100	103,55	104,14	108,64
11	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB	62,38	61,22	110,52	138,55	119,16
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	93,5	113,65	113,55	135,37	116,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2025

Kendala penerapan SPM Urusan Kesehatan antara lain :

1. Masih banyaknya Bayi Baru Lahir yang tidak dilakukan IMD, terutama Bayi yang lahir di Rumah sakit dengan Operasi caesar dan mengalami komplikasi. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB), disebabkan banyaknya komplikasi dalam kehamilan (Pre eklamsi), Ibu hamil Anemi dan KEK. mengakibatkan bayi terlahir BBLR dan mengalami komplikasi Asfiksia. Kurangnya Sarana prasarana pertolongan dan perawatan Gawat darurat Neonatal pada FKTP dan FKTL.
2. Masih ada orang tua yang tidak membawa balitanya ke Posyandu lagi karena sudah selesai Imunisasi. Masih adanya orangtua yang menolak Imunisasi. Pemanfaatan Buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta Edukasi masih kurang.
3. Masih banyak lansia yang tidak hadir pada posyandu lansia dikarenakan mereka masih bekerja pada saat pelaksanaan posyandu. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi kehadiran lansia di posyandu anak atau cucu yang bekerja sehingga tidak dapat mengantar para lansia ke posyandu lansia selain itu juga anggaran untuk pengadaan BMHP stick kolesterol, gula darah dan asam urat untuk pelayanan skrening kesehatan pada usia lanjut masih belum mencukupi semua sasaran, sehingga cakupan skrening kesehatan pada usia lanjut di triwulan III berada di angka 60,85% belum mencapai target 100%.
4. Masih rendahnya kehadiran masyarakat di posbindu-posbindu dan pos layanan kesehatan untuk dilakukan screening deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM), masyarakat masih enggan hadir dikarenakan merasa tidak ada keluhan. Penduduk usia banyak yang bekerja pada saat jam kerja. penduduk usia produktif banyak yang bekerja pada saat pelaksanaan posbindu. Sehingga cakupan skrening kesehatan usia produktif di triwulan III masih 34,05% dari target

100% setahun penduduk usia produktif dilakukan skrening kesehatan standar.

5. Kurangnya kewaspadaan penderita hipertensi sehingga tidak berkunjung ke faskes untuk melakukan pemeriksaan rutin mereka cenderung periksa jika ada keluhan saja sehingga untuk memenuhi target dimana prevalensi hipertensi sesuai hasil Riskesdas 2018 adalah 31,7% dari jumlah penduduk tidak tercapai.

2.4.5.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerapan SPM Pekerjaan Umum selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 161 Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan	570.818	609.858			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari					
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari			628.842	643.492	649.072
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	589.665	198.403			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dometik			215.232 KK	230.464 KK	663.840

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Target SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluruh warga negara harus mendapatkan layanan air minum dan sanitasi, hingga saat ini masih belum seluruh warga mendapatkan layanan air minum dan sanitasi. Dari jumlah penduduk tahun 2024 baru terlayani 649.072 jiwa (82,73%), masih sekitar 17,27% masyarakat yang belum terlayani air minum. Beberapa permasalahan yang menyebabkan antara lain, ketersediaan air baku yang kurang, sarana prasarana perpipaan air minum banyak yang rusak karena kurang terpelihara. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan air limbah domestik tahun 2024 tercapai 84,61% atau 663.840 jiwa. Hal ini disebabkan perilaku hidup bersih dan sehat belum maksimal. Diharapkan penyediaan air minum dan sanitasi dapat dilakukan secara optimal agar seluruh masyarakat dapat mengakses air minum dengan baik.

2.4.5.4 SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan SPM Perumahan Rakyat selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 162 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	642	27	30	69	57
2	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2025

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM bidang Perumahan Rakyat, yaitu (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan target seluruh warga korban bencana harus disediakan dan direhabilitasi rumahnya serta difasilitasi penyediaan rumah untuk warga yang terkena relokasi akibat program pembangunan.

Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso antara lain tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2020 yaitu banjir bandang dan longsor di Kecamatan Ijen yang mengakibatkan rusaknya rumah-rumah warga dan beberapa fasilitas umum lainnya. Berdasarkan evaluasi, maka para korban bencana direlokasi di wilayah yang aman melalui bantuan pembangunan rumah

baik yang dilakukan oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini BPBD dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Secara akumulasi jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni tahun 2020-2024 sebanyak 825 jiwa. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya untuk melakukan mitigasi bencana.

2.4.5.5 SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 163 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
1*	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	A. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten / Kota (Persen)	2020	28,57
			2021	28,57
			2022	35,71
			2023	100,00
			2024	100,00
		B. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Persen)	2020	39,13
			2021	39,13
			2022	39,13
			2023	100,00
			2024	100,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		C. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2*	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	A. Jumlah Total Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi (Pelanggar)	2020 2021 2022 2023 2024	17.770 1.483 3.805 4.653 5.214
		B. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materiil (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	- - - - -
		C. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	- - - - -
		D. Jumlah penerima pelayanan	2020 2021 2022 2023 2024	17.770 1.483 3.805 4.653 5.214
		E. Jumlah penerima layanan kerugian pengobatan dan kerugian materiil	2021 2022 2023 2024	- - - -
3*	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	A. Jumlah Total Penegakan Perda sesuai mutu (Orang)	2020 2021 2022	17.770 1.483 3.805

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
	Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu		2023	4.653
			2024	5.214
		B. Jumlah Penegakan Perda Sesuai SOP (Orang)	2020	17.770
			2021	1.483
			2022	3.805
			2023	4.653
			2024	5.214
		C. Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda Sesuai Dengan Standar Jumlah SDM Pol PP dan Linmas Yang Sesuai Standar (Orang)	2020	17.770
			2021	1.483
			2022	3.805
			2023	4.653
			2024	5.214
		D. Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda Menggunakan Sarpras Sesuai Standar (Orang)	2020	1.056
			2021	1.204
			2022	764
			2023	342
			2024	286
			2021	1.483
			2022	3.805
			2023	4.653
			2024	286
4*	Penanggulangan Bencana Kebakaran	A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota (Persen)	2020	100,00
			2021	100,00
			2022	100,00
			2023	100,00
			2024	
		B. Tingkat Waktu Tanggap *(response time rate)* daerah layanan WMK (Persen)	2020	100,00
			2021	50,00
			2022	38,71
			2023	15,05
			2024	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi (Persen)	2020 2021 2022 2023 2024	11,76 40,47 40,47 52,38 67,77
		D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK (Unit)	2020 2021 2022 2023 2024	1 1 1 1 1
5*	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	11 25 21 44 65
6**	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	776.151 813.958 447.665 616.297 765.988
7**	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	2020 2021 2022 2023 2024	1.350 310 376.620 467.170 765.988
8**	Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan	2020 2021	57 25

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
	Evakuasi Korban Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang		
			2022	10
			2023	6
			2024	183

*Sumber : * Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso, 2025*
*** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025*

Pada tahun 2020 terdapat beberapa perubahan jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel tersebut di atas. Tahun 2017 persentase Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota adalah 30%. Pada Tahun 2023 jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan sebanyak 4.653 pelanggaran, jumlah pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan/dipantau sebanyak 4.653 pelanggaran jadi prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota adalah 100,00 %.

Tahun 2023 jumlah luas cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah mencapai 100,00 %. Untuk tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate) tahun 2020) sebesar 100 % dengan kasus kebakaran sebanyak 30 kasus yang masuk dalam jangkauan WMK sebanyak 30 kasus, dan jumlah kebakaran yang masuk jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit sebanyak 17 kasus. Dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, sebanyak 11 orang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pada tahun 2023 Respone Time Rate sebesar 15,05 %.

Jumlah ideal aparatur Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan dalam pelayanan Bencana Kebakaran adalah 72 orang, Tahun 2020 persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah

52,38 %. sehingga sangat dibutuhkan aparatur pemadam kebakaran yang mampu mengelola dan merawat peralatan yang berhubungan dengan teknologi informasi bencana kebakaran.

Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada tahun 2020 sebanyak 11 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 44 orang. Sedangkan Jumlah warga negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana tahun 2020 sebanyak 776.151 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 765.988 orang. Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tahun tahun 2024 sebanyak 765.988 orang. Jumlah warga negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tahun 2020 sebanyak 57 dan tahun 2024 sebanyak 183 orang tergantung kejadian bencana.

2.4.5.6 SPM Sosial

Penerapan SPM Sosial selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian SPM Sosial Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 164 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator SPM	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (%)	Real (%)	Target (%)	Real (%)	Target (%)	Real (%)	Target (Org)	Real (Org)	Target (Org)	Real (Org)
1	Panti Sosial Skala Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Panti Sosial Skala Luar Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
4	Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
5	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	100	97	100	98	100	100	100	99	526	526
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	100	97	100	96	100	99	100	100	1117	1117
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	-	-	100	100	100	100	100	100	5043	5043
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	2.254	2.254	30	30	40	40	40	40	54	54
10	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	1.790	1.790	-	-	-	-	-	-	75	75

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Tabel 2. 165 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021 – 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
1	Rehabitilasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar panti Sosial	A. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Permakanan diluar panti	2021	40
			2022	40
			2023	50
			2024	20
		B. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Sandang diluar panti	2021	10
			2022	10
			2023	10
			2024	-
		C. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Alat bantu diluar panti	2021	119
			2022	257
			2023	351
			2024	37
		D. Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti	2021	1
			2022	1

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2023	1
			2024	1
		E. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti	2021	20
			2022	20
			2023	50
			2024	50
		F. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti	2021	15
			2022	15
			2023	30
			2024	50
		G. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	2021	10

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti		
			2022	10
			2023	12
			2024	15
		H. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar diluar panti	2021	15
			2022	20
			2023	50
			2024	14
		I. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti	2021	5
			2022	10
			2023	10
			2024	10

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		J. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pelayanan Reunifikasi keluarga diluar panti	2021	5
			2022	10
			2023	10
			2024	10
		K. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Rujukan diluar panti	2021	5
			2022	10
			2023	10
			2024	10
		L. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Kedaruratan bagi daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti	2021	5

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2022	5
			2023	10
			2024	10
		M. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti	2021	5
			2022	5
			2023	10
			2024	10
		N. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	2
		O. Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang	2021	11

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Belum memiliki Kandaraan Khusu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru diluar panti		
			2022	1
			2023	1
			2024	1
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	A. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti	2021	290
			2022	25
			2023	50
			2024	50
		B. Jumlah anak telantar yang memperoleh Permakanan diluar panti	2021	210
			2022	25
			2023	100
			2024	50
		C. Jumlah anak telantar yang memperoleh Sandang diluar panti	2021	12

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2022	5
			2023	5
			2024	7
		D. Jumlah anak telantar yang memperoleh Alat Bantu diluar panti	2021	2
			2022	5
			2023	3
			2024	-
		E. Jumlah anak telantar yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
		F. Jumlah anak telantar yang memperoleh Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti	2021	26
			2022	15
			2023	15
			2024	50

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		G. Jumlah anak telantar yang memperoleh Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar diluar panti	2021	30
			2022	30
			2023	30
			2024	50
		H. Jumlah anak telantar yang memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti	2021	10
			2022	10
			2023	10
			2024	10
		I. Jumlah anak telantar yang memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diluar panti	2021	5
			2022	5
			2023	10
			2024	5
			2021	5

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		J. Jumlah anak telantar yang memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti	2022	5
			2023	10
			2024	5
		K. Jumlah anak telantar yang memperoleh Pelayanan Reunifikasi Keluarga diluar panti	2021	5
			2022	5
			2023	10
			2024	5
		L. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Rujukan diluar Panti	2021	5
			2022	5
			2023	10
			2024	5
		M. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
		N. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan	2021	1

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru diluar Panti		
			2022	1
			2023	1
			2024	1
		O. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar Panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	A. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti	2021	150

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2022	836
			2023	5043
			2024	4053
		B. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti	2021	50
			2022	55
			2023	65
			2024	25
		C. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Permakanan diluar panti	2021	150
			2022	836
			2023	5043
			2024	4053
		D. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Sandang diluar panti	2021	8
			2022	10
			2023	12

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2024	5
		E. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Alat Bantu diluar panti	2021	8
			2022	10
			2023	12
			2024	7
		F. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
		G. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti	2021	25
			2022	25
			2023	25
			2024	25

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		H. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar diluar panti	2021	150
			2022	-
			2023	-
			2024	-
		I. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diluar panti	2021	25
			2022	30
			2023	40
			2024	10
		J. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti	2021	10
			2022	10
			2023	15
			2024	6
		K. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Pelayanan	2021	10

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Reunifikasi Keluarga diluar panti		
			2022	10
			2023	15
			2024	10
		L. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Rujukan diluar panti	2021	10
			2022	10
			2023	10
			2024	6
		M. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum memiliki Kendaraan Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu melakukan Pengadaan kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti	2021	1
			2022	1
			2023	1

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2024	1
		N. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti	2021	10
			2022	10
			2023	15
			2024	24
		O. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi daerah Yang belum memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak mampu Melakukan Pengadaan kendaraan Baru diluar Panti	2021	1
			2022	1
			2023	1
			2024	1
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	A. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan data dan pengaduan diluar panti	2021	45

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2022	40
			2023	40
			2024	54
		B. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Permakanan diluar panti	2021	40
			2022	40
			2023	40
			2024	40
		C. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Sandang diluar panti	2021	35
			2022	30
			2023	30
			2024	30
		D. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Alat Bantu diluar panti	2021	10
			2022	-
			2023	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2024	-
		E. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti	2021	31
			2022	2
			2023	2
			2024	3
		F. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Bimbingan Fisik, mental Spiritual dan Sosial diluar panti	2021	35
			2022	14
			2023	14
			2024	10
		G. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan pengemis Terlantar diluar panti	2021	35
			2022	30

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
			2023	30
			2024	20
		H. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti	2021	30
			2022	10
			2023	14
			2024	10
		I. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar diluar panti	2021	31
			2022	20
			2023	20
			2024	15
		J. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Pelayanan	2021	30

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Penelurusan Keluarga diluar panti		
			2022	14
			2023	14
			2024	10
		K. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Reunifikasi Keluarga diluar panti	2021	20
			2022	10
			2023	5
			2024	5
		L. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Rujukan diluar panti	2021	30
			2022	10
			2023	14
			2024	10
		M. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan kedaruratan Bagi daerah Yang belum Memiliki kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak mampu melakukan pengadaan Kendaraan Baru diluar panti	2021	2
			2022	2
			2023	2
			2024	2
		N. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Layanan kedaruratan Bagi Daerah Yang	2021	1

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		Sudah Memiliki Kendaraan Khusus layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti		
			2022	-
			2023	-
			2024	-
		O. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Layanan kedaruratan Bagi daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan mampu Melakukan pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti	2021	1
			2022	-
			2023	-
			2024	-
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat Bancana bagi korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	A. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh permakanan perlindungan dan jaminan sosial	2021	75
			2022	75
			2023	75
			2024	75
		B. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Sandang	2021	75
			2022	75
			2023	75

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Realisasi Pencapaian SPM
		perlindungan dan jaminan sosial	2024	75
		C. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Tempat Penampungan perlindungan dan jaminan sosial	2021	25
			2022	75
			2023	75
			2024	75
		D. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Penanganan Khusus Bagi Kelompok rentan sosial	2021	75
			2022	75
			2023	75
			2024	7
		E. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Pelayanan Dukungan Psikososial	2021	75
			2022	75
			2023	75
			2024	75

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Pada tahun 2019-2023 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja pada SPM Sosial sebagaimana tabel tersebut di atas. Target dan capaian kinerja indikator SPM Sosial dari tahun 2021 – 2023 tidak terlalu jauh berbeda di setiap tahunnya.

Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala pada pemenuhan data sasaran (DTKS). Proses verifikasi lapangan bagi

masyarakat PMKS harus selalu di update secara rutin dan berkesinambungan agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran, sehingga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 166 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Keluarga Fakir Miskin	155.470	223.766	217.368	214.978	215.365
	Populasi PMKS Prioritas					
1	Anak Jalanan	16	26	41	46	46
2	Tuna Susila	0	0	0	-	0
3	Pengemis	75	51	50	55	35
4	Gelandangan dan gelandangan Psikotik	75	167	493	500	538
	Jumlah PMKS Prioritas	**166**	**244**			**619**
	Populasi PMKS Lainnya					
1	Anak BalitaTerlantar	0	0	2	4	4
2	Anak Terlantar	0	291	1.143	1.243	1260
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	26	21	45	65	79
4	Anak dengan Kedisabilitasan	658	22	79	85	90
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	21	45	55	79
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	26	2	2	3	5
7	Lanjut Usia terlantar	15	150	836	5.043	7038
8	Penyandang Disabilitas	579	740			4148

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	a. Tubuh	308	617	1.680	1.719	1571
	b. Netra	82	64	201	270	899
	c. Runguwicara	65	17	479	515	815
	d. Mental	65	42	602	625	579
	e. Cacat Ganda	59	0	780	748	284
	f. Bekas penderita penyakit kronis	0	0	83	91	
9	Pemulung	0	0	0	20	35
10	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
11	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	25	25	-	-	0
12	a. Orang dengan HIV	35	11	-	-	0
	b. Orang dengan AIDS (ODHA)			7	2	0
13	Korban penyalahgunaan Napza	30	30		-	0
14	Korban Trafficking	0	0		-	0
15	Korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah	42	26		-	0
	a. Wanita	42	26		-	0
	b. Lakilaki	0	0		-	0
	c. Lanjutusia	0	0		-	0
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	81	0		1	

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
						0
17	Korban Bencana Alam	26	59	54	35	75
18	Korban Bencana Sosial	8	59	21	40	75
19	Perempuan rawan sosial ekonomi	0	0		15	
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0		75	75
21	Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	0	0		11org	100
	Jumlah Populasi PMKS Lainnya	**1.577**	**1.457**	**3.753**		**13.063**
	Jumlah Populasi PMKS Prioritas dan Populasi PMKS Lainnya	**157.213**	**1.701**			**229.047**

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 2025

Penerapan SPM di desa sesuai Undang-Undang Desa mengatur mandat dan kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, berdasarkan kewenangan tersebut desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan seperti Posyandu. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu mengamanatkan bahwa Posyandu tidak hanya menangani bidang kesehatan, tetapi juga melibatkan enam bidang SPM berikut:

1. Pendidikan;

   Posyandu mendukung pendidikan anak usia dini, membantu identifikasi kebutuhan alat peraga edukasi, dan memperkuat literasi digital masyarakat.

2. Kesehatan;

   Meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, gizi, kunjungan rutin, deteksi dini terhadap hipertensi, diabetes, serta gangguan jiwa.

3. Pekerjaan Umum;

   Membantu akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan merespons kebutuhan pembangunan seperti jalan desa.

4. Perumahan Rakyat;

   Terlibat dalam identifikasi penyediaan rumah layak huni, edukasi lingkungan sehat dan pemanfaatan pekarangan untuk pangan sehat.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas);

   Menyelenggarakan penyuluhan pasca-bencana, melakukan pencegahan kekerasan serta menjaga ketertiban umum.

6. Sosial.

Melakukan pendataan dan memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan serta memfasilitasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

2.4.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mencakup berbagai aspek dari 17 tujuan yang ada yaitu Bondowoso telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu program utamanya adalah Gerakan Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), sebagai gerakan yang terpadu dan sinergi dari seluruh pemangku kebijakan, dengan tujuan yang sama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan adalah dengan Penguatan sistem pengelolaan data kemiskinan, Penguatan mekanisme sinergi program dan sasaran kemiskinan, Penguatan pola kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan serta penguatan sistem pengaduan dalam penanggulangan kemiskinan. Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Bondowoso dari 14,73% pada tahun 2021 menjadi 12,6% pada tahun 2024. Kebijakan lain yang mendukung adalah penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui intensifikasi pertanian dan diversifikasi tanaman pangan. Kebijakan yang

diterapkan mencakup bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan pelatihan bagi petani. Produksi padi di Bondowoso terus meningkat, dan program penyuluhan gizi untuk mencegah stunting pada anak-anak. Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi prioritas. Capaian penting adalah penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi. Pada tahun 2021, angka kematian ibu di Bondowoso adalah 43 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi 144 per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan yang mendukung mencakup peningkatan fasilitas Puskesmas, penyediaan posyandu, dan program imunisasi lengkap. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Angka partisipasi sekolah di semua jenjang terus meningkat. Kebijakan yang dijalankan termasuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta pembangunan ruang kelas baru untuk mengatasi kekurangan fasilitas. Kabupaten Bondowoso memiliki kebijakan untuk pemberdayaan perempuan melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan dan keterampilan. Terdapat juga peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan publik dan kepemimpinan. Akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi terus ditingkatkan. Kebijakan utama adalah pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di berbagai desa. Pemanfaatan energi terbarukan menjadi fokus, terutama di daerah pedesaan. Kebijakan yang ada mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) skala kecil. Bondowoso fokus pada pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Kebijakan yang diterapkan adalah fasilitasi permodalan, pelatihan, dan promosi produk lokal. Angka pengangguran terbuka di Bondowoso pada tahun 2021 menurun dari 4,46% menjadi 3,63% di tahun 2024. Pembangunan infrastruktur

dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah mendorong inovasi di sektor pertanian dan pariwisata. Fokus pada pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan yang diterapkan adalah alokasi dana desa yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Kabupaten Bondowoso berupaya menata ruang perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan. Kebijakan terkait adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permukiman kumuh. Promosi produk-produk lokal dan penerapan pertanian organik menjadi kebijakan unggulan. Terdapat program pelatihan untuk petani organik dan pengembangan produk olahan kopi Bondowoso.Pemerintah Bondowoso mengimplementasikan program penghijauan di kawasan Gunung Ijen. Ada juga kebijakan untuk edukasi masyarakat tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan 14: Ekosistem Lautan tidak relevan secara langsung untuk Kabupaten Bondowoso karena merupakan wilayah daratan. Tujuan 15: Ekosistem Daratan berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati. Kebijakan yang diterapkan adalah perlindungan kawasan hutan dan ekosistem di sekitar Gunung Ijen dan Pegunungan Argopuro. Peningkatan layanan publik dan penegakan hukum menjadi prioritas. Kebijakan yang ada mencakup reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mendukung pencapaian SDGs. Kemitraan ini mencakup kolaborasi dalam program pembangunan dan pendanaan.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 222 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. penyusunan Program dan Kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c. penyusunan anggaran; d. pengelolaan Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; f. akuntansi dan pelaporan; dan g. pengadaan barang dan jasa.

Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pasal 14 dinyatakan bahwa hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA, PPAS dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan dokumen perencanaan tersebut menggunakan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah secara sistematis merupakan

perwujudan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya sangat mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi terus mengalami penurunan dari kategori sedang ke kategori rendah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 167 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

TAHUN	INDEKS KFD	KATEGORI KFD	DASAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
2020	0.922	Sedang	No. 120/PMK.07/2020
2021	0.912	Sedang	No. 116/PMK.07/2021
2022	0.998	Sangat Rendah	No. 193/PMK.07/2022
2023	1.031	Rendah	No. 84 tahun 2023
2024	0.957	Rendah	No. 65 tahun 2024

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Penyusunan APBD yang dilakukan setiap tahun pada kurun waktu 2020-2024, selalu memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber lain, yang memiliki potensi sebagai penyumbang pendapatan daerah, sehingga kebutuhan pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat terpenuhi. Optimalisasi dan *updating* sumber daya yang menjadi pengungkit untuk meningkatkan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan terus menerus menjadi perhatian, salah satunya melalui penyusunan regulasi secara komprehensif dan rasional.

APBD disusun berdasarkan asumsi dan proyeksi secara rasional, terukur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sehingga antara jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber dengan jumlah pembiayaan yang dibelanjakan terdapat keseimbangan. Pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 setiap tahun mengalami fluktuasi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2024 masih mengandalkan sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih lebih dari 66% sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari kurun waktu tahun 2020-2024 mendapatkan penilaian dari BPK yaitu opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

2.5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso selama tahun 2020-2024 didukung pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah secara proporsi mencapai tingkat kontribusi sekitar 11,47% hingga 12,99%, Pendapatan Transfer tingkat kontribusinya sebesar 84,97% hingga 85,99%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang kontribusinya mencapai sebesar 3,57%% hingga 1,02%%.

Secara umum, dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024), pendapatan Kabupaten Bondowoso menunjukan tren yang relatif flukuatif. Pada tahun 2020, realisasi total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.941.757.072.598,72. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp2.054.350.628.524,73, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi Rp1.908.478.394.409,06. Pada tahun 2023, pendapatan kembali meningkat menjadi Rp1.990.420.763.058,12, hingga tahun 2024 menjadi Rp2.016.026.652.579,11. Namun demikian, dibandingkan awal periode (2020), pendapatan daerah pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp 74,26 miliar atau tumbuh sebesar 3,82%, menunjukkan kecenderungan stabil namun masih terbatasnya kapasitas ekspansi fiskal daerah.

Sejalan dengan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp

222,66 miliar, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp 223,13 miliar di tahun 2021. Namun, PAD mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 189,50 miliar, yang diduga sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, terjadi pemulihan pada tahun 2023 dan peningkatan tajam pada tahun 2024, yang mencapai Rp 255,07 miliar, atau tumbuh sebesar 14,57% dibanding tahun 2020. Peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya penerimaan dari komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non pajak selama periode 2020–2024 masih sangat dominan terhadap total Pendapatan Daerah, yaitu berkisar antara 67,30% hingga 71,29%. DAU memberikan porsi terbesar dalam menopang pendapatan daerah, yakni berkisar antara 45,15% hingga 48,01%, diikuti oleh DAK yang berada pada kisaran 14,43% hingga 18,48%, dan DBH yang berkisar antara 4,27% hingga 6,89%.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, total Dana Perimbangan tercatat sebesar Rp 1.264.055.581.233, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 1.323.758.092.095, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.297.910.080.036. Pada tahun 2023, realisasi meningkat kembali menjadi Rp 1.364.855.214.487, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 1.346.550.326.610. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2024, terdapat peningkatan sebesar Rp 82.494.745.377 atau setara dengan 6,53% selama lima tahun. Pola fluktuasi ini mencerminkan dinamika alokasi fiskal dari pemerintah pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan nasional tiap tahunnya.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang terdiri dari Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa menunjukkan

dinamika yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah sangat fluktuatif dan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Dana Insentif Daerah diterima hanya pada tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 37.542.241.000, kemudian turun drastis pada tahun 2022 menjadi Rp 7.725.363.000, dan tidak lagi dialokasikan pada 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp 5.765.570.000. Sementara itu, Dana Desa menunjukkan kecenderungan menurun dari Rp 236.217.008.000 pada tahun 2020 dan 2021, menjadi Rp 231.667.832.000 pada 2022, Rp 224.397.404.000 pada 2023, lalu sedikit meningkat menjadi Rp 226.154.083.000 pada 2024. Secara total, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengalami penurunan dari Rp 256.120.568.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 225.656.784 pada tahun 2024, atau turun sebesar Rp 30.463.784.000 atau 11,89% dalam lima tahun.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Komponen ini terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos pendapatan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2020, pendapatan ini tercatat sebesar Rp 69.302.860.000, seluruhnya berasal dari pendapatan hibah. Nilai ini meningkat tajam pada 2021 menjadi Rp 101.582.419.780, seluruhnya berasal dari pendapatan lainnya. Namun, mulai tahun 2022, pendapatan ini mengalami penurunan signifikan, yaitu Rp 40.191.479.944, terdiri dari hibah Rp 11.601.665.000 dan pendapatan lainnya Rp 28.589.814.944. Pada tahun 2023, nilainya kembali menurun menjadi Rp 35.962.713.057, yang seluruhnya berasal dari pendapatan lainnya, dan turun lebih jauh lagi pada tahun 2024 menjadi Rp 20.116.281.228 tanpa ada kontribusi dari hibah maupun pendapatan lainnya. Jika dibandingkan antara tahun 2021 dan 2024, terjadi penurunan sebesar Rp 81.466.138.552 atau 80,22% dalam kurun waktu tiga tahun. Fluktuasi tajam ini mencerminkan ketergantungan

komponen ini pada faktor-faktor non-reguler seperti pemberian hibah atau penerimaan insidental lainnya.

Pada tahun 2020 terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan kebijakan prioritas alokasi anggaran Pemerintah Pusat digunakan untuk percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19, serta sesuai dengan ketentuan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, selanjutnya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemotongan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, pemotongan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dan penyesuaian belanja pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

2. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Social Safety Net*; dan
3. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyusunan APBD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya, yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 94 Tahun 2021. Pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan *refocussing* alokasi TKDD untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan baik dari sisi perekonomian maupun perlindungan sosial. Belanja kesehatan dan belanja prioritas dianggarkan melalui *refocussing* DAU dan/atau DBH dengan besaran: 1) paling sedikit 8% Dana Alokasi Umum (DAU); atau 2) paling sedikit 8% Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, serta penerimaan umum APBD jika pendanaan melalui DAU/DBH belum mencukupi.

Sebelum memasuki Tahun Anggaran 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 38A ayat 1 PMK tersebut berbunyi bahwa alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah DAU *Block Grant* merupakan DAU yang sebelum tahun 2023 yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya dan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta memenuhi prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak jauh berbeda dengan PMK Nomor 139/PMK.07/2019, DAU *Block*

Grant disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.

DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) atau DAU *earmarked* adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut. DAU yang ditentukan penggunaannya disalurkan secara bertahap. Pemerintah Daerah wajib memenuhi prasyarat di tiap tahapnya sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 sebelum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Mengacu pada PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, DAU yang ditentukan penggunaannya dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat Kinerja Daerah, besaran pembayaran gaji PPPK, dan satuan biaya per Kelurahan pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah. DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan tersebut.

DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum sudah ditentukan kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Dengan kata lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai selain kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang

masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan tidak sepenuhnya dapat menggunakan DAU untuk kebutuhan dan program daerah seperti alokasi DAU sebelum Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan secara fleksibel oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan prioritas daerah.

Di sisi yang lain, apabila persyaratan penyaluran di tiap tahapnya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat disalurkan ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam PMK 211/PMK.07/2022.

Gambaran rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 168 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bondowoso

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	**PENDAPATAN**	**1,941,757,072,598.72**	**2,054,350,628,524.73**	**1,908,478,394,409.06**	**1,990,420,763,058.12**	**2,016,026,652,579.111**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**222,657,296,673.72**	**223,136,567,608.59**	**189,504,490,467.06**	**211,009,393,993.12**	**255,068,751,500.11**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30,580,807,590.96	35,114,763,839.00	41,397,270,293.00	43,384,281,391.00	46,854,513,560.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18,316,717,235.00	14,367,036,052.00	16,881,328,762.00	21,566,432,779.68	191,366,744,109.15
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,203,394,607.40	4,260,079,389.45	4,544,375,373.27	4,629,838,583.13	4,743,208,147.23
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169,556,377,240.36	169,394,688,328.14	126,681,516,038.79	141,428,841,239.31	12,104,285,683.73
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,649,796,915,925.00**	**1,729,631,641,136.14**	**1,678,782,423,998.00**	**1,743,448,656,008.00**	**1,721,200178,985.00**
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**1,264,055,581,233.00**	**1,323,758,092,095.00**	**1,297,910,080,036.00**	**1,364,855,214,487.00**	**1,346,550,326,610.00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil (Pajak/Non Pajak)	99,407,048,031.00	142,767,234,998.00	163,050,876,593.00	137,443,488,069.00	132,642,395,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	851,793,800,000.00	843,159,769,000.00	829,591,176,619.00	881,906,003,493.00	921,645,132,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (Fisik + Non Fisik)	312,854,733,202.00	337,831,088,097.00	305,268,026,824.00	345,505,722,925.00	292,262,799,610.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**256,120,568,000.00**	**273,759,249,000.00**	**239,393,195,000.00**	**224,397,404,000.00**	**231,422,354,000.00**
1.2.5	Dana Penyesuian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Insentif Daerah	19,903,560,000.00	37,542,241,000.00	7,725,363,000.00	0.00	5,765,570,000.00
	Dana Desa	236,217,008,000.00	236,217,008,000.00	231,667,832,000.00	224,397,404,000.00	225,656,784,000.00
	TRANSFER ANTAR DAERAH	**129,620,766,692.00**	**132,114,300,041.14**	**141,479,148,962.00**	**154,196,037,521.00**	**143,227,498,375.00**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.2.6	Pendapatan Bagi Hasil	93,730,423,692.00	121,070,561,684.00	120,622,425,962.00	142,351,187,500.00	132,054,084,375.00
1.2.7	Bantuan Keuangan	35,890,343,000.00	11,043,738,357.14	20,856,723,000.00	11,844,850,021.00	11,173,414,000.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**69,302,860,000.00**	**101,582,419,780.00**	**40,191,479,944.00**	**35,962,713,057.00**	**39,757,722,094.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	69,302,860,000.00	0.00	11,601,665,000.00	0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya	0.00	101,582,419,780.00	28,589,814,944.00	35,962,713,057.00	39,757,722,094.00
2	**BELANJA**	**1,608,208,955,398.92**	**1,607,910,188,438.37**	**1,569,343,979,797.66**	**1,689,226,339,751.06**	**1,798,213,901,281.52**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,380,731,057,346.40**	**1,410,349,479,042.56**	**1,377,797,615,369.66**	**1,518,643,228,947.03**	**1,637,882,275,688.54**
2.1.1	Belanja Pegawai	752,196,941,707.00	799,417,410,997.00	787,984,360,335.00	806,488,789,870.40	883,648,166,907.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	554,882,853,239.40	444,016,600,988.70	475,352,226,339.66	582,713,480,289.63	615,253,552,196.45
2.1.3	Belanja Subsidi	1,183,163,800.00	1,183,163,800.00	2,183,163,800.00	1,781,923,800.00	1,000,000,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	70,135,598,600.00	130,514,844,220.06	93,266,283,855.00	124,626,774,987.00	134,777,256,585.09
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,332,500,000.00	35,217,459,036.80	19,011,581,040.00	3,032,260,000.00	3,203,300,000.00
2.2	**BELANJA MODAL**	**227,251,278,052.52**	**196,554,645,695.81**	**190,396,577,000.00**	**169,833,845,333.03**	**158,936,580,871.98**
2.2.1	Belanja Modal - Tanah	0.00	0.00	0.00	94,915,970.00	0.00
2.2.2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	104,183,050,562.00	95,221,279,024.00	86,205,466,900.00	82,098,298,764.00	64,910,963,743.00
2.2.3	Belanja Modal - Bangunan dan Gedung	70,038,377,021.89	42,446,436,867.21	48,977,092,155.00	20,570,157,238.30	41,576,207,831.98
2.2.4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	43,648,432,279.63	51,677,563,443.60	48,386,382,840.00	58,084,684,454.73	42,654,931,447.00
2.2.5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	8,409,927,669.00	7,025,222,811.00	6,802,635,105.00	8,469,163,161.00	8,852,351,050.00
2.2.6	Belanja Modal - Aset Lainnya	971,490,520.00	184,143,550.00	25,000,000.00	516,625,745.00	942,126,800.00

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**226,620,000.00**	**1,006,063,700.00**	**1,149,787,428.00**	**749,265,471.00**	**1,395,044,721.00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	226,620,000.00	1,006,063,700.00	1,149,787,428.00	749,265,471.00	1,395,044,721.00
3	**TRANSFER**	**349,172,085,712.00**	**355,891,616,869.00**	**331,565,452,287.00**	**329,305,592,234.00**	**328,482,350,229.00**
3.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2,915,741,954.00	4,154,754,200.00	4,527,376,025.00	4,913,455,644.00	8,813,455,644.00
3.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2,323,144,234.00	2,010,995,353.00	0.00	2,266,372,490.00	2,618,019,885.00
3.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	343,933,199,524.00	349,725,867,316.00	327,038,076,262.00	322,125,764,100.00	321,050,874,700.00
3.4	Transfer Bantuan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/ DEFISIT	(15,623,968,512.20)	90,548,823,217.36	7,568,942,324.40	(28,111,168,926.94)	(110,669,598,931.41)
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**152,530,938,011.77**	**137,046,287,999.57**	**227,726,349,216.93**	**220,340,427,541.33**	**207,229,258,614.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	152,497,813,011.77	136,906,969,499.57	227,595,111,216.93	220,295,311,541.33	177,229,258,614.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000,000,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33,125,000.00	139,318,500.00	131,238,000.00	45,116,000.00	0.00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**0.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00
3.2.2	Penyertaan modal/Investasi Pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**PEMBIAYAAN NETTO**	**152,530,938,011.77**	**137,046,287,999.57**	**212,726,349,216.93**	**205,340,427,541.33**	**207,229,258,614.39**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**136,906,969,499.57**	**227,595,111,216.93**	**220,295,311,541.33**	**177,229,258,614.39**	**96,559,659,682.98**

2.5.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Neraca Daerah Kabupaten Bondowoso secara umum menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif.

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 169 Neraca Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
A	**ASET**					
1	**ASET LANCAR**					
	Kas Di Kas Daerah	104,040,569,665.12	179,556,601,565.89	207,708,972,841.60	158,334,059,191.91	64.860.307.721,15
	Kas Di Bendahara Penerimaan	7,875,000.00	18,433,000.00	1,001,111.23	42,000.00	
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	317,407,530.00	0.00	30,000,000.00	0.00	11.614.796,00
	Kas di BLUD	23,661,575,848.16	43,083,972,311.47	10,329,468,288.89	13,522,118,826.27	26.085.578.026,62
	Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP	0.00	0.00	0.00	579,740,166.12	2.528.540.252,12
	Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP	0.00	0.00	0.00	4,728,092,342.00	3.010.310.708,00
	Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00	0.00	65,206,088.09	63.308.179,09
	Kas Lainnya	9,013,447,668.33	5,137,508,504.57	2,308,771,309.61	47,798,821.00	30.878.112,00
	Piutang Pendapatan	39,376,238,980.21	34,869,237,347.91	39,285,468,248.66	49,725,883,331.63	59.204.012.375,39
	Piutang Transfer	16,331,739,736.00	8,128,005,469.00	9,433,155,600.00	0.00	0.00
	Piutang Lainnya	9,112,000,988.86	8,968,269,888.86	8,824,144,388.86	8,776,628,388.86	8,776,628,388.86
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(27,526,204,145.14)	(28,862,198,413.61)	(32,523,447,778.30)	(39,326,108,526.74)	(44.524.745.338,76)
	Beban Dibayar Dimuka	4,000,000.00	4,000,000.00	54,000,000.00	4,120,000.00	64.120.000,00
	Persediaan	45,727,718,089.39	41,836,674,564.08	38,455,122,907.88	45,742,090,336.11	38.256.953.678,50
	JUMLAH ASET LANCAR	**220,066,369,360.93**	**292,740,504,238.17**	**283,906,656,918.43**	**242,199,670,965.25**	**158.367.506.898,97**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**					
	Jumlah Investasi Non Permanen					
	Investasi Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36,999,689,204.00	37,467,057,468.76	40,039,713,370.76	67,462,016,512.76	71.961.772.288,76
	Jumlah Investasi Permanen	**36,999,689,204.00**	**37,467,057,468.76**	**40,039,713,370.76**	**67,462,016,512.76**	**71.961.772.288,76**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**36,999,689,204.00**	**37,467,057,468.76**	**40,039,713,370.76**	**67,462,016,512.76**	**71.961.772.288,76**
3	**ASET TETAP**					
	Tanah	356,992,452,776.00	356,992,452,776.00	356,992,452,776.00	367,485,131,346.00	377.114.721.302,00
	Peralatan dan Mesin	713,018,983,064.63	804,359,574,244.63	882,762,175,492.04	954,974,563,272.04	1.009.275.694.894,23
	Gedung dan Bangunan	966,125,500,568.52	1,012,156,331,292.77	1,065,048,895,661.77	1,092,208,331,500.07	1.134.501.797.454,05
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2,157,138,561,361.75	2,209,170,212,756.54	2,257,980,446,596.54	2,312,852,019,708.27	2.367.159.958.209,27
	Aset Tetap Lainnya	72,594,049,345.21	79,419,369,156.21	85,745,196,946.21	94,033,788,836.21	102.886.139.886,21
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,301,507,700.00	554,343,200.00	545,343,200.00	10,359,500,353.00	1.591.239.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(1,701,000,454,138.36)	(1,964,664,492,387.03)	(2,201,242,997,669.22)	(2,443,642,622,097.02)	(2.684.375.558.946,83)
	JUMLAH ASET TETAP	**2,566,170,600,677.75**	**2,497,987,791,039.12**	**2,447,831,513,003.34**	**2,388,270,712,918.57**	**2.308.153.991.798,93**
4	**PROPERTI INVESTASI**					
	Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	4,746,957,580.00	6.100.467.624,00
	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	0.00	(680,555,000.00)	(680.555.000,00)
5	**DANA CADANGAN**					
	Dana Cadangan	0.00	0.00	15,040,311,124.69	30,000,000,000.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0.00**	**0.00**	**15,040,311,124.69**	**30,000,000,000.00**	**0.00**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
6	**ASET LAINNYA**					
	Tagihan Jangka Panjang	2,535,278,509.00	2,549,278,509.00	2,549,278,509.00	2,578,008,825.00	2.578.008.825,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	151,408,140.00	151,408,140.00	151,408,140.00	151,408,140.00	151.408.140,00
	Aset Tidak Berwujud	8,752,074,510.00	8,969,674,320.00	9,223,187,675.00	9,153,295,822.00	9.559.531.717,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,402,640,328.33)	(7,113,980,691.34)	(7,870,655,413.34)	(7,964,347,590.20)	(8.182.373.464,40)
	Aset Lain-lain	61,613,288,122.00	61,609,438,122.00	59,367,581,199.00	61,400,934,114.00	37.944.741.488,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3,733,197,350.08)	(3,733,197,350.08)	(3,029,721,102.00)	(3,992,607,602.00)	(3.770.680.602,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**62,916,211,602.59**	**62,432,621,049.58**	**60,391,079,007.66**	**61,326,691,708.80**	**38.280.636.103,60**
	JUMLAH ASET	**2,886,152,870,845.27**	**2,890,627,973,795.63**	**2,847,209,273,424.88**	**2,793,325,494,685.38**	**2.582.183.819.714,26**
B	**KEWAJIBAN**					
1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	133,906,212.04	201,404,165.00	82,902,010.00	47,798,821.00	30.878.112,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	1,747,899,149.08	739,493,629.92	1,405,862,437.56	779,361,937.33	1.492.070.262,91
	Utang Beban	14,561,206,073.24	4,683,650,361.73	11,018,561,650.56	10,110,909,497.84	15.260.667.397,46
	Utang Jangka Pendek Lainnya	5,821,605,158.12	2,882,281,318.26	3,860,225,088.12	438,365,166.12	328.913.445,12
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**22,264,616,592.48**	**8,506,829,474.91**	**16,367,551,186.24**	**11,376,435,422.29**	**17.112.529.217,49**
2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**22,264,616,592.48**	**8,506,829,474.91**	**16,367,551,186.24**	**11,376,435,422.29**	**17.112.529.217,49**
C	**EKUITAS**					
	Ekuitas	2,863,888,254,252.79	2,882,121,144,320.72	2,830,841,722,238.64	2,781,949,059,263.09	2.565.071.290.496,77
	JUMLAH EKUITAS	**2,863,888,254,252.79**	**2,882,121,144,320.72**	**2,830,841,722,238.64**	**2,781,949,059,263.09**	**2.565.071.290.496,77**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2,886,152,870,845.27**	**2,890,627,973,795.63**	**2,847,209,273,424.88**	**2,793,325,494,685.38**	**2.582.183.819.714,26**

Analisis neraca daerah dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain Rasio Lancar dan Quick Ratio.

2.5.3 Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan dengan mengelola keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besar manfaat untuk masyarakat melalui:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah.
3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan.
4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah, serta sarana prasarana

lainnya yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan adalah:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah

   a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah (PAD)

      Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

   b. Peningkatan penerimaan daerah dari pemerintah pusat, provinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

      Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan pemerintah pusat/provinsi dan pihak lainnya agar pendanaan pembangunan dapat terpenuhi.

   c. Pinjaman Daerah

      Pinjaman Daerah dapat dilakukan secara selektif dalam rangka menutup defisit berupa pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku (batasan maksimal defisit yang boleh dibiayai dari pinjaman), dengan mempertimbangkan:

1) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

2) Proyeksi kemampuan mengangsur kembali (*Debt Coverage Service Rasio*).

3) Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI, serta laju inflasi yang terjadi, sehingga diperoleh tingkat suku bunga yang memadai, kompetitif, dan tidak membebani keuangan daerah.

2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah

   a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Meningkatkan dan memperluas Kemitraan (*Public Private Partnership*).

      Kemitraan/kerjasama merupakan suatu hubungan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Pihak yang saling bekerjasama adalah pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan dimana kemitraan/kerjasama ini dilaksanakan

sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan secara berkelanjutan dapat tercukupi melalui pengerahan dana swasta dan masyarakat.

c. Optimalisasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan lingkungan sosial dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya baik untuk saat ini maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan CSR dengan sukarela. Pelaksanaan CSR akan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/kegiatan antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan pihak perusahaan sehingga dapat berjalan efektif (tepat sasaran).

d. Mengembangkan Privatisasi / Swastanisasi

Pengembangan privatisasi / swastanisasi dilakukan dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya peran swasta / masyarakat untuk sektor usaha pelayanan umum.

e. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro Bank dan non Bank diarahkan untuk berperan dalam intermediasi secara praktis dan efektif antara Bank Umum dengan sektor usaha mikro, kecil dan menengah

dengan strategi meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan sumberdaya finansial.

f. Optimalisasi pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Efektifitas pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dapat dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/ kegiatan berpedoman pada norma/kaidah-kaidah yang berlaku antara Lembaga Pengelola ZIS dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

g. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah dirasakan cukup penting, sehingga keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

h. Pemanfaatan pembiayaan melalui skema KPBU

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat, mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna, dan/atau memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Masyarakat.

3. Pelaksanaan KPBU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Jawa Timur.
4. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan, langkah-langkah yang dilakukan yaitu :
   a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan PAD.
   b. Peningkatan pengendalian serta pengawasan atas pemungutan PAD.
5. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada Masyarakat.
   a. Dalam pengalokasian pembiayaan pembangunan lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan publik disamping kepentingan aparatur.
   b. Pendanaan Pembangunan dengan pola *cost sharing.*

      Pola pendanaan pembangunan ini dilakukan melalui kesepakatan belanja antara Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk obyek program maupun kegiatan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.6 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Memperhatikan rencana target kinerja pembangunan daerah tahun 2020 – 2024 yang terus meningkat, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Pada tahun 2026-2030, diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan keuangan negara. Dibandingkan tahun 2020-2024, total pendapatan diperkirakan meningkat, pendapatan dari PAD diasumsikan meningkat, PAD dari hasil pajak daerah diperkirakan meningkat, pendapatan retribusi daerah diperkirakan naik dan Lain-lain PAD yang sah diasumsikan menurun.

Total pendapatan transfer yang berasal dari komponen transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sedikit meningkat. Dana transfer antar daerah diproyeksikan sedikit meningkat pada tahun 2026-2030. Pendapatan dari transfer antar daerah diasumsikan sedikit meningkat, sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sedikit meningkat dengan asumsi terdapat bonus produksi dari pengelolaan pembangkit Listrik tenaga panas bumi di Kawasan Ijen.

Proyeksi belanja daerah selama tahun 2026-2030 harus dilakukan dengan estimasi secara cermat sehingga jika terjadi defisit diperkirakan dapat ditutup dengan pembiayaan netto. Belanja Daerah diperkirakan menurun pada tahun 2026 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Total belanja operasi berfluktuasi, belanja modal meningkat setiap tahun, belanja tidak terduga dialokasikan naik menyesuaikan aturan perundang-undangan dan peningkatan kebutuhan belanja

lainnya, sedangkan untuk belanja transfer secara umum meningkat pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Peningkatan terbesar dari komponen bagi hasil pajak dan retribusi daerah, sedangkan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan lainnya mengikuti besaran dana perimbangan.

Untuk komponen belanja pegawai pada belanja operasi berfluktuasi dimana hal ini telah memperhitungkan peningkatan pengeluaran gaji CPNS serta jumlah pegawai pensiun sesuai peraturan perundangan.

SiLPA atau sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti penghematan belanja, pendapatan yang melebihi target, atau adanya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana. Terhadap SiLPA tahun 2026 tidak dilakukan proyeksi atau sama dengan nol. Karena pada tahun 2024 SiLPA umum sangat sedikit serta adanya efisiensi, sehingga SiLPA tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan. Artinya, penerimaan pendapatan daerah harus dapat menutup defisit anggaran yang mungkin terjadi. Untuk tahun 2027-2030 diproyeksi terdapat SiLPA tetapi nilainya terus menurun.

Guna meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat melakukan penyertaan modal kepada badan hukum, khususnya pada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, asumsi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.170 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	**PENDAPATAN**	**2,016,026,652,579**	**2,094,476,119,561**	**2,219,991,418,584**	**2,306,895,800,474**	**2,420,864,590,648**	**2,463,550,292,202**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**255,068,751,500**	**313,802,788,107**	**328,400,170,324**	**341,792,108,409**	**356,669,301,921**	**370,889,828,177**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46,854,513,560	99,788,420,497	103,450,307,900	105,457,608,300	107,469,818,600	108,319,819,100
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	28,751,324,094	202,976,234,497	213,911,729,311	225,296,366,996	238,161,350,208	251,531,875,964
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,743,208,147	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174,719,705,699	6,038,133,113	6,038,133,113	6,038,133,113	6,038,133,113	6,038,133,113
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,721,200,178,985**	**1,732,533,177,454**	**1,841,119,308,260**	**1,912,183,038,065**	**2,008,703,496,727**	**2,037,168,672,025**
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**1,577,972,680,610**	**1,646,238,735,304**	**1,750,510,144,003**	**1,833,543,493,783**	**1,923,413,375,888**	**1,947,614,045,144**
	TRANSFER ANTAR DAERAH	**143,227,498,375**	**86,294,442,150**	**90,609,164,258**	**95,139,622,470**	**85,290,120,839**	**89,554,626,881**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**39,757,722,094**	**48,140,154,000**	**50,471,940,000**	**52,920,654,000**	**55,491,792,000**	**55,491,792,000**
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**39,757,722,094**	**46,640,154,000**	**48,971,940,000**	**51,420,654,000**	**53,991,792,000**	**53,991,792,000**
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	39,757,722,094	46,640,154,000	48,971,940,000	51,420,654,000	53,991,792,000	53,991,792,000
	Pendapatan Lain-lain sesuai Perundang-undangan	**0**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**
	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
2	**BELANJA**	**2,126,696,251,510**	**2,094,476,119,561**	**2,234,991,418,584**	**2,298,895,800,474**	**2,469,864,590,648**	**2,475,000,292,202**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,637,882,275,688**	**1,574,472,089,830**	**1,614,263,155,015**	**1,644,972,783,354**	**1,757,274,564,516**	**1,731,140,062,117**
2.1.1	Belanja Pegawai	883,648,166,907	981,509,843,099	941,879,200,007	924,560,125,608	924,560,125,609	953,425,247,710
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	615,253,552,196	520,695,626,409	555,445,236,154	606,043,141,697	718,680,223,716	664,860,577,937
2.1.3	Belanja Subsidi	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
2.1.4	Belanja Hibah	134,777,256,585	70,497,250,322	115,338,718,854	112,769,516,049	112,434,215,191	111,254,236,470

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
470	Belanja Bantuan Sosial	3,203,300,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2.2	**BELANJA MODAL**	**158,936,580,871**	**182,418,259,996**	**279,680,135,795**	**300,376,331,586**	**355,923,380,299**	**375,353,412,217**
2.2.1	Belanja Modal - Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	64,910,963,743	64,887,289,150	70,197,289,150	73,697,289,150	74,447,289,150	76,447,289,150
2.2.3	Belanja Modal - Bangunan dan Gedung	41,576,207,831	37,943,377,387	47,618,680,387	62,218,680,387	82,268,680,387	90,968,680,387
2.2.4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	42,654,931,447	70,002,489,329	152,064,692,128	154,660,887,919	189,407,936,632	198,137,968,550
2.2.5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	8,852,351,050	9,530,515,530	9,744,885,530	9,744,885,530	9,744,885,530	9,744,885,530
2.2.6	Belanja Modal - Aset Lainnya	942,126,800	54,588,600	54,588,600	54,588,600	54,588,600	54,588,600
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**1,395,044,721**	**8,182,419,201**	**9,644,777,240**	**22,143,335,000**	**25,263,295,299**	**37,103,467,334**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1,395,044,721	8,182,419,201	9,644,777,240	22,143,335,000	25,263,295,299	37,103,467,334
3	**TRANSFER**	**328,482,350,229**	**329,403,350,534**	**331,403,350,534**	**331,403,350,534**	**331,403,350,534**	**331,403,350,534**
3.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah + Retribusi Daerah	7,431,475,529	11,018,570,400	11,018,570,400	11,018,570,400	11,018,570,400	11,018,570,400
3.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	321,050,874,700	318,384,780,134	320,384,780,134	320,384,780,134	320,384,780,134	320,384,780,134
	SURPLUS/DEFISIT	**(110,669,598,931)**	**0**	**(15,000,000,000)**	**8,000,000,000**	**(49,000,000,000)**	**(11,450,000,000)**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**207,229,258,614**	**0**	**25,000,000,000**	**20,000,000,000**	**52,000,000,000**	**14,450,000,000**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	177,229,258,614	0	25,000,000,000	20,000,000,000	17,000,000,000	14,450,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	30,000,000,000	0	0	0	35,000,000,000	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**10,000,000,000**	**28,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	10,000,000,000	25,000,000,000	0	0

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
3.2.2	Penyertaan modal/Investasi Pemerintah	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
4	**PEMBIAYAAN NETTO**	**207,229,258,614**	**0**	**15,000,000,000**	**(8,000,000,000)**	**49,000,000,000**	**11,450,000,000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**96,559,659,682.98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis

2.7.1 Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan daerah dapat terungkap melalui analisis gambaran umum wilayah dan evaluasi pencapaian kinerja daerah. Tantangan pembangunan daerah sebenarnya mencerminkan kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang diharapkan pada saat ini dengan perencanaan sebelumnya, juga antara aspirasi masa depan dan kondisi aktual saat perencanaan sedang berlangsung. Potensi masalah pembangunan daerah sering kali timbul dari pemanfaatan yang belum optimal terhadap keunggulan yang dimiliki dan ketidakmampuan mengatasi kelemahan untuk meraih peluang yang muncul, serta meminimalkan hambatan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukannya peningkatan perencanaan sistem pembangunan daerah dan penyusunan visi/misi daerah dengan cermat memerlukan pemahaman mendalam tentang kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Perumusan masalah pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi masalah pembangunan juga dilakukan terhadap setiap aspek tugas pemerintahan daerah secara terpisah atau serentak pada beberapa aspek yang diemban. Tujuannya adalah untuk memetakan berbagai masalah terkait dengan tugas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah.

Setiap masalah juga dianalisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilannya di masa depan, sehingga dapat dihasilkan gambaran awal tentang cara mengatasi masalah daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan melibatkan faktor kritis, pencapaian kinerja,

dan elemen lain yang memiliki pengaruh besar dalam mengatasi masalah pembangunan atau mencapai kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi masalah pembangunan pada setiap sektor pemerintahan daerah memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi hambatan di masa lalu, serta solusi yang diharapkan di masa depan untuk layanan dasar dan tugas/fungsi setiap bagian daerah.

2.7.2 Isu Strategis

2.7.2.1 Isu Strategis Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. perkembangan demografi global;
2. geopolitik dan geoekonomi;
3. perkembangan teknologi;
4. peningkatan urbanisasi dunia;
5. konstelasi perdagangan global;

6. tata kelola keuangan global;
7. pertumbuhan kelas menengah (*middle class*);
8. peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. perubahan iklim; dan
10. pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Sumber: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Gambar 2. 47 Isu Strategis Global

1) Demografi Global

Tantangan penyesuaian terhadap tingginya kebutuhan hidup masyarakat dan keterbatasan sumber daya alam serta lahan muncul seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Data dari *World Population Prospects* (2022) menunjukkan bahwa populasi dunia saat ini mencapai 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar pada tahun 2050. Dalam konteks ini, pemenuhan kualitas keluarga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan bentuk rumah tangga, perkembangan teknologi digital, dan penetrasi global.

Perubahan dalam struktur dan bentuk keluarga menjadi semakin signifikan akibat perpindahan penduduk dan pergeseran ideologi. Faktor-faktor seperti infertilitas, penundaan pernikahan, dan meningkatnya prevalensi perilaku sesama jenis turut berkontribusi pada penurunan angka kelahiran. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam mengelola dinamika populasi dan memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Di samping itu, dinamika geopolitik global menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Perkembangan geopolitik yang meluas memiliki dampak pada seluruh lapisan masyarakat dan tatanan global. Meningkatnya persaingan antar negara adidaya dapat berpengaruh pada tatanan global dan menimbulkan tantangan ekonomi dan keamanan.

Kewaspadaan yang meningkat akibat konflik-konflik di dunia, seperti Perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatkan risiko terjadinya konflik geopolitik di wilayah lain, seperti Semenanjung Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan. Potensi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, seperti tekanan inflasi global, krisis energi, dan pangan, dapat mempengaruhi negara-negara termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerja sama internasional, diplomasi yang bijaksana, dan upaya untuk memperkuat ketahanan nasional menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan di tengah kompleksitas dinamika global.

2) Geopolitik dan Geoekonomi

Kemunculan kawasan Indo-Pasifik sebagai hasil dari dinamika geopolitik yang melibatkan wilayah maritim

Samudera Hindia dan Pasifik telah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang memicu persaingan antar negara. Indonesia menghadapi kontestasi geopolitik di kawasan ini dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific*, sebuah inisiatif untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan tersebut. Kawasan Indo-Pasifik dianggap memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, yang diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Tren global menunjukkan bahwa negara-negara berkembang semakin mendominasi output dunia. Pada tahun 2015, mereka menyumbang 55% dari total output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Proyeksi hingga tahun 2050 menunjukkan bahwa nilai output negara-negara berkembang akan mencapai 71% dari total nilai output dunia, dengan negara-negara Asia sebagai pendorong utama, menyumbang 54% dari total nilai output global. Namun, ketidaksetaraan pendapatan per kapita masih menjadi kenyataan, dengan negara maju memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Perubahan struktur perekonomian, terutama di negara-negara pengimpor komoditas, menandai pergeseran signifikan. Sektor komoditas, yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, menghadapi penurunan permintaan. Oleh karena itu, tingkat kesiapan untuk menghadapi perubahan ini akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sangat terkait dengan kebijakan makro ekonomi yang kredibel berdasarkan prinsip kehati-hatian. Investasi jangka panjang pada peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Reformasi dan perbaikan lingkungan usaha juga diperlukan untuk mendukung terbentuknya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan demikian, upaya ini akan menjadi pilar utama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di masa depan.

3) Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing, Auto Robotic System, 3D*, dan *Future Technologies*.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Gambar 2. 48 Disrupsi Teknologi

Beberapa manfaat Perkembangan teknologi digital bagi masyarakat antara lain:

a. Peningkatan Efisiensi Industri: Teknologi seperti IoT, RPA, dan komputasi tepi telah mempercepat otomatisasi dalam aktivitas industri. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan sumber daya.

b. Inovasi dalam Proses Belajar Mengajar: Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar memungkinkan transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan tanpa kendala ruang dan waktu. Pendidikan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

c. Peningkatan Proses Pengambilan Kebijakan: Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan kebijakan, termasuk pengembangan peraturan. Kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi dalam analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

d. Optimasi Proses Hukum dan Pembentukan Undang-Undang: Perkembangan teknologi membantu proses pembentukan undang-undang dan peraturan. Pemanfaatan teknologi dalam hal ini dapat menciptakan lembaga-lembaga nasional yang lebih terencana, lengkap, dan sistematis.

e. Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui teknologi seperti IoT, blockchain, dan kecerdasan buatan, banyak aspek kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan, termasuk layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru, terutama terkait dengan perubahan jenis pekerjaan dan implikasi etika. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dampak sosial, ekonomi, dan etika dari penggunaan teknologi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat.

4) Urbanisasi Dunia

Peningkatan tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan, terutama di negara-negara *emerging economies*, seringkali tidak diimbangi dengan infrastruktur dan perencanaan yang memadai. Hal ini dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Fakta bahwa sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan di banyak kota Asia dan Afrika masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai menjadi tantangan serius.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat membuka peluang inovasi dalam mengatasi

masalah perkotaan. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Solusi-solusi ini dapat mencakup pemantauan dan manajemen lalu lintas, penerapan energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau.

Pentingnya adaptasi teknologi pintar di kawasan perkotaan semakin terbukti, terutama dengan dampak pandemi COVID-19 yang telah mempercepat kebutuhan akan solusi yang memungkinkan kerja jarak jauh, pendidikan online, dan pelayanan kesehatan yang lebih responsif. Oleh karena itu, menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien melibatkan integrasi teknologi sebagai bagian integral dari perencanaan dan pengelolaan kota di masa depan.

5) Konstelasi Perdagangan Global

Perkiraan bahwa perekonomian negara berkembang, terutama yang tergabung dalam kelompok E7, akan mengalami pertumbuhan tinggi dan mendominasi perekonomian dunia, menggantikan dominasi negara maju dalam G7, mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi global. GPN (*Global Production Network*) dan GVC (*Global Value Chain*) menjadi pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya melibatkan biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan mendorong perdagangan internasional bagi suatu negara.

Kawasan Asia Timur dan ASEAN diperkirakan akan menjadi pusat GVC dunia. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM

industri yang berkualitas mendukung perkembangan ini, terutama dalam produksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Kerja sama dalam Kawasan Regional *Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis, memberikan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Ini mendorong ketersediaan rantai pasok global dan investasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama regional.

Pentingnya kerja sama ini tidak hanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan di kawasan tersebut. Seiring dengan perkembangan ini, negara-negara di Asia Pasifik diharapkan dapat saling mendukung dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemajuan bersama.

6) Tata Kelola Keuangan Global

Perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk diprediksi akan sangat memengaruhi pendapatan negara ke depan. Perubahan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Salah satu tren yang dapat berkontribusi pada transformasi ini adalah penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara.

Penerapan CBDC tidak hanya menjadi alat pembayaran digital tetapi juga dianggap sebagai terobosan untuk mengatasi

risiko stabilitas aset kripto. Aset kripto, seperti Bitcoin, memiliki potensi untuk menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan secara keseluruhan. CBDC diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih terkendali dan ter-regulasi.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam industri jasa keuangan, juga merupakan faktor penting dalam perubahan ekonomi. Inovasi seperti *Internet of Things* (IoT), komputasi, kecerdasan buatan (AI), dan *machine learning* telah membawa perubahan signifikan pada cara layanan keuangan diselenggarakan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses ke layanan keuangan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Dalam konteks ini, adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu terus berinovasi dan bersiap menghadapi tantangan yang muncul, sambil memastikan bahwa penerapan teknologi baru mendukung kepentingan ekonomi dan keuangan yang lebih luas.

7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Peningkatan proporsi kelas menengah yang semakin besar dapat menjadi pendorong utama dalam penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru, sekaligus meningkatkan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga mempengaruhi tren pekerjaan di masa mendatang.

Beberapa jenis pekerjaan yang diperkirakan akan berkembang di masa mendatang termasuk:

a) Pekerjaan Terkait Teknologi Tinggi: Pertumbuhan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan pengembangan perangkat lunak akan menciptakan permintaan pekerjaan baru di bidang teknologi. Ini melibatkan ahli teknologi, ilmuwan data, dan spesialis keamanan siber, di antara lain.

b) Pekerjaan Melalui *Virtual-Metaverse*: Dengan berkembangnya metaverse dan dunia virtual, pekerjaan yang terkait dengan platform virtual, pembuatan konten digital, pengembangan dunia virtual, dan pengelolaan acara virtual dapat menjadi tren signifikan di masa mendatang.

c) Pekerjaan Fleksibel dan Mobilitas Tinggi: Adanya kebutuhan akan fleksibilitas kerja dan mobilitas tinggi mendorong munculnya pekerjaan yang memungkinkan kerja jarak jauh (*remote work*), pekerjaan lepas (*freelance*), dan model kerja fleksibel lainnya. Ini termasuk pekerjaan di bidang konsultasi, pemasaran digital, dan desain grafis yang dapat dilakukan dari mana saja.

Pekerjaan baru ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mempercepat dan mempermudah proses transformasi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kebutuhan akan keterampilan baru dan adaptabilitas akan menjadi kunci untuk sukses di pasar kerja yang terus berubah dan berkembang.

8) Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam

Perkiraan mengenai kelangkaan dan persaingan sumber daya alam (SDA) yang meningkat secara global di masa depan

menggambarkan tantangan serius dalam mengelola keberlanjutan sumber daya. Dua faktor utama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, sehingga meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi.

a) Peningkatan Jumlah Penduduk: Pertumbuhan populasi dunia secara langsung terkait dengan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam. Semakin banyak orang yang membutuhkan akses terhadap air bersih, makanan, dan energi, semakin tinggi tekanan terhadap sumber daya tersebut.

b) Aktivitas Ekonomi yang Meningkat: Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, menandai peningkatan konsumsi sumber daya alam. Proses produksi, industrialisasi, dan urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi, kebutuhan air yang lebih besar, dan pertumbuhan sektor pertanian yang intensif.

Akibatnya, persaingan untuk mengamankan sumber daya alam semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga dapat menciptakan konflik antarnegara. Negara dan organisasi internasional harus berkolaborasi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan teknologi yang efisien, dan mendorong praktek-praktek yang ramah lingkungan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan meminimalkan konflik terkait sumber daya alam. Solusi inovatif dan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kelangkaan dan persaingan sumber daya alam di masa depan.

9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati memicu *Triple Planet Crisis* yang diyakini akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari. Dampak dari ketiga krisis tersebut akan menciptakan perubahan tren dalam dinamika pembangunan global. Adanya urgensi yang semakin meningkat untuk meninggalkan model pembangunan seperti biasa (*Business as Usual*/BaU) yang lama dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi fokus kebijakan dan strategi global. Banyak negara maju dan berkembang telah mengambil komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Promosi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon telah menjadi arah pengembangan kebijakan global di masa depan.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap praktik-praktik pembangunan berkelanjutan, telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan ekonomi hijau. Upaya ini mencakup pengembangan energi terbarukan, pengurangan deforestasi, dan penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. Adanya komitmen ini merupakan bagian dari kontribusi global dalam menghadapi tantangan *Triple Planet Crisis*.

Dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, diharapkan dapat diciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, seimbang, dan memperhatikan keberlanjutan planet ini untuk generasi mendatang.

10) Pemanfaatan Luar Angkasa

Pandangan antariksa sebagai warisan bersama umat manusia mencerminkan semangat kerjasama internasional dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Konsep bahwa ruang angkasa tidak dimiliki oleh satu negara tertentu telah mendorong banyak negara untuk aktif mengembangkan industri dirgantara mereka sendiri.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi antariksa di tingkat global diperkirakan akan signifikan. Pada tahun 2021, ekonomi luar angkasa diperkirakan mencapai $469 miliar, dan proyeksi menunjukkan bahwa angka ini akan terus meningkat, bahkan mencapai $1 triliun pada tahun 2040. Pertumbuhan ini mencakup berbagai sektor, termasuk peluncuran satelit, eksplorasi angkasa, pengembangan teknologi antariksa, dan layanan terkait.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antariksa meliputi peningkatan kebutuhan akan layanan satelit untuk komunikasi dan pemantauan bumi, eksplorasi planet dan asteroid untuk sumber daya, serta inovasi teknologi antariksa yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor.

Selain Megatrend, hal yang harus disoroti lainya dalam hal pembangunan jangka panjang adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu usaha yang disengaja dan direncanakan untuk menggabungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, dengan tujuan untuk menjaga integritas lingkungan dan memastikan kesejahteraan, kemampuan, serta mutu hidup generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Menurut definisi dari Komisi Brundtland PBB, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan, baik dalam

konteks lahan, perkotaan, bisnis, maupun masyarakat, yang berlandaskan prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Agenda pembangunan berkelanjutan telah diciptakan sebagai respons terhadap tuntutan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim melalui tindakan konkret. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan muncul dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada tahun 2012, yang menetapkan serangkaian target yang bisa diadopsi secara universal dan dapat diukur, dengan tujuan mencapai keseimbangan dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Sumber: United Nations Development Programme, 2023

Gambar 2.49 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). SDGs dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara,

masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari seluruh dunia. Agenda ini dibuat sebagai respons atas permintaan pemimpin dunia untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim melalui tindakan konkret. SDGs atau Agenda 2030 secara resmi dinyatakan pada 25 September 2015, saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA) di markas PBB di New York, Amerika Serikat. SDGs, yang mencakup cakupan dan substansi yang sejalan dengan Nawacita, terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut mencerminkan visi dan cakupan agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensional, yang akan memandu komunitas global selama 15 tahun mendatang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri dari 17 tujuan, yakni:

1. Tidak Ada Kemiskinan (*No Poverty*): Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Fokusnya termasuk upaya untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*): SDG ini berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan akses universal terhadap makanan yang aman, bergizi, dan mencukupi. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan.
3. Kesehatan dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*): Fokus pada peningkatan kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk

mengatasi penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan memperkuat sistem Kesehatan.

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*): SDG ini menargetkan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua, dengan penekanan pada peningkatan akses dan relevansi pendidikan.
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*): Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan adalah fokus dari tujuan ini. Hal ini termasuk mengakhiri diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan partisipasi penuh dan setara dalam kehidupan publik dan ekonomi.
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*): SDG ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Terjangkau dan Bersih (*Affordable and Clean Energy*): Meningkatkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic GrowthI)*: Menciptakan pekerjaan yang layak, memastikan perlindungan sosial, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*): Mendorong perkembangan industri yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar.

10. Ketidak-Unggulan yang Tereduksi (*Reduced Inequality*): Mengurangi kesenjangan dalam dan antara negara, serta menciptakan kebijakan inklusif untuk mengatasi ketidaksetaraan.
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*): Tujuan ini mencakup pembangunan kota yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan dari segi lingkungan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*): Mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta mendorong pola konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tindakan Iklim (*Climate Action*): Mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi.
14. Kehidupan di Bawah Air (*Life Below Water*): Melindungi ekosistem laut dan perairan dari kerusakan dan degradasi.
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*): Melindungi ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengatasi desertifikasi, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): Mendorong perdamaian yang inklusif dan keadilan, serta membangun lembaga yang efektif dan akuntabel.
17. Kemitraan untuk Tujuan (*Partnerships for the Goals*): Meningkatkan kemitraan global antara pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Divisi Statistik UN-DESA, telah merilis metadata untuk 241 indikator (versi Maret 2016) yang digunakan untuk mengukur pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metadata ini telah digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang mencakup 17 Tujuan, 169 Target, dan 319 Indikator. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap pencapaian TPB/SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang menjadikan pencapaian TPB/SDGs sebagai tolok ukur untuk mencapai agenda pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam upaya mencapai TPB/SDGs, yang harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Proses pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan daerah itu sendiri, yang merupakan komponen penting dari pembangunan nasional.

2.7.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan isu pembangunan ke depan, terutama dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Beberapa aspek yang menjadi fokus meliputi ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan yang dapat diidentifikasi melibatkan:

A. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas: Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkelanjutan. Tantangan melibatkan diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan inklusi ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

B. Tata Kelola dan Supremasi Hukum: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, perkembangan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan.

C. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Mempertahankan dan memperkuat keberagaman sosial budaya serta menjaga ekosistem dan lingkungan hidup adalah isu utama. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan perlu diatasi dengan kebijakan yang berkelanjutan.

D. Infrastruktur dan Kewilayahan: Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keseimbangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tantangan melibatkan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung konektivitas dan mobilitas.

E. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.

F. Pertahanan dan Diplomasi: Penguatan pertahanan nasional dan diplomasi yang efektif diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

G. Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan: Menjamin pembiayaan yang berkelanjutan, efisien, dan transparan akan menjadi kunci untuk mendukung proyek-proyek pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Indonesia perlu mengatasi berbagai isu ini dengan strategi dan kebijakan yang terencana matang serta melibatkan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi yang kuat ini akan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

A. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah Masyarakat global yang semakin meningkat

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap produktivitas yang rendah di Indonesia melibatkan:

A. Kualitas SDM yang Tertinggal, Terutama Perempuan: Disparitas kualitas sumber daya manusia, terutama di antara perempuan, dapat mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan.

B. Produktivitas Sektor Ekonomi Rendah: Sektor ekonomi yang memiliki produktivitas rendah dapat merusak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

C. Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tertinggal: Keterlambatan dalam kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghambat kemajuan produktivitas.

D. Kelembagaan yang Masih Lemah: Faktor-faktor seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang lemah dapat menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas.

Dampak langsung dari produktivitas yang rendah adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, dari rata-rata 5,7 persen pada tahun 2005-2010 menjadi 4,7 persen pada tahun 2010-2015, dan kemudian lebih lanjut turun menjadi 4,0 persen pada tahun 2015-2022.

Produktivitas yang rendah juga mempengaruhi ekonomi potensial, dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas, pembangunan sumber daya manusia, inovasi, dan perbaikan kelembagaan menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan..

B. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) menjadi faktor kunci dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini esensial untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk-produk berkualitas serta berteknologi tinggi. Namun, tantangan dalam peningkatan kapasitas IPTEKIN di Indonesia terlihat dari berbagai aspek, terutama dalam ketersediaan anggaran.

Penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas IPTEKIN, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan, pembentukan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset, serta upaya untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di bidang ini, akan menjadi langkah-langkah krusial untuk memajukan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.

C. Kuantitas Dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai

Beberapa masalah utama dalam ekosistem riset dan inovasi di Indonesia termasuk kelemahan dalam hasil riset yang kurang aplikatif karena minimnya kerja sama antara lembaga riset dan industri. Selain itu, kerja sama antara lembaga riset domestik dan internasional masih terbatas.

D. Deindustralisasi Dini Dan Produktivitas Sektor Pertanian Yang Masih Rendah

Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dapat diatributkan pada beberapa faktor, termasuk pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi, serta kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Beberapa faktor lain termasuk keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan biaya logistik yang tinggi, serta suku bunga yang tinggi dalam ekonomi.

Sementara itu, sektor pertanian juga mengalami tantangan, seperti lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi, dan masalah kelembagaan. Hal ini tercermin dalam melambatnya produktivitas pertanian dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

Pariwisata dan ekonomi kreatif juga menghadapi kendala seperti keterbatasan atraksi, aksesibilitas, kapasitas pengelolaan pariwisata yang rendah, serta kurangnya dukungan dan kebijakan untuk ekonomi kreatif. Transformasi digital yang belum merata dan rendahnya inovasi serta pengembangan produk juga menjadi hambatan. Selain itu, akses ke pasar internasional masih terbatas.

E. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia masih di bawah potensinya karena beberapa faktor penghambat. Berikut adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan:

a) Terbatasnya Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas: Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas atraksi pariwisata, aksesibilitas, dan amenitas (fasilitas pendukung) dapat mengurangi daya tarik destinasi pariwisata.

b) Kapasitas Pengelolaan dan Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan: Kapasitas dalam pengelolaan dan perencanaan pariwisata berkelanjutan masih rendah, mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan destinasi.

c) Perubahan Preferensi Pasar dan Disrupsi Teknologi: Perubahan preferensi pasar, terutama terkait dengan tren wisata berbasis teknologi dan digitalisasi, dapat mempengaruhi daya tarik destinasi tradisional. Disrupsi teknologi juga dapat memengaruhi cara pariwisata dan ekonomi kreatif dijalankan.

d) Kebencanaan: Kejadian bencana alam dapat berdampak buruk pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama jika tidak ada rencana mitigasi dan pemulihan yang efektif.

e) Kurangnya Dukungan Kebijakan: Kurangnya dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah dapat menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

f) Transformasi Digital yang Belum Merata: Transformasi digital yang belum merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan teknologi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

g) Rendahnya Inovasi dan Pengembangan Produk: Tingkat inovasi dan pengembangan produk masih rendah, sehingga kurangnya daya saing dalam menarik wisatawan dan konsumen.

h) Keterbatasan Ekosistem untuk Komersialisasi: Kurangnya ekosistem yang mendukung komersialisasi produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan pelaku industri kreatif.

i) Akses Terbatas ke Pasar Internasional: Terbatasnya akses ke pasar internasional dapat menghambat ekspansi dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat global.

F. Rendahnya Kontribusi UMKM Dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama dengan koperasi memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, meskipun kontribusi ekonominya cenderung lebih rendah. UMKM membentuk 99,99 persen dari total pelaku usaha, menyumbang 96,92 persen penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019. Meski begitu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,51 persen pada tahun yang sama, sementara koperasi hanya berkontribusi sebesar 1,07 persen terhadap PDB. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi melibatkan pekerja yang kebanyakan memiliki keterampilan rendah dan beroperasi dalam sektor dengan nilai tambah yang terbatas. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, kapasitas pengelolaan yang kurang, serta partisipasi yang rendah dalam rantai nilai produksi menjadi kendala utama. Jumlah koperasi yang berfokus pada sektor riil juga terbatas.

G. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal

Dengan produktivitas sebesar US$7.274,9 per pekerja, Indonesia berada di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang mencapai US$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas melibatkan beberapa aspek, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah (56,3 persen tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja, kurangnya keefektifan informasi pasar tenaga kerja untuk menjadi intelijen yang baik, serta ketidakmampuan pasar kerja Indonesia dalam merespons perubahan cepat di jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, dan pola budaya kerja.

H. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan landasan yang esensial untuk mencapai kemakmuran jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip ini masih belum merata dan menyeluruh. Terdapat kesenjangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kendala utama termasuk kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan dan kurangnya koordinasi antara sektor-sektor terkait.

Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan masih menjadi kecenderungan, terutama dalam industri ekstraktif dan pembangunan infrastruktur. Rencana tata ruang yang kurang terencana dengan baik dapat mengakibatkan hilangnya lahan berharga, deforestasi, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Penerapan teknologi ramah lingkungan belum sepenuhnya diterapkan secara luas, menyebabkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan menyebabkan pemahaman yang kurang mendalam akan kebutuhan lokal dan dampak sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kapasitas lembaga pengelola lingkungan,

penguatan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip berkelanjutan, dan kampanye edukasi publik yang intensif.

I. Tantangan Pembangunan Energi Utamanya Peningkatan Akses Energi Yang Belum Merata Dan Berkualitas Di Seluruh Wilayah, Masih Rendahnya Penggunaan Energi Terbarukan, Dan Masih Rendahnya Efisiensi Energi

Salah satu tantangan utama dalam sektor energi di Indonesia adalah ketidakmerataan akses energi. Terdapat disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan energi dan akses ke listrik. Ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di daerah yang belum terjangkau.

Penggunaan energi yang masih dominan berasal dari sumber konvensional, seperti batu bara, menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan. Kendala dalam penerapan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, termasuk biaya tinggi dan kurangnya infrastruktur pendukung, menjadi hambatan utama. Sementara itu, efisiensi energi di banyak sektor masih rendah, mengakibatkan pemborosan dan dampak lingkungan yang tidak perlu.

Peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi dan infrastruktur. Diperlukan kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan energi, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan negatif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

J. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Masih Menjadi Tantangan Untuk Mencapai Ekonomi Hijau

Pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai ekonomi hijau. Meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, masih banyak kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Polusi udara, limbah industri, dan deforestasi terus mengancam keberlanjutan lingkungan. Perubahan iklim juga menjadi dampak serius dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan ekonomi hijau, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi jejak lingkungan, mendorong teknologi ramah lingkungan, dan mengadopsi praktik berkelanjutan.

K. Ditengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur Dan Literasi Digital Masih Terbatas

Meskipun perkembangan teknologi digital berlangsung cepat, masih ada keterbatasan dalam infrastruktur dan literasi digital. Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang cepat. Selain itu, literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi modern. Peningkatan investasi dalam infrastruktur digital dan program literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

L. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah Masih Relatif Terbatas

Keterbatasan integrasi ekonomi domestik menciptakan tantangan dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan yang masih terbatas antarwilayah dapat menghambat aliran barang dan jasa, mengurangi efisiensi ekonomi, dan menciptakan kesenjangan antar daerah. Diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pengembangan infrastruktur transportasi

dan kebijakan dukungan, untuk meningkatkan integrasi ekonomi domestik dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seimbang.

M. Tantangan Yang Masih Harus Dihadapi Antara Lain Adalah Rendahnya Peran Perkotaan di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan lainnya adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun perkotaan memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi, faktor seperti kurangnya investasi, infrastruktur yang kurang memadai, dan masalah-masalah lingkungan perkotaan dapat membatasi kontribusinya. Peningkatan peran perkotaan memerlukan kebijakan yang mendukung, investasi infrastruktur yang signifikan, dan strategi pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.

N. Untuk Mencapai Tingkat Kemiskinan Menuju Nol Persen Pada Tahun 2045, Tantangan Yang Dihadapi Utamanya disebabkan Akses Dan Kualitas Yang Belum Merata Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Perlindungan Sosial

Tantangan utama dalam mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 adalah ketidakmerataan akses dan kualitas di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Beberapa daerah mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, dan perlindungan sosial yang cukup. Peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan dan pendidikan, bersama dengan kebijakan perlindungan sosial yang efektif, diperlukan untuk menciptakan landasan yang kuat guna mengatasi ketidaksetaraan ini dan mencapai target kemiskinan nol persen.

O. Kualitas Pendidikan Yang Masih Rendah

Kualitas pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu isu utama dalam konteks pembangunan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang

memadai, kualitas pengajaran yang bervariasi, serta akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan. Kurangnya investasi dan perhatian pada pendidikan dapat menghambat perkembangan intelektual masyarakat dan berdampak negatif pada kemampuan generasi muda untuk bersaing dalam dunia kerja.

P. Belum Meratanya Akses Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Masih Rendahnya Pemahaman Manfaat Jaminan Sosial Yang Tercermin Dari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Informal, Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Masih Rendah

Masih rendahnya akses terhadap layanan kesehatan menjadi kendala serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pemahaman terhadap manfaat jaminan sosial, terutama di kalangan pekerja informal, juga rendah. Ketidakpahaman ini dapat menghambat partisipasi dalam program jaminan sosial kesehatan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Q. Regulasi Yang Berlebih (*Hyper Regulating*) Dan Kualitas Regulasi Rendah

Peraturan yang berlebihan dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan ketidakharmonisan dalam regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampak dari situasi ini mencakup munculnya banyak uji materi dalam hukum, yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara umum. Faktor-faktor penyebab kondisi ini melibatkan kecenderungan yang kuat pada perspektif sektoral, penyebaran kewenangan pengaturan yang tidak terkoordinasi, kurangnya pengawasan terhadap dampak implementasi regulasi, kekurangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di sektor regulasi, serta kurangnya partisipasi efektif dalam proses perumusan regulasi.

R. Kelembagaan Instansi Publik Masih Dicirikan Dengan Struktur Yang Terfragmentasi Dan Tidak Efektif

Pembongkaran birokrasi menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berbagai organisasi di berbagai sektor, serta mendorong terjadinya ego sektoral yang berkelanjutan. Fragmentasi di lembaga-lembaga pemerintah juga terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemecahan struktur birokrasi menciptakan situasi di mana tugas dan fungsi organisasi di berbagai sektor saling tumpang tindih, menciptakan ego sektoral yang berlanjut. Fragmentasi di dalam lembaga pemerintah juga terkait dengan cara kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka hubungan yang ada.

S. Proses Bisnis Dan Tata Kelola Pemerintahan Masih Terfragmentasi Dan Tidak Adaptif

Meskipun setiap kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan, namun dalam praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakefektifan dan ketidaksempurnaan efisiensi dalam proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan.

T. Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta Secara Merata Di Seluruh K/L/D

Keadaan ini menghambat proses suksesi dalam pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi individu yang paling berbakat. Dampaknya adalah penurunan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), memperkuat pemisahan mentalitas antar unit kerja, dan mengurangi budaya serta semangat kerja. Sistem penghargaan yang berbasis pada kinerja ASN juga belum terwujud,

yang tercermin dalam disparitas atau kesenjangan dalam penghasilan ASN di berbagai instansi, sulit untuk mempertahankan ASN berbakat yang terbaik.

U. ASN Berada Dalam Posisi Yang Rentan Terhadap Intervensi Politik

Dalam lingkungan birokrasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, muncul masalah ketika kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN), seperti pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian. Selama periode 2020-2022, tercatat 1.703 pengaduan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Dalam kasus korupsi, ASN dan pejabat eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi, menyumbang sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi antara tahun 2003-2022.

V. Transformasi Digital di Tingkat Pemerintahan Masih Dihadapkan Oleh Berbagai Tantangan Mendasar

Tantangan mendasar dalam transformasi digital pemerintahan melibatkan disparitas infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi antar wilayah, terutama kesenjangan antara kota dan desa serta rendahnya tingkat literasi digital. Kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga dihadapkan pada isu tata kelola yang baik, keamanan siber, integrasi data dan informasi yang terbatas, dan tingkat literasi digital yang rendah.

W. Permasalahan Terkait Integritas Masih Terjadi pada Partai Politik

Tantangan melibatkan kader partai politik yang menghadapi masalah hukum, melanggar kode etik, dan kesulitan dalam mencari calon pemimpin serta anggota legislatif. Pengelolaan keuangan partai politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta

kurangnya pendanaan dari negara, mengakibatkan praktik politik uang, perilaku koruptif, dan kurangnya mandiri bagi partai politik. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan integritas serta kemandirian partai politik dalam sistem demokrasi.

X. Belum Meratanya Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan standar pelayanan publik masih mengalami ketidak konsistenan, yang mengakibatkan kompleksitas dalam prosedur pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu pelayanan, dan masih adanya praktik pungutan ilegal. Selain itu, proses digitalisasi pelayanan publik dihambat oleh ketidakmerataan pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya terwujudnya interoperabilitas data dan layanan.

Y. Kualitas Pelayanan Dan Proses Pembangunan Di Bidang Strategis Belum Sesuai Harapan Masyarakat

Tantangan masih terjadi dalam tata kelola, termasuk masalah kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai sektor strategis. Ini mencerminkan adanya permasalahan yang perlu diatasi dalam mengelola aspek kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi isu-isu ini demi mendukung perkembangan berkelanjutan.

Z. Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan Dan Demokratisasi Belum Optimal

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum mencapai tingkat optimal. Faktor-faktor seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan dalam aparatur sipil di tingkat nasional dan daerah,

keterbatasan keuangan, dan lingkungan yang kurang kondusif mempengaruhi situasi ini.

AA. Prinsip Keterbukaan Pemerintahan Belum Sepenuhnya Terarusutamakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya menekankan prinsip keterbukaan pemerintah. Absennya mekanisme ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada kurang optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Fondasi yang kuat, seperti supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan diplomasi yang tangguh, diperlukan untuk mencapai perubahan menyeluruh.

BB. Sistem Hukum Belum Mampu Sepenuhnya Mewujudkan Kepastian Hukum

Sistem hukum masih belum mampu sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil. Pemulihan aset dari tindak pidana masih belum optimal, potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tinggi, dan pengawasan terhadap institusi penegak hukum masih kurang kuat. Budaya rendah dalam masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum menjadi isu penting dalam bidang hukum.

CC. Demokrasi Masih Terbatas Pada Hal-Hal Prosedural

Praktik politik uang, kekurangan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, ketidaktransparanan dalam penggunaan dana publik, kinerja pemilu dan kebebasan pers yang belum optimal, serta kurangnya kebebasan sipil dan peningkatan perilaku diskriminatif serta intoleransi menandai keterbatasan demokrasi. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan terus-menerus.

DD. Keamanan Nasional Menghadapi Kompleksitas Ancaman dan Gangguan Serta Meningkatnya Isu Geopolitik Kawasan Perbatasan

Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan, terutama di perbatasan. Kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan masih belum terbangun, ketergantungan pada alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri tetap tinggi. Tantangan lain melibatkan tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional, kejahatan baru dengan teknologi tinggi, kelemahan keamanan siber, dan tingginya tingkat gangguan keamanan serta pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

EE. Kebijakan Fiskal Dan Moneter Yang Pro-Pertumbuhan

Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini tetap kokoh di tengah ketidakpastian global, sehingga diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan. Tantangan dalam kebijakan fiskal mencakup rendahnya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, yang tercermin dari rasio pajak hanya mencapai 10,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia (15,7 persen) dan negara maju (20,9 persen) pada tahun 2021. Kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB juga masih rendah, hanya sekitar 15,8 persen pada tahun 2022, tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand (18,3 persen, 2022) dan Filipina (21,9 persen, 2022). Kondisi fiskal yang terbatas, bersama dengan kualitas belanja yang belum optimal, menyebabkan keterbatasan peran fiskal sebagai pendorong pembangunan. Sementara itu, dalam kebijakan moneter, tantangan melibatkan upaya menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi harga komoditas global, terutama pangan dan energi, serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global. Situasi ini dapat menimbulkan risiko

peningkatan inflasi dan tekanan nilai tukar, yang mendorong kebijakan moneter untuk lebih ketat guna menanggulangi risiko ketidakstabilan harga domestik.

FF. Pancasila Belum Sepenuhnya Diimplementasikan

Pancasila belum sepenuhnya diaplikasikan dalam norma dan praktik kehidupan, sementara karakter dan identitas bangsa menghadapi ancaman budaya global yang negatif. Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai dasar pembangunan masyarakat. Meskipun Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 51,90 pada tahun 2021, aspek budaya seperti literasi, kreativitas, dan inovasi masih belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Disparitas literasi antarwilayah masih ada, dan meskipun akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meningkat, kemampuan dalam memilah informasi tidak selalu sejalan. Keluarga juga belum mencapai tingkat optimal, terlihat dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga sebesar 58,49 pada tahun 2022. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga masih belum optimal. Kebebasan beragama belum didukung dengan kemampuan literasi, dan penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya masih lemah dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 73,09 pada tahun 2022. Ketimpangan gender tinggi, tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,458 pada tahun 2022. Keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan masih menjadi tantangan.

GG. Ketahanan Ekologi Menghadapi Tantangan Berupa Tingginya Laju Kehilangan Dan Rendahnya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Yang Berkelanjutan

Keberlanjutan ekologis dihadapkan pada tantangan serius akibat tingginya tingkat kehilangan dan rendahnya pemanfaatan

keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, bencana hidrometeorologi menyumbang sebanyak 95 persen dari total 3.207 kejadian bencana. Upaya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Pengelolaan kerusakan lingkungan masih belum optimal, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, serta air juga menjadi masalah yang signifikan di berbagai wilayah. Meskipun pembangunan kewilayahan telah memberikan hasil yang positif, tantangan terkait bencana dan lingkungan tetap menjadi fokus utama.

HH. Pembangunan Infrastruktur Telah Meningkat Dengan Pesat di Berbagai Wilayah Indonesia, Tetapi Masih Jauh Dibawah Kebutuhannya

Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, meskipun masih belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan yang ada. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pelayanan dasar, dan memperkuat integrasi nasional. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik, waduk, irigasi pertanian, dan infrastruktur dasar serta perumahan telah dilaksanakan atau sedang dalam proses di berbagai wilayah. Meskipun terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, masih terdapat beberapa kendala seperti tata kelola dan koordinasi yang lemah, pendanaan yang kurang memadai, perawatan dan keberlanjutan infrastruktur yang belum optimal, serta pemanfaatan yang belum maksimal sehingga belum memberikan dampak ekonomi dan sosial yang optimal.

II. Belum Efektifnya Upaya Menjaga Konsistensi Antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/ Lembaga Dan Daerah

Upaya untuk menjaga keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah, serta pencapaian sasaran jangka panjang masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Instrumen pengamanan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Penerapan manajemen risiko dalam konteks pembangunan nasional masih belum mencapai tingkat maksimal, dan upaya komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjamin dengan baik. Diperlukan perbaikan dalam pengembangan instrumen pengamanan, optimalisasi manajemen risiko, dan peningkatan komunikasi publik guna memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan melibatkan semua pihak yang terlibat.

JJ. Terbatasnya Kapasitas Pembiayaan Percepatan Dan Peningkatan Kebutuhan Pengembangan Sektor Publik Pusat Dan Daerah

Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi, termasuk kemajuan inovasi yang lambat, tingginya biaya pendanaan, keterbatasan di sektor keuangan (terutama dalam hal sumber dana dan peran sektor keuangan non-bank seperti dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta kurang optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen pada tahun 2022. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat sistem pembiayaan pembangunan agar lebih efisien dan inklusif.

Telaah RPJMN 2025-2029

Dalam rangka menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN Tahun 2025 - 2029. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 RPJMN, Visi RPJMN 2O25-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. RPJMN 2025-2029 memuat 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Delapan Asta Cita tersebut adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan qenerasi z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapar masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. 17 program prioritas Presiden adalah :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Sedangkan Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* adalah:

1. Memberi makanan dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.

Dalam Lampiran IV, Arah Pembangunan Kewilayahan RPJM Nasional Tahun 2O25-2O29 untuk Provinsi Jawa Timur yang dapat diselaraskan untuk RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah :

Tabel 2. 171 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.9	8,0
PDRB Perkapita (Rp Juta)	114.8	80.7
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	14.2	13.7
Tingkat Kemiskinan (%)	7.58 - 8.08	4.31 - 5.31
Rasio Gini	0.381 - 0.386	0.369 - 0.373
Indeks Modal Manusia	0.64	0.68
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1.00	2.52

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur	2025	2029
IKLH Daerah	74.17	74.5
TPT (%)	3.90 - 4.49	3.26 - 4.21

Sumber: RPJMN 2025-2029

Berikut *highlight* pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN 2025 – 2029 yang dapat diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2029.

Kawasan Selingkar Ijen (KSI) yang meliputi wilayah Kabupaten Situbondo (PKL), Jember (PKW), Banyuwangi (PKL) dan Bondowoso (PKL) menyimpan kekayaan alam luar biasa, termasuk Kawah Ijen yang terkenal dengan fenomena *blue fire*. Kawasan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dukungan infrastruktur yang semakin berkembang menjadikan Selingkar Ijen sebagai kawasan dengan daya saing tinggi di sektor pariwisata dan ekonomi hijau. Optimalisasi sektor unggulan serta pengembangan potensi agrowisata di Kawasan Selingkar Ijen bergantung pada arah kebijakan yang dirumuskan. Arah kebijakan ini dibagi ke dalam 3 aspek; yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan/infrastruktur. Pada aspek sosial, pengembangan difokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aspek ekonomi berupaya mengoptimalkan rantai pasok sektor potensial dan komoditas unggulan di Kawasan Selingkar Ijen, mulai dari pengembangan industri, hilirisasi, hingga perluasan pemasaran produk dengan berkelanjutan. Aspek lingkungan/infrastruktur merupakan strategi peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung distribusi logistik dan konektivitasnya, kualitas lingkungan permukiman, dan konservasi ekosistem sekitarnya.

Tabel 2. 172 Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen

No.	Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen
A.	**Kawasan Perkotaan Jember** 1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jember, antara lain melalui: · Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu · Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau · Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan · Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan 2. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jember (PHTC) 3. Inisiasi pembangunan TPST Regional Jember 4. Inisiasi pengembangan SPAM Regional Jember 5. Pengembangan kota agropolitan Jember 6. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soebandi Jember (PHTC) 7.Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso-Situbondo, dan Jember- Lumajang 8.Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo 9.Pembangunan RS Paru Jember (sebagai bagian penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 koridor)
B.	**Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi)** 1.Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain D.I. Sampean Baru, D.I. Setail, D.I. Setail Teknik, D.I. Bedadung, D.I. Pondok Waluh, dan D.I. Sampean 2.Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 3.Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 4.Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 5.Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

No.	Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen
	6.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 7.Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area,* terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung dan DAS Sampean, dan DAS Tempuran Kedungbajul 8.Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung dan DAS Sampean, dan DAS Tempuran Kedungbajul 9.Pembangunan infrastruktur PLTP ijen 10.Pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi 11.Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan Peningkatan kapasitas SPAM Umbulan 12.Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan Konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk /pestisida) pakan organik 13.Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui. penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 14.Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 15.Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkataproduktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian 16.Percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur.

No.	Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen
C.	**Kabupaten Bondowoso masuk ke dalam Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan pangan (PHTC)**
D.	**Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (Kab. Jember & Kab. Banyuwangi), Kawasan Konservasi TN Alas Purwo (Kab. Banyuwangi), dan Kawasan Konservasi Baluran (Kab. Situbondo), Kawasan Geopark Ijen (Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso)** 1.Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi 2.Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung ekonomi 3.Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik 4.Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri 5.Penguatan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan 6. Perlindungan dan pengamanan hutan 7. Penguatan pengelolaan hutan lestari 8. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi 9. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana 10. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
E.	**Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda (Lumajang, Jember, Situbondo, dan Bondowoso)** 1.Peningkatan Produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) 2.Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) 3.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) 4.Pengendalian OTP dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) 5.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian (tebu)
F.	**Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi (Banyuwangi)** 1.Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar 2.Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi 3.Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap

No.	Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen
	4.Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut yang memiliki nilai jual tinggi (high-value commodity) 5.Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat 6.Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan 7.Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan 8.Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produksi perikanan

Arahan umum pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, antara lain melalui
   - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
   - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
   - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
   - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
   - Revitalisasi pendidikan nonformal
   - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
3. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
   - Penurunan kematian ibu dan anak

- Pencegahan dan penurunan stunting
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

4. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
   - Penuntasan TBC
   - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
   - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
5. Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui:
   - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
   - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
6. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:
   - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
   - Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
7. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:
   - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan
   - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

- Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik
- Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time
- Perluasan pengunaan kendaraan listrik

8. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
   - Perluasan infrastruktur digital
   - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
   - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
9. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:
   - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
   - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
   - Digitalisasi layanan publik prioritas
   - Pengembangan ekosistem layanan publik digital
10. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa timur, antara lain melalui:
    - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
    - Penanggulangan judi dan penyelundupan
    - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
11. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, antara lain melalui:
    - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya

- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
- Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Ada

2.7.2.3 Isu Strategis Regional

Provinsi Jawa Timur pada tahapan Pembangunan sebelumnya telah mencatat kemajuan, namun dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai kondisi eksisting menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran mimpi Jawa Timur di 2045, hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, tata Kelola pemerintah, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

1. **Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah**

   Isu strategis mengenai pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

   Dalam rangka pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas

antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Secara umum, Disparitas di Jawa Timur disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas dan belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di Jawa Timur (transportasi, sumber daya air, dan layanan dasar), serta belum efektifnya implementasi konsep pengembangan wilayah yang ada di Jawa Timur seperti Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan sebagainya.

2. **Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.**

   Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang Secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan stabilitas ekonomi baik nasional maupun global menjadi salah satu akar masalah kemiskinan yang memberikan pengaruh pada sulitnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Kondisi ketidakpastian iklim perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan bertahan usaha pada sektor primer di Jawa Timur, sehingga mendorong masyarakat untuk bergeser pada sektor lain atau kehilangan pendapatan. Potensi pengembangan usaha ekonomi mandiri dinilai mampu menjadi penyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

3. **Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.**

Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena layanan pendidikan yang tidak memadai adalah isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya layanan pendidikan yang baik dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial masyarakat. Rendahnya layanan pendidikan menyebabkan kurangnya SDM yang berkualitas sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. SDM yang terdidik dan terlatih dengan baik sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4. **Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik**

Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi strategi penegakan hukum yang humanis, edukatif dan persuasif, serta partisipasi masyarakat, dan reformasi tata kelola pemerintahan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berkelanjutan.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan

Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas seiring dengan meningkatnya kebutuhan makhluk hidup melebihi ketersediaan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan disebabkan oleh penurunan jasa ekosistem. Penurunan jasa ekosistem merujuk pada situasi di mana ekosistem alam tidak lagi mampu menyediakan dengan baik berbagai manfaat dan fungsi yang berkontribusi dalam mendukung kelangsungan hidup kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Di lain pihak penurunan kualitas lingkungan hidup memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, penurunan kualitas dan kondisi wilayah semakin diperparah oleh kegiatan manusia yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup sehingga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Salah satu faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup adalah penggunaan ruang yang tidak sesuai dan menyebabkan

peningkatan lahan kritis, kejadian bencana, serta pelanggaran peruntukan tata ruang, termasuk perubahan fungsi kawasan lindung.

6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kedaulatan Pangan Jawa Timur terkonfirmasi dari tingginya kontibusi komoditas agro (pertanian dalam arti luas) Jawa Timur terhadap nasional, sehingga menjadi lumbung pangan nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Surplus komoditas pangan pertanian di Jawa Timur selain didukung potensi sumber daya alam yang sesuai, juga sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur pendukung yang cukup baik.

Dengan dirilisnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat, maka Jawa Timur sebagai daerah lumbung pangan nasional memiliki kesempatan untuk mendukung langsung dari produksi komoditas pangan dan pertanian yang menjadi bahan makanan dari program ini dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Kesempatan ini perlu didukung dengan kestabilan produksi pangan dan pertanian agar mampu menopang program MBG ini, yang kelanjutannya guna membangun pondasi fisik dan psikis Sumber Daya Manusia ke depan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Disamping itu terdapat telaah dokumen perencanaan tingkat regional yang menjadi acuan yaitu :

1. Telaah RTRW Provinsi Jawa Timur 2023-2043

Secara hierarki pembangunan wilayah secara spasial harus terintegrasi dan sinkron antara wilayah Kabupaten Bondowoso dengan wilayah

kabupaten sekitar juga dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur. Beberapa arahan pengembangan spasial untuk wilayah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur 2023-2043, adalah sebagai beikut:

(1) Penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut dikembangkan kebijakan pengintegrasian antar koridor pertumbuhan Wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di Wilayah Pengembangan 3 Kelautan bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam strategi-strategi diantaranya mengintegrasikan konektivitas antar 7 koridor pengembangan Wilayah (Sapto Karso) diantaranya Koridor penghubung antar Kawasan dan Kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura. Maka pengembangan Kawasan Ijen menjadi salah satu strategi pembangunan pengembangan wilayah Propinsi Jawa Timur.

(2) Dalam upaya mewujudkan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur, beberapa pengembangan infrastruktur atau prasarana dan sarana yang diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Bondowoso antara lain:

a) Penetapan Perkotaan Bondowoso sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani Kabupaten Bondowoso, yang secara hierarki mendukung keberadaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Jember dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kawasan Gerbangkertosusilo dan Perkotaan Malang.

b) Pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol yaitu jalan ruas Situbondo–Bondowoso dan Bondowoso–Jember, serta rencana pembangunan Jalan Tol Situbondo-Jember yang melintasi wilayah Kabupaten Bondowoso.

c) Optimalisasi Terminal Penumpang tipe B yaitu Terminal Bondowoso.

d) Reaktivasi jalur rel kereta api Kalisat-Panarukan yang melintasi Kabupaten Bondowoso.

e) Pengembangan Pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu PLTP Blawan Ijen, PLTP Iyang Argopuro yang berada di perbatasan beberapa kabupaten. Selain itu terdapat potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan jaringan SUTT Jember–Bondowoso, SUTT Bondowoso–Situbondo, serta GI Bondowoso.

f) Pengembangan jaringan terestrial komunikasi dan informartikan yang menggunakan sistem kabel dan sistem nirkabel atau BTS (*Base* Transceiver *Station*) secara terpadu, pengembangan jaringan satelit baik yang menggunakan tower maupun tidak menggunakan tower (non tower).

g) Pengembanggan dan pemantapan sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi, diantaranya D.I. Gumbolo/Dawuhan dan D.I. Sumber Nyamplong yang berada di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

h) Pengelolaan dan pengembangan bangunan pengendalian banjir yaitu Waduk Taman, Waduk Tegalampel, Waduk Karanganyar, Waduk Botolinggo, Waduk Krasak, Bendungan Sampean Baru dan Waduk Klabang.

i) Pembangunan bangunan pengendalian banjir berupa Waduk Dukokerto.

j) Pengembangan dan pengelolaan bangunan embung yaitu: Embung Pace, Embung Gubrih, Embung Klabang, dan Embung Blimbing.

k) Optimalisasi pengembangan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Pekalen – Sampean.

l) Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa : SPAM Regional Timur yang melayani Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, SPAM Regional Bondowoso-Jember, dan SPAM Regional Situbondo –Bondowoso.

(3) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jawa Timur memberikan arahan pengembangan fungsi dan kegiatan pemanfaatan ruang yang dikembangkan di Kabupaten Bondowoso antara lain:

a) Fungsi lindung dipertahankan di Kabupaten Bondowoso yaitu hutan lindung, Taman Wisata Alam (TWA) dan kawasan konservasi lainnya.

b) Untuk Cagar Budaya dilakukan pelestarian bangunan pabrik gula (Prajekan) dan pemeliharaan Situs Sarcophagus dan Kawasan Megalitik Grujugan.

c) Fungsi budidaya yang menonjol adalah Kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian termasuk di dalamnya KP2B, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, serta Kawasan Peruntukan Industri.

d) Kawasan dengan ketentuan khusus fungsi pertahanan dan keamanan, Kabupaten Bondowoso merupakan bagian dari Daerah Latihan Militer Dodilatpur (Bondowoso, Sumbergading,

Blawan, Tamanan, Gunung Raung) dan bagian dari Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 (Klucing Bondowoso, Curanpoh Bondowoso, Arak-Arak Besuki).

e) Kawasan dengan ketentuan khusus Kawasan Karst.

(4) Secara khusus wilayah Kabupaten Bondowoso memerlukan perhatian berkaitan dengan adanya Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat tinggi meliputi: letusan gunung api, banjir bandang, likuefaksi, tanah longsor, dan gempa bumi.

(5) Kabupaten Bondowoso merupakan bagian dari Kawasan Strategis Ekonomi Unggulan Jawa Timur, yaitu bagian dari Sistem Agropolitan Ijen yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.

Arahan-arahan diatas menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030

Provinsi Jawa Timur telah memberikan peran besar dalam menopang percepatan pembangunan nasional melalui program kerja strategis di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Spirit kerja bersama dalam bingkai Nawa Bhakti Satya sepanjang tahun 2019 - 2024 terbukti memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Jawa Timur. Pelaksanaan pembangunan periode 2020 – 2024 berhasil mewujudkan kesetaraan ekonomi antar kelompok, sektor, dan wilayah; menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan khususnya bagi kelompok rentan; mencukupi kebutuhan primer mencakup pangan, pendidikan, dan kesehatan; mempermudah akses terhadap lapangan pekerjaan dan konektivitas kewilayahan; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, transparan, dan partisipatif; menguatkan harmoni kewargaan dalam kehidupan sosial yang beragam; serta mengerjakan pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk mencapai visi "Indonesia Emas" pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Provinsi Jawa Timur mencanangkan target "Jawa Timur Sejahtera" pada tahun 2045. Target tersebut telah didukung oleh fondasi yang kuat berkat berbagai capaian pembangunan yang telah diraih. Fondasi ini harus terus diperkuat dan dibangun secara bersama-sama hingga mencapai visi "Jawa Timur Sejahtera".

Sinergi dan kerja keras lintas sektoral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur wajib dilakukan sebagai syarat menuju kesejahteraan. Tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan, seperti ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta krisis perubahan iklim. Hal ini tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030 berpedoman pada RPJMN 2025-2029, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Visi Pembangunan RPJMD 2025-2030 Provinsi Jawa Timur adalah “**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**”. Penetapan Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yang dirancang tersebut untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi masyarakat Jawa Timur lebih Sejahtera.

Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) yang menjadi pijakan utama dalam menjabarkan Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

1. **Bersama**, mengandung pengertian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam satu tekad yang kuat.
2. **Jawa Timur Maju**, merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa pada tahapan 2025–2029, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai *center of gravity* yang strategis dan berkembang pesat.
3. **Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan**, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi, dan Pembangunan yang berkelanjutan.
4. **Menuju**, mengandung pengertian upaya untuk mencapai tujuan -tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur
5. **Indonesia Emas**, mengandung pengertian bahwa Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 diselaraskan dan mendukung Visi Nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045.

Jawa Timur memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, budaya, sumber daya manusia (SDM), dan pasar. Selain itu, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat gravitasi (center of gravity) yang diperkuat dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 21 rute dari 39 rute tol laut, sehingga 80 persen logistik di 19 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut, Jawa Timur siap menjadi GERBANG BARU NUSANTARA, yang selaras dengan pergeseran paradigma pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas

ekonomi dengan wilayah timur Indonesia melalui rantai integrasi industri dan perdagangan guna menghadapi pertumbuhan yang semakin pesat. Dengan sinergi dan inovasi yang terus dikembangkan, Jawa Timur akan memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Visi tersebut dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu

1. Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan dengan pendekatan lintas sektoral-spasial berbasis data terpadu.
2. Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan, iklim investasi dan stabilitas ekonomi.
3. Jatim Akses, memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Cerdas, memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
5. Jatim Sehat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).
6. Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif.

7. Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
8. Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilainilai kesalehan sosial, berjiwa pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga.
9. Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan iklim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Misi tersebut diimplementasikan dalam tujuan dan target kinerja yang dapat diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025 – 2029, sebagai berikut

Tabel 2. 173 Tujuan dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	2026	2030
Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan dengan pendekatan lintas sektoral-spasial berbasis data terpadu.	Terwujudnya Pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,81 - 9,10	6,40 - 7,90
	Terwujudnya Pengurangan ketimpangan	Rasio Gini	0,370 - 0,380	0,366 - 0,375
Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan, iklim	Terwujudnya Perluasan lapangan kerja dan konektivitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,84 - 4,48	3,62 - 4,28

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	2026	2030
investasi dan stabilitas ekonomi.	wilayah untuk penguatan ekonomi			
Jatim Akses, memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80 - 5,40	5,10 - 6,90
Jatim Cerdas, memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.	Meningkatnya SDM yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	75,80 - 76,40	77,10 - 79,66
Jatim Sehat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).				
Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	85,80 - 86,40	88,60 - 90,20

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	2026	2030
yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif.				
Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.	Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Nilai Tukar Petani	112,3	112,5
Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilainilai kesalehan sosial, berjiwa pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga.	Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran dan inklusif	Indeks Kesalehan Sosial	76,40 – 77,90	78,40 – 79,90
Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan iklim dalam	Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.08 - 74.25	74.41 - 74.59

Sumber : Dokumen Rankhir RPJMD Provinsi Jatim tahun 2025 - 2029

Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur untuk Bondowoso adalah :

1. Inisiasi pembangunan TPST Regional Jember
2. Inisiasi pengembangan SPAM Regional Jember

3. Pengembangan kota agropolitan Jember
4. Preservasi jalan ruas Jember-Bondowoso-Situbondo
5. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
6. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani
7. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
8. Pembangunan dan pengelolaan tampung air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
9. Konservasi sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *cacthment area*
10. Pembangunan Infrastruktur PLTP Ijen
11. Kawasan komoditas unggulan tebu tapal kuda
12. Peningkatan ketahanan bencana terhadap kawasan Geopark Ijen
13. Indikasi daerah prioritas intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).

3. Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Pada RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029

Bahwa dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terkait pencapaian target Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025 - 2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, maka diperlukan penyelarasan target dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah. Adapun target penyelarasan Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Tahun

2025-2030 digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029, sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.7.2.2/13537/201.2/2035 tanggal 18 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, disajikan pada Tabel 2.174 Penyelarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030 dan Tabel 2.175 Tabel Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030.

Tabel. 2. 174 Penyelarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00-4,87	4,04 - 4.88	4,04-5,00	4,06-5,04	4,15-5,05	4,16-5,02
2.	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	33,90 - 34,80	34,05 - 36,79	34,51 - 38,78	35,52 - 40,77	35,81 - 42,76	36,54 - 44,75
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi	%	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
4.	Tingkat Kemiskinan	%	10,31-	10,25 -	10,05-	9,83 -	6,83 -	6,44 -
5.	Rasio Gini	-	0,31 - 0,35	0,307 - 0,347	0,304 - 0,344	0,301 - 0,341	0,298 - 0,338	0,295 - 0,335
6.	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,99 - 70,34	70,06 - 70,66	70,33 - 71,23	70,60 - 71,80	70,87 - 73,07	71,24 - 73,80
7.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	472.114,78	481.557,08	491.188,22	501.011,99	511.032,22	521.252,87
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	73,46	73,54	73,61	73,69	73,77	73,85
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 - 3,32	3,88-3,21	3,87-3,03	3,79-2,90	3,75-2,82	3,71-2,77

Tabel. 2. 175 Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,51	73,76	74,02	74,27	74,52	74,77
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	189,41 - 199,81	187,41 - 198,81	185,41 - 197,81	183,41 - 196,81	181,41 - 195,81	179,41 - 194,81
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	20,72	19,97	19,23	18,48	15,93	15,27
4.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Uisa di atas 15 tahun	Tahun	6,68	6,76	6,84	6,98	7,05	7,08
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,3	13,34	13,38	13,45	13,47	13,48
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,53	7,59	7,68	7,78	8,09	9,23

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.	Tingkat Kemiskinan	%	10,31-12,12	10,25-11,73	10,05-11,21	9,83-10,83	6,83-10,18	6,44-8,89
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	18,63	19,52	20,99	21,89	23,36	24,42
9.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	24,4	25,24	25,25	25,26	25,28	25,29
10.	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,41 - 2,50	1,85 - 2,57	1,90 - 2,60	1,95 - 2,65	2,00 - 2,70	2,05 - 2,75
11.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,62 - 0,88	0,63 - 0,93	0,64 - 0,95	0,65 - 0,99	0,65 - 1,02	0,66 - 1,06
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 - 3,32	3,88-3,21	3,87-3,03	3,79-2,90	3,75-2,82	3,71-2,77
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,11	62,25	62,48	62,98	63,48	63,99

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	24,61 - 26,00	24,69 - 26,15	24,75 - 26,16	24,79 - 26,17	24,82 - 26,19	24,84 - 26,2
15.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	75,34	75,94	76,54	77,12	77,70	78,26
16.	Persentase Desa Mandiri	%	35,89	36,84	37,8	38,76	39,71	2,24 - 2,79
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	4,16	1,84 - 2,21	1,94 - 2,36	2,04 - 2,5	2,14 - 2,65	2,24 - 2,79
18.	Realisasi Investasi	Tiliun Rupiah	1,06	1,07	1,07	1,07	1,09	1,09
19.	ICOR	-	5,52	5,61	5,61	5,6	5,6	5,59
20.	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,537	0,508	0,493	0,479	0,464	0,449
21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	73,46	73,54	73,61	73,69	73,77	73,85

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
22.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,92	4,41	5,9	7,39	8,88	10,36
23.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	47,75	49,58	51,41	53,24	55,07	56,9
24.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	21,14	21,34	21,54	21,74	21,94	22,14
25.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	12,05	11,57	11,09	10,61	10,13	9,65
26.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	25,23	29,47	33,7	37,94	42,18	45
27.	Indeks Risiko Bencana	-	101,74	101,05-100,46	100,37-99,19	99,68-97,91	98,99-96,64	98,31-95,36
28.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	472.114,78	481.557,08	491.188,22	501.011,99	511.032,22	521.252,87

2.7.3 Telaah Dokumen Lainnya

1. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029

Kategori capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil analisis data pada Dokumen Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029 terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 176 Capaian Indikator TPB di Kabupaten Bondowoso

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	BB	TAD	Grand Total
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	10	8	0	5	23
TPB 2. Tanpa Kelaparan	7	3	0	1	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	3	0	13	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	5	5	0	3	13
TPB 5. Kesetaraan Gender	8	5	0	1	14
TPB. 6 Air Bersih	5	3	0	8	16
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	4	10	0	5	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	2	4	0	3	9
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	6	2	0	1	9
TPB 11. Kota &Permukiman Berkelanjutan	5	2	1	0	8
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	5
TPB 13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
TPB 15. Ekosistem Daratan	1	1	0	2	4

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	BB	TAD	Grand Total
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	10	7	0	4	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	6	4	2	2	14
Grand Total	**91**	**57**	**3**	**51**	**202**

Sumber: Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029

Tabel 2. 177 Persentase Capaian TPB di Kabupaten Bondowoso

No	Indikator	Jumlah Capaian	%
1	Indikator – SS	91	45%
2	Indikator – SB	57	28%
3	Indikator – BB	3	2%
4	Indikator – TAD	51	25%
	Jumlah	202	100%

Sumber: Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel di atas secara umum Kabupaten Bondowoso sudah cukup baik dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana jika dilihat dari persentase capaian TPB untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target memiliki porsi terbanyak sebesar 45% (91 indikator) dari 204 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Bondowoso. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bondowoso kedepan adalah indikator yang memiliki capaian belum mencapai target dan indikator yang tidak ada data, yang memiliki persentase sebanyak 28% (57 indikator) dan 25% (51 indikator) yang diharapkan indikator tersebut dapat mencapai target nasional dan dapat disediakan pada tahun-tahun mendatang.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Menengah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil Laporan Induk Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2. 178 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Menengah

No.	Isu Strategis PB
1	Kerawanan Terhadap Bencana
2	Alih Fungsi Lahan
3	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4	Rencahnya Kualitas SDM
5	Permasalahan Tata Kelola dan Penegakan Hukum
6	Kemiskinan
7	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029

2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2045 adalah "Bondowoso Unggul, Sejahtera, Maju Dan Berkelanjutan" dengan misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Potensi Unggulan Daerah
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif Didukung Digitalisasi di Semua Sektor
4. Memantapkan Kondusivitas Wilayah, dan Stabilitas Demokrasi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Toleran, Dan Berbudaya Didukung dengan Lingkungan Yang Aman
6. Mewujudkan Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan

7. Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup
8. Kesinambungan Pembangunan

Arah Kebijakan periode pertama RPJPD tahun 2025-2029 selaras dengan tahapan pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu "Penguatan Fondasi Transformasi Daerah". Dari arah kebijakan tersebut, terdapat sejumlah arah pembangunan daerah yang menjadi prioritas yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup
2. Penguatan dan optimalisasi industri pengolahan berbasis pertanian serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
3. Perencanaan daerah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan melalui penguatan kebijakan
4. Penguatan moral dan etika masyarakat untuk menjaga kondusifitas demokrasi
5. Penguatan ketahanan budaya dan kerukunan agama sebagai dasar mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas ASN, Kelembagaan yang efisien, digitalisasi teknologi untuk pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
7. Pemenuhan rencana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis lingkungan hidup
8. Penguatan perencanaan pembangunan dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial

Isu Strategis RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. Kerawanan Terhadap Bencana;

2. Alih Fungsi Lahan;
3. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
4. Rendahnya Kualitas SDM;
5. Permasalahan Tata Kelola Dan Penegakan Hukum;
6. Kemiskinan;
7. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi;
8. Terbatasnya Lapangan Kerja;
9. Infrastruktur Belum Memadai;
10. Pergeseran Nilai-Nilai Sosial Masyarakat.

2.7.4 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sehingga ditetapkan isu strategis Pembangunan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kerawanan Terhadap Bencana;
2. Alih Fungsi Lahan;
3. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
4. Optimalisasi Pemanfaatan Ijen Geopark;
5. Rendahnya Kualitas SDM;
6. Permasalahan Tata Kelola Dan Penegakan Hukum;
7. Kemiskinan;
8. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi;
9. Terbatasnya Lapangan Kerja;
10. Infrastruktur Belum Memadai;
11. Pergeseran Nilai-Nilai Sosial Masyarakat.

Tabel 2. 179 ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Bondowoso dalam periode 2018 hingga 2023, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan yang signifikan dalam indeks risiko bencana selama periode tersebut. Pada tahun 2018, Kabupaten Bondowoso memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 166,00, mencerminkan risiko bencana yang relatif tinggi.		RB Kabupaten Bondowoso secara proyeksi mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun	Kerawanan terhadap bencana	1. peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; 2. perubahan iklim;	Kualitas Pelayanan Dan Proses Pembangunan Di Bidang Strategis Belum Sesuai Harapan Masyarakat	Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam.	Kerawanan Terhadap Bencana;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Namun, dalam periode berikutnya, terjadi penurunan yang konsisten dalam indeks tersebut. Pada tahun 2019, IRB menurun menjadi 150,96, menandakan adanya upaya atau faktor-faktor yang membantu mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2021, di mana indeks berturut-turut mencapai 128.75 dan 112.39,							

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen risiko bencana di Kabupaten Bondowoso. Disisi lainnya terdapat arahan kewilayahan provinsi jawa timur terhadap risiko bencana di Bondowoso, utamnya pada peningkatan ketahanan bencana terhadap kawasan Geopark Ijen							
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di		Terjadinya alih fungsi lahan menyebabkan IKL	Alih fungsi lahan	peningkatan persaingan	1. Pembanguna n Belum	Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa	Alih Fungsi Lahan;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten Bondowoso tahun 2016-2023, terdapat variasi dalam capaian indeks tersebut. Pada tahun 2016, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso sebesar 70,40. Pada tahun 2017, indeks mengalami peningkatan kecil menjadi 70.46. Pada tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun menjadi 66,0 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 60,3, Hal		semakin berkurang nilainya		pemanfaatan sumber daya alam;	Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan 2. Ketahanan Ekologi Menghadapi Tantangan Berupa Tingginya Laju Kehilangan Dan Rendahnya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Yang Berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur Telah Meningkat Dengan Pesat di Berbagai Wilayah Indonesia, Tetapi Masih Jauh Dibawah Kebutuhannya	terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi;	

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
tersebut disebabkan pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), dimana pada beberapa titik pantau air terjadi pencemaran ringan. Sedangkan, pada tahun 2019, terindikasi adanya peningkatan emisi di wilayah pemantauan, sehingga indeks kualitas udara (IKU) pada tahun tersebut mengalami penurunan nilai. Pada tahun 2020, Kabupaten Bondowoso					4. Belum Efektifnya Upaya Menjaga Konsistensi Antara Perencanaan 5. Terbatasnya Kapasitas Pembiayaan Percepatan Dan Peningkatan Kebutuhan Pengembangan Sektor Publik Pusat Dan Daerah		

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
berhasil mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin muncul pada tahun sebelumnya, salah satunya peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana terdapat penambahan tutupan vegetasi sehingga nilai IKLH naik menjadi 71.06. Hal ini mencerminkan upaya pemulihan dan kebijakan yang berhasil diimplementasikan untuk meningkatkan							

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
kualitas lingkungan hidup. Namun, Pada tahun 2021, terjadi penurunan kembali pada nilai IKLH menjadi 66,39 yang disebabkan oleh adanya perubahan formulasi perhitungan pada IKLH dan IKL. Sedangkan pada tahun 2023, IKLH kembali menunjukkan adanya penurunan nilai menjadi 66,76 yang disebabkan turunnya Indeks Kualitas Air (IKA),							

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Selama tahun 2019-2023, sarana penanganan sampah terus meningkat. Pada tahun 2023 terdapat 27 unit alat pengangkut sampah yang bertambah 3 unit dari jumlah tahun 2022 yang berjumlah 24 unit. Sedangkan Rasio TPS per penduduk meningkat, dari 0,84% pada tahun 2022 menurun 1,26% pada tahun 2023. Peningkatan sarana pengangkutan sampah dan ketersediaan TPS tersebut sebanding		Kondisi IKLH Kabupaten Bondowoso perlu untuk ditingkatkan agar dapat mencapai target yang ditentukan. Kondisi IKA semakin meningkat karena kualitas air sungai yang membaik. IKU semakin meningkat karena sumber polusi dan RTH yang semakin membaik. Semakin tinggi dan meningkat jumlah penduduk maka jumlah timbulan sa	Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	perkembangan teknologi	1. Pancasila Belum Sepenuhnya Diimplementasikan 2. Tantangan Pembangunan Energi Utamanya Peningkatan Akses Energi Yang Belum Merata Dan Berkualitas Di Seluruh Wilayah, Masih Rendahnya Penggunaan Energi Terbarukan, Dan Masih Rendahnya Efisiensi Energi 3. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Masih Menjadi Tantangan Untuk Mencapai Ekonomi Hijau	1. Permasa lahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; 2. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit	Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
dengan peningkatan Persentase sampah tertangani pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, sampah tertangani mencapai 81,3% meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 60,69%.						Listrik terbarukan relatif rendah;	
Kawasan Ijen Geopark ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) oleh Dewan Eksekutif UNESCO ke-126 di Perancis pada tahun 2023. Sehingga Ijen Geopark menjadi		Belum optimal pemanfaatannya dikarenakan membutuhkan komitmen dan sinergi antar Pemerintah Daerah lain selaku juga pengelola Ijen Geopark.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi		Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Ijen Geopark;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
destinasi wisata yang tidak lagi tersegmentatif pada wisatawan lokal. Predikat ini berdampak terhadap peningkatan wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2024, total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bondowoso mencapai 611.361 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 10,13% dari tahun 2023. Secara berkelanjutan Ijen Geopark dapat berkontribusi lebih tinggi terhadap peningkatan							

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lapangan pekerjaan							
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari tahun 2021 ke tahun 2022, mengalami kenaikan dari 15,8 menjadi 17,42. Peningkatan ini mencerminkan potensi perbaikan signifikan dalam tingkat literasi masyarakat, menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan			Rendahnya kualitas SDM	peningkatan urbanisasi dunia;	1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah Masyarakat global yang semakin meningkat 2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Inovasi (IPTEKIN) 3. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih	Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif;	Rendahnya Kualitas SDM;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
literasi di komunitas tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan ini termasuk upaya pendidikan formal, program- program literasi masyarakat, atau kebijakan pemerintah yang mendukung.					Relatif Tertinggal 4. Kuantitas Dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai 5. Kualitas Pendidikan Yang Masih Rendah		
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		Berdasarkan kondisi wilayah, Kabupaten Bondowoso perlu mempertahankan status daya dukung air yang belum terlampaui dengan regulasi yang ada	Permasalahan tata kelola dan penegakan hukum	peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;	1. Regulasi Yang Berlebih (Hyper Regulating) Dan Kualitas Regulasi Rendah 2. Kelembagaan Instansi Publik Masih Dicirikan Dengan Struktur	Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur;	Tata Kelola Dan Penegakan Hukum;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 Ayat (3) yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021					Yang Terfragmentasi Dan Tidak Efektif 3. Proses Bisnis Dan Tata Kelola Pemerintahan Masih Terfragmentasi Dan Tidak Adaptif 4. Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta Secara Merata Di Seluruh K/L/D 5. ASN Berada Dalam Posisi Yang Rentan Terhadap Intervensi Politik 6. Transformasi Digital Di Tingkat Pemerintahan Masih Dihadapkan Oleh Berbagai		

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100%.					Tantangan Mendasar 7. Belum Meratanya Akses Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Masih Rendahnya Pemahaman Manfaat Jaminan Sosial Yang Tercermin Dari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Informal, Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Masih Rendah 8. Ditengah Kecepatan		

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
					Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur Dan Literasi Digital Masih Terbatas 9. Belum Meratanya Kualitas Pelayanan Publik 10. Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan Dan Demokratisasi Belum Optimal		
Struktur PDRB Kabupaten Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2018-2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan		Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2023 menunjukkan tren positif dengan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2010, Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan	1. Perkembangan demografi global; 2. konstelasi perdagangan global; 3. tata kelola keuangan global;	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata 2. Untuk Mencapai Tingkat Kemiskinan Menuju Nol Persen Pada Tahun 2045, Tantangan Yang	Masih terdapatnya beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia seperti (1) masih terbatasnya akses	Kemiskinan;

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB dengan kontribusi di atas 25 persen. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,41 persen dengan nilai PDRB sebesar 5,620 Trilyun, kontribusinya		mencapai 17,89%, namun kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 13,34% di tahun 2023.			Dihadapi Utamanya disebabkan Akses Dan Kualitas Yang Belum Merata Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Perlindungan Sosial 3. Prinsip Keterbukaan Pemerintahan Belum Sepenuhnya Terarusutamakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan 4. Sistem Hukum Belum Mampu Sepenuhnya Mewujudkan Kepastian Hukum 5. Demokrasi Masih Terbatas Pada Hal-Hal Prosedural	pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; (2) tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia; dan (4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja	

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 27,88 persen dengan nilai PDRB naik dibanding tahun 2018 menjadi sebesar 6,906 Trilyun.					6. Keamanan Nasional Menghadapi Kompleksitas Ancaman dan Gangguan Serta Meningkatnya Isu Geopolitik Kawasan Perbatasan 7.	dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.	
Selama tahun 2018-2023 struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, berturut-turut yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri		Berdasarkan kondisi wilayah, Kabupaten Bondowoso perlu mempertahankan status daya dukung pangan yang belum terlampaui agar dapat meningkatkan kesejahteraan wilayah	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	1. pertumbuhan kelas menengah (*middle class*); 2. geopolitik dan geoekonomi;	1. Deindustralisasi Dini Dan Produktivitas Sektor Pertanian Yang Masih Rendah 2. Rendahnya Kontribusi UMKM Dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi 3. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri.	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi; Terbatasnya Lapangan Kerja; Infrastruktur Belum Memadai; Pergeseran Nilai-Nilai

POTENSI DAERAH		PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi.					Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah Masih Relatif Terbatas 4. Rendahnya Peran Perkotaan di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5. Kebijakan Fiskal Dan Moneter Yang Pro-Pertumbuhan		Sosial Masyarakat.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso. Pernyataan visi Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2025-2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah:

"Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan"

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut:

Kabupaten Bondowoso "**Tangguh**" dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Bondowoso diharapkan berkembang menjadi daerah yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan baik global maupun nasional, dengan daya tahan dan kemandirian yang berpijak di atas pemanfaatan potensi sumber daya lokal mencakup sumber daya manusia maupun sumber daya alam, baik yang terlihat (infrastruktur fisik) maupun yang tidak terlihat (kebudayaan, nilai dan norma lokal).

Selanjutnya, Kabupaten Bondowoso "**Unggul**" dapat diartikan sebagai daerah yang terdepan dalam pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang transformatif untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam rangka merespon dinamika tantangan dan permasalahan perkembangan zaman. Kabupaten Bondowoso "**Berdaya Saing Global**" merupakan visi untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang memiliki kemampuan untuk mengangkat potensi lokal daerah sehingga mampu bersaing ditingkat global.

Sedangkan "**Berbudaya**" merupakan diksi untuk tetap menekankan arti penting nilai-nilai kearifan lokal sebagai jati diri pembangunan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Pokok visi selanjutnya yaitu "**Bingkai Iman dan Taqwa**" dapat diartikan sebagai nilai pondasi dari semua ikhtiar membangun Kabupaten Bondowoso berpijak di atas prinsip iman dan taqwa.

3.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan beberapa faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas langkah atau peta jalan (*road map*) yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah:

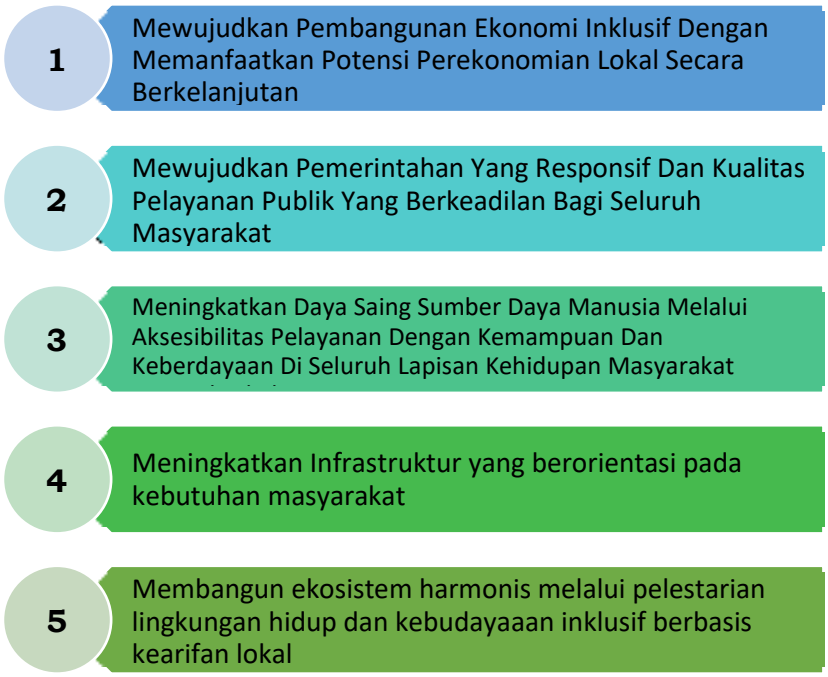

Gambar 3.1 Misi RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029

1. **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian Lokal secara Berkelanjutan;**

   Ekonomi inklusif merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang seringkali terpinggirkan dari pembangunan. Dalam konteks daerah, ekonomi inklusif berarti menciptakan kesempatan yang adil bagi semua, termasuk untuk kaum miskin, pekerja informal, perempuan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengandalkan potensi lokal daerah. Hal ini bertujuan untuk mendegradasi kesenjangan ekonomi dengan mewujudkan kesejahteraan yang merata.

   Untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga

berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Berfokus pada pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi lokal, pemanfaatan potensi pariwisata, ekonomi syariah dan ekonomi kreatif serta memaksimalkan investasi daerah diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan terhadap UMKM, misalnya, menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong ekonomi inklusif.

Salah satu potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bondowoso, yakni kawasan **Ijen Geopark**. Kawasan ini tidak hanya memiliki keunikan geologis seperti fenomena api biru (*blue fire*), kaldera terasam di dunia, dan aktivitas vulkanik yang eksotis semata, namun juga menyimpan nilai ekologis dan budaya yang tinggi. Keanekaragaman hayati, panorama alami, serta tradisi masyarakat lokal di sekitar kawasan Ijen menjadi daya tarik kuat dalam pemanfaatan bagi pengembangan sektor **geowisata** dan **ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal**.

Pemanfaatan dan pengembangan Ijen Geopark sebagai destinasi wisata berkelanjutan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pariwisata, kuliner, kerajinan, dan jasa pendukung lainnya. Selain itu, potensi ini juga dapat mendorong kolaborasi lintas sektor seperti pendidikan, pelestarian lingkungan, serta promosi budaya, yang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Ijen Geopark berperan strategis sebagai **motor pertumbuhan wilayah aglomerasi**, mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing daerah di tingkat nasional hingga global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan kawasan **Ijen Geopark** perlu

diarahkan secara terencana dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

2. **Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat;**

   Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan memiliki kualitas pelayanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Serta dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik.

3. **Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia melalui Aksesibilitas Pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di Seluruh Lapisan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan;**

   Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dilaksanakan dengan memastikan pelayanan dasar dapat diakses seluruh masyarakat, sehingga tercipta keberdayaan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tataran global secara berkelanjutan. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.

4. **Meningkatkan Infrastruktur yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat;**

   Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik daerah. Infrastruktur di daerah meliputi, sistem drainase atau pengendalian banjir, air minum, persampahan, sanitasi atau air limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur wilayah penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah dalam berbagai urusan. Seperti penyediaan infrastruktur pendukung potensi wisata unggulan, Kawasan Ijen Geopark, penyediaan infrastruktur pendukung urusan pertanian, dan berbagai urusan lainnya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan

dasar maupun kebutuhan untuk mendukung sosial ekonomi masyarakat.

5. **Membangun Ekosistem Harmonis melalui Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaaan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal;**

   Ekosistem yang harmonis adalah kondisi lingkungan dan suasana yang nyaman menandakan wilayah ini memiliki kualitas lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap melestarikan warisan budaya yang ada.

   Mewujudkan wilayah kabupaten yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat (hunian yang layak, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan, yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana, dengan mengedepankan pengolahan sampah serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas perkotaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.1.3 Tujuan

Berdasarkan pemahaman dasarnya, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta

Cita, dan tidak terbatas pada:

1) Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
2) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
3) Peningkatan produktivitas daerah;
4) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
5) Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7) Tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.4 Sasaran

Kemudian, sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Lebih jauh, kriteria penentuan target kinerja sasaran strategis tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek SMART, berikut:

1) *Specific*; sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2) *Measurable*; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3) *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
4) *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
5) *Time Bond*: waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

3.1.5 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Pencapaian indikator

kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang didukung oleh Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan lima tahun ke depan jelas dan terukur.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagai indikator tujuan yang terdiri dari Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Misi 1 Tujuan 1: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara Merata Berbasis Potensi Lokal

Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dengan memanfaatkan potensi perekonomian lokal secara berkelanjutan yang selanjutnya diarahkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak dari kesenjangan pendapatan serta kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan perkapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik kedepannya.

Dalam hal peningkatan perekonomian, Kabupaten Bondowoso juga memiliki potensi daerah sebagai bagian dari kawasan **Ijen Geopark** yang merupakan salah satu potensi strategis unggulan Kabupaten Bondowoso yang memiliki nilai geografis, ekologis, dan budaya yang tinggi. Terletak di kawasan pegunungan Ijen yang membentang di wilayah Bondowoso dan Banyuwangi, geopark ini dikenal secara global melalui fenomena **api biru (*blue fire*)**, satu dari sedikit fenomena serupa di dunia. Selain itu, kawasan ini juga memiliki **kaldera terbesar di Jawa Timur**, serta kekayaan hayati dan budaya lokal yang mendukung pengembangan kawasan sebagai destinasi geowisata kelas dunia.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan berkelanjutan, Ijen Geopark telah mendorong integrasi antara pelestarian lingkungan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal berbasis wisata alam dan budaya. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, serta memperluas pangsa pasar wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pembangunan Kabupaten Bondowoso selama lima tahun mendatang harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu: “Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal”. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 3 indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara merata, yang mengacu pada potensi lokal daerah dalam gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung ketimpangan pendapatan yaitu

Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini semakin mendekati satu (1). Upaya-upaya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut, yang kemudian dirumuskan dalam sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar berikut:

MISI 1	**Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian lokal Secara Berkelanjutan**							
TUJUAN	**Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal**							
INDIKATOR TUJUAN	**Persentase Pertumbuhan Ekonomi**			**Indeks GINI**		**Tingkat Kemiskinan**		
SASARAN	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)**	**Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Meningkatnya Investasi Daerah**	**Meningkatnya Wirausaha Baru**	**Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa**	**Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**	**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**	**Meningkatnya Ketahanan Pangan**
INDIKATOR SASARAN	**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan)**	**Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum**	**Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah**	**Rasio Kewirausahaan**	**Persentase Desa Mandiri**	**Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi**	**Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Indeks Ketahanan Pangan**

Gambar 3. 2 Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 2 Tujuan 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu prasyaratnya yaitu dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur Birokrasi yang menjadi tumpuan utama tata kelola pemerintahan memerlukan banyak sumber daya serta kemampuan yang mumpuni, maka proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Tujuan ini

adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya yang diformulasi untuk mendukung sasaran seperti yang disajikan, sebagai berikut:

MISI 2	**Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat**						
TUJUAN	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**						
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Reformasi Birokrasi**						
SASARAN	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah**					
INDIKATOR SASARAN	**Indeks Pelayanan Publik**	**NILAI SAKIP**	**Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)**	**Opini BPK**	**Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks SPBE**

Gambar 3. 3 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 3 Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan produktivitas daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kabupaten Bondowoso diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu "Meningkatnya Sumber Daya Manusia" dalam rentang waktu lima tahun mendatang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan, antara lain:

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat diukur menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH);
b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
c. Dimensi Standar Hidup Layak diukur menggunakan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan.

Efektivitas pencapaian tujuan tersebut dapat terwujud jika terdapat sinergitas yang baik dalam kinerja lintas OPD pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mendukung peningkatan IMM/IPM, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang ada. Seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

MISI 3	Meningkatkan Daya Saing SDM Melalui Aksesibilitas Pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di Seluruh Lapisan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan				
TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia				
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pembangunan Manusia				
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda		Meningkatnya Kualitas Keluarga
INDIKATOR SASARAN	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase Pemuda Berprestasi dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Gambar 3. 4 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 4 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia saja tetapi juga pada komitmen dan usaha pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan infrastruktur secara merata dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam satu daerah, serta antar daerah dalam wilayah regional.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. IKLI mengukur sejauh mana pemanfaatan dan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat, serta menilai kualitas output dan outcome dari penyediaan layanan infrastruktur.

Pada tingkat sasaran, ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan atau pembangunan infrastruktur yaitu Indeks Infrastruktur. Indeks Infrastruktur adalah pengukuran kondisi infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur jalan, perhubungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum dan sistem pengelolaan limbah (sanitasi).

Untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

MISI 4	**Meningkatkan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat**
TUJUAN	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**
SASARAN	**Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata**
INDIKATOR SASARAN	**Indeks Infrastruktur**

Gambar 3. 5 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 5 Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya

Proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso tentu mempertimbangkan bagaimana kualitas lingkungan sosial dan

budaya berjalan. Lingkungan sosial yang harmonis dan toleran terhadap keragaman diperlukan sebagai salah satu upaya dalam membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan inklusif berbasis kearifan lokal. Meningkatnya kualitas lingkungan sosial dan budaya dalam tataran masyarakat, akan diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI). Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan matriks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan dalam masyarakat. IHaI mengukur berbagai dimensi yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Misi 5 Tujuan 2: Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan daerah diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan tiga isu strategis Kabupaten Bondowoso yaitu kerawanan terhadap bencana, alih fungsi lahan dan infrastruktur yang belum memadai. Pada tahun 2023 rekomendasi alih fungsi lahan didominasi oleh kawasan permukiman namun jika ditinjau dari luas areanya, alih fungsi lahan di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh kawasan pertambangan, kawasan peternakan. Dalam penanggulangannya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui program-program konservasi, pengendalian, dan pemulihan lahan yang terdampak sehingga dapat menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah meningkatnya lingkungan hidup yang inklusif

dan berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh lintas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH menggabungkan berbagai parameter lingkungan seperti kualitas air, udara, tutupan lahan, dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi lingkungan. Sehingga IKLH pada dasarnya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Gambaran ini kemudian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan terkait perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

MISI 5	Membangun Ekosistem Harmonis Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal					
TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya			Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan		
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
SASARAN	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Toleransi Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
INDIKATOR SASARAN	Persentase Kekayaan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (TonCO2eq)	Indeks RIsiko Bencana (IRB)

Gambar 3. 6 Tujuan dan Sasaran Misi 5

Diperlukan indikasi operasional dalam penilaian kinerja untuk capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2025-2030 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030

VISI: MEWUJUDKAN BONDOWOSO TANGGUH, UNGGUL, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERBUDAYA DALAM BINGKAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan memanfaatkan potensi perekonomian lokal secara berkelanjutan	1.Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,41	4,82	4,94	5,00	5,05	5,11	
				Indeks Gini	0,355	0,347	0,317	0,311	0,305	0,294	
				Persentase Tingkat Kemiskinan	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	8,89	
			1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan)	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	2,37	4,86	3,12	3,15	3,18	3,21	
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	6,92	7,14	5,39	5,53	5,68	5,83	
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	7,45	7,54	7,22	7,31	7,40	7,51	
			1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	0,62-0,88	0,63-0,93	0,64-0,95	0,65-0,99	0,65-1,02	0,66-1,06	
			1.3 Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	3,91	4,02	4,13	4,24	4,35	4,46	
			1.4 Meningkatnya Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan	8,59	8,61	8,63	8,65	8,67	8,69	
			1.5 Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	1,44%	1,44%	1,91%	2,39%	2,87%	3,35%	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1.6 Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	42,71	42,94	43,20	43,47	43,73	44,00	
			1.7 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,89-3,38	3,88-3,21	3,87-3,03	3,79-2,90	3,75-2,82	3,71-2,77	
			1.8 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	75,68	75,69	75,70	75,71	75,72	75,73	
2	Mewujudkan Pemerintahan yang responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	70,00	71,00	79,10	79,20	79,30	79,04	
			2.1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	A 81,00	A 81,00	A 82,00	A 83,00	A 84,00	A 85,00	
				Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	90	92	93	94	95	96	
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	4,08	
				Indeks Profesionalitas ASN	77,15	77,25	77,45	77,750	78,00	78,25	
				Indeks SPBE/PemDi	4,16	1,84 -2,21	1,94-2,36	2,04-2,5	2,14-2,65	2,24-2,79	
			2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,88	3,90	3,92	4,00	4,05	N/A (*Not Available)*
3	Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan	3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,95	72.54	72.60	73.15	73.71	74.27	
			3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,15	7,15	7,29	7,44	7,58	8,31	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kemampuan dan Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.		3.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	73,51	73,76	74,02	74,27	74,52	74,77	
			3.3 Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Serta Pemberdayaan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,22	91,25	91,30	91,50	91,75	92,00	
				Persentase Pemuda Berprestasi dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan	55	58	60	63	65	68	
			3.4 Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,12	61,20	61,30	61,40	61,50	62,00	
4	Meningkatkan Infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	
			4.1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Indeks Infrastruktur	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	
5	Membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan	5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial Dan Budaya		Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	N/A	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	N/A (*Not Available)*

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	hidup dan kebudayaaan inklusif berbasis kearifan lokal		5.1 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Persentase Kekayaan Budaya Yang Dilestarikan	74,34	75,13	75,71	76,19	76,59	76,92	
			5.2 Meningkatnya Toleransi Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA	100	100	100	100	100	100	
			5.3 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	
		6. Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif Dan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,46	73,54	73,61	73,69	73,77	73,85	
			6.1 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	75,34	75,94	76,54	77,12	77,70	78,26	
			6.2 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	111,97-109,24	109,24-106,64	106,64-104,16	104,16-101,80	101,80-99,53	99,53-96,54	
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (ton CO2eq)	472. 114,78	481. 557,08	491. 188,22	501. 011,99	511. 032,22	521. 252,87	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029

VISI		
Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan		
Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan memanfaatkan potensi perekonomian lokal secara berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
T.1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal	S1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan)	ST.1. Mengembangkan agrobisnis perdesaan, revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi budidaya, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha, perluasan pertanian organik
		ST.2. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi pengolahan, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha pengolahan, diversifikasi produk unggulan daerah
		ST.3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan dengan

		pelaku/ pengusaha pemasaran, penguatan industri dan UMKM halal serta pencitraan produk dalam rangka promosi, revitalisasi pasar tradisional
	S1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ST.4. Mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi usaha lokal perdesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan citra kepariwisataan Bondowoso, promosi pemasaran dan pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan Ijen Geopark
	S1.3. Meningkatnya Investasi Daerah	ST.5. Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi
	S1.4. Meningkatnya Wirausaha Baru	ST.6. Meningkatkan kemudahan berwirausaha melalui fasilitasi akses terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, pengembangan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi pondok pesantren (santripreneur)

	S1.5. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa	ST.7. Menguatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Lokal
	S1.6. Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	ST.8. Mengoptimalkan perlindungan dan Jaminan Sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
	S1.7. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	ST.9. Meningkatkan kesempatan kerja, fasilitas akses informasi ketenagakerjaan dan produktifitas tenaga kerja
	S1.8. Meningkatnya Ketahanan Pangan	ST.10. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang berkeadilan bagi seluruh Masyarakat		
T.2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	S2.1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	ST.11. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
		ST.12. Meningkatkan kualitas pengelolaan APBD
		ST.13. Meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, Meningkatkan

		pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan program/kegiatan
		ST.14. Meningkatkan mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		ST.15. Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, dan pengembangan SPBE
	S2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	ST.16. Meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi, transparansi rekrutmen dalam jabatan, dan sumber daya aparatur yang profesional
Misi 3: Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.		
T.3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	S3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Literasi Masyarakat	ST.17. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan

	S3.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST.18. Meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan serta optimalisasi sarana dan dan prasarana yang sesuai standar
	S3.3. Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda	ST.19. Meningkatkan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan perlindungan anak, serta implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas
	S3.4. Meningkatnya Kualitas Keluarga	ST.20. Meningkatkan akses dan kualitas program-program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi keluarga; serta menjaga kesinambungan akses layanan pembangunan keluarga
Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat		
T.4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan memperhatikan prinsip	S4.1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap	ST.21. Meningkatkan kelancaran konektivitas antar kawasan yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur

pembangunan berkelanjutan	Infrastruktur Wilayah Secara Merata	pelayanan dasar, infrastruktur pendukung sosial ekonomi masyarakat
Misi 5: Membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaaan inklusif berbasis kearifan lokal		
T.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya	S5.1. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	ST.22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk pelestarian budaya dan kearifan lokal
	S5.2. Meningkatnya toleransi antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan	ST.23. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pancasila dan keberagaman
	S5.3 Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat	ST.24. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan ketertiban melalui peningkatan intensitas penegakan perda, koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi pos kamling di setiap desa
T.6. Meningkatnya lingkungan hidup yang inklusif dan berkelanjutan	S6.1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukima	ST.25. Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak pencemaran air, udara dan tanah, pengelolaan sampah berkelanjutan, penghijauan dan estetika kota, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

		ST.26. Meningkatkan Perbaikan kawasan permukiman kumuh dan pengendalian kawasan perumahan melalui kemudahan akses mendapatkan hunian layak yang terjangkau dan penyediaan prasarana sarana utilitas sesuai standar.
	S.6.2 Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	ST.27. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam memitigasi risiko bencana dan perubahan iklim

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
1	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian Lokal Secara Berkelanjutan	1. Peningkatan nilai tambah produksi Pertanian	
		2. Peningkatan nilai tambah produksi Industri Pengolahan	
		3. Peningkatan nilai Lebih Penyelenggaraan Perdagangan	
		4. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	
		5. Peningkatan nilai Lebih Pariwisata	
		6. Peningkatan akses dan fasilitasi kemudahan berwirausaha	
		7. Penguatan kemandirian masyarakat dan peningkatan pembangunan desa	
		8. Peningkatan perlindungan jaminan sosial dan pengoptimalan data, informasi	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
		serta akses pemberdayaan untuk PPKS	
		9. Penurunan tingkat pengangguran masyarakat	
		10. Peningkatan ketersediaan dan akses distribusi pangan dan produksi hasil pertanian	
2	Mewujudkan Pemerintahan yang responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang berkeadilan bagi seluruh Masyarakat	1. Peningkatan Nilai SAKIP	
		2. Peningkatan pencegahan korupsi pada area rawan korupsi	
		3. Mempertahankan nilai Opini WTP	
		4. Peningkatan Aksesibilitas Keuangan	
		5. Peningkatan kompetensi serta pengembangan karir ASN dan pelayanan kepegawaian	
		6. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyediaan jaringan internet yang memadai, pengembangan aplikasi layanan berbasis digital yang efektif, layanan informasi berkualitas, aman dan merata, serta didukung data statistik yang akurat.	
		7. Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan publik dan penguatan kebijakan daerah oleh pemerintah	
3	Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan Kemampuan dan	1. Peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		2. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
	Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.	3. Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	
		4. Peningkatan pembinaan, dan pembangunan kualitas keluarga	
4	Meningkatkan Infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan penyediaan infrastruktur wilayah meliputi prasarana sumberdaya air, drainase, jalan dan jembatan yang merata, menjangkau kawasan terpencil, sentra-sentra produksi dan kawasan strategis, termasuk akses kawasan Ijen Geopark. 2. Peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan dan sarana transportasi umum yang layak, perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik, pengembangan terminal sesuai kebutuhan, serta perlengkapan jalan yang memadai dalam menjamin keselamatan lalulintas. 3. Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dasar masyarakat meliputi pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah.	
5	Membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaaan	1. Peningkatan pelestarian dan pengembangan warisan budaya melalui pelestarian tata nilai budaya, seni, kepurbakalaan, pengetahuan, tradisi juga pengembangan sejarah dan bahasa.	
		2. Peningkatan edukasi Pancasila bagi masyarakat dan peran	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
	inklusif berbasis kearifan lokal	lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya kerukunan dan ketentraman masyarakat.	
		3. Peningkatan sinergitas lembaga dan organisasi sosial yang bergerak di bidang ketertiban umum dan intensitas penegakkan peraturan	
		4. Peningkatan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan yang sejalan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan RTH taman, optimalisasi penanganan dan pengurangan sampah berbasis gerakan masyarakat, serta konservasi lingkungan diantarnya pelestarian sumberdaya alam Ijen Geopark.	
		5. Peningkatan pemenuhan akses hunian layak dan pemerataan pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, penyediaan prasarana sarana utilitas yang layak serta percepatan penanganan kawasan kumuh.	
		6. Peningkatan kapasitas dalam mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi, serta resiliensi dalam penang- gulangan bencana.	

3.2.3 Penahapan Pembangunan Daerah

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur, Pelestarian Budaya, dan Harmonisasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Peningkatan Pemerintahan yang Responsif dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Ketangguhan Daerah, Kualitas Layanan Publik, serta Pembangunan Berbasis Keberlanjutan

Penyajian lokus pembangunan disajikan wilayah pengembangan serta disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya menyelaraskan antara janji politis maupun program unggulan Bupati ke dalam program prioritas, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih.

Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada intinya program prioritas merupakan substansi dasar dari janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan maupun ke dalam program atau kegiatan. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Program unggulan Bupati tersebar dalam berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Program Unggulan dalam Bidang Pemerintahan dan Layanan Publik

Program-program dalam bidang pemerintahan dan layanan publik terfokus pada birokrasi dan tatanan pemerintahan daerah, serta layanan publik kepada masyarakat. Harapannya melalui program unggulan yang ada dalam bidang ini, dapat mengoptimalkan kinerja pemerintahan

daerah, meningkatkan pastisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program dalam bidang ini yang pertama yaitu Birokrasi Merdeka, merupakan sebuah program seleksi pejabat daerah secara terbuka dan transparan melalui mekanisme seleksi meritokratis yang adil dan akuntabel. Selanjutnya, terdapat program Jaminan Kontrak PPPK yakni program jaminan perpanjangan kontrak bagi tenaga pppk secara maksimal. Kemudian terdapat program Pengangkatan PPPK yaitu program pengangkatan Tenaga Honorer, K2 (PTT/GTT, Teknis) menjadi ASN (PPPK) sesuai peraturan perundang- undangan. Selanjutnya program Aplikasi Digital KANDA yang berfokus untuk transparansi Kinerja Pemerintah Melalui aplikasi digital KANDA (Kami Melayani, Anda Mengawasi).

Kemudian terdapat program Khidmat Terhormat yaitu sebuah program penghargaan untuk pelayanan terbaik bagi organisasi/unit pelayanan publik. Program selanjutnya yaitu Fleksibilitas Dan Pendapatan Perangkat Desa, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan perangkat desa dalam mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan masyarakat. Selanjutnya yaitu Dansus Dekraf Program Dana Khusus untuk Desa Kreatif yang merupakan aresiasi dana khusus untuk pembangunan desa, tematik sesuai prioritas masing-masing desa. Kemudian terdapat program Jam Kerja Pak Desa yaitu pemberian Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perangkat dan Kader Desa. Terdapat juga program SATU-PADU (Satu Pintu Layanan Terpadu) yang merupakan sebuah layanan sistem satu pintu, untuk pelayanan mudah terpadu. Program terakhir dalam bidang pemerintahan dan layanan publik yaitu E-LANDUK (E-Layanan Kependudukan). Program ini ditujukan untuk memberi kemudahan mengurus administrasi kependudukan melalui aplikasi digital.

Selain itu, untuk mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi telah dikembangkan inovasi SATPOL PP SIAP LAYANI ADUAN WARGA

(SATPOL PP SIAGA) sebagai solusi berbasis digital yang mempermudah warga dalam menyampaikan laporan secara real-time. Pengaduan melalui portal website resmi Satpol PP dan media sosial Instagram. Laporan yang masuk akan langsung diteruskan melalui layanan WhatsApp untuk ditindaklanjuti.

b. Program Unggulan dalam Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Program unggulan dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dirancang untuk mendorong produktivitas serta menanggulangi permasalahan yang selama ini telah menjadi hambatan dalam bidang bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Program unggulan yang pertama yaitu Pupuk Gratis Untuk Tanaman Tembakau, program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Selanjutnya untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi petani, program unggulan ASTANI hadir sebagai asuransi untuk petani yang rawan gagal panen. Selanjutnya guna mendukung prasarana pertanian, terdapat program 1 Desa 1 Klinik Pertanian. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan petani melalui 1 Desa 1 Petugas Pendamping Lapangan (PPL) dalam rangka peningkatan kualitas produksi, hasil panen, dan kelangkaan pupuk. Kemudian terdapat program Pasar Digital Aplikasi Pasar Digital untuk memperluas pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya terdapat program Kerabat (Koperasi Bagi Buruh Tani), yaitu program pembentukan Koperasi Buruh Tani untuk meminimalisir gerakan pinjaman online (pinjol). Kemudian yang terakhir yaitu program Belati, merupakan sebuah program Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani.

c. Program Unggulan dalam Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan

Program unggulan dalam bidang Pendidikan, Olahraga, dan Kesehatan dirancang untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang

tersebut sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait pendidikan, olahraga dan kesehatan. Program-program dalam bidang ini meliputi Si Zona, merupakan program redistribusi penempatan guru dan tenaga kesehatan sesuai zona domisili masing-masing. Selanjutnya, terdapat program WFH Guru Di Hari Libur yang merupakan program kerja dari rumah, untuk guru sehat berkinerja optimal. Program selanjutnya yaitu 10.000 Beasiswa Pintar Beasiswa Pendidikan untuk putra-putri daerah. Selain itu, untuk mengapresiasi dan mendorong prestasi keagamaan terdapat program unggulan Bisarah yaitu bantuan insentif untuk para Hafidz Al Quran. Selanjutnya terdapat program Beasiswa Bondowoso Unggul Beasiswa untuk mahasiswa Bondowoso berprestasi. Program ini diharapkan mampu memicu prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bondowoso. Kemudian terdapat program Senyum Cemerlang (Sekolah Nyaman untuk Murid Cemerlang) program ini merupakan sebuah program dalam bentuk pendampingan pendidikan maksimal untuk peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mengoptimalkan inklusivitas akses pendidikan. Kemudian, terdapat program Batara (Bantuan Tetap untuk Guru Agama) sebagai bentuk keberpihakan kepada guru ngaji, pesantren dan madrasah, serta Sekolah Minggu. Program lain yang dirancang untuk kesejahteraan guru yakni program Buguru, merupakan program peningkatan honor untuk Guru PAUD, TK. Dalam bidang pendidikan, terdapat juga program unggulan berupa bantuan untuk lembaga RA.

Selain itu, untuk mendorong pemberdayaan pemuda dan meningkatkan kualitas pesantren terdapat program Hidmah Pesantren (Hibah Amanah untuk Pesantren). Program ini berupa hibah bagi pesantren, untuk Bondowoso digdaya. Program selanjutnya yaitu Jamin Segar (Jaminan kesehatan Gratis). Program ini mendorong akses kesehatan bagi seluruh masyarakat, melalui jaminan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Ber-KTP Bondowoso. Program selanjutnya

yaitu Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu, program ini merupakan program yang ditujukan guna mendorong kesejahteraan kader untuk memperkuat pendampingan generasi unggul bebas stunting. Sebagai tindak lanjut terhadap PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM diperluas dengan terbitnya Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), menjadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu yang adaptif dan responsif, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur ringan, perumahan, ketertiban, dan bantuan sosial (enam bidang SPM). Transformasi ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Kegiatan Posyandu selain didukung oleh Pemerintahan desa/ Kelurahan dapat didukung juga oleh perangkat daerah pengampu SPM. Selanjutnya pada bidang kesehatan, program unggul lainnya yaitu Rumah Sakit Wilayah Perbatasan. Program ini direalisasikan dengan pembangunan rumah sakit pemerintah wilayah utara-selatan (batas kota) untuk mendukung layanan kesehatan maksimal.

Selanjutnya, untuk mendukung bidang keolahragaan terdapat program Bondowoso Sport Center. Program ini berupa revitalisasi ruang/gedung/gelanggang olah raga sebagai pusat aktivitas yang memuat aspek olah raga (sarana, pembinaan dan promosi atlet), edukasi, serta pariwisata buatan/*manmade tourism* dan kuliner. Selain pada pembangunan prasarana, terdapat program Beasiswa Atlet Berprestasi. Program ini memberikan beasiswa bagi atlet berprestasi untuk mendorong tumbuhnya generasi unggul sebagai pondasi bagi Bondowoso BERKAH (Berkualitas, Akseleratif, Holistik). Kemudian terdapat program Makan Bergizi Gratis Untuk Ibu Hamil & Menyusui, program ini memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui untuk menurunkan angka stunting, AKI dan AKA secara signifikan.

d. Program Unggulan dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, program unggulan diarahkan kepada dampak yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memanfaatkan potensi lokal. Program unggulan pertama yaitu Hilirisasi Produk Lokal. Program ini memberikan fasilitasi hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas. Selain itu terdapat program Kreanial (Rumah Kreatif untuk Milenial), program ini ditujukan untuk memberi ruang pada kreativitas milenial dalam inovasi pembangunan. Pada bidang ekonomi, terdapat program Bondowoso Republik Kopi Reborn yaitu sebuah program sebagai wujud upaya membangkitkan perekonomian sektor kopi di Kabupaten Bondowoso. Selain itu dari segi UMKM dan Pedagang Kecil, juga turut menjadi perhatian melalui pemberdayaan UMKM dan Pedagang Kecil. Program selanjutnya masih dalam semangat pemberdayaan, terdapat program fasilitasi PKL. Sehingga PKL dapat berdaya, masyarakat sasaran program tersebut meningkat kesejahteraannya dan dalam outcome jangka panjang PKL diharapkan dapat bermitra dalam dunia industri. Guna mewujudkan pembangunan daerah yang bersinergi dengan berbagai elemen, maka terdapat program Bondowoso Pusat Tridarma. Program ini diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nasional dan internasional.

e. Program Unggulan dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam bidang yang lebih spesifik yaitu pariwisata dan Ekonomi Kreatif program unggulan dirancang hadir sebagai pemecah permasalahan dan katalisator produktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Program unggulan pertama yaitu 1000 kelompok usaha baru untuk Bondowoso Tangguh diharapkan program ini mampu mendorong usaha-usaha baru di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya terdapat program Ampuh (Angkatan Muda Pekerja Tangguh). Program ini terkait pemberian *Short Course*, Pendidikan Vokasi dan Uji Kompetensi untuk

angkatan kerja. Optimalisasi BLK & Lembaga Sertifikasi. Harapannya program tersebut, dapat meningkatkan produktivitas pemuda, yang pada gilirannya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka. Selanjutnya terdapat program Rebranding Pariwisata Bondowoso, salah satunya dengan penguatan dan pengadaan berbagai event sebagai bagian penting dari pariwisata Nasional dan Internasional. Selanjutnya untuk melengkapi pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat program unggulan Le Olle Bondowoso yaitu fasilitasi pusat oleh-oleh di destinasi wisata unggulan berbasis produk UMKM lokal. Kemudian, terdapat program Travel Pattern Bondowoso, yaitu program yang berbasis pengembangan perjalanan wisata nyaman melalui pariwisata terencana di Kabupaten Bondowoso. Kemudian, terdapat program Digisata (Digitalisasi Situs Pariwisata). Prorgam ini bertujuan untuk optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui Digitalisasi Situs Pariwisata dan Kebudayaan (Digital Site Map).

f. Program Unggulan dalam Bidang Sosial Budaya

Pada program unggulan bidang sosial budaya berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan serta pemajuan budaya berbasis kearifan lokal. Program pertama yaitu Permata (Perempuan Mandiri dan Tangguh), program ini merupakan program pemberdayaan perempuan untuk menciptakan keluarga Unggul Mandiri. Selanjutnya, terdapat program yang berfokus pada Anak yaitu program Kasih Bunda. Program ini mengawal anak sehat bahagia untuk Bondowoso berdaya. Kemudian, terdapat program Insentif untuk Modin yaitu sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat berdaya. Selain itu terdapat program kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal, untuk mendukung pelestarian budaya dalam kurikulum sekolah.

g. Program Unggulan dalam Bidang Infrastruktur

Pada program unggulan bidang Infrastruktur berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur guna mendukung penyediaan

infrastruktur yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Dalam bidang ini terdapat dua program unggulan yaitu Rantas (Infrastruktur Jalan Tuntas), merupakan sebuah program untuk mewujudkan komitmen dalam menuntaskan perbaikan jalan rusak di tahun pertama. Selanjutnya terdapat program Bondowoso Menyala, yang berfokus pada penerangan jalan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sehingga jalanan dapat terakses penerangan yang merata sampai ke desa.

Program prioritas Daerah Kabupaten Bondowoso diselaraskan dan sinkron dengan program prioritas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bondowoso. Sehingga kedepan, Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menyusun RIPJPID guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang selaras antar dokumen.

Penentuan program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029, selain memperhatikan keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, juga memperhatikan program unggulan yang merupakan janji politik pasangan kepala daerah terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan program unggulan tersebut disesuaikan dengan kewenangan daerah serta nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada Perangkat Daerah pelaksana, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5. Integrasi Janji Politik ke dalam Program Nomenklatur.

Pemenuhan keseluruhan program prioritas yang selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, serta penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pemenuhan program unggulan dari skala makro hingga mikro, disajikan pada Tabel. 3.6. Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Integrasi Janji Politik Ke Dalam Program Nomenklatur

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A.	**BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK**										
1.	Birokrasi Merdeka	Seleksi pejabat daerah secara terbuka dan transparan melalui mekanisme seleksi meritokratis yang adil dan akuntabel	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya kualitas penilaian kerja ASN Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	850,000,000	415,000,000	400,000,000	555,000,000	645,000,000	755,000,000
2.	Jaminan Kontrak PPPK	Jaminan perpanjangan kontrak bagi tenaga PPPK secara maksimal	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	200,000,000	315,000,000	540,000,000	650,000,000	850,000,000	850,000,000
3.	Pengangkatan PPPK	Pengangkatan Tenaga Honorer, K2 (PTT/GTT, Teknis) menjadi ASN (PPPK) sesuai peraturan perundang-undangan	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						
4.	Aplikasi Digital KANDA	Transparansi Kinerja Pemerintah Melalui aplikasi digital KANDA (Kami Melayani, Anda Mengawasi)	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
5.	Khidmat Terhormat	Award untuk pelayanan terbaik bagi organisasi/ unit pelayanan publik	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	1,512,205,400	2,226,985,300	3,226,985,300	3,826,985,300	3,826,985,300	3,976,985,300
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	392,236,000
			Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					terkait riset dan inovasi di daerah						
6.	Fleksibilitas Dan Pendapatan Perangkat Desa	Meningkatkan pendapatan perangkat desa dalam mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000
7.	Dansus Dekraf	Program Dana Khusus untuk Desa Kreatif; Apresiasi dana khusus untuk pembangunan desa, tematik sesuai prioritas masing-masing desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	392,236,000
8.	Jam Kerja Pak Desa	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perangkat dan Kader Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000
9.	SATU-PADU (Satu Pintu Layanan Terpadu)	Sistem satu pintu, untuk pelayanan mudah terpadu	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	192,527,000	113,026,600	191,900,000	223,000,000	240,800,000	276,400,000
			6.02 Keuangan	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dihapus, Bapenda tidak berhubungan langsung						
10.	E-LANDUK (E-Layanan Kependudukan)	Kemudahan mengurus Administrasi Kependudukan melalui aplikasi digital	Komunikasi dan Informatika	2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	117,000,000	617,000,000	167,000,000	617,000,000	167,000,000	1,117,000,000
B.	**Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan**										
1.	1. Pupuk Gratis Untuk Tanaman Tembakau	Mendorong peningkatan kesejahteraan petani tembakau	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	2,015,000,000	2,015,000,000	2,015,000,000	2,015,000,000	2,015,000,000	2,015,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	2. ASTANI	Asuransi untuk Petani Rawan Gagal Panen	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000
3.	1 Desa 1 Klinik Pertanian	Pendampingan petani melalui 1 Desa 1 Petugas Pendamping Lapangan (PPL) dalam rangka peningkatan kualitas produksi, hasil panen, dan kelangkaan pupuk	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	11,900,000	11,900,000	11,900,000	11,900,000	11,900,000	11,900,000
4.	Pasar Digital	Aplikasi Pasar Digital untuk memperluas pemasaran hasil pertanian dan Perkebunan	Pertanian	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	13,810,500	53,518,400	53,518,400	53,518,400	53,518,400	53,518,400
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	0	0	0	0	0	0
			Perdagangan	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	13,762,400	13,762,400	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000
5.	Kerabat (Koperasi Bagi Buruh Tani)	Pembentukan Koperasi Buruh Tani untuk meminimalisir gerakan pinjaman online (pinjol)	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	*	*	*	*	*	*
			KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	13,762,400	13,762,400	13,762,400	13,762,400	13,762,400	13,762,400
6.	Belati	Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1,570,638,000	1,570,638,000	1,570,638,000	1,570,638,000	1,570,638,000	1,570,638,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1,679,423,100	2,724,138,300	3,454,651,600	3,204,651,600	3,799,651,600	3,520,190,900
C.	**BIDANG PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN**										
1.	Si Zona	Redistribusi Penempatan Guru dan Tenaga Kesehatan sesuai zona domisili	Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	63,875,450	55,226,800	65,226,800	75,226,800	85,226,800	95,226,800
2.	WFH Guru Di Hari Libur	Program Kerja dari Rumah, untuk guru sehat berkinerja optimal	Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	*	*	*	*	*	*
3.	10.000 Beasiswa Pintar	Beasiswa Pendidikan untuk putra-putri daerah	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	**	**	**	**	**	**
4.	Bisarah	Bantuan Insentif untuk Para Hafidh Alquran	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000
5.	Beasiswa Bondowoso Unggul	Beasiswa untuk mahasiswa Bondowoso berprestasi	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1,164,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000
6.	Senyum Cemerlang (Sekolah Nyaman untuk Murid Cemerlang)	Pendampingan Pendidikan Maksimal untuk Peserta didik berkebutuhan khusus	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	338,593,000	166,371,400	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
			Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
7.	Batara (Bantuan Tetap untuk Guru Agama)	Sebagai bentuk keberpihakan kepada guru ngaji, pesantren dan madrasah, serta Sekolah Minggu	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	10,819,500,000	10,819,500,000	10,819,500,000	10,819,500,000	10,819,500,000	10,819,500,000
8.	Buguru	Peningkatan Honor untuk Guru PAUD dan TK	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1,066,800,000	14,167,200,000	14,167,200,000	14,167,200,000	14,167,200,000	14,167,200,000
9.	Bantuan Untuk Lembaga RA		Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	4,188,800,000	4,188,800,000	4,188,800,000	4,188,800,000	4,188,800,000	4,188,800,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10.	Hidmah Pesantren (Hibah Amanah untuk Pesantren)	Program hibah pesantren, untuk Bondowoso digdaya.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyrakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
			Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kualitas hidup dan perilaku hidup sehat warga pesantren dan lingkungan sekitarnya	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
			Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	47,817,500	50,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
11.	Jamin Segar (Jaminan kesehatan Gratis)	Jaminan Kesehatan Gratis untuk Seluruh Masyarakat Ber-KTP Bondowoso.	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	60,415,210,800	76,454,733,600	93,237,933,600	113,287,053,600	133,993,893,600	144,744,213,600
12.	Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu	Peningkatan kesejahteraan kader untuk memperkuat pendampingan generasi unggul bebas stunting	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Adminstrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000
13.	Rumah Sakit Wilayah Perbatasan	Pembangunan rumah sakit pemerintah wilayah utara-selatan (batas kota) untuk Layanan Kesehatan Maksimal	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	0	300,000,000	0	3,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
			Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	0	250,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
14.	Bondowoso Sport Center	Revitalisasi ruang/gedung/gelanggang olah raga sebagai pusat aktivitas yang memuat aspek olah raga (sarana, pembinaan dan promosi atlet), edukasi, serta pariwisata buatan/manmade tourism dan kuliner	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	0	300,000,000	0	2,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	0	300,000,000	0	0	0	0
15.	Beasiswa Atlet Berprestasi	Pemberian Beasiswa bagi atlet berprestasi untuk mendorong tumbuhnya generasi unggul sebagai pondasi bagi Bondowoso BERKAH (Berkualitas, Akseleratif, Holistik)	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	125,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000
16.	Makan Bergizi Gratis Untuk Ibu Hamil & Menyusui	Pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui untuk menurunkan angka stunting, AKI dan AKA secara signifikan	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningfkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1,000,393,000	1,637,010,000	1,637,010,000	1,637,010,000	1,637,010,000	1,637,010,000
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000
D.	**BIDANG EKONOMI**										
1.	Hilirisasi Produk Lokal	Fasilitasi hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas	Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	2,081,200	31,287,500	31,287,500	31,287,500	31,287,500	31,287,500
			Perindustrian	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	-	60,000,000	60,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	2,455,872,060	4,613,756,060	5,329,169,800	6,053,090,800	6,137,590,800	6,337,590,800
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	14,999,830	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	Kreanial (Rumah Kreatif untuk Milenial)	Ruang Kreativitas Milenial untuk Inovasi Pembangunan	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	125,600,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	14,999,830.00	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
			Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	0	100,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	150,000,000
3.	BRK Reborn	Ikhtiar membangkitkan perekonomian sektor kopi	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	125,600,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000
			Perindustrian	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	50,635,000	60,000,000	60,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	409,275,400	409,275,400	412,275,400	412,275,400	412,275,400	412,275,400
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	14,999,830	15,000,000	150,000,000	250,000,000	250,000,000	270,000,000
			Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	60,000,000	150,000,000	175,000,000	180,000,000	200,000,000	200,000,000
4.	Pemberdayaan UMKM dan Pedagang Kecil	Peningkatan kemampuan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	160,000,000	508,204,500	604,354,500	669,704,500	688,204,500	716,654,500
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	1,806,943,400	2,166,855,300	2,263,005,300	2,378,355,300	2,416,855,300	2,455,305,300
			Perdagangan	Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	66,478,900	120,000,000	150,000,000	180,000,000	180,000,000	200,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreati	0	100,000,000	130,000,000	140,000,000	150,000,000	175,000,000
5.	Fasilitasi PKL	PKL Berdaya, Masyarakat Sejahtera, PKL menjadi mitra dunia industri	Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan distribusi perdagangan yang efisien	15,000,000	16,231,000	25,000,000	21,581,000	30,081,000	28,531,000
6.	Bondowoso Pusat Tridarma	Menjadikan Bondowoso sebagai pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional dan Internasional	Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	*	*	*	*	*	*
			Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	*	*	*	*	*	*
E.	**BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**										
1.	1000 Kelompok Usaha Baru Untuk Bondowoso Tangguh		Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	2,081,200	31,287,500	31,287,500	31,287,500	31,287,500	31,287,500
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	2,046,596,660	4,204,480,660	4,916,894,400	5,640,815,400	5,725,315,400	5,925,315,400
			Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	306,250,300	169,071,700	211,800,000	322,900,000	322,900,000	322,900,000
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	200,000,000	225,000,000	250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000
2.	Ampuh (Angkatan Muda Pekerja Tangguh)	Short Course, Pendidikan Vokasi dan Uji Kompetensi untuk angkatan kerja. Optimalisasi BLK & Lembaga Sertifikasi	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,411,100,000	1,411,100,000	1,411,100,000
			Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	702,500,000	118,972,700	257,900,000	257,900,000	285,700,000	341,200,000
			Perindustrian	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	0	30,000,000	126,150,000	304,500,000	280,000,000	318,450,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Perindustrian	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	0	31,325,025	31,325,025	61,325,025	76,325,025	91,325,025
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3.	Rebranding Pariwisata Bondowoso	Event sebagai bagian penting dari pariwisata nasional & internasional	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	125,600,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000	110,740,000
			Perdagangan	Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	792,224,300	795,000,000	850,000,000	950,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
			Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	100,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000
4.	Le Olle Bondowoso	Fasilitasi Pusat Oleh-oleh di destinasi wisata unggulan berbasis produk UMKM lokal	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyediaan pusat oleh-oleh produk unggulan	227,459,000	0	0	0	0	0
			Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	0	150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
5.	*Travel Pattern* Bondowoso	Perjalanan wisata nyaman melalui pariwisata terencana	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	100,000,000	170,000,000	195,000,000	30,000,000	220,000,000	270,000,000
6.	Digisata (Digitalisasi Situs Pariwisata)	Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui Digitalisasi Situs Pariwisata dan Kebudayaan (Digital Site Map)	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	0	75,000,000	100,000,000	125,000,000	150,000,000	150,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
F.	**BIDANG SOSIAL BUDAYA**										
1.	Permata (Perempuan Mandiri dan Tangguh)	Pemberdayaan perempuan untuk menciptakan keluarga Unggul Mandiri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	80,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	45,000,000	45,000,000
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	0	0	100,000,000	0	100,000,000	29,460,700
			Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
2.	Kasih Bunda	Kawal Anak Sehat Bahagia untuk Bondowoso Berdaya	Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	139,464,900	139,464,900	169,564,900	244,464,900	249,464,900	289,464,900
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya Pasar Pangan Aman	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemenuhan hak anak	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

NO.	BIDANG	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	PAGU					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyrakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
3.	Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal		Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	*	*	*	*	*	*
4.	Insentif Untuk Modin	Peningkatan kualitas layanan untuk Masyarakat berdaya				**	**	**	**	**	**
G.	**BIDANG INFRASTRUKTUR**										
1.	Rantas (Infrastruktur Jalan Tuntas)	Komitmen menuntaskan perbaikan jalan rusak	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan jalan	Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	67,578,022,385	32,283,667,900	41,853,667,900	46,853,667,900	47,353,667,900	89,353,667,900
2.	Bondowoso Menyala	Jalanan Terang Merata Sampai ke Desa	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	17,836,112,500	17,693,362,500	18,106,262,500	19,256,261,900	19,486,112,500	20,111,112,500
			Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	851,173,987	681,936,615	1,681,936,615	5,181,936,615	5,681,936,615	7,081,936,615

Keterangan : * Dapat dilaksanakan tanpa memerlukan dukungan anggaran/sudah terintegrasi dengan outcome program yang ada
**Under Discussion

Tabel 3. 6 Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan memanfaatkan potensi perekonomian lokal secara berkelanjutan	1.Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal			Persentase Pertumbuhan Ekonomi		
					Indeks Gini		
					Persentase Tingkat Kemiskinan		
			1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan)		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian		
				1.1.1 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1.1.1.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					1.1.1.2 Peningkatan Tanaman Hortikultura		
					1.1.1.3 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
				1.1.2 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1.1.2.1 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				1.1.3 Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1.1.3.1 Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	3. Program Penyuluhan Pertanian	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan		
				1.1.4 Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1.1.4.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan		
				1.1.5 Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	1.1.5.1 Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	5. Program Pengembangan Ekspor	
			1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum		
				1.2.1 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1.2.1.1 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang .Non Berbintang)	6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				1.2.2 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	1.2.2.1 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	7. Program Pemasaran Pariwisata	
				1.2.3 Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	1.2.3.1 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				1.2.4 Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1.2.4.1 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			1.3 Meningkatnya Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah		
				1.3.1 Meningkatnya kemudahan berinvestasi	1.3.1 Realisasi Total terhadap Target Investasi	10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				1.3.2 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1.3.2 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	11. Program Pelayanan Penanaman Modal	
			1.4 Meningkatnya Wirausaha Baru		Rasio Kewirausahaan		
				1.4.1 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1.4.1.1 Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				1.4.2 Meningkatnya daya saing UMKM	1.4.2.1 Pertumbuhan Wirausaha	13. Program Pengembangan UMKM	
			1.5 Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Mandiri		
				1.5.1 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.5.1.1 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	14. Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				1.5.2 Meningkatnya kualitas penataan desa	1.5.2.1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa	15. Program Penataan Desa	
				1.5.3 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1.5.3.1 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	16. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
					1.5.3.2 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			1.6 Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				1.6.1 Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.6.1.1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	17. Program Rehabilitasi Sosial	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					1.6.1.2. Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					1.6.1.3. Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					1.6.1.4. Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				1.6.2 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.6.2.1 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	18. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				1.6.3 Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1.6.3.1 Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	19. Program Kesejahteraan Rakyat	
				1.6.4 Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.6.4.1 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	20. Program Pemberdayaan Sosial	
			1.7 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
				1.7.1 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1.7.1.1 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				1.7.2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1.7.2.1 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	22. Program Penempatan Tenaga Kerja	
			1.8 Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan		
				1.8.1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1.8.1.1 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				1.8.2 Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	1.8.2.1 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	24. Program Penanganan Kerawanan Pangan	
2	Mewujudkan Pemerintahan yang responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi		
			2.1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP		
				2.1.1 Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	2.1.1.1 Indeks kematangan organisasi	25. Program Penataan Organisasi	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					2.1.1.2 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
					2.1.1.3 Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik		
				2.1.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.2.1 Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	26. Program Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					2.1.2.2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
					Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)		
				2.1.3 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	2.1.3.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	27. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
					2.1.3.2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
					Opini BPK		
				2.1.4 Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	2.1.4.1 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	28. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					2.1.4.2 Persentase Penurunan SILPA		
				2.1.5 Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	2.15.1. Persentase laporan keuangan tepat waktu	28. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				2.1.6 Meningkatnya tata kelola anggaran	2.1.6.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	28. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					2.1.6.2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
				2.1.7 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	2.1.7.1 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	29. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
				2.1.8 Meningkatnya tata kelola aset daerah	2.1.8.1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	30. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				2.1.9 Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	2.1.9.1 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis digital	31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Indeks Profesionalitas ASN		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				2.1.10 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	2.1.10.1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	34. Program Kepegawaian Daerah	
				2.1.11 Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2.1.11.1 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
				2.1.12 Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	2.1.12.1 Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
				2.1.13 Meningkatnya kualitas penilaian kerja ASN	2.1.13.1 Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		
				2.1.14 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader manajerial dan fungsional	2.1.14.1 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	35. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
					2.1.14.2 Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		
					2.1.14.3 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		
					2.1.14.4 Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan kompetensi teknis		
					Indeks SPBE		
				2.1.12 Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	2.1.12.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	36. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
					2.1.12.2 Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
					2.1.12.3 Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
			2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		
				2.2.1 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.2.1.1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	37. Program Pendaftaran Penduduk	
					2.2.1.2 Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				2.2.2 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.2.2.1 Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	38. Program Pencatatan Sipil	
					2.2.2.2 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun		
					2.2.2.3 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		
					2.2.2.4 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan		
3	Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.	3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Literasi Masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah		
				3.1.1 Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	3.1.1.1 Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	39. Program Pengembangan Kurikulum	
				3.1.2 Meningkatnya Partisipasi Anak usia Sekolah	3.1.2.1 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	40. Program Pengelolaan Pendidikan	
					3.1.2. 2 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
					3.1.2.3 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
					3.1.2.4 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
					3.1.2.5 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		
					3.1.2.6 Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		
					3.1.2.7 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
					3.1.2.8 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					3.1.2.8 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		
					3.1.2.9 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		
				3.1.3 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	3.1.3.1 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	41. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				3.1.4 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	3.1.4.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	42. Program Pembinaan Perpustakaan	
			3.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup		
				3.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	3.2.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	43. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					3.2.1.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
					3.2.1.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
					3.2.1.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
					3.2.1.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
					3.2.1.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
					3.2.1.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar		
					3.2.1.8 Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
					3.2.1.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar		
					3.2.1.10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					3.2.1.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					3.2.1.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
					3.2.1.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
					3.2.1.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
				3.2.2 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	3.2.2.1 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	44. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				3.2.3 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.2.3.1 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	45. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			3.3 Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Serta Pemberdayaan Pemuda		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
				3.3.1 Meningkatnya kualitas PUG dan pemberdayaan perempuan	3.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	46. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
					3.3.1.2 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		
				3.3.2 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	3.3.2.1 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	47. Program Perlindungan Perempuan	
				3.3.3 Meningkatnya pencegahan dan perlindungan terhadap anak	3.3.3.1 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	48. Program Perlindungan Khusus Anak	
					Persentase Pemuda Berprestasi dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan		
				3.3.4 Meningkatnya daya saing kepemudaan	3.3.4.1 Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	49. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
					3.3.4.2 Rasio Wirausaha Pemuda		
				3.3.5 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	50. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
			3.4 Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				3.4.1 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	3.4.1.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	51. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
					3.4.1.2 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)		
				3.4.2 Terpenuhinya hak anak	3.4.2.1 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	52. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				3.4.3 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	3.4.3.1 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	53. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	
4	Meningkatkan Infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		
			4.1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata		Indeks Infrastruktur		
				4.1.1 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	54. Program Penyelenggaraan Jalan	
				4.1.2 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	4.1.2.1 Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	55. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
				4.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	4.1.3.1 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	56. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				4.1.4 Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	4.1.4.1 Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	57. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				4.1.5 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	4.1.5.1 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				4.1.6 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	4.1.6.1 Rasio konektivitas kabupaten/kota	59. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					4.1.6.2 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
					4.1.6.2 Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan		
					4.1.6.3 V/C ratio di jalan Provinsi		
5	Membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaaan inklusif berbasis kearifan lokal	5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial Dan Budaya			Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)		
			5.1 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		Persentase Kekayaan Budaya Yang Dilestarikan		
				5.1.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	5.1.1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	60. Program Pengembangan Kebudayaan	
			5.2 Meningkatnya Toleransi Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan		Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA		
				5.2.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.2.1.1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	61. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
				5.2.2 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	5.2.1.1 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	62. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				5.2.3 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	5.2.3.1 Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	63. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			5.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		
				5.3.1 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	5.3.1.1 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					5.3.1.2 Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya		
				5.3.2 Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	5.3.2.1 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		6. Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif Dan Berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			6.1 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan		
				6.1.1 Meningkatnya tata kelola persampahan	6.1.1.1 Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	65. Program Pengelolaan Persampahan	
				6.1.2 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	6.1.2.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	66. Program Pengembangan Perumahan	
				6.1.3 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	6.1.3.1 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	67. Program Kawasan Permukiman	
				6.1.4 Meningkatnya prosentas rumah layak huni	6.1.4.1 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	68. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				6.1.5 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	6.1.5.1 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	69. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			6.2 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB)		
				6.2.1 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6.2.1.1 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	70. Program Penanggulangan Bencana	
					6.2.1.2 Persentase penanganan pra bencana		
				6.2.2 Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	6.2.2.1 Persentase penanganan tanggap bencana darurat	70.Program Penanggulangan Bencana	
				6.2.3 Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	6.2.3.1 Persentase Penanganan Pasca Bencana	70. Program Penanggulangan Bencana	
					Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)		
				6.2.4 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6.2.4.1 Persentase Penurunan emisi GRK Kumulatif	71. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				6.2.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	6.2.5.1 Persentase RTH	72. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Keseluruhan rencana program pembangunan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, beserta indikator, target pencapaiannya, serta pagu indikatif tahun 2026-2030 disajikan secara lengkap. Program yang dilaksanakan perangkat daerah pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu merupakan dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034.

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif setiap urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				685.404.601.224		713.687.021.531		706.706.932.824		709.357.132.824		731.844.569.124	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				527.601.816.000		552.984.236.307		543.154.147.600		543.404.347.600		560.091.783.900	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	527.601.816.000	100	552.984.236.307	100	543.154.147.600	100	543.404.347.600	100	560.091.783.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				153.190.109.452		155.590.109.452		158.290.109.452		160.590.109.452		166.240.109.452	
Meningkatnya usia anak partisipasi sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	97,37	97,85	153.190.109.452	97,85	155.590.109.452	98,05	158.290.109.452	98,35	160.590.109.452	98,35	166.240.109.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,22	98,44		98,74		98,94		99,04		99,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	66,14	66,96		67,37		67,78		68,6		68,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	77,46	73,14		73,89		74,64		76,14		76,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	58.10-58.30	63.10-63.30		65.60-65.70		68.10-68.30		70.60-70.80		73.10-73.30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	54,55	60,35		63,25		66,15		69,05		71,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,06	68,26		69,36		70,46		71,56		72,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,35	63,35		64,85		66,35		67,85		69,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				93.307.600		293.307.600		343.307.600		393.307.600		443.307.600	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	93.307.600	100	293.307.600	100	343.307.600	100	393.307.600	100	443.307.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				4.477.577.700		4.677.577.700		4.677.577.700		4.677.577.700		4.727.577.700	
Meningkatnya Mutu dan Ditribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	49,59	49,95	4.477.577.700	50,43	4.677.577.700	50,92	4.677.577.700	51,37	4.677.577.700	52	4.727.577.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				41.790.472		141.790.472		241.790.472		291.790.472		341.790.472	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	49,59	100	41.790.472	100	141.790.472	100	241.790.472	100	291.790.472	100	341.790.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				488.909.525.542		524.095.527.792		536.605.855.425		555.872.937.436		582.624.254.855	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				333.587.377.014		359.922.561.744		369.305.082.804		383.125.986.492		402.182.063.569	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	67.860.675.714	100	71.833.183.814	100	69.955.189.714	100	70.155.189.714	100	73.285.180.014	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	206.459.554.400	100	218.128.241.600	100	226.069.032.800	100	235.503.676.550	100	247.151.025.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Maesan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	3.590.175.900	100	4.119.059.417	100	4.367.946.931	100	4.674.627.203	100	4.989.107.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	65		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Grujugan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	3.329.198.200	100	3.858.419.856	100	4.088.621.061	100	4.369.884.869	100	4.658.636.676	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Tamanan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	3.587.432.200	100	4.117.047.213	100	4.369.958.188	100	4.685.325.651	100	5.008.181.113	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	65		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Jambesari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.834.639.200	100	3.327.976.228	100	3.532.921.987	100	3.789.016.625	100	4.051.039.263	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	65		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Pujer	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	3.283.269.100	100	3.774.029.346	100	3.875.999.029	100	4.028.953.552	100	4.181.908.075	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	67		67		67		67		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Tlogosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.836.498.000	100	3.936.487.295	100	4.009.439.581	100	4.118.868.011	100	4.228.296.441	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Sukosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.324.969.900	100	1.516.851.117	100	1.550.769.649	100	1.601.647.447	100	1.652.525.245	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Sumber Wringin	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.859.590.500	100	3.127.122.756	100	3.208.238.126	100	3.329.911.181	100	3.451.584.236	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Tapen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.189.637.600	100	2.588.811.016	100	2.634.837.017	100	2.703.876.019	100	2.772.915.021	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Wonosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	3.062.607.600	100	3.533.609.156	100	3.611.878.300	100	3.729.282.016	100	3.846.685.732	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Tenggarang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.450.674.200	100	2.702.586.770	100	2.852.506.490	100	3.025.594.068	100	3.204.687.647	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Nangkaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.125.859.500	100	2.136.062.992	100	2.254.432.818	100	2.391.037.556	100	2.532.412.294	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Kotakulon	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.197.914.200	100	1.216.973.884	100	1.287.020.744	100	1.370.266.033	100	1.456.031.322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Kademangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.129.185.000	100	1.191.072.636	100	1.259.377.996	100	1.340.425.036	100	1.423.968.075	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Curahdami	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.732.606.500	100	3.179.882.684	100	3.375.871.091	100	3.620.713.702	100	3.871.328.313	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Binakal	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.330.006.600	100	1.684.747.850	100	1.779.407.663	100	1.889.807.382	100	2.003.897.102	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Pakem	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.814.220.800	100	2.061.081.798	100	2.185.635.085	100	2.339.120.015	100	2.496.504.945	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Wringin	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.726.845.400	100	3.040.678.552	100	3.212.980.948	100	3.415.391.542	100	3.624.354.135	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Tegalampel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.147.125.800	100	2.760.424.694	100	2.939.496.406	100	3.171.023.975	100	3.406.871.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Klabang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.406.307.700	100	1.720.261.378	100	1.833.467.411	100	1.981.046.460	100	2.131.199.509	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Taman Krocok	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.106.326.900	100	1.398.941.260	100	1.486.373.456	100	1.596.734.751	100	1.709.514.046	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Sempol	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.359.997.500	100	1.564.613.809	100	1.657.399.357	100	1.770.357.680	100	1.886.316.003	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Botolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.993.276.300	100	2.334.224.615	100	2.478.866.842	100	2.660.223.183	100	2.845.713.526	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Prajekan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	1.732.603.200	100	2.247.321.418	100	2.388.367.890	100	2.566.826.596	100	2.749.185.303	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Puskesmas Cermee	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	N/A	100	2.029.124.300	100	3.735.793.790	100	3.951.991.424	100	4.210.104.875	100	4.475.940.326	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	N/A	60		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Labkesda	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	3.087.054.800	100	3.087.054.800	100	3.087.054.800	100	3.087.054.800	100	3.087.054.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				151.123.282.678		158.117.810.098		160.539.012.072		162.528.255.563		170.216.214.330	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	76,55	80,5	130.448.807.678	90	133.559.611.348	90	135.052.903.388	90	136.067.841.450	90	142.732.779.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	97,52	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	74,46	75		80		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	95,58	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	75,35	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0,2	22		25		28		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	0	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	86		89		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	73		76		78		81		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,08	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	62,56	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	10	12		13		14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	82,38	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	75	77		79		81		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	8	11		12		13		14		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	24,71	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	0	78		79		80		81		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	3.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Maesan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	846.989.000	100	889.338.450	100	933.805.372	100	980.495.641	100	1.029.520.423	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Grujugan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	899.162.000	100	944.120.100	100	991.326.105	100	1.040.892.410	100	1.092.937.030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Tamanan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	783.570.000	100	822.748.500	100	863.885.925	100	907.080.221	100	952.434.232	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Jambesari	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	811.406.000	100	851.976.300	100	894.575.115	100	939.303.870	100	986.269.064	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	821.786.000	100	862.875.300	100	906.019.065	100	951.320.018	100	998.886.019	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
dan Masyarakat Puskesmas Pujer													Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Tlogosari	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	825.844.000	100	867.136.200	100	910.493.010	100	956.017.661	100	1.003.818.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Sukosari	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	592.470.000	100	622.093.500	100	653.198.175	100	685.858.083	100	720.150.987	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Sumber Wringin	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	858.525.000	100	901.451.250	100	946.523.812	100	993.850.003	100	1.043.542.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Tapen	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	719.392.000	100	755.361.600	100	793.129.680	100	832.786.164	100	874.425.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Wonosari	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	805.736.000	100	846.022.800	100	888.323.940	100	932.740.137	100	979.377.143	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Tenggarang	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	814.498.000	100	855.222.900	100	897.984.045	100	942.883.247	100	990.027.409	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Nangkaan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	605.796.000	100	636.085.800	100	667.890.090	100	701.284.594	100	736.348.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Kotakulon	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	567.490.000	100	595.864.500	100	625.657.725	100	656.940.611	100	689.787.641	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Kademangan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	500.973.000	100	526.021.650	100	552.322.732	100	579.938.869	100	608.935.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Curahdami	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	734.134.000	100	770.840.700	100	809.382.735	100	849.851.871	100	892.344.465	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Binakal	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	539.809.000	100	566.799.450	100	595.139.422	100	624.896.393	100	656.141.213	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Pakem	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	558.892.000	100	586.836.600	100	616.178.430	100	646.987.351	100	679.336.719	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Wringin	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	767.690.000	100	806.074.500	100	846.378.225	100	888.697.136	100	933.131.993	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Tegalampel	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	628.517.000	100	659.942.850	100	692.939.992	100	727.586.992	100	763.966.341	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Klabang	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	675.991.000	100	709.790.550	100	745.280.077	100	782.544.081	100	821.671.285	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Taman Krocok	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	590.686.000	100	620.220.300	100	651.231.315	100	683.792.880	100	717.982.524	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Sempol	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	623.076.000	100	654.229.800	100	686.941.290	100	721.288.354	100	757.352.772	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Botolinggo	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	602.894.000	100	633.038.700	100	664.690.635	100	697.925.166	100	732.821.425	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Prajekan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	539.121.000	100	566.077.050	100	594.380.902	100	624.099.947	100	655.304.945	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Puskesmas Cermee	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	N/A	100	960.028.000	100	1.008.029.400	100	1.058.430.870	100	1.111.352.413	100	1.166.920.034	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.169.931.000		4.669.931.000		5.169.931.000		8.169.931.000		8.169.931.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	80	92	3.169.931.000	92	4.669.931.000	96	5.169.931.000	96	8.169.931.000	96	8.169.931.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,9	3		3,1		3,1		3,2		3,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				466.030.850		716.030.850		716.030.850		966.030.850		966.030.850	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan. dan makanan minuman	Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	466.030.850	100	716.030.850	100	716.030.850	100	966.030.850	100	966.030.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	76		77		78		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)	0	20		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%)	0	84		84,5		85		85,5		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	26		28		30		32		34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				562.904.000		669.194.100		875.798.699		1.082.733.531		1.090.015.106	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	437.102.000	38	537.102.000	39	737.102.000	40	937.102.000	41	937.102.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Maesan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	5.397.000	38	5.666.850	39	5.950.193	40	6.247.702	41	6.560.087	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Grujugan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	8.315.000	38	8.730.750	39	9.167.287	40	9.625.651	41	10.106.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tamanan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.420.000	38	4.641.000	39	4.873.050	40	5.116.702	41	5.372.537	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Jambesari	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	6.265.000	38	6.578.250	39	6.907.162	40	7.252.520	41	7.615.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pujer	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	8.785.000	38	9.224.250	39	9.685.462	40	10.169.735	41	10.678.222	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tlogosari	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	6.517.000	38	6.842.850	39	7.184.993	40	7.544.242	41	7.921.454	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Sukosari	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	2.679.000	38	2.812.950	39	2.953.597	40	3.101.277	41	3.256.341	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Sumber Wringin	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	6.797.000	38	7.136.850	39	7.493.692	40	7.868.377	41	8.261.795	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tapen	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.108.000	38	4.313.400	39	4.529.070	40	4.755.524	41	4.993.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Wonosari	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	2.695.000	38	2.829.750	39	2.971.237	40	3.119.799	41	3.275.789	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tenggarang	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	6.663.000	38	6.996.150	39	7.345.957	40	7.713.255	41	8.098.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Nangkaan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.845.000	38	5.087.250	39	5.341.612	40	5.608.693	41	5.889.127	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Kotakulon	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.884.000	38	5.128.200	39	5.384.610	40	5.653.840	41	5.936.532	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Kademangan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	6.124.000	38	6.430.200	39	6.751.710	40	7.089.295	41	7.443.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Curahdami	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	2.297.000	38	2.411.850	39	2.532.442	40	2.659.064	41	2.792.017	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Binakal	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	5.519.000	38	5.794.950	39	6.084.697	40	6.388.932	41	6.708.378	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pakem	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.076.000	38	4.279.800	39	4.493.790	40	4.718.479	41	4.954.403	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Wringin	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	3.781.000	38	3.970.050	39	4.168.552	40	4.376.980	41	4.595.829	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tegalampel	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	3.401.000	38	3.571.050	39	3.749.602	40	3.937.082	41	4.133.936	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Klabang	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	7.228.000	38	7.589.400	39	7.968.870	40	8.367.313	41	8.785.679	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Taman Krocok	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	2.805.000	38	2.945.250	39	3.092.512	40	3.247.138	41	3.409.495	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Sempol	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	3.744.000	38	3.931.200	39	4.127.760	40	4.334.148	41	4.550.855	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Botolinggo	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	4.446.000	38	4.668.300	39	4.901.715	40	5.146.800	41	5.404.140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Prajekan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	2.745.000	38	2.882.250	39	3.026.362	40	3.177.680	41	3.336.564	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Cermee	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	7.266.000	38	7.629.300	39	8.010.765	40	8.411.303	41	8.831.868	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				107.643.307.997		123.304.443.597		134.200.599.097		184.950.599.097		197.740.339.797	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.973.215.300		14.334.350.900		13.980.506.400		13.980.506.400		14.570.247.100	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	13.973.215.300	100	14.334.350.900	100	13.980.506.400	100	13.980.506.400	100	14.570.247.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				30.579.821.429		33.079.821.429		34.079.821.429		40.079.821.429		40.079.821.429	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.546	1.000	30.579.821.429	1.000	33.079.821.429	1.000	34.079.821.429	1.000	40.079.821.429	1.000	40.079.821.429	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3.050.000.000		3.050.000.000		4.050.000.000		4.550.000.000		5.550.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	40,75	41,98	3.050.000.000	42,58	3.050.000.000	43,16	4.050.000.000	43,72	4.550.000.000	45	5.550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.117.603.368		3.117.603.368		5.117.603.368		5.917.603.368		5.617.603.368	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	84,61	85,46	3.117.603.368	85,89	3.117.603.368	86,31	5.117.603.368	86,73	5.917.603.368	87,15	5.617.603.368	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.012.000.000		3.812.000.000		4.262.000.000		4.512.000.000		5.012.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	7,88	8,37	3.012.000.000	8,62	3.812.000.000	8,86	4.262.000.000	9,11	4.512.000.000	9,35	5.012.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				3.925.000.000		4.425.000.000		5.925.000.000		19.925.000.000		20.925.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	89,46	90,36	3.925.000.000	90,8	4.425.000.000	91,25	5.925.000.000	91,7	19.925.000.000	92,14	20.925.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				48.995.667.900		59.995.667.900		64.995.667.900		93.995.667.900		103.995.667.900	
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	64,97	66,47	48.995.667.900	67,22	59.995.667.900	67,97	64.995.667.900	68,72	93.995.667.900	69,47	103.995.667.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	60	70	500.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				490.000.000		490.000.000		790.000.000		990.000.000		990.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah (Hari)	15	15	490.000.000	15	490.000.000	15	790.000.000	15	990.000.000	15	990.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.167.909.551		21.405.843.751		21.658.057.951		23.408.057.951		26.071.034.451	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.228.163.800		4.316.098.000		4.218.312.200		4.218.312.200		4.381.288.700	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	4.228.163.800	100	4.316.098.000	100	4.218.312.200	100	4.218.312.200	100	4.381.288.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				431.500.000		431.500.000		431.500.000		681.500.000		681.500.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	80	100	431.500.000	100	431.500.000	100	431.500.000	100	681.500.000	100	681.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.898.442.625		4.398.442.625		4.398.442.625		4.398.442.625		4.898.442.625	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	10,65	14,6	3.898.442.625	21,9	4.398.442.625	29,2	4.398.442.625	36,5	4.398.442.625	43,8	4.898.442.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				3.338.295.413		4.738.295.413		4.838.295.413		5.338.295.413		6.338.295.413	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas rumah layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	2,42	1,5	3.338.295.413	1,52	4.738.295.413	1,54	4.838.295.413	1,57	5.338.295.413	1,59	6.338.295.413	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				6.271.507.713		7.521.507.713		7.771.507.713		8.771.507.713		9.771.507.713	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	6.271.507.713	100	7.521.507.713	100	7.771.507.713	100	8.771.507.713	100	9.771.507.713	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.785.384.205		18.344.108.305		19.985.497.005		25.985.497.005		22.103.488.505	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.797.876.950		10.506.601.050		10.797.989.750		10.797.989.750		11.165.981.250	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	6.767.437.000	100	7.156.145.600	100	7.145.901.500	100	7.145.901.500	100	7.412.975.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	3.030.439.950	100	3.350.455.450	100	3.652.088.250	100	3.652.088.250	100	3.753.005.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.956.007.605		4.456.007.605		4.856.007.605		10.156.007.605		5.656.007.605	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	3.956.007.605	100	4.456.007.605	100	4.856.007.605	100	10.156.007.605	100	5.656.007.605	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.756.039.900		2.756.039.900		3.256.039.900		3.756.039.900		4.006.039.900	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	1.229.227.930	100	1.929.227.930	100	2.279.227.930	100	2.629.227.930	100	2.804.227.930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	351.207.980	100	551.207.980	100	651.207.980	100	751.207.980	100	801.207.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	175.603.990	100	275.603.990	100	325.603.990	100	375.603.990	100	400.603.990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				275.459.750		625.459.750		1.075.459.750		1.275.459.750		1.275.459.750	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	275.459.750	100	625.459.750	100	1.075.459.750	100	1.275.459.750	100	1.275.459.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0,28	10,5		10,5		10,5		10,5		10,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.805.126.825		18.947.396.325		19.733.469.325		19.733.469.325		20.521.681.125	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.490.726.825		3.922.996.325		4.084.069.325		4.084.069.325		4.382.281.125	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	3.490.726.825	100	3.922.996.325	100	4.084.069.325	100	4.084.069.325	100	4.382.281.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				41.150.000		191.150.000		391.150.000		391.150.000		741.150.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	70	75	41.150.000	75	191.150.000	75	391.150.000	75	391.150.000	75	741.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				5.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		30.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	5.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.138.000.000		1.588.000.000		1.983.000.000		1.983.000.000		2.088.000.000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	31,03	32,06	1.138.000.000	32,06	1.588.000.000	32,06	1.983.000.000	32,06	1.983.000.000	32,06	2.088.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	31,12	32,17		32,17		32,17		32,17		32,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	31,03	32,01		32,01		32,01		32,01		32,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	31,02	32,01		32,01		32,01		32,01		32,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				13.047.000.000		13.097.000.000		13.097.000.000		13.097.000.000		13.097.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	2.694	2.700	13.047.000.000	2.700	13.097.000.000	2.700	13.097.000.000	2.700	13.097.000.000	2.700	13.097.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				78.000.000		103.000.000		113.000.000		113.000.000		128.000.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	78.000.000	100	103.000.000	100	113.000.000	100	113.000.000	100	128.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				5.250.000		35.250.000		50.250.000		50.250.000		55.250.000	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	5.250.000	100	35.250.000	100	50.250.000	100	50.250.000	100	55.250.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.279.498.700		3.696.200.000		4.029.500.000		4.112.900.000		4.278.425.600	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.448.972.700		1.587.900.000		1.699.000.000		1.726.800.000		1.782.300.000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0,08	0,51	1.448.972.700	0,54	1.587.900.000	0,57	1.699.000.000	0,59	1.726.800.000	0,59	1.782.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				487.947.200		626.800.000		737.900.000		765.700.000		820.225.600	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	1.714	1.735	487.947.200	1.758	626.800.000	1.783	737.900.000	1.810	765.700.000	1.839	820.225.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.342.578.800		1.481.500.000		1.592.600.000		1.620.400.000		1.675.900.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	11,56	11,82	1.342.578.800	11,99	1.481.500.000	12,15	1.592.600.000	12,29	1.620.400.000	12,42	1.675.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				450.660.000		575.660.000		635.660.000		635.660.000		700.660.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				5.000.000		15.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	45,55	46	5.000.000	46	15.000.000	46	30.000.000	46	30.000.000	46	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	62,11	62,25		62,48		62,98		63,48		63,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				215.400.000		240.400.000		265.400.000		265.400.000		290.400.000	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	215.400.000	100	240.400.000	100	265.400.000	100	265.400.000	100	290.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				5.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	50	50	5.000.000	50	20.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				10.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Koprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	56,49	56,6	10.000.000	56,7	35.000.000	56,8	45.000.000	56,9	45.000.000	57	60.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				215.260.000		265.260.000		265.260.000		265.260.000		265.260.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	215.260.000	100	265.260.000	100	265.260.000	100	265.260.000	100	265.260.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				197.360.000		881.026.000		1.467.361.000		1.560.692.000		1.904.028.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				71.000.000		293.222.000		487.667.000		515.444.000		626.556.000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	20	20	71.000.000	20	293.222.000	20	487.667.000	20	515.444.000	20	626.556.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				39.360.000		321.582.000		456.027.000		483.804.000		594.916.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	37,6	38	39.360.000	38,2	321.582.000	38,4	456.027.000	38,6	483.804.000	38,8	594.916.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				70.000.000		239.222.000		486.667.000		514.444.000		625.556.000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18,26	18,21	70.000.000	18,17	239.222.000	18,12	486.667.000	18,08	514.444.000	18,04	625.556.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				17.000.000		27.000.000		37.000.000		47.000.000		57.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	17.000.000	100	27.000.000	100	37.000.000	100	47.000.000	100	57.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				110.000.000		110.000.000		310.000.000		360.000.000		360.000.000	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				110.000.000		110.000.000		310.000.000		360.000.000		360.000.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase)	65,3	71,23	110.000.000	72,6	110.000.000	73,97	310.000.000	75,34	360.000.000	76,71	360.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.251.859.912		17.469.179.012		22.669.029.112		23.169.029.112		27.169.279.012	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.084.272.100		12.551.591.200		12.251.441.300		12.251.441.300		12.751.691.200	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	12.084.272.100	100	12.551.591.200	100	12.251.441.300	100	12.251.441.300	100	12.751.691.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		375.000.000	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	200.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	375.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		540.000.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK Komulatif (%)	10,15	2	340.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000	2	540.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				681.936.615		1.681.936.615		5.181.936.615		5.681.936.615		7.081.936.615	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	70,38	70,48	681.936.615	70,68	1.681.936.615	70,88	5.181.936.615	71,08	5.681.936.615	71,29	7.081.936.615	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	75	50.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	95	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	20	30	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	25.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.820.651.197		2.320.651.197		4.320.651.197		4.320.651.197		5.820.651.197	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	21,22	21,34	1.820.651.197	21,54	2.320.651.197	21,74	4.320.651.197	21,94	4.320.651.197	22,14	5.820.651.197	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	30,36	49,58		51,41		53,24		55,07		56,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.076.719.450		4.454.215.950		5.160.820.250		6.410.820.250		6.233.146.350	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.830.719.450		2.958.215.950		3.064.820.250		3.264.820.250		3.737.146.350	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.830.719.450	100	2.958.215.950	100	3.064.820.250	100	3.264.820.250	100	3.737.146.350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				55.000.000		305.000.000		805.000.000		905.000.000		755.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	99,99	99,99	55.000.000	99,99	305.000.000	99,99	805.000.000	99,99	905.000.000	99,99	755.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	41,45	46,1		46,25		46,4		46,55		46,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,7	5,54		6,62		7,65		8,68		9,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				67.000.000		517.000.000		1.067.000.000		1.567.000.000		567.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	67.000.000	100	517.000.000	100	1.067.000.000	100	1.567.000.000	100	567.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	97,61	99		99		99		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				117.000.000		617.000.000		167.000.000		617.000.000		1.117.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (%)	57,69	65,38	117.000.000	73,08	617.000.000	80,77	167.000.000	88,46	617.000.000	100	1.117.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				7.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2	2	7.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.637.598.475		13.199.837.975		14.385.756.775		15.135.756.775		15.742.558.675	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.814.135.275		3.076.374.775		3.162.293.575		3.162.293.575		3.269.095.475	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.814.135.275	100	3.076.374.775	100	3.162.293.575	100	3.162.293.575	100	3.269.095.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				115.000.000		215.000.000		515.000.000		615.000.000		615.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	31,1	9,56	115.000.000	10,52	215.000.000	11	515.000.000	9,56	615.000.000	10,05	615.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				30.000.000		130.000.000		530.000.000		580.000.000		680.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	95,65	36,43	30.000.000	55,04	130.000.000	72,87	530.000.000	81,4	580.000.000	100	680.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.468.811.600		4.818.811.600		4.968.811.600		5.068.811.600		5.218.811.600	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	52	2,66	4.468.811.600	2,59	4.818.811.600	2,53	4.968.811.600	2,47	5.068.811.600	2,41	5.218.811.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				4.209.651.600		4.959.651.600		5.209.651.600		5.709.651.600		5.959.651.600	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%)	100	100	4.209.651.600	100	4.959.651.600	100	5.209.651.600	100	5.709.651.600	100	5.959.651.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	N/A	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	N/A	25,76		27,25		30,68		32,23		34,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.921.165.000		13.236.165.000		13.551.165.000		13.551.165.000		13.846.165.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				456.600.000		481.600.000		506.600.000		506.600.000		531.600.000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. (Orang)	24,22	24,22	456.600.000	24,22	481.600.000	24,22	506.600.000	24,22	506.600.000	24,22	531.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	60,3	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				8.384.765.000		8.424.765.000		8.464.765.000		8.464.765.000		8.484.765.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	81,04	81,3	8.384.765.000	81,3	8.424.765.000	81,3	8.464.765.000	81,3	8.464.765.000	81,3	8.484.765.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	68	69		69		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2,94	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	14,6	14		13,5		13		12,5		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	97,2	98		98,4		98,6		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.079.800.000		4.329.800.000		4.579.800.000		4.579.800.000		4.829.800.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59,8	60	4.079.800.000	61	4.329.800.000	61	4.579.800.000	62	4.579.800.000	62	4.829.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81,5	82		83		83		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	10,27	11		11		11		11		11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.333.159.300		26.584.462.300		28.497.005.600		29.247.005.600		30.892.767.100	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.295.692.700		5.296.995.700		5.209.539.000		5.209.539.000		5.355.300.500	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	5.295.692.700	100	5.296.995.700	100	5.209.539.000	100	5.209.539.000	100	5.355.300.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
													Bidang Perhubungan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				20.037.466.600		21.287.466.600		23.287.466.600		24.037.466.600		25.537.466.600	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan)	0	1	20.037.466.600	1	21.287.466.600	1	23.287.466.600	1	24.037.466.600	1	25.537.466.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	15,6	16,15		16,61		17,08		17,54		18,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	V/C ratio di jalan Provinsi (Nilai)	0.20:0.44	0.20:0.44		0.20:0.44		0.20:0.44		0.20:0.44		0.20:0.44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.121.888.900		7.955.538.500		9.335.210.100		9.335.210.100		9.952.424.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.923.755.900		4.107.405.500		4.037.077.100		4.037.077.100		4.154.291.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	3.923.755.900	100	4.107.405.500	100	4.037.077.100	100	4.037.077.100	100	4.154.291.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				601.140.000		901.140.000		1.601.140.000		1.601.140.000		1.601.140.000	
Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	N/A	82	601.140.000	85	901.140.000	87	1.601.140.000	90	1.601.140.000	94	1.601.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.596.993.000		2.946.993.000		3.696.993.000		3.696.993.000		4.196.993.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	6,67	14,47	2.596.993.000	19,74	2.946.993.000	26,32	3.696.993.000	30,26	3.696.993.000	34,21	4.196.993.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	98,67	97,37		97,37		97,37		97,37		97,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				10.395.320.300		10.679.038.700		11.048.904.000		11.259.689.000		11.598.229.500	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.010.665.400		6.894.783.800		6.788.249.100		6.830.034.100		6.999.774.600	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	7.010.665.400	100	6.894.783.800	100	6.788.249.100	100	6.830.034.100	100	6.999.774.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				36.910.000		51.910.000		66.910.000		81.910.000		96.910.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	46,32	46,59	36.910.000	46,81	51.910.000	47,08	66.910.000	47,34	81.910.000	47,55	96.910.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16,41	16,56		16,58		16,62		16,63		16,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				265.343.300		361.493.300		476.843.300		515.343.300		553.793.300	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	26,67	26,69	265.343.300	26,75	361.493.300	26,85	476.843.300	26,92	515.343.300	26,98	553.793.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				162.341.800		258.491.800		373.841.800		412.341.800		450.791.800	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	13,58	13,6	162.341.800	13,63	258.491.800	13,68	373.841.800	13,71	412.341.800	13,74	450.791.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				753.204.500		849.354.500		964.704.500		1.003.204.500		1.041.654.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	87,4	87,69	753.204.500	88,78	849.354.500	89,36	964.704.500	90,16	1.003.204.500	91,07	1.041.654.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.166.855.300		2.263.005.300		2.378.355.300		2.416.855.300		2.455.305.300	
Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2,25	2,38	2.166.855.300	2,41	2.263.005.300	2,43	2.378.355.300	2,44	2.416.855.300	2,45	2.455.305.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.491.426.900		5.602.942.000		6.189.910.800		6.356.510.800		6.823.870.500	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.932.029.500		4.349.116.400		4.380.485.200		4.408.210.800		4.596.770.500	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	3.932.029.500	100	4.349.116.400	100	4.380.485.200	100	4.408.210.800	100	4.596.770.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				194.262.600		333.125.600		444.300.000		472.000.000		527.600.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	194.262.600	100	333.125.600	100	444.300.000	100	472.000.000	100	527.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				71.477.700		210.400.000		321.525.600		349.300.000		405.800.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	84,02	3,28	71.477.700	4,76	210.400.000	5,3	321.525.600	5,76	349.300.000	6,12	405.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				193.026.600		331.900.000		443.000.000		470.800.000		526.400.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	193.026.600	100	331.900.000	100	443.000.000	100	470.800.000	100	526.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				95.630.500		234.500.000		345.600.000		373.400.000		429.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	95.630.500	100	234.500.000	100	345.600.000	100	373.400.000	100	429.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				5.000.000		143.900.000		255.000.000		282.800.000		338.300.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	5.000.000	100	143.900.000	100	255.000.000	100	282.800.000	100	338.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.808.229.050		2.136.079.050		3.419.829.050		3.346.429.050		3.914.829.050	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				308.808.000		454.608.000		704.608.000		725.408.000		892.108.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,03	0,05	308.808.000	0,08	454.608.000	0,13	704.608.000	0,15	725.408.000	0,18	892.108.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.399.421.050		1.546.471.050		2.545.221.050		2.416.021.050		2.882.721.050	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional (Persentase)	1,83	1,91	1.399.421.050	1,96	1.546.471.050	2	2.545.221.050	2,04	2.416.021.050	2,08	2.882.721.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				100.000.000		135.000.000		170.000.000		205.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,37	0,39	100.000.000	0,4	135.000.000	0,41	170.000.000	0,42	205.000.000	0,43	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				63.600.000		313.600.000		363.600.000		363.600.000		363.600.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				63.600.000		313.600.000		363.600.000		363.600.000		363.600.000	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,03	2,05	63.600.000	2,05	313.600.000	2,06	363.600.000	2,06	363.600.000	2,08	363.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				73.300.000		173.300.000		173.300.000		173.300.000		173.300.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				73.300.000		173.300.000		173.300.000		173.300.000		173.300.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	68,74	68,85	73.300.000	68,85	173.300.000	68,95	173.300.000	68,95	173.300.000	69,06	173.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.619.470.630		1.956.070.630		2.501.070.630		3.187.670.630		3.366.070.630	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.347.270.530		1.493.070.530		1.743.070.530		2.363.870.530		2.330.570.530	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0,31	0,43	1.347.270.530	0,49	1.493.070.530	0,55	1.743.070.530	0,61	2.363.870.530	0,67	2.330.570.530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				90.000.000		110.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	54,55	67,89	90.000.000	72	110.000.000	75,18	130.000.000	77,71	150.000.000	79,77	170.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				100.000.000		245.800.000		495.800.000		516.600.000		683.300.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0,1	0,18	100.000.000	0,22	245.800.000	0,26	495.800.000	0,29	516.600.000	0,33	683.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				82.200.100		107.200.100		132.200.100		157.200.100		182.200.100	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	91,2	88,81	82.200.100	89,11	107.200.100	89,41	132.200.100	89,69	157.200.100	89,98	182.200.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.258.257.825		3.821.912.000		4.013.981.200		4.263.981.200		4.260.532.500	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.758.257.825		3.071.912.000		3.013.981.200		3.013.981.200		3.110.532.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.758.257.825	100	3.071.912.000	100	3.013.981.200	100	3.013.981.200	100	3.110.532.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				500.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.150.000.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Anggota perpustakaan (UPLM 7) (%)	0,6375	0,6375	500.000.000	0,6438	750.000.000	0,65	1.000.000.000	0,6563	1.250.000.000	0,6625	1.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Ketercukupan koleksi (UPLM 2) (%)	0,513	0,513		0,514		0,515		0,516		0,517		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) (%)	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (UPLM 6) (%)	0,0266	0,0266		0,0281		0,0297		0,0313		0,0328		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1) (%)	0,046	0,046		0,046		0,046		0,046		0,046		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5) (%)	0,2868	0,2868		0,299		0,3112		0,3234		0,3356		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (UPLM 4) (%)	0,0156	0,0156		0,0156		0,0156		0,0156		0,0156		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				206.798.825		606.798.825		506.798.825		506.798.825		606.798.825	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				179.298.825		479.298.825		379.298.825		379.298.825		379.298.825	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	51,74	52,07	179.298.825	52,27	479.298.825	52,47	379.298.825	52,67	379.298.825	52,87	379.298.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				27.500.000		127.500.000		127.500.000		127.500.000		227.500.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tinggat Keberadaan dn keutuan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbahasa dan bernegra untuk kepentinga negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesetjateraan rakyat (Nilai)	2.263,17	2.265,67	27.500.000	2.268,17	127.500.000	2.270,67	127.500.000	2.273,17	127.500.000	2.275,67	227.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				535.979.200		654.689.200		800.979.200		831.479.200		891.479.200	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				37.063.600		45.573.600		55.063.600		60.563.600		70.563.600	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	111,07	115,513	37.063.600	117,493	45.573.600	119,473	55.063.600	121,453	60.563.600	123,433	70.563.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				328.163.200		408.263.200		470.163.200		490.163.200		500.163.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	850	850	328.163.200	855	408.263.200	860	470.163.200	865	490.163.200	870	500.163.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				170.752.400		200.852.400		275.752.400		280.752.400		320.752.400	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	21,52	21,72	170.752.400	21,83	200.852.400	21,92	275.752.400	22,02	280.752.400	22,12	320.752.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.085.340.040		8.152.131.840		9.259.473.540		8.896.273.540		10.255.987.240	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.624.293.500		4.777.985.300		5.376.827.000		5.432.027.000		5.568.340.700	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	4.624.293.500	100	4.777.985.300	100	5.376.827.000	100	5.432.027.000	100	5.568.340.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.638.954.540		2.316.254.540		2.534.754.540		2.055.554.540		2.722.254.540	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	566.237	624.276	1.638.954.540	655.490	2.316.254.540	688.265	2.534.754.540	722.678	2.055.554.540	758.812	2.722.254.540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	45.124	49.749		52.236		54.848		57.590		60.470		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				510.000.000		655.800.000		905.800.000		926.600.000		1.343.300.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	25	25	510.000.000	25	655.800.000	25	905.800.000	25	926.600.000	25	1.343.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				25.000.000		40.000.000		55.000.000		70.000.000		85.000.000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	2,67	4	25.000.000	4,7	40.000.000	5,3	55.000.000	6,7	70.000.000	8	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				287.092.000		362.092.000		387.092.000		412.092.000		537.092.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	13,33	16,67	287.092.000	18,33	362.092.000	20	387.092.000	21,67	412.092.000	23,33	537.092.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				38.270.006.050		42.224.295.850		44.651.233.850		45.027.402.850		47.108.128.150	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.086.121.582		26.145.010.328		26.749.015.050		26.876.794.328		28.101.964.350	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	15.408.622.054	100	16.806.220.800	100	16.624.490.722	100	16.652.270.000	100	17.390.333.322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	8.677.499.528	100	9.338.789.528	100	10.124.524.328	100	10.224.524.328	100	10.711.631.028	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				9.009.268.668		10.156.791.500		11.266.602.500		11.396.660.222		11.808.880.500	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,02	0,04	4.676.376.168	0,06	5.103.820.000	0,08	5.489.710.000	0,09	5.535.267.722	0,11	5.747.488.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,87	0,9		0,98		1,01		1,05		1,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,09	0,18		0,27		0,36		0,44		0,527		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	56,96	57,3	4.332.892.500	57,47	5.052.971.500	57,67	5.776.892.500	57,8	5.861.392.500	57,97	6.061.392.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.350.152.700		4.634.575.200		4.928.819.200		4.976.597.200		5.147.708.200	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	35.200,13	35.200,13	3.661.838.500	35.200,13	3.884.061.000	35.200,13	4.078.505.000	35.200,13	4.106.283.000	35.200,13	4.217.394.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan dan kesehatan hewan (%)	100	100	688.314.200	100	750.514.200	100	850.314.200	100	870.314.200	100	930.314.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN				141.963.100		160.973.100		190.963.100		205.963.100		255.963.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
MASYARAKAT VETERINER													
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	23,9	23,95	141.963.100	24	160.973.100	24,05	190.963.100	24,1	205.963.100	24,15	255.963.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				150.000.000		372.222.000		566.667.000		594.444.000		705.556.000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	150.000.000	100	372.222.000	100	566.667.000	100	594.444.000	100	705.556.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				532.500.000		754.723.722		949.167.000		976.944.000		1.088.056.000	
Meingkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	5	5	532.500.000	5	754.723.722	5	949.167.000	5	976.944.000	5	1.088.056.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.765.181.000		2.149.831.000		2.911.681.000		2.975.181.000		3.176.021.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				310.081.000		406.231.000		621.581.000		960.081.000		998.531.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien. merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	35,29	52,94	310.081.000	47,05	406.231.000	58,82	621.581.000	64,71	960.081.000	70,59	998.531.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				230.000.000		326.150.000		541.500.000		580.000.000		618.460.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	2,25	2,3	230.000.000	2,35	326.150.000	2,4	541.500.000	2,45	580.000.000	2,5	618.460.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				795.000.000		891.150.000		1.006.500.000		1.045.000.000		1.083.450.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	6.223.183,91	6.226.918,38	795.000.000	6.228.786,46	891.150.000	6.230.655,09	1.006.500.000	6.232.524,29	1.045.000.000	6.234.394,05	1.083.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				430.100.000		526.300.000		742.100.000		390.100.000		475.580.000	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	1,55	2,48	430.100.000	3,47	526.300.000	4,46	742.100.000	5,45	390.100.000	6,44	475.580.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4.316.325.025		4.685.925.025		4.832.325.025		4.961.325.025		5.053.235.025	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.255.000.000		4.513.450.000		4.466.500.000		4.605.000.000		4.643.460.000	
Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	25,21	25,65	4.255.000.000	25,91	4.513.450.000	26,19	4.466.500.000	26,51	4.605.000.000	26,84	4.643.460.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				30.000.000		126.150.000		304.500.000		280.000.000		318.450.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	100	100	30.000.000	100	126.150.000	100	304.500.000	100	280.000.000	100	318.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				31.325.025		46.325.025		61.325.025		76.325.025		91.325.025	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	90	100	31.325.025	100	46.325.025	100	61.325.025	100	76.325.025	100	91.325.025	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				58.091.657.175		72.221.400.434		74.835.111.477		72.535.111.477		74.614.001.677	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.915.490.673		44.045.233.932		44.658.944.975		43.958.944.975		45.037.835.175	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Bagian Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100	9.773.635.532	100	11.483.171.486	100	12.377.719.153	100	11.677.719.153	100	12.186.599.053	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Kepala Daerah yang terfasilitasi dan terdokumentasikan (%)	100	100	739.190.300	100	764.618.446	100	825.787.922	100	725.787.922	100	725.787.922	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Bagian Perencanaan dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	20.152.427.641	100	31.547.206.800	100	31.205.200.700	100	31.205.200.700	100	31.775.211.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. (unit)	52	53	250.237.200	54	250.237.200	55	250.237.200	56	350.237.200	56	350.237.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				24.087.653.402		25.087.653.402		27.087.653.402		25.487.653.402		26.487.653.402	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	100	100	1.516.463.400	100	1.616.463.400	100	1.716.463.400	100	1.916.463.400	100	1.916.463.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektifvitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	21.952.864.402	100	22.852.864.402	100	24.752.864.402	100	22.952.864.402	100	23.952.864.402	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	618.325.600	100	618.325.600	100	618.325.600	100	618.325.600	100	618.325.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.088.513.100		3.088.513.100		3.088.513.100		3.088.513.100		3.088.513.100	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	2.206.705.800	100	2.206.705.800	100	2.206.705.800	100	2.206.705.800	100	2.206.705.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. (Dokumen)	150	150		150		150		150		150		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	58.675.000	100	58.675.000	100	58.675.000	100	58.675.000	100	58.675.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	100	100	823.132.300	100	823.132.300	100	823.132.300	100	823.132.300	100	823.132.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				37.135.489.050		39.298.878.600		40.204.035.200		40.704.035.200		41.112.107.700	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				26.772.645.250		27.186.034.800		27.091.191.400		27.091.191.400		27.299.263.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	26.772.645.250	100	27.186.034.800	100	27.091.191.400	100	27.091.191.400	100	27.299.263.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				10.362.843.800		12.112.843.800		13.112.843.800		13.612.843.800		13.812.843.800	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	2.459.422.700	100	2.487.422.700	100	2.487.422.700	100	2.487.422.700	100	2.487.422.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	7.903.421.100	100	9.625.421.100	100	10.625.421.100	100	11.125.421.100	100	11.325.421.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				5.672.059.950		6.683.737.850		7.438.479.550		7.438.479.550		7.597.243.650	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.094.027.016		4.505.704.916		4.660.446.616		4.660.446.616		4.819.210.716	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	4.094.027.016	100	4.505.704.916	100	4.660.446.616	100	4.660.446.616	100	4.819.210.716	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	88,65	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				740.000.000		890.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	740.000.000	100	890.000.000	100	1.040.000.000	100	1.040.000.000	100	1.040.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				838.032.934		1.288.032.934		1.738.032.934		1.738.032.934		1.738.032.934	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	275.000.000	100	425.000.000	100	575.000.000	100	575.000.000	100	575.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	290.000.000	100	440.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	273.032.934	100	423.032.934	100	573.032.934	100	573.032.934	100	573.032.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN				432.582.462.939		442.012.834.936		453.508.112.995		455.045.495.394		465.146.759.029	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				90.431.149.101		91.659.301.462		91.820.124.662		92.540.781.662		93.625.109.162	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	86.049.435.214	100	86.804.880.675	100	87.254.334.675	100	87.974.991.675	100	88.907.434.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	4.381.713.887	100	4.854.420.787	100	4.565.789.987	100	4.565.789.987	100	4.717.674.687	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				338.864.018.538		345.896.062.174		356.257.359.033		356.481.387.432		364.925.625.567	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	17,47	25	338.262.885.838	25,5	345.067.951.174	26	354.975.275.033	26,5	354.631.835.432	27	362.508.608.567	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	23,35	24,5		24,35		24,05		23,85		23,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	27,48	27,48	116.132.700	27,48	159.980.000	27,48	247.684.000	27,48	357.313.000	27,48	466.941.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	92,63	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	485.000.000	100	668.131.000	100	1.034.400.000	100	1.492.239.000	100	1.950.076.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				606.675.000		835.751.000		1.293.909.000		1.866.606.000		2.439.304.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-3,45	1,14	606.675.000	1,24	835.751.000	1,34	1.293.909.000	1,44	1.866.606.000	1,55	2.439.304.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.680.620.300		3.621.720.300		4.136.720.300		4.156.720.300		4.156.720.300	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,65	14,98	2.202.492.600	14,94	2.465.693.400	14,83	2.720.693.400	14,75	2.720.693.400	15,25	2.720.693.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	212.878.300	100	273.852.300	100	423.852.300	100	423.852.300	100	423.852.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	265.249.400	100	882.174.600	100	992.174.600	100	1.012.174.600	100	1.012.174.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN				6.724.940.325		7.756.913.425		8.475.303.525		8.725.303.525		9.444.653.325	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.884.940.325		6.666.913.425		6.635.303.525		6.635.303.525		6.854.653.325	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	5.884.940.325	100	6.666.913.425	100	6.635.303.525	100	6.635.303.525	100	6.854.653.325	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
													Bidang Kepegawaian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				840.000.000		1.090.000.000		1.840.000.000		2.090.000.000		2.590.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	38,1	38,14	840.000.000	39,87	1.090.000.000	41,61	1.840.000.000	43,34	2.090.000.000	45,07	2.590.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,2	99,63		99,65		99,68		99,71		99,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,98	14,19		14,38		16,62		16,89		17,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				425.000.000		1.025.000.000		1.675.000.000		1.925.000.000		1.925.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				425.000.000		1.025.000.000		1.675.000.000		1.925.000.000		1.925.000.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	12,82	13,42	425.000.000	13,78	1.025.000.000	13,98	1.675.000.000	14,35	1.925.000.000	16,71	1.925.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	8,7	8,98		10,04		11,19		12,48		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	29,15	29,84		30,41		30,99		31,57		32,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	30,5	35		36,66		38,33		40		41,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				290.000.000		440.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				230.000.000		330.000.000		430.000.000		430.000.000		430.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100	230.000.000	100	330.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				60.000.000		110.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	100	100	60.000.000	100	110.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				9.437.512.554		11.494.912.454		12.305.020.916		12.455.020.916		13.144.354.916	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.553.410.054		7.110.809.954		7.320.918.416		7.470.918.416		7.760.252.416	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	6.553.410.054	100	7.110.809.954	100	7.320.918.416	100	7.470.918.416	100	7.760.252.416	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.226.985.300		3.226.985.300		3.826.985.300		3.826.985.300		3.976.985.300	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	92,62	100	2.226.985.300	100	3.226.985.300	100	3.826.985.300	100	3.826.985.300	100	3.976.985.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1 (%)	91,17	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (%)	72,22	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				657.117.200		1.157.117.200		1.157.117.200		1.157.117.200		1.407.117.200	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	657.117.200	Terintegrasi (Integrated)	1.157.117.200	Terintegrasi (Integrated)	1.157.117.200	Terintegrasi (Integrated)	1.157.117.200	Terintegrasi (Integrated)	1.407.117.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Manajemen Risiko Indeks (Level)	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				50.239.970.192		55.074.290.577		61.677.512.677		61.888.353.441		63.437.063.641	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				45.377.633.220		47.796.953.605		48.765.175.705		48.251.016.469		50.524.726.669	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Bondowoso	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	6.244.448.800	100	6.356.555.000	100	6.236.898.600	100	6.242.854.000	100	6.505.059.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Badean	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	115.274.000	100	119.440.000	100	129.360.000	100	131.680.000	100	129.360.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Nangkaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	97.276.000	100	101.600.000	100	111.820.000	100	114.290.000	100	111.820.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Kotakulon	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	180.832.000	100	184.560.000	100	193.400.000	100	195.505.000	100	193.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Tamansari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	107.807.000	100	111.696.000	100	120.906.000	100	123.156.000	100	120.906.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Dabasah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	165.733.000	100	168.810.000	100	176.180.000	100	177.880.000	100	176.180.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Kademangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	106.052.000	100	110.160.000	100	119.910.000	100	122.260.000	100	119.910.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Blindungan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	122.197.000	100	126.380.000	100	132.610.000	100	138.459.600	100	136.310.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Tamanan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.350.102.500	100	1.723.249.300	100	1.794.465.100	100	1.769.465.100	100	1.850.772.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Tenggarang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.391.969.464	100	2.417.982.200	100	2.463.867.000	100	2.386.453.564	100	2.509.978.864	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Tenggarang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	138.323.500	100	141.323.500	100	141.323.500	100	141.323.500	100	141.323.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Tegalampel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.319.881.700	100	2.331.753.700	100	2.370.206.500	100	2.345.206.500	100	2.460.284.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Sekarputih	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	146.650.000	100	152.000.000	100	164.500.000	100	164.500.000	100	164.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Curahdami	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.201.278.900	100	2.433.430.300	100	2.432.558.200	100	2.422.558.200	100	2.532.344.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kelurahan Curahdami	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	109.365.300	100	126.365.300	100	172.365.300	100	157.365.300	100	172.365.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Wringin	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.465.609.500	100	1.710.561.300	100	1.777.172.700	100	1.752.172.700	100	1.841.153.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Pakem	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.332.463.100	100	1.500.596.600	100	1.469.270.900	100	1.444.270.900	100	1.529.813.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Binakal	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.638.169.860	100	1.913.046.609	100	1.973.468.109	100	1.948.468.109	100	2.047.765.409	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Maesan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.838.858.600	100	1.979.252.700	100	2.037.086.000	100	2.006.542.300	100	2.107.653.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Grujugan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.906.826.000	100	1.829.422.900	100	1.891.624.400	100	1.866.624.400	100	1.962.955.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Pujer	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.210.528.240	100	2.423.986.700	100	2.439.677.600	100	2.439.677.600	100	2.507.110.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Wonosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.849.474.600	100	1.713.647.600	100	1.776.930.300	100	1.751.930.300	100	1.846.459.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Sukosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.672.939.512	100	1.834.012.712	100	1.894.496.512	100	1.869.496.512	100	1.968.690.312	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Tlogosari	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.945.987.600	100	2.099.469.600	100	2.145.320.300	100	2.114.118.200	100	2.227.572.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Tapen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.765.080.380	100	1.626.553.680	100	1.691.016.480	100	1.666.016.480	100	1.758.578.380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Sumber Wringin	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.503.212.580	100	1.417.678.600	100	1.386.639.300	100	1.386.639.300	100	1.438.371.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Prajekan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.516.767.020	100	1.471.251.920	100	1.540.719.520	100	1.515.719.520	100	1.599.940.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Klabang	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.800.929.180	100	1.826.284.800	100	1.805.603.200	100	1.805.603.200	100	1.878.405.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Cermee	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.030.003.760	100	2.103.773.760	100	2.159.995.360	100	2.134.995.360	100	2.241.292.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Ijen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.013.125.704	100	1.256.700.904	100	1.375.680.904	100	1.350.680.904	100	1.427.380.704	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Taman Krocok	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.335.274.420	100	1.426.376.120	100	1.443.614.320	100	1.418.614.320	100	1.499.676.220	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.080.435.500	100	1.250.981.500	100	1.327.697.900	100	1.302.697.900	100	1.374.837.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Kecamatan Botolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	1.674.756.500	100	1.808.050.300	100	1.868.791.700	100	1.843.791.700	100	1.942.555.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				550.066.300		1.067.566.300		2.275.066.300		2.305.066.300		2.275.066.300	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Bondowoso	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	39.539.200	100	62.039.200	100	114.539.200	100	144.539.200	100	114.539.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Tamanan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	29.504.300	100	52.004.300	100	104.504.300	100	104.504.300	100	104.504.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Tenggarang	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	20.111.300	100	42.611.300	100	95.111.300	100	95.111.300	100	95.111.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Tegalampel	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	15.507.600	100	38.007.600	100	90.507.600	100	90.507.600	100	90.507.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Curahdami	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	23.078.100	100	45.578.100	100	98.078.100	100	98.078.100	100	98.078.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Wringin	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	28.604.000	100	51.104.000	100	103.604.000	100	103.604.000	100	103.604.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Pakem	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	16.422.600	100	38.922.600	100	91.422.600	100	91.422.600	100	91.422.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Binakal	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	13.677.400	100	36.177.400	100	88.677.400	100	88.677.400	100	88.677.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Maesan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	26.000.000	100	48.500.000	100	101.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Grujugan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	33.954.300	100	56.454.300	100	108.954.300	100	108.954.300	100	108.954.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Pujer	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	21.818.900	100	44.318.900	100	96.818.900	100	96.818.900	100	96.818.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Wonosari	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	18.648.800	100	41.148.800	100	93.648.800	100	93.648.800	100	93.648.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Sukosari	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	15.000.000	100	37.500.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Tlogosari	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	22.000.000	100	44.500.000	100	97.000.000	100	97.000.000	100	97.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Tapen	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	27.793.500	100	50.293.500	100	102.793.500	100	102.793.500	100	102.793.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Sumber Wringin	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	30.697.200	100	53.197.200	100	105.697.200	100	105.697.200	100	105.697.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Prajekan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	21.000.000	100	43.500.000	100	96.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Klabang	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	17.989.500	100	40.489.500	100	92.989.500	100	92.989.500	100	92.989.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Cermee	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	30.000.000	100	52.500.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Ijen	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	19.000.000	100	41.500.000	100	94.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Taman Krocok	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	20.554.200	100	43.054.200	100	95.554.200	100	95.554.200	100	95.554.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	31.665.400	100	54.165.400	100	106.665.400	100	106.665.400	100	106.665.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kecamatan Botolinggo	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	27.500.000	100	50.000.000	100	102.500.000	100	102.500.000	100	102.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.856.404.300		3.546.404.300		5.156.404.300		4.611.404.300		5.156.404.300	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bondowoso	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	58.041.500	100	88.041.500	100	158.041.500	100	163.041.500	100	158.041.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Badean	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Nangkaan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Kotakulon	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Tamansari	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Dabasah	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Kademangan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Blindungan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tamanan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	68.271.300	100	98.271.300	100	168.271.300	100	143.271.300	100	168.271.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tenggarang	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	39.412.300	100	69.412.300	100	139.412.300	100	114.412.300	100	139.412.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Tenggarang	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tegalampel	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	27.952.500	100	57.952.500	100	127.952.500	100	102.952.500	100	127.952.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Sekarputih	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Curahdami	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	29.721.400	100	59.721.400	100	129.721.400	100	104.721.400	100	129.721.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Curahdami	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wringin	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	58.500.000	100	88.500.000	100	158.500.000	100	133.500.000	100	158.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Pakem	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	29.388.200	100	59.388.200	100	129.388.200	100	104.388.200	100	129.388.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Binakal	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	14.390.000	100	44.390.000	100	114.390.000	100	89.390.000	100	114.390.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Maesan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	38.400.000	100	68.400.000	100	138.400.000	100	113.400.000	100	138.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Grujugan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	33.829.800	100	63.829.800	100	133.829.800	100	108.829.800	100	133.829.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Pujer	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	46.295.800	100	76.295.800	100	146.295.800	100	121.295.800	100	146.295.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosari	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	51.273.200	100	81.273.200	100	151.273.200	100	126.273.200	100	151.273.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sukosari	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	21.503.800	100	51.503.800	100	121.503.800	100	96.503.800	100	121.503.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tlogosari	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	50.000.000	100	80.000.000	100	150.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tapen	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	38.031.400	100	68.031.400	100	138.031.400	100	113.031.400	100	138.031.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumber Wringin	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	37.753.100	100	67.753.100	100	137.753.100	100	112.753.100	100	137.753.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Prajekan	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	40.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	100	115.000.000	100	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Klabang	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	17.843.500	100	47.843.500	100	117.843.500	100	92.843.500	100	117.843.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Cermee	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	37.000.000	100	67.000.000	100	137.000.000	100	112.000.000	100	137.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ijen	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	29.706.600	100	59.706.600	100	129.706.600	100	104.706.600	100	129.706.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Taman Krocok	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	12.509.200	100	42.509.200	100	112.509.200	100	87.509.200	100	112.509.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	39.740.700	100	69.740.700	100	139.740.700	100	114.740.700	100	139.740.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Botolinggo	Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (%)	100	100	36.840.000	100	66.840.000	100	136.840.000	100	111.840.000	100	136.840.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				507.980.300		852.980.300		1.657.980.300		2.262.980.300		1.657.980.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Bondowoso	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	36.605.000	100	51.605.000	100	86.605.000	100	141.605.000	100	86.605.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Tamanan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	28.918.000	100	43.918.000	100	78.918.000	100	103.918.000	100	78.918.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Tenggarang	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	34.730.600	100	49.730.600	100	84.730.600	100	109.730.600	100	84.730.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Tegalampel	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	14.852.000	100	29.852.000	100	64.852.000	100	89.852.000	100	64.852.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Curahdami	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	11.895.700	100	26.895.700	100	61.895.700	100	86.895.700	100	61.895.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Wringin	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	30.000.000	100	45.000.000	100	80.000.000	100	105.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Pakem	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	17.649.300	100	32.649.300	100	67.649.300	100	92.649.300	100	67.649.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Binakal	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	13.400.800	100	28.400.800	100	63.400.800	100	88.400.800	100	63.400.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Maesan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	29.000.000	100	44.000.000	100	79.000.000	100	104.000.000	100	79.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Grujugan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	30.486.100	100	45.486.100	100	80.486.100	100	105.486.100	100	80.486.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Pujer	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	19.004.800	100	34.004.800	100	69.004.800	100	94.004.800	100	69.004.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Wonosari	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	23.453.900	100	38.453.900	100	73.453.900	100	98.453.900	100	73.453.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Sukosari	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	10.000.000	100	25.000.000	100	60.000.000	100	85.000.000	100	60.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Tlogosari	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	20.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	100	95.000.000	100	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Tapen	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	22.121.100	100	37.121.100	100	72.121.100	100	97.121.100	100	72.121.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Sumber Wringin	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	32.631.500	100	47.631.500	100	82.631.500	100	107.631.500	100	82.631.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Prajekan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	20.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	100	95.000.000	100	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Klabang	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	11.030.900	100	26.030.900	100	61.030.900	100	86.030.900	100	61.030.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Cermee	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	20.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	100	95.000.000	100	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Ijen	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	24.350.000	100	39.350.000	100	74.350.000	100	99.350.000	100	74.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Taman Krocok	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	14.530.100	100	29.530.100	100	64.530.100	100	89.530.100	100	64.530.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	22.068.000	100	37.068.000	100	72.068.000	100	97.068.000	100	72.068.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tentram Kecamatan Botolinggo	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	21.252.500	100	36.252.500	100	71.252.500	100	96.252.500	100	71.252.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				394.416.100		911.916.100		2.119.416.100		2.734.416.100		2.119.416.100	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Bondowoso	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	21.570.000	100	44.070.000	100	96.570.000	100	161.570.000	100	96.570.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Tamanan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	15.750.600	100	38.250.600	100	90.750.600	100	115.750.600	100	90.750.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Tenggarang	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	35.000.000	100	57.500.000	100	110.000.000	100	135.000.000	100	110.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Tegalampel	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	7.450.000	100	29.950.000	100	82.450.000	100	107.450.000	100	82.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Curahdami	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	11.984.700	100	34.484.700	100	86.984.700	100	111.984.700	100	86.984.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Wringin	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	45.600.000	100	68.100.000	100	120.600.000	100	145.600.000	100	120.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Pakem	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	15.866.800	100	38.366.800	100	90.866.800	100	115.866.800	100	90.866.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Binakal	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	13.254.800	100	35.754.800	100	88.254.800	100	113.254.800	100	88.254.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Maesan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	18.000.000	100	40.500.000	100	93.000.000	100	118.000.000	100	93.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Grujugan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	30.253.300	100	52.753.300	100	105.253.300	100	130.253.300	100	105.253.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Pujer	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	9.648.000	100	32.148.000	100	84.648.000	100	109.648.000	100	84.648.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Wonosari	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	13.105.800	100	35.605.800	100	88.105.800	100	113.105.800	100	88.105.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Sukosari	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	7.000.000	100	29.500.000	100	82.000.000	100	107.000.000	100	82.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Tlogosari	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	10.000.000	100	32.500.000	100	85.000.000	100	110.000.000	100	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Tapen	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	15.398.500	100	37.898.500	100	90.398.500	100	115.398.500	100	90.398.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Sumber Wringin	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	36.569.600	100	59.069.600	100	111.569.600	100	136.569.600	100	111.569.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Prajekan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	5.000.000	100	27.500.000	100	80.000.000	100	105.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Klabang	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	13.793.000	100	36.293.000	100	88.793.000	100	113.793.000	100	88.793.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Cermee	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	20.000.000	100	42.500.000	100	95.000.000	100	120.000.000	100	95.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Ijen	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	10.000.000	100	32.500.000	100	85.000.000	100	110.000.000	100	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Taman Krocok	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	14.346.000	100	36.846.000	100	89.346.000	100	114.346.000	100	89.346.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	16.525.000	100	39.025.000	100	91.525.000	100	116.525.000	100	91.525.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang efektif dan efisien Kecamatan Botolinggo	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan (%)	100	100	8.300.000	100	30.800.000	100	83.300.000	100	108.300.000	100	83.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				553.469.972		898.469.972		1.703.469.972		1.723.469.972		1.703.469.972	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Bondowoso	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	8.421.572	100	23.421.572	100	58.421.572	100	78.421.572	100	58.421.572	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Tamanan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	22.046.300	100	37.046.300	100	72.046.300	100	72.046.300	100	72.046.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Tenggarang	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	26.312.300	100	41.312.300	100	76.312.300	100	76.312.300	100	76.312.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Tegalampel	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	16.200.000	100	31.200.000	100	66.200.000	100	66.200.000	100	66.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Curahdami	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	20.632.600	100	35.632.600	100	70.632.600	100	70.632.600	100	70.632.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Wringin	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	37.120.000	100	52.120.000	100	87.120.000	100	87.120.000	100	87.120.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Pakem	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	27.034.900	100	42.034.900	100	77.034.900	100	77.034.900	100	77.034.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Binakal	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	15.710.300	100	30.710.300	100	65.710.300	100	65.710.300	100	65.710.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Maesan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	36.000.000	100	51.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Grujugan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	32.440.900	100	47.440.900	100	82.440.900	100	82.440.900	100	82.440.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Pujer	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	33.863.400	100	48.863.400	100	83.863.400	100	83.863.400	100	83.863.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Wonosari	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	50.105.400	100	65.105.400	100	100.105.400	100	100.105.400	100	100.105.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Sukosari	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	17.000.000	100	32.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Tlogosari	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	22.000.000	100	37.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Tapen	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	30.000.000	100	45.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Sumber Wringin	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	13.685.600	100	28.685.600	100	63.685.600	100	63.685.600	100	63.685.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Prajekan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	26.000.000	100	41.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Klabang	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	21.233.800	100	36.233.800	100	71.233.800	100	71.233.800	100	71.233.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Cermee	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	29.475.100	100	44.475.100	100	79.475.100	100	79.475.100	100	79.475.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Ijen	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	20.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Taman Krocok	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	13.728.600	100	28.728.600	100	63.728.600	100	63.728.600	100	63.728.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Jambesari Darussholah	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	17.459.200	100	32.459.200	100	67.459.200	100	67.459.200	100	67.459.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa secara optimal Kecamatan Botolinggo	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	100	17.000.000	100	32.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.892.027.450		7.880.210.150		8.582.217.550		93.582.217.550		8.412.205.050	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.706.196.850		2.794.379.550		2.796.386.950		2.796.386.950		2.926.374.450	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	2.706.196.850	100	2.794.379.550	100	2.796.386.950	100	2.796.386.950	100	2.926.374.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.173.994.800		1.623.994.800		1.923.994.800		2.173.994.800		1.423.994.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	N/A	15,4	1.173.994.800	28,43	1.623.994.800	42,35	1.923.994.800	55,39	2.173.994.800	55,39	1.423.994.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.112.323.000		2.262.323.000		2.262.323.000		79.612.323.000		2.612.323.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	13,88	0,17	2.112.323.000	0,19	2.262.323.000	0,19	2.262.323.000	0,21	79.612.323.000	0,21	2.612.323.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				320.800.000		420.800.000		470.800.000		520.800.000		420.800.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,8	71,63	320.800.000	71,78	420.800.000	71,93	470.800.000	73,57	520.800.000	73,57	420.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				56.124.800		156.124.800		256.124.800		456.124.800		206.124.800	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)	6,52	3,04	56.124.800	6,09	156.124.800	10,43	256.124.800	19,13	456.124.800	19,13	206.124.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				522.588.000		622.588.000		872.588.000		8.022.588.000		822.588.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	522.588.000	100	622.588.000	100	872.588.000	100	8.022.588.000	100	822.588.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				2.094.476.119.561		2.234.991.418.584		2.298.895.800.474		2.469.864.590.648		2.475.000.292.202	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penyelenggaran pemerintahan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berasaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yaitu untuk daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati serta untuk daerah kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya pada pasal 60 dijelaskan, bahwa masa jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesuadahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggung-jawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap

akhir tahun pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perihal penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 70 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Bupati / Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (4) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pada ketentuan pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34, Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri No. 18/2020 ini mengatur mekanisme penyusun laporan yang meliputi LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang pada seluruh dokumen perencanaan yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menegah. Adapun kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dinilai atas capaian akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai indikator yang tertuang pada seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kabupaten Bondowoso adalah antara Bupati Bondowoso dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturtan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kabupaten Bondowoso dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

Birokrasi. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analis antara target dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan hasil capaian dari nilai AKIP yang diukur atas hasil evaluasi dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu; 1) Komponen Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; dan 5) Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu perangkat pada pemerintah daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Setelah organisasi menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur capaian-capaian yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI. KPI harus dapat diukur baik untuk capaian KPI jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang ditentukan. Maka dari itu dalam membuat KPI harus menyatakan kuantitas atau persentase yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Berkenaan pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Bondowoso yang disusun, Pemerintah Daerah wajib menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan akhir periode masa jabatan. Hal ini memiliki tujuan berupa gambaran tentang ukuran capaian keberhasilan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdeskripsi sebagai berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan indikator dituangkan kedalam format Tabel dibawah. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,41	4,82	4,94	5,00	5,05	5,11	
2	Indeks Gini	Angka	0,355	0,347	0,317	0,311	0,305	0,294	
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	8,89	
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	70,00	71,00	79,10	79,20	79,30	79,04	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,95	72.54	72.60	73.15	73.71	74.27	
6	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,89 - 3,38	3,88-3,21	3,87-3,03	3,79-2,90	3,75-2,82	3,71-2,77	IUP
7	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	
8	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	73,46	73.54	73.61	73.69	73.77	73.85	IUP

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini terdeskripsi sebagai Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Makro meliputi aspek Geografi dan Demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator Kinerja Kunci meliputi Indikator Kinerja semua urusan pemerintah daerah. Tabel Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Point	75,68	75,92	76,16	76,39	76,63	76,87	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	12,05	11,57	11,09	10,61	10,13	9,65	IUP
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,16	83.58	84.01	84.43	84.86	85.28	
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	41,36	41,98	42,58	43,16	43,72	45,00	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,46	73.54	73.61	73.69	73.77	73.85	IUP
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,92	4,41	5,9	7,39	8,88	10,36	IUP
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	47,75	49,58	51,41	53,24	55,07	56,90	IUP
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	21,23	21,34	21,54	21,74	21,94	22,14	IUP
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	(ton CO2 eq)	472.114,78	481.557,08	491.188,22	501.011,99	511.032,22	521.252,87	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK Komulatif	%	0,56	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IUP
12	Indeks Risiko Bencana	poin	111,97-109,24	109,24-106,64	106,64-104,16	104,16-101,80	101,80-99,53	99,53-96,54	IUP
13	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
15	Rasio Penduduk	%	97	97	97	97	97	97	
16	Kepadatan Penduduk	Orang/m 2	0,000500	0,000510	0,000516	0,000521	0,000527	0,000533	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	4,41	4.82	4.94	5.00	5.05	5.11	
2	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	12,00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	33,90 – 34,80	34,05 – 36,79	34,51 – 38,78	35,52 – 40,77	35,81 – 42,76	36,54 – 44,75	
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 - 3,32	3,88-3,21	3,87-3,03	3,79-2,90	3,75-2,82	3,71-2,77	IUP
6	Indeks Gini	angka	0,355	0.350	0.317	0.311	0.305	0.294	
7	Indeks Modal Manusia (IMM)	angka	-	0.531	0.535	0.539	0.543	0.547	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,95	72.54	72.60	73.15	73.71	74.27	
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,51	73,76	74,02	74,27	74,52	74,77	IUP
10	Prevalensi Stunting	%	11,20	10,00	8,00	7,00	7,00	6,00	IUP
11	Insidensi Tuberkulosis	Rasio	163/100.000	163/100.000	163/100.000	163/100.000	163/100.000	65/100.000	IUP
12	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,15	7,15	7,29	7,44	7,58	8,31	
13	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	tahun	7,15	7,15	7,29	7,44	7,58	8,31	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,34	13,36	13,43	13,52	13,58	13,62	IUP
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	101,13	102.00	102.90	103.70	104.10	104.10	IUP
16	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	%	100,36	100.30	100.30	100.30	100.29	100.29	IUP
17	Proporsi Penduduk Usia 15 tahun	%	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	20,00	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi								
18	Angka Literasi/Numerasi	%	28,1	28,6	29,2	29,7	30,1	30,3	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	29,38	78,94	79,24	79,54	79,84	80,14	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	18,63	19,52	20,99	21,89	23,36	24,42	IUP
21	Cakupan Kepesertaan JKN	%	98,50	98,76	98,88	98,92	99,00	99,00	IUP
22	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	
23	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0.37	0.41	0.45	0.49	0.53	0.57	
24	Persentase penanganan potensi konflik	%	100	100	100	100	100	100	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
25	Persentase penanganan potensi konflik SARA	%	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase Kekayaan Budaya yang Dilestarikan	%	74,40	75,13	75,71	76,19	76,59	76,92	IUP
27	Indeks Perlindungan Anak	angka	61.63	61,70	61,80	61,90	62,00	62,10	
28	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	IUP
29	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	42,71	42,94	43,20	43,47	43,73	44,00	
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,12	61,20	61,30	61,40	61,50	62,00	
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,547	0,508	0,493	0,479	0,464	0,449	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,22	91,25	91,30	91,50	91,75	92,00	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	46,21	46,21	45,81	45,41	45,01	44,61	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	24,4	25,24	25,25	25,26	25,28	25,29	IUP
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,62 - 0,88	0,63 - 0,93	0,64 - 0,95	0,65 - 0,99	0,65 - 1,02	0,66 - 1,06	IUP
4	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	%	2,37	4,86	3,12	3,15	3,18	3,21	
5	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	%	7,45	7,54	7,22	7,31	7,40	7,51	
6	Rasio Kewirausahaan	%	8,59	9,92	10,21	10,5	10,8	11,1	IUP
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,18	71,48	71,78	72,08	72,38	72,68	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,11	62,25	62,48	62,98	63,48	63,99	IUP
9	Indeks Inovasi Daerah	skor	70,00	70,75	71,50	72,25	73,00	73,75	
10	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/ Jiwa	6.797.568	7.285.866	7.774.164	8.289.523	8.832.597	9.404.076	
11	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,41 - 2,50	1,85 - 2,57	1,90 - 2,60	1,95 - 2,65	2,00 - 2,70	2,05 - 2,75	IUP
12	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	0,0544	0,0546	0,0548	0,055	0,0552	0,0554	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,61 – 26,00	24,69 - 26,15	24,75 - 26,16	24,79 - 26,17	24,82 - 26,19	24,84 - 26,2	IUP
14	Realisasi Investasi	(Triliun Rupiah)	1,06	1,07	1,07	1,07	1,09	1,09	IUP
15	ICOR	-	5,52	5,61	5,61	5,6	5,6	5,59	
16	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	3,91	4,02	4,13	4,24	4,35	4,46	
17	Indeks Infrastruktur	point	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
18	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	point	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	
19	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	75,34	75,94	76,54	77,12	77,70	78,26	IUP
20	Persentase Desa Mandiri	%	35,89	36,84	37,8	38,76	39,71	40,67	IUP
21	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	1,16	1,17	1,18	1,19	1,21	1,22	
22	Tingkat Inflasi	%	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	
23	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	ribu orang	25.983	27.281	28.645	30.220	32.033	34.275	IUP
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	70,00	71,00	79,10	79,20	79,30	79,04	
2	Nilai SAKIP	Nilai	A 81,00	A 81,00	A 82,00	A 83,00	A 84,00	A 85,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Indeks Reformasi Hukum	angka	87,86	87,88	87,90	87,92	87,95	88,00	IUP
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	4,08	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/PemDi	angka	4,16	1,84 - 2,21	1,94 - 2,36	2,04 - 2,5	2,14 - 2,65	2,24 - 2,79	IUP
6	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,01	3,88	3,90	3,92	4,00	4,05	IUP
7	IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	Nilai	2,473	2,480	2,487	2,494	2,501	2,510	IUP
8	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	angka	90	92	93	94	95	96	
9	Opini BPK	Kategori /Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
10	Indeks Profesionalitas ASN	angka	77,15	77,25	77,45	77,750	78,00	78,25	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
11	Indeks Integritas Nasional	angka	65	70	75	80	85	90	
12	Persentase penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Demokrasi Indonesia	%	N/A	80	80	80	81	82	
15	Indeks Rasa Aman	angka	N/A	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
16	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	N/A	76	76	76	76	76	
17	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,37	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	IUP
19	Persentase Pemuda Berprestasi dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan	%	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
A	**Pendidikan**								
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	97,37%	97,80%	97,85%	98,05%	98,35%	98,35%	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,22%	98,44%	98,74%	98,94%	99,04%	99,04%	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,00	63,20	65,70	68,20	70,70	73,20	IUP
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	41,53	60,35	63,25	66,15	69,05	71,95	IUP
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,55	68,26	69,36	70,46	71,56	72,66	IUP
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	40,00	63,35	64,85	66,35	67,85	69,35	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	66,14	66,96	67,37	67,78	68,19	68,60	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	77,46	73,14	73,89	74,64	75,39	76,14	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	74,11	75,91	76,81	77,71	78,61	79,51	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	67,80	70,80	72,30	73,80	75,30	76,80	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	69,96	71,96	72,96	73,96	74,96	75,96	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,80	70,80	71,80	72,80	73,80	74,80	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	58,38	63,38	65,88	68,38	70,88	73,38	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	56,49	61,29	63,69	66,09	68,49	70,89	
B	**Kesehatan**								
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	160,85	100	90	85	80	70	IUP
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Balita	%	11,20%	10,00%	8,00%	7,00%	7,00%	6,00%	IUP
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,16	83,58	84,01	84,43	84,86	85,28	
3	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,92	4,41	5,9	7,39	8,88	10,36	
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	65,72	66,47	67,22	67,97	68,72	69,47	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
5	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari	20	15	15	15	15	15	
6	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
2	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	7,30	14,60	21,90	29,20	36,50	43,80	
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	
E	**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	-	-	2	2	2	2	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	70	70	80	90	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	60	60	70	80	90	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	63,33	63,33	73,33	83,33	91,67	100,00	
7	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
F	**Sosial**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,02	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,03	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,03	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,12	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	
7	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	
8	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	42,71	42,94	43,20	43,47	43,73	44,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
9	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	70	75	75	75	75	75	
10	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	keluarga	2694	2700	2700	2700	2700	2700	
11	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
A	**Tenaga Kerja**								
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,10	0,13	0,16	0,19	0,21	0,23	
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	1735	1758	1783	1810	1839	1812	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	11,69	11,82	11,99	12,15	12,29	12,42	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,17	91,25	91,30	91,50	91,75	92	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,547	0,508	0,493	0, 479	0,464	0,449	
3	Persentase ARG Daerah	%	45,55	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	
6	Status Kabupaten Layak Anak	Status	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,63	61,70	61,80	61,90	62	62,10	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	62,11	62,25	62,48	62,98	63,48	63,99	
9	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	kelompok	50	50	50	50	50	50	
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	56,49	56,60	56,70	56,80	56,90	57	
C	**Pangan**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	37,80	38,00	38,2	38,4	38,6	38,8	
D	**Pertanahan**								
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	28,17	45,53	60,52	73,86	87,19	100,00	
E	**Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	%	73,46	73,54	73,61	73,69	73,77	73,85	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	31,5	32	33	34	35	36	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	73	75	80	85	90	95	
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	96,20	96,96	97,09	97,09	97,21	97,31	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	41,45	46,10	46,25	46,40	46,55	46,55	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	4,70	5,54	6,62	7,65	8,68	9,82	
G	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	33,33%	33,33%	25%	20%	16,66%	14,29%	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	5,26%	9,57%	10,53%	11,00%	9,57%	10,05%	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	8,53%	36,43%	55,04%	72,87%	81,40%	100,00%	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	%	24,27%	25,76%	27,25%	30,68%	32,23%	34,94%	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	
H	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2	2	2	2	2	2	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	81,04	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	2,94	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	61,12	61,20	61,30	61,40	62	62	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	20,7	21	21	21	21	21	
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	10,27	11	11	11	11	11	
I	**Perhubungan**								
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	15,68	16,15	16,61	17,08	17,54	18,01	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	0	1	1	1	1	1	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
J	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	13,16	14,47	19,74	26,32	30,26	34,21	
K	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
1	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	26,68	26,69	26,75	26,85	26,92	26,98	
2	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	87,57	87,69	88,78	89,36	90,16	91,07	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,28	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	
L	**Penanaman Modal**								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	1,67	3,28	4,76	5,30	5,76	6,12	
M	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,04	0,05	0,08	0,13	0,15	0,18	
2	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%	1,87	1,91	1,96	2,00	2,04	2,08	
N	**Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	angka	2,03	2,05	2,05	2,06	2,06	2,08	
O	**Persandian**								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	68,74	68,85	68,85	68,95	68,95	69,06	
P	**Kebudayaan**								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	0,37	0,43	0,49	0,55	0,61	0,67	
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	62,37	67,89	72,00	75,18	77,71	79,77	
Q	**Perpustakaan**								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,70	57,95	58,20	58,45	58,70	58,95	IUP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	29,38	78,94	79,24	79,54	79,84	80,13	
R	**Kearsipan**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	N/A	68	70	73	76	80	
URUSAN PILIHAN									
A	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	111,290	115,513	117,493	119,473	121,453	123,433	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	845	850	855	860	865	870	
3	Angka Konsumsi Ikan	Angka	21,62	21,72	21,83	21,92	22,02	22,12	
B	**Pariwisata**								
1	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	47.380	49.749	52.236	54.848	57.590	60.470	
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	594.549	624.276	655.490	688.265	722.678	758.812	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	3.33	4.00	4.70	5.30	6.70	8.00	
C	**Pertanian**								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,14	0,18	0,27	0,36	0,44	0,52	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,88	0,90	0,98	1,01	1,05	1,09	
	Produksi Daging	Ton	5,991.05	6,050.96	6,141.72	6,264.55	6,421.17	6,613.80	
	Produksi Telur	Ton	2,940,962.44	2,999,781.69	3,089,775.14	3,213,366.15	3,374,034.45	3,576,476.52	
	Produksi Susu	Ton	290.65	305.19	335.70	386.06	463.27	579.09	
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	35.200,13	35.200,13	35.200,13	35.200,13	35.200,13	35.200,13	
5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	5	5	5	5	5	5	
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	57,13	57,30	57,47	57,64	57,81	57,98	
7	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan dan kesehatan hewan	%	100	100	100	100	100	100	
D	**Kehutanan**								
	-								
E	**Energi dan Sumber Daya Minera**								
	-								
F	**Perdagangan**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Nilai Ekspor Barang	Nilai	6.225.050,87	6.226.918,38	6.228.786,46	6.230.655,09	6.232.524,29	6.234.394,05	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1.55	2,48	3,47	4,46	5,45	6,44	
G	**Perindustrian**								
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	25,43	25,65	25,91	26,19	26,51	26,84	
2	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	
H	**Transmigrasi**								
	-								
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
A	**Perencanaan**								
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	
B	**Keuangan**								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14,98	14,94	14,83	14,75	15,25	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-27,48	-27,48	-27,48	-27,48	-27,48	-27,48	
7	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	100	100	
C	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	%	77,76	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
D	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	
E	**Fungsi Pengawasan**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	5	5	5	5	5	5	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	5	5	5	5	5	5	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	4	4	4	4	4	4	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100	100	100	100	100	100	
F	**Fungsi Pengadaan**								
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	19,47	27,5	29	30	30	30	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	7,2	12	14,4	18	21,5	24	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	35,56	40	40	40	40	40	
G	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	
H	**Pelayanan Publik**								
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	86,78	86,79	86,79	86,80	86,80	86,81	

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan landasan yuridis dalam pelaksanaan pembangunan yang berisi program-program strategis yang akan dilaksanakan, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

5.1 Pedoman Transisi

Dengan berakhirnya tahapan pembangunan periode sebelumnya, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya khususnya untuk tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2030-2034, maka RPJMD Tahun 2025-2029 ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 dan RAPBD Tahun 2030 Kabupaten Bondowoso serta menjadi tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk periode 2030-2034. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun

2025 – 2045 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur yang digunakan pada masa tersebut.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bondowoso disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan untuk masa lima tahun ke depan. Sudah selayaknya Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan melalui program kegiatan di setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanannya, antara lain :

a. RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD.
b. Perangkat Daerah pengampu urusan Perencanaan Pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029.

Bondowoso, 20 Agustus 2025

Bupati Bondowoso

KH. ABD. HAMID WAHID